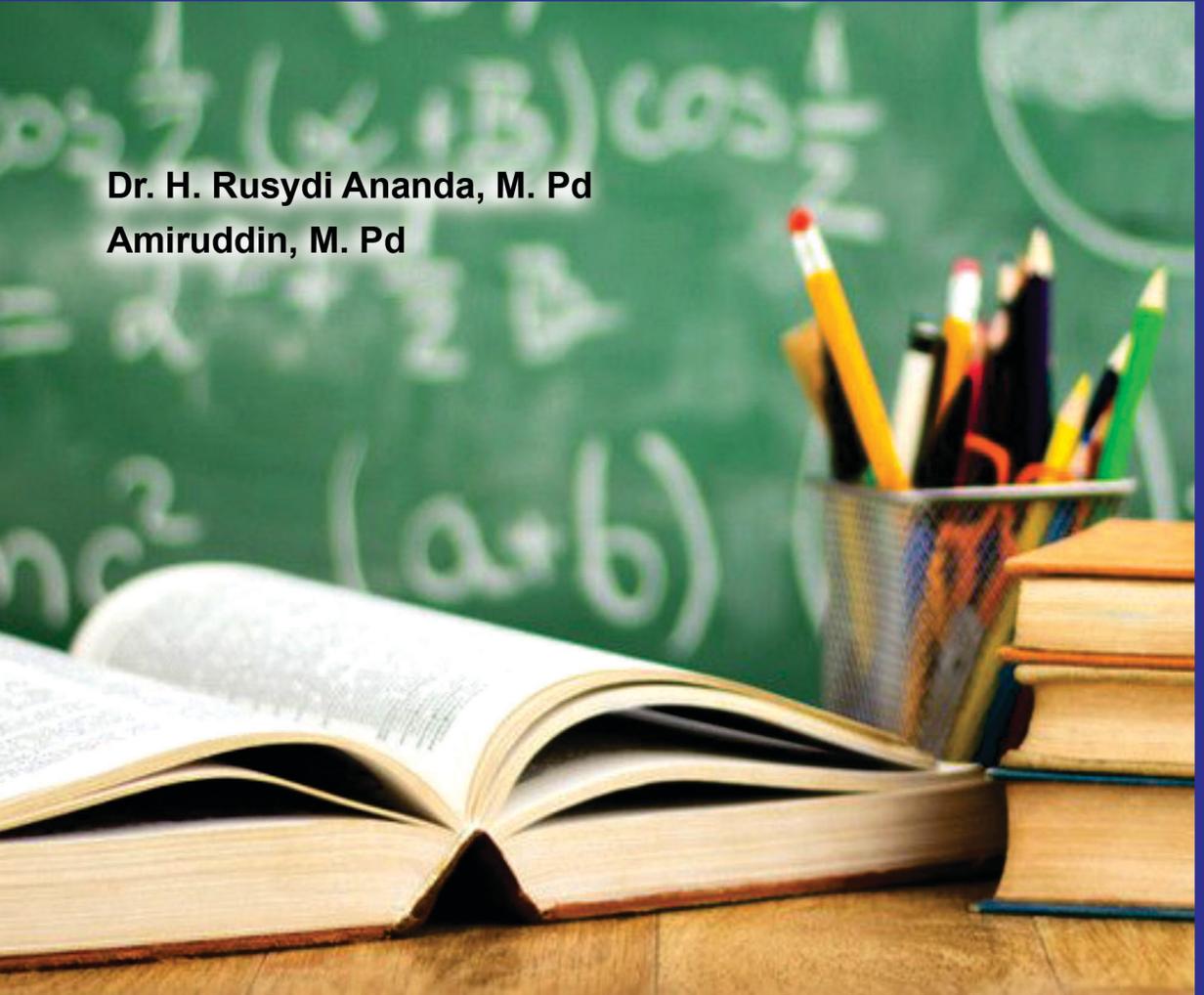


Dr. H. Rusydi Ananda, M. Pd
Amiruddin, M. Pd



Inovasi Pendidikan

MELEJITKAN POTENSI TEKNOLOGI
DAN INOVASI PENDIDIKAN

Muhammad Rifa'i, M.Pd (Ed.)



Dr. H. Rusydi Ananda, M. Pd

Amiruddin, M. Pd

INOVASI PENDIDIKAN:

Melejitkan Potensi Teknologi dan
Inovasi Pendidikan

Editor

Muhammad Rifa'i, M. Pd



Copyright © 2017, CV. Widya Puspita, Medan

Judul Buku : INOVASI PENDIDIKAN:
Melejitkan Potensi Teknologi dan
Inovasi Pendidikan

Penulis : Dr. H. Rusydi Ananda, M. Pd
Amiruddin, M. Pd

Penerbit : CV. Widya Puspita
Jln. Keadilan/ Cemara, Lorong II
Barat No. 57 Sampali Medan
CP: 081397477666 - 081361699291
Email: cv.widyapuspita@gmail.com

Cetakan Pertama : September 2017

Penata Letak : Amiruddin, M.Pd

Desain Sampul : Pusedikra Advertising

ISBN : 978-602-50368-0-4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini, serta memperjualbelikannya tanpa mendapat izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur dipersembahkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa menganugerahkan nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulisan naskah buku “INOVASI PENDIDIKAN: Melejitkan Potensi Teknologi dan Inovasi Pendidikan” dapat diselesaikan sebagai mana yang diharapkan.

Kehadiran buku: INOVASI PENDIDIKAN: Melejitkan Potensi Teknologi dan Inovasi Pendidikan ini sangat penting artinya bagi membantu mahasiswa dan calon guru pendidikan islam, mahasiswa kependidikan islam, atau bagi para peminat kajian ilmu inovasi pendidikan. Tujuan penulisan buku ini untuk dapat mempermudah penyediaan sumber belajar bagi kalangan mahasiswa pada berbagai jurusan Pendidikan Islam, baik pada STAIN, IAIN, UIN maupun STAIS sehingga mempermudah penguasaan materi pokok kajian ilmu inovasi pendidikan.

Bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, atau Jurusan Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan Jurusan Tadris diharapkan dapat menjadi kajian awal untuk mendalami konsep inovasi pendidikan sebagai bahagian intergral dari pendidikan sehingga terjadi profesionalitas calon guru. Lebih dari itu, dengan mempelajari ilmu inovasi pendidikan diharapkan terjadi peningkatan derajat profesionalisme sebagai guru yang menjadi ujung tombak dalam mencapai keberhasilan inovasi pendidikan di sekolah, madrasah dan pesantren.

Penulis menyadari bahwa penulisan buku ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penyempurnaan buku inovasi Pendidikan akan dilakukan seiring dengan perkembangan dan respon dari para pembaca.

Medan, 8 September 2017

H. Rusydi Ananda
Amiruddin

KATA PENGANTAR

Inovasi pendidikan adalah suatu perubahan yang baru dan kualitatif berbeda dari hal yang ada sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Sementara dalam pembaharuan biasanya perubahan terjadi adalah menyangkut berbagai aspek, bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi secara total atau keseluruhan. Jadi ruang lingkup pembaharuan pada dasarnya lebih luas.

Tampaknya diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan modifikasi dalam desain dan program inovasi yang sesuai dengan iklim dan prioritas tertentu dari lembaga. Dimana modifikasi dibuat dalam upaya yang serius untuk melakukan perubahan, sebaliknya modifikasi tersebut menghasilkan inovasi yang lebih relevan dan kesuksesan yang lebih dari lembaga tersebut.

Konsep inovasi pendidikan sebagai bagian integral dari pendidikan sehingga mempelajari ilmu inovasi pendidikan diharapkan terjadi peningkatan derajat profesionalisme sebagai guru yang menjadi ujung tombak dalam mencapai keberhasilan inovasi pendidikan di sekolah, madrasah dan pesantren. Diharapkan inovasi lebih ditingkatkan lagi di setiap lembaga pendidikan, sehingga akan mendorong untuk kemajuan dan perkembangan lembaga pendidikan tersebut.

Buku ini membahas berbagai aspek tentang Konsep inovasi pendidikan, sasaran inovasi, strategi inovasi pendidikan, difusi inovasi, inovasi kelembagaan, inovasi kurikulum, inovasi manajemen pembelajaran, dan inovasi tenaga pendidik. Buku ini diperuntukkan bagi mahasiswa Fakultas Kependidikan, Guru, Kepala Sekolah serta semua orang yang tertarik akan pembahasan mengenai inovasi dalam dunia pendidikan.

Medan, 8 September 2017

Muhammad Rifa'i, M.Pd

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Pengertian	1
B. Tujuan Inovasi Pendidikan	6
C. Prinsip-Prinsip Inovasi	7
D. Faktor-Faktor Pendorong Inovasi Pendidikan	7
E. Karakteristik Inovasi	14
BAB II	
PROSES INOVASI PENDIDIKAN	17
A. Proses Keputusan Inovasi	17
B. Proses Inovasi Pendidikan	25
BAB III	
SASARAN INOVASI	33
A. Guru	33
B. Siswa	40
C. Kurikulum	40
D. Fasilitas	44
E. Lingkup Sosial Masyarakat	45
BAB IV	
STRATEGI INOVASI PENDIDIKAN	47
A. Strategi Inovasi	47
B. Penerapan Strategi Inovasi Pendidikan	54
C. Model Inovasi	63
BAB V	
DIFUSI INOVASI	66
A. Pengertian Difusi Inovasi	66
B. Unsur-Unsur Difusi Inovasi	68
C. Desiminasi Inovasi	69
D. Strategi Difusi Inovasi	70
E. Hambatan-Hambatan Dalam Difusi Inovasi	72

BAB VI	
INOVASI KELEMBAGAAN	76
A. Madrasah Model	76
B. Universitas Islam Negeri	80
C. SMP Terbuka	91
BAB VII	
INOVASI KURIKULUM	97
A. Historikal Kurikulum di Indonesia	97
B. Kurikulum 2013	108
BAB VIII	
INOVASI MANAJEMEN SEKOLAH	132
A. Pendahuluan	132
B. Pengertian MBS	134
C. Tujuan MBS	136
D. Karakteristik MBS	137
E. Prinsip-Prinsip MBS	141
F. Proses MBS	144
G. Komponen MBS	150
H. Strategi Pelaksanaan MBS	183
BAB IX	
INOVASI PEMBELAJARAN	187
A. E-Learning	187
BAB X	
INOVASI TENAGA PENDIDIK	208
A. Kualifikasi Dan Kompetensi Guru	207
B. Sertifikasi Guru	242
DAFTAR PUSTAKA	263
RIWAYAT PENULIS	270
GLOSSARIUM	273

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian

1. Inovasi

Kata inovasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *innovation* yang bermakna segala hal yang baru atau pembaharuan. Kata inovasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau sudah dikenal sebelumnya (gagasan, metode atau alat).

Menurut Van de Van sebagaimana dikutip Yamin dan Maisah (2012:61) inovasi merupakan suatu ide baru yang dapat diaplikasikan dengan harapan dapat menghasilkan atau dapat memperbaiki sebuah produk, proses maupun jasa.

Rogers (2003:12) menjelaskan inovasi adalah suatu ide, praktek atau objek yang dipandang baru oleh individu atau unit yang mengadopsi. Selanjutnya Rusdiana (2014:27) menjelaskan inovasi adalah gagasan, tindakan atau barang yang dianggap baru oleh seseorang dan kebaruannya itu bersifat relatif.

Sa'ud (2015:3) menjelaskan inovasi adalah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat), baik itu berupa hasil invention maupun diskoveri. Dalam hal ini inovasi diadakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu masalah tertentu.

Hasbullah (2008:190) memaparkan dalam konteks kebaruan, kata inovasi disandingkan dengan kata pembaruan meskipun pada esensinya antara inovasi dengan pembaruan mempunyai pengertian yang sedikit berbeda. Biasanya pada inovasi, perubahan-perubahan terjadi hanya menyangkut aspek-aspek tertentu, dalam arti sempit dan terbatas. Sementara dalam pembaruan biasanya perubahan terjadi adalah menyangkut berbagai aspek, bahkan tidak menutup kemungkinan

terjadi perubahan secara total atau keseluruhan. Jadi ruang lingkup pembaruan pada dasarnya lebih luas.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapatlah dipahami bahwa inovasi adalah suatu ide, benda, peristiwa, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) sebagai hasil invensi maupun diskoveri yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan masalah.

2. Pendidikan

Kata pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu “paedagogie” yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Inggris pendidikan adalah “education” yang bermakna pengembangan atau bimbingan, sedangkan dalam bahasa Arab, pendidikan adalah “tarbiyah”.

Menurut Zakiah (1994:1) istilah pendidikan berasal dari kata “didik” dengan memberinya awalan “pe” dan akhiran “kan” yang mengandung makna perbuatan. Dengan demikian pendidikan berarti usaha orang dewasa dalam pergaulannya dengan anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Marimba (1987:19) menjelaskan pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Selanjutnya menurut Hasbullah (2008:1) pendidikan dalam arti sederhana adalah usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam hal ini bimbingan dan pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar anak menjadi dewasa.

Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada

anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya (Suwarno, 1985:2).

Jamaris (2010:3) menjelaskan pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar dalam rangka membimbing dan mengarahkan perkembangan anak ke arah dewasa. Dewasa artinya bertanggung jawab terhadap dirinya, keluarganya, masyarakatnya, bangsa dan negaranya. Selanjutnya bertanggungjawab terhadap segala resiko dari sesuatu yang telah menjadi pilihannya.

Langeveld sebagaimana dikutip Salam (2011:3) menjelaskan pendidikan ialah suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai tujuan yaitu kedewasaan. Hal senada dijelaskan Purwanto (2007:10) bahwa pendidikan ialah segala usaha orang dewasa dalam pergaulannya dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya kearah kedewasaan agar berguna bagi diri sendiri dan bagi masyarakat.

Ahmadi (2014:38) mendefinisikan pendidikan merupakan suatu proses interaksi manusia dengan lingkungannya yang berlangsung secara sadar dan terencana dalam rangka mengembangkan segala potensinya, baik jasmani dan rohani yang menimbulkan perubahan positif dan kemajuan baik kognitif afektif maupun psikomotorik yang berlangsung secara terus menerus guna mencapai tujuan hidupnya.

Basri (2013:13) pendidikan adalah proses pembinaan dan bimbingan yang dilakukan seseorang secara terus menerus kepada anak didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses pendidikan merupakan perjalanan yang tak pernah terhenti sepanjang hidup manusia dan merupakan hal yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Selanjutnya Hafid dkk (2014:27) menjelaskan pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkembangkan potensi-potensi bawaan baik jasmani maupun rohani untuk memperoleh hasil dan prestasi sehingga ia dapat mencapai kedewasaan.

John Dewey sebagaimana dikutip Hasbullah (2008:2) menjelaskan pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke alam dan sesama manusia. Selanjutnya Tilaar (2000:54) menjelaskan

pendidikan adalah proses hominisasi dan humanisasi seseorang yang berlangsung di dalam lingkungan kehidupan keluarga, dan masyarakat yang berbudaya, kini dan masa depan.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapatlah dipahami bahwa pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan terencana melalui proses kegiatan bimbingan, tuntunan kepada anak sehingga memiliki kecerdasan intelegensi, emosional dan spiritual dan menjadi *insan kamil* dalam hidup dan kehidupannya kelak.

3. Inovasi Pendidikan

Menurut Ekosusilo dan Kasihadi (1988:92) inovasi pendidikan merupakan perubahan pendidikan yang didasarkan atas usaha-usaha sadar, terencana, berpola dalam pendidikan yang bertujuan untuk mengarahkan, sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi dan tuntutan zamannya. Dalam inovasi pendidikan, gagasan baru sebagai hasil pemikiran kembali haruslah mampu memecahkan persoalan yang tidak terpecahkan oleh cara-cara tradisional.

Rusdiana (2014:46) menjelaskan inovasi pendidikan adalah inovasi untuk memecahkan masalah dalam pendidikan, dalam hal ini mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan baik dalam arti sempit yaitu tingkat lembaga pendidikan maupun arti luas yaitu sistem pendidikan nasional.

Saud (2015:6) menjelaskan inovasi pendidikan adalah suatu perubahan yang baru dan kualitatif berbeda dari hal yang ada sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Berdasarkan konsep ini maka Saud menjelaskan bahwa dalam inovasi pendidikan terdapat beberapa kata kunci yaitu:

a. Baru.

Baru dalam inovasi dapat diartikan apa saja yang belum dipahami, diterima, atau dilaksanakan oleh penerima inovasi, meskipun mungkin bukan baru lagi bagi orang lain. Akan tetapi yang lebih penting dari sifatnya yang baru ialah sifat kualitatif berbeda dari sebelumnya.

b. Kualitatif.

Inovasi memungkinkan adanya reorganisasi atau pengaturan kembali unsur-unsur dalam pendidikan, jadi bukan semata-mata penjumlahan atau penambahan unsur-unsur setiap komponen.

Tindakan menambah anggaran belanja supaya lebih banyak mendapatkan siswa, guru, kelas, dan sebagainya, meskipun perlu dan penting tetapi bukanlah merupakan tindakan inovasi. Akan tetapi, tindakan mengatur kembali jenis dan pengelompokkan pelajaran, waktu, ruang kelas, cara-cara menyampaikan pelajaran, sehingga dengan tenaga, alat, uang dan waktu yang sama dapat menjangkau sasaran siswa yang lebih banyak dan dicapai kualitas yang lebih tinggi adalah tindakan inovasi.

c. Hal.

Hal yang dimaksudkan dalam konteks definisi inovasi pendidikan ini banyak sekali meliputi seluruh komponen dan aspek dalam subsistem pendidikan. Hal-hal yang diperbaharui pada hakikatnya adalah ide atau rangkaian ide. Sementara inovasi karena sifatnya tetap bercorak mental, sedangkan yang lain merupakan bentuk nyata. Termasuk hal yang diperbaharui ialah ide, metode, dan teknik bekerja, mengajar, mendidik, peraturan, norma, barang dan alat.

d. Kesengajaan.

Kesengajaan merupakan unsur perkembangan baru dalam pemikiran pendidik. Dalam hal ini inovasi dan penyempurnaan pendidikan harus dilakukan secara sengaja dan berencana dan tidak dapat diserahkan menurut cara-cara kebetulan atau sekedar berdasarkan hobi perseorangan belaka.

e. Meningkatkan kemampuan.

Meningkat kemampuan bermakna bahwa tujuan utama inovasi adalah kemampuan sumber-sumber tenaga, uang, dan sarana termasuk struktur dan prosedur organisasi perlu ditingkatkan agar semua tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai dengan sebaik-baiknya.

f. Tujuan.

Tujuan yang direncanakan harus dirinci dengan jelas tentang sasaran dan hasil-hasil yang ingin dicapai, yang sedapat mungkin dapat diukur untuk mengetahui perbedaan antara keadaan sesudah dan sebelum inovasi dilaksanakan.

B. Tujuan Inovasi Pendidikan

Setidaknya terdapat dua tujuan utama inovasi di dalam dunia pendidikan. Kedua tujuan tersebut dijelaskan oleh Tim Dosen FIP IKIP Malang (1988:202) tersebut adalah:

1. Pembaruan pendidikan sebagai tanggapan baru terhadap masalah-masalah pendidikan.

Majunya bidang teknologi dan komunikasi sekarang ini dapat memberikan pengaruh positif terhadap kemajuan di bidang lain, termasuk dalam dunia pendidikan. Tugas pembaruan pendidikan yang terutama adalah memecahkan masalah-masalah yang dijumpai dalam dunia pendidikan, baik dengan cara yang konvensional maupun dengan cara yang inovatif. Titik pangkal pembaruan pendidikan adalah masalah pendidikan yang aktual, yang secara sistematis akan dipecahkan dengan cara inovatif.

Masalah-masalah pendidikan yang perlu dipecahkan melalui inovasi tersebut adalah:

- a. Kurang meratanya pelayanan pendidikan.
 - b. Kurang serasnya kegiatan belajar dengan tujuan.
 - c. Belum efisien dan ekonomisnya pendidikan.
 - d. Belum efektif dan efisiennya sistem penyajian.
 - e. Kurang lancer dan sempurnanya sistem informasi kebijakan.
 - f. Kurang dihargainya unsur kebudayaan nasional.
 - g. Belum kokohnya kesadaran, identitas dan kebanggaan nasional.
 - h. Belum tumbuhnya masyarakat yang gemar belajar.
 - i. Belum tersebarnya paket pendidikan yang memikat, mudah dicerna dan mudah diperoleh.
 - j. Belum meluasnya kesempatan kerja pembuatan dan pemanfaatan teknologi komunikasi.
2. Upaya mengembangkan pendidikan yang lebih efektif dan ekonomi.

Manusia mampu menciptakan sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak dikenal. Manusia juga selalu berusaha dan mampu melakukan sesuatu dengan cara yang baru, yang sebelumnya tidak dikenal dan bahkan lebih sempurna. Dengan kreativitas dan usaha yang tidak henti-hentinya, manusia menemukan sesuatu dengan cara baru yang mengantarkan pada kehidupan yang lebih baik seperti sekarang ini. Pembaruan pendidikan dilakukan dalam upaya *problem solving* yang

dihadapi dunia pendidikan yang selalu dinamis dan berkembang.

Sifat pendekatan yang diperlukan untuk pemecahan masalah pendidikan yang kompleks dan berkembang itu harus berorientasi pada hal-hal yang efektif dan murah serta peka terhadap timbulnya masalah-masalah baru di dalam pendidikan.

C. Prinsip-Prinsip Inovasi.

Drucker sebagaimana dikutip Tilaar (1999:356) mengemukakan beberapa prinsip inovasi yaitu:

1. Inovasi memerlukan analisis berbagai kesempatan dan kemungkinan yang terbuka, artinya inovasi hanya dapat terjadi apabila mempunyai kemampuan analisis.
2. Inovasi bersifat konseptual dan perseptual, artinya yang bermula dari keinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang dapat diterima masyarakat.
3. Inovasi harus dimulai dengan yang kecil. Tidak semua inovasi dimulai dengan ide-ide besar yang tidak terjangkau oleh kehidupan nyata manusia. Keinginan yang kecil untuk memperbaiki suatu kondisi atau kebutuhan hidup ternyata kelak mempunyai pengaruh yang sangat luas terhadap kehidupan manusia selanjutnya.
4. Inovasi diarahkan pada kepemimpinan atau kepeloporan. Inovasi selalu diarahkan bahwa hasilnya akan menjadi pelopor dari suatu perubahan yang diperlukan. Apabila tidak demikian maka intensi suatu inovasi kurang jelas dan tidak memperoleh apresiasi dalam masyarakat.

D. Faktor-Faktor Pendorong Inovasi Pendidikan

Menurut Hasbullah (2008:194) setidaknya terdapat 4 (empat) faktor yang cukup berperan dalam mempengaruhi perlunya inovasi pendidikan. Keempat faktor tersebut adalah: visi terhadap pendidikan, faktor penambahan penduduk, perkembangan ilmu pengetahuan, dan tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Berikut penjelasannya:

1. Visi terhadap pendidikan.
Pendidikan merupakan persoalan asasi bagi manusia. Manusia sebagai makhluk yang dapat dididik dan harus dididik akan tumbuh menjadi manusia dewasa dengan proses pendidikan yang

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

dialaminya. Sejak kelahirannya, manusia telah memiliki potensi dasar yang universal, berupa:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan buruk (*moral identity*).
- b. Kemampuan dan kebebasan untuk mengembangkan diri sendiri sesuai dengan pembawaan dan cita-citanya (*individual identity*).
- c. Kemampuan untuk berhubungan dan kerjasama dengan orang lain (*social identity*).
- d. Adanya ciri-ciri khas yang mampu memedakan dirinya dengan orang lain (*individual difference*).

Usaha dan tujuan pendidikan dilandasi oleh pandangan hidup orang tua, lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan, masyarakat dan bangsanya. Manusia Indonesia, warga masyarakat dan warga Negara yang lengkap dan utuh harus dipersiapkan sejak anak usia dini dengan upaya pendidikan. Tujuan pendidikan diabdikan untuk kebahagiaan individu, keselamatan masyarakat, dan kepentingan Negara.

Pandangan hidup bangsa menjadi norma pendidikan nasional keseluruhan. Seperti diketahui baha kehidupan ini selalu mengalami perubahan, tujuan pembangunan bangsa mengalami pergeseran dan peningkatan serta perubahan sesuai dengan waktu dan keadaan dan kondisinya. Dengan demikian, pandangan dan harapan orang tua terhadap pendidikan sekarang dapat berbeda dengan pandangan sebelumnya. Perbedaan pandangan ini erat hubungannya yang kita namakan falsafah mengenai manusia dan kemanusiaan pada zamannya masing-masing.

2. Pertambahan penduduk.

Pertambahan penduduk yang cepat merupakan faktor yang sangat menentukan dan berpengaruh besar terhadap penyelenggaraan pendidikan sehingga menuntut adanya pembaruan-pembaruan di bidang pendidikan. Akibat dari perkembangan penduduk yang sangat cepat sulit dibayangkan, misalnya bagaimana penyediaan gedung sekolah. Dalam waktu-waktu tertentu gedung sekolah tentu harus mengalami penambahan seiring dengan terus bertambahnya anak-anak usia sekolah. Begitu pula hal-hal yang terkait dengan itu seperti tenaga guru,

buku-buku, dan fasilitas-fasilitas lainpun turut mendapat perhatian.

Pertambahan penduduk berarti pula pertambahan tenaga usia kerja. Pendidikan dalam konteks ini lebih dituntut kemampuannya mengembangkan sistem pendidikan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan tenaga kerja. Tanggung jawab ini sebenarnya bukan saja pada pendidikan, namun pendidikan dapat melepaskan salah satu tugasnya untuk mempersiapkan anak didik menjelang kehidupannya dalam masyarakat secara mandiri dan bertanggung jawab. Untuk menjawab kenyataan sekarang ini dikembangkanlah sekolah-sekolah kejuruan dan sekolah-sekolah model yang di dalamnya diberikan keterampilan-keterampilan yang mengarah kepada pengembangan profesionalisme.

Adanya pertambahan penduduk yang cepat menimbulkan akibat yang luas terhadap berbagai segi kehidupan, utamanya pendidikan. Banyak masalah pendidikan yang berkaitan erat dengan meledaknya jumlah anak usia sekolah. Beberapa masalah yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Kekurangan kesempatan belajar.
Masalah kekurangan kesempatan belajar merupakan masalah yang mendapat prioritas pertama dan utama yang perlu segera digarap. Caranya adalah dengan menciptakan sistem pendidikan yang dapat menampung sebanyak mungkin anak usia sekolah.
- b. Masalah kualitas pendidikan.
Kurangnya dana, guru, fasilitas pendidikan akan mempengaruhi mutu pendidikan, oleh karena itu, dalam mengatasi masalah ini pemerintah telah berusaha meningkatkan kemampuan guru lewat pelatihan, menambah fasilitas, menambah dana pendidikan, mencari sistem pembelajaran yang tepat guna dan sistem evaluasi yang baik sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap.
- c. Masalah relevansi.
Dalam kondisi saat ini sangat dibutuhkan *output* pendidikan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat, terutama dalam hubungannya dengan kesiapan kerja. Hal tersebut lebih jelas dengan digulirkannya konsep *link and match* yang

salah satu tujuannya adalah mengatasi persoalan relevansi pendidikan dan dunia kerja.

d. Masalah efisiensi dan efektivitas.

Pendidikan diusahakan agar memperoleh hasil yang baik dengan biaya dan waktu yang sedikit. Ini berarti harus dicari sistem mendidik dan mengajar yang efisien dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pendidikan.

3. Perkembangan ilmu pengetahuan.

Kemajuan zaman seperti saat ini justru ditandai dengan majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan berlangsung secara akumulatif dan semakin cepat jalannya. Tanggapan yang biasa dilakukan dalam kependidikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan ialah dengan memasukkan penemuan dan teori baru ke dalam kurikulum. Hal ini menyebabkan adanya kurikulum yang sangat sarat dengan masalah-masalah yang baru.

Perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat ini tidak harus diikuti dengan penambahan kurikulum sekolah di luar kemampuan meskipun kondisi anak didik perlu diperhatikan. Anak didik pun tidak mungkin mampu mengikuti dan menguasai segenap penemuan baru dalam dunia ilmu pengetahuan.

4. Tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan.

Salah satu tuntutan diadakannya inovasi di dalam pendidikan adalah adanya relevansi antara dunia pendidikan dengan kebutuhan masyarakat atau dunia kerja. Berkenaan dengan hal tersebut, pendidikan dapat diperoleh dari sekolah maupun dari luar sekolah. Cukup banyak pendidikan yang sangat berarti justru tidak dapat diperoleh di sekolah, terutama yang bersifat pengembangan profesi dan keterampilan, seperti pengembangan karir, profesi tertentu dan sebagainya.

Dalin (1978) memaparkan faktor-faktor dasar sebagai pendorong terjadinya inovasi pendidikan memiliki dimensi-dimensi yang meliputi: *technological change, behavioural change, organizational change, social change, centrality, complexity, nature and amount of change, goal fit, goal stability.*

1. *Technological change* (perubahan teknologi).
Tingkat dan intensitas perubahan teknologi sangat penting untuk proses inovasi. Penggunaan teknologi memberikan dampak perubahan dalam metode, sarana pembelajaran dan sistem di lembaga pendidikan. Namun demikian faktor pembiayaan dan dukungan teknis menjadi perhatian dalam mengadopsi perubahan teknologi.
2. *Behavioural change* (perubahan perilaku).
Perubahan bidang pendidikan seiring dengan perubahan perilaku guru, siswa, administrator, orang tua dan juga kelompok-kelompok lain yang terlibat. Upaya perubahan ditandai dengan perubahan perilaku, semakin penting untuk melibatkan pengguna dalam semua aspek pelaksanaan pendidikan mulai dari proses identifikasi awal kebutuhan sampai kepada proses pelaksanaan pendidikan.
3. *Organizational change* (perubahan organisasi).
Perubahan organisasi dapat diartikan sebagai perubahan struktur, pengambilan keputusan, peran interaksi manusia dan fungsi dan teknologi organisasi. Perubahan yang terjadi di dalam organisasi merupakan perubahan strategis untuk perubahan pendidikan dengan kata lain perubahan pendidikan perlu melibatkan seluruh organisasi dan strategi perubahan yang lebih kompleks terkait dengan proses dan hasil.
4. *Social change* (perubahan sosial).
Perubahan sosial didefinisikan sebagai redistribusi kekuasaan, sumber daya, dan kesempatan dalam sistem. Hal ini dimungkinkan untuk memfasilitasi perubahan sosial dalam sektor pendidikan oleh redistribusi internal sumber daya dan sebuah peluang dalam sistem.

Perubahan sosial dalam perspektif yang lebih global, menggunakan sektor pendidikan sebagai sarana yang peluang hidup yang menyamakan kedudukan di masyarakat luas. Semakin tinggi tingkat perubahan sosial, maka semakin penting adalah *link* (hubungan) dengan lingkungan, dan khususnya dukungan dari kekuatan politik dan sosial yang akan membantu upaya perubahan.

5. *Centrality* (sentralitas).
Sentralitas dari suatu inovasi mempengaruhi minat dan komitmen untuk mengadopsi program semua tingkat lembaga. Pentingnya administrasi yang

melekat pada inovasi memberikan sinyal untuk pelaksana program.

Dalam sistem yang terpusat dan keterlibatan parlemen, kementerian pendidikan dan lembaga inovasi memaksimalkan peluang untuk pelaksanaan program, tapi itu tidak menjamin. Keterlibatan tinggi dari kekuatan politik dan administrasi pusat cenderung meningkatkan peluang untuk dilakukan inovasi, namun tidak menjamin diimplementasi di lapangan.

6. *Complexity* (kompleksitas).

Inovasi dan koordinasi yang baik dapat bervariasi sepanjang meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Target fokus kelompok.

Untuk yang lebih kecil, lebih homogen atau secara khusus didefinisikan sasaran kelompok, maka inovasinya kurang kompleks. Sedangkan inovasi yang lebih kompleks, akan melibatkan peserta didik, daerah, kurikulum yang lebih luas.

b. Fokus kurikulum.

Kurikulum daerah kecil yang terlibat maka inovasinya kurang kompleks.

c. Fokus perilaku.

Perubahan perilaku atau sikap yang diasumsikan oleh perubahan, maka inovasinya semakin kompleks.

d. Integrasi kelembagaan.

Faktor ini mengacu pada sejauh mana kegiatan sebuah inovasi yang saling terkait, baik di antara mereka sendiri, dan dengan lainnya. Kegiatan prosedur operasi standar lembaga, semakin besar jumlah integrasi kelembagaan yang diperlukan untuk pelaksanaan program, maka semakin kompleks inovasi tersebut.

Program yang kompleks pada umumnya menimbulkan setidaknya dua syarat bagi para perencana dan pelaksana. *Pertama*, dukungan awal dan komitmen yang terlibat dalam implementasi. *Kedua*, inovasi yang diadaptasi dan dimodifikasi selama pelaksanaan sehingga dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan dan prioritas dari individu yang berbeda dan unit organisasi yang terlibat.

7. *Nature and amount of change* (sifat dan jumlah perubahan).

Dalam inovasi, sifat dan jumlah perubahan diasumsikan mengacu kepada kelengkapan atau makna dari upaya perubahan yaitu individu memperoleh keterampilan teknis baru atau mendefinisikan kembali atau mengganti praktik yang lama. Dimensi ini cenderung untuk bekerja berbeda dengan gagasan kompleksitas dan sentralitas, namun memiliki dimensi yang berbeda dalam hal itu terlihat pada masalah bagi individu yang terlibat.

Strategi yang memungkinkan pengembangan individu dan pembelajaran sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan inovasi. Semakin besar dan lebih sulit perubahan yang diperlukan maka akan memberikan strategi yang lebih efisien.

8. *Goal fit* (tujuan nyata).

Pada umumnya individu akan bekerja untuk menerapkan inovasi jika nilai-nilai nyata yang mereka anut selaras dengan nilai-nilai dan tujuan dari reformasi/perubahan. Jika individu tidak percaya pada tujuan inovasi maka sangat tidak mungkin bahwa mereka akan mengajukan upaya perilaku belajar atau peran baru.

Penegasan ini sejalan dengan penelitian Rand Change Agent yang menemukan bahwa jika tujuan dan nilai-nilai yang tersirat dalam desain program tidak sejalan dengan individu dari program tersebut maka inovasi ini mungkin bersifat simbolis belaka atau bahkan tidak dilaksanakan sama sekali. Untuk itu tampaknya diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan program inovasi dimasukkan modifikasi dalam desain dan program inovasi yang sesuai dengan iklim dan prioritas tertentu dari lembaga. Di mana modifikasi dibuat dalam upaya yang serius untuk melakukan perubahan, sebaliknya modifikasi tersebut menghasilkan inovasi yang lebih relevan dan kesuksesan yang lebih dari lembaga tersebut.

9. *Goal stability* (keseimbangan tujuan).

Tujuan dari program pembaruan cenderung berubah dari waktu ke waktu. Hal ini mungkin berkaitan dengan tingkat stabilitas di lingkungan atau tingkat stabilitas dalam sistem pendidikan. Perubahan dalam kepemimpinan di tingkat tinggi dapat menjelaskan perubahan yang lebih kecil atau lebih besar dalam tujuan yang baru. Terutama,

perubahan tersebut merupakan hasil dari proses perubahan itu sendiri.

Jenis keseimbangan yang dimaksud dalam konteks ini adalah sejauh mana kepemimpinan pendidikan yang bertanggung jawab untuk kegiatan pembaruan berkomitmen untuk inovasi dari waktu ke waktu. Jika salah satu dapat mengandalkan komitmen tersebut dari waktu ke waktu, maka sejauh itu karakteristik inovasi akan relatif stabil dan kemungkinan untuk peningkatan pelaksanaannya. Pada saat yang sama, komitmen inovasi tidak berarti kekakuan atau keengganan atau ketidakmampuan untuk mendengarkan kekhawatiran dan kebutuhan lokal dan untuk memodifikasi inovasi yang sesuai.

E. Karakteristik Inovasi

Lima hal yang menjadi karakteristik inovasi sebagaimana dijelaskan oleh Roger (2003:14) yang dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi. Kelima karakteristik inovasi tersebut adalah:

1. Keuntungan relatif.
Keuntungan relatif terkait dengan sejauhmana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya, atau mungkin dari faktor status sosial (gengsi), kesenangan, kepuasan atau karena mempunyai komponen yang sangat penting. Makin menguntungkan bagi penerima makin cepat tersebarnya informasi.
2. Kompatibel.
Kompatibel terkait dengan tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai (*values*), pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada.
3. Kompleksitas.
Kompleksitas ialah tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Suatu inovasi yang mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar, sedangkan inovasi yang sukar dimengerti atau sukar digunakan oleh penerima akan lambat proses penyebarannya.
4. Triabilitas.

Triabilitas ialah dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Suatu inovasi yang dicoba akan cepat diterima masyarakat daripada inovasi yang tidak dapat dicoba lebih dulu.

5. Dapat diamati.

Mudah atau tidaknya diamati suatu hasil inovasi akan berpengaruh kepada cepat atau lambatnya diterima masyarakat.

Sa'ud (2015:23-24) mengutip pendapat Zaltman, Duncan dan Holbeck memaparkan penerimaan suatu inovasi dipengaruhi oleh atribut sendiri yaitu:

1. Pembiayaan (*cost*), cepat lambatnya penerimaan inovasi dipengaruhi oleh pembiayaan, baik pembiayaan pada awal (penggunaan) maupun pembiayaan untuk pembinaan selanjutnya. Walaupun diketahui pula bahwa biasanya tingginya pembiayaan ada kaitannya dengan kualitas inovasi itu sendiri. Misalnya penggunaan modul di sekolah dasar, apabila ditinjau dari pengembangan pribadi anak, kemandirian dalam belajar mempunyai nilai positif, tetapi karena pembiayaannya mahal maka akhirnya tidak dapat disebarluaskan.
2. Balik modal (*returns to investment*), atribut ini hanya ada dalam inovasi di bidang perusahaan atau industry. Artinya suatu inovasi akan dapat dilaksanakan kalau hasilnya dapat dilihat sesuai dengan modal yang telah dikeluarkan. Untuk bidang pendidikan atribut ini sukar dipertimbangkan karena hasil pendidikan tidak dapat diketahui dengan nyata dalam waktu relatif singkat.
3. Efisiensi, inovasi akan cepat diterima jika ternyata pelaksanaan dapat menghemat waktu dan juga terhindar dari berbagai masalah/ hambatan.
4. Resiko dari ketidakpastian, inovasi akan cepat diterima jika mengandung resiko yang sekecil-kecilnya bagi penerima inovasi.
5. Mudah dikomunikasikan, inovasi akan cepat diterima bila isinya mudah dikomunikasikan dan mudah diterima klien.
6. Kompatibilitas, cepat lambatnya penerimaan inovasi tergantung dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai (*value*) warga masyarakat.
7. Kompleksitas, inovasi yang dapat mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar dengan cepat.
8. Status ilmiah, suatu inovasi yang mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar, sedangkan inovasi yang sukar dimengerti

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

atau sukar digunakan oleh penerima akan lambat proses penyebarannya.

9. Kadar keaslian, warga masyarakat dapat cepat menerima inovasi apabila dirasakan itu hal yang baru bagi mereka.
10. Dapat dilihat kemanfaatannya, suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh masyarakat dan sebaliknya inovasi yang sukar diamati hasilnya, akan lama diterima oleh masyarakat.
11. Dapat dilihat batas sebelumnya, suatu inovasi akan makin cepat diterima masyarakat apabila dilihat batas sebelumnya.
12. Keterlibatan sasaran perubahan, inovasi dapat mudah diterima apabila masyarakat diikutsertakan dalam setiap proses yang dijalani.
13. Hubungan interpersonal, jika hubungan interpersonal baik, dapat mempengaruhi temannya untuk menerima inovasi. Dengan hubungan yang baik maka orang yang menentang akan menjadi bersikap lunak, orang simpati akan menjadi tertarik dan orang yang tertarik akan menerima inovasi.
14. Kepentingan umum atau pribadi, inovasi yang bermanfaat untuk kepentingan umum akan lebih cepat diterima daripada inovasi yang ditujukan pada kepentingan sekelompok orang saja.
15. Penyuluh inovasi, untuk melancarkan hubungan dalam usaha mengenalkan suatu inovasi kepada organisasi sampai organisasi mau menerima inovasi diperlukan sejumlah orang yang diangkat menjadi penyuluh inovasi.

BAB II

PROSES INOVASI

A. Proses Keputusan Inovasi

1. Pengertian

Proses keputusan inovasi adalah proses yang dilalui (dialami) individu (unit pengambil keputusan yang lain), mulai dari pertama tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya (Sa'ud, 2015:35).

Merujuk kepada pengertian di atas, maka dapatlah dimaknai bahwa proses mengandung arti bahwa aktivitas itu membutuhkan waktu dan setiap saat tentu terjadi perubahan. Lamanya waktu yang dipergunakan selama proses itu berbeda antara orang atau organisasi satu dengan yang lain yang bergantung pada kepekaan orang atau organisasi terhadap inovasi. Demikian pula selama proses inovasi itu berlangsung akan selalu terjadi perubahan yang berkesinambungan sampai proses itu dinyatakan berakhir.

Proses keputusan inovasi bukanlah kegiatan yang dapat berlangsung seketika, tetapi merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu, sehingga individu atau organisasi dapat menilai gagasan yang baru itu sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya akan menolak atau menerima inovasi dan menerapkannya.

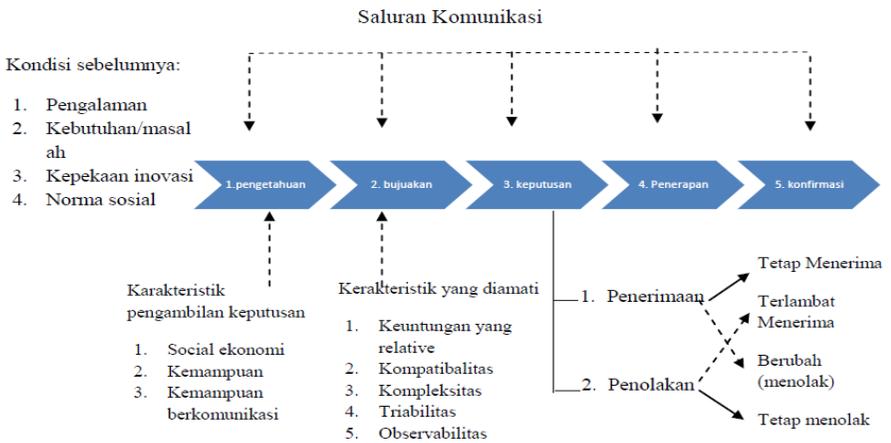
Menurut Sa'ud (2015:35) ciri pokok keputusan inovasi merupakan perbedaannya dengan tipe keputusan yang lain ialah dimulai dengan adanya ketidakpastian (*uncertainty*) tentang sesuatu (inovasi), misalnya ketika harus mengambil keputusan untuk menghadiri rapat atau melakukan olahraga, maka kita sudah tahu apa yang akan dilakukan jika menghadiri rapat, begitu pula apa yang akan dilakukan jika melakukan olahraga. Rapat dan olahraga bukanlah hal yang baru. Pertimbangan dalam mengambil keputusan mana yang paling menguntungkan sesuai dengan kondisi saat itu. Keputusan ini bukanlah keputusan inovasi.

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

Berbeda halnya dengan ketika mengambil keputusan untuk mengganti penggunaan minyak bumi dengan bahan bakar gas, yang sebelumnya belum pernah menggunakan atau belum tahu tentang kompor gas, maka keputusan ini adalah keputusan inovasi. Proses pengambilan keputusan mau tidak mau menggunakan kompor gas, dimulai dengan adanya serba ketidaktahuan tentang kompor gas, yaitu masih terbuka berbagai alternatif, mungkin lebih bersih, lebih hemat, lebih tahan lama, tetapi mungkin juga berbahaya dan sebagainya. Untuk sampai pada keputusan yang mantap menerima atau menolak kompor gas perlu informasi. Dengan kejelasan informasi akan mengurangi ketidaktentuan dan berani mengambil keputusan.

2. Tahapan Proses Keputusan Inovasi.

Rogers (2003) memaparkan tahapan proses keputusan inovasi sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.1. Proses Keputusan Inovasi

Merujuk kepada gambar di atas, maka dapat dilihat lima tahapan proses keputusan inovasi yakni:

a. Tahap Pengetahuan (*Knowledge*)

Tahapan pertama proses inovasi dimulai dengan tahap pengetahuan, yaitu tahap pada saat seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana inovasi tersebut. Menyadari dalam hal ini bukan memahami melainkan membuka diri untuk mengetahui inovasi. Menyadari atau membuka diri terhadap inovasi tentu dilakukan secara aktif.

Seseorang yang menyadari perlunya mengetahui inovasi tentu berdasarkan pengamatannya tentang inovasi itu sesuai dengan kebutuhan, minat atau kepercayaannya. Misalnya, pada acara siaran televisi disebutkan bahwa akan disiarkan tentang metode baru alam mengajarkan berhitung di sekolah dasar. Guru A yang mendengar dan melihat acaran tersebut menyadari bahwa ada metode baru tersebut, ia pun mulai proses keputusan inovasi pada tahap pengetahuan. Adapun guru B walaupun mendengar dan melihat acara TV, tidak ingin tahu maka belum terjadi proses keputusan inovasi.

Pada contoh guru A, guru tersebut memiliki keinginantahuan mengenai metode baru berhitung, karena ia memerlukannya. Adanya inovasi menumbuhkan kebutuhan kafrena kebetulan ia merasa membutuhkannya. Sekalipun demikian, mungkin terhjadi karena seseorang membutuhkan sesuatu, untuk memenuhinya, ia mengadakan inovasi. Dalam kenyataan di masyarakat, hal ini jarang terjadi, karena banyak orang tidak tahu apa yang diperlukan. Dalam bidang pendidikan, misalnya yang dapat merasakan perlunya perubahan adalah para pakar pendidikan, sedangkan guru belum tentu menerima perubahan atau inovasi yang sebenarnya diperlukan untuk mengefektifkan pelaksanaan tugasnya.

Setelah menyadari adanya inovasi dan membuka dirinya untuk mengetahui inovasi, keaktifan untuk memenuhi kebutuhan ingin tahun tentang inovasi itu bukan hanya berlangsung pada tahap pengetahuan, tetapi juga pada tahap lain, bahkan sampai pada tahap konfirmasi masih ada keinginan untuk mengetahui aspek-aspek tertentu dari inovasi.

Berkaitan dengan pengetahuan tentang inovasi, ada generalisasi prinsip-prinsip umum tentang pihak-pihak yang lebih awal mengetahui tentang inovasi:

- 1) Pihak-pihak yang lebih awal tahu tentang inovasi lebih tinggi pendidikannya dari yang akhir.
- 2) Pihak-pihak yang lebih awal tahu tentang inovasi lebih tinggi status sosial ekonominya dari pada yang akhir.
- 3) Pihak-pihak yang lebih awal tahu tentang inovasi lebih terbuka terhadap media massa dari pada yang akhir.

- 4) Pihak-pihak yang lebih awal tahu tentang inovasi lebih terbuka terhadap komunikasi interpersonal dari pada yang akhir.
- 5) Pihak-pihak yang lebih awal tahu tentang inovasi lebih banyak kontak dengan agen pemabaharu daripada yang akhir.
- 6) Pihak-pihak yang lebih awal tahu tentang inovasi lebih kosmopolitan daripada yang akhir.

b. Tahap Bujukan (*Persuasion*)

Pada tahap bujukan atau persuasi dari proses keputusan inovasi, seseorang membentuk sikap menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap inovasi. Jika pada tahap pengetahuan proses kegiatan mental yang utama adalah di bidang kognitif, maka pada tahap persuasi, proses kegiatan mental yang berperan utama adalah bidang afektif atau perasaan.

Pada tahap bujukan ini yang lebih banyak berperan adalah keaktifan mental, dalam hal ini seseorang akan berusaha untuk mengetahui lebih banyak tentang inovasi dan menafsirkan informasi yang diterimanya. Pada tahap ini, berlangsung seleksi informasi disesuaikan dengan kondisi dan sifat pribadinya. Di sinilah, peranan karakteristik inovasi dalam mempengaruhi proses keputusan inovasi.

Di samping itu, pada tahap bujukan ini juga yang berperan penting adalah peran kemampuan individu atau organisasi untuk mengantisipasi kemungkinan penerapan inovasi masa datang. Diperlukan kemampuan untuk memproyeksikan penerapan inovasi dalam pemikiran berdasarkan kondisi dan situasi yang ada. Untuk mempermudah proses mental itu diperlukan gambaran yang jelas tentang cara pelaksanaan inovasi, jika mungkin sampai pada konsekuensi inovasi.

Hasil tahap bujukan yang utama adalah adanya penentan menyenangkan atau tidak menyenangkan inovasi. Diharapkan hasil tahapan bujukan akan mengarahkan proses keputusan inovasi. Dengan kata lain, ada kecenderungan kesesuaian antara menyenangkan inovasi dengan menerapkan inovasi. Perlu diketahui bahwa sebenarnya antara sikap dengan aktivitas masih ada jarak. Orang yang menyenangkan inovasi belum tentu menerapkan inovasi. Ada jarak atau kesenjangan antara pengetahuan, sikap dengan penerapan (praktek). Misalnya seorang guru mengetahui metode diskusi, mengetahui cara

menerapkannya, dan senang menggunakan, tetapi tidak pernah menggunakan karena faktor tempat duduknya tidak memungkinkan, jumlah siswanya terlalu besar dan merasa khawatir bahan pelajarannya tidak akan dapat disajikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Oleh karena itu perlu adanya bantuan pemecahan masalah.

c. Tahap Keputusan (*Decision*)

Tahap keputusan dari proses keputusan inovasi, berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarahkan untuk menetapkan menerima atau menolak inovasi. Menerima berarti sepenuhnya akan menerapkan inovasi. Menolak inovasi berarti tidak akan menerapkan inovasi tersebut. Seringkali terjadi seseorang menerima inovasi setelah ia mencoba lebih dahulu atau mencoba sebagian kecil lebih dahulu, kemudian dilanjutkan secara keseluruhan jika sudah terbukti berhasil sesuai dengan yang diharapkan.

Inovasi yang dapat dicoba bagian demi bagian akan lebih cepat diterima, akan tetapi tidak semua inovasi dapat dicoba dengan dipecahkan menjadi beberapa bagian. Dalam kenyataannya, pada setiap tahap dalam proses keputusan inovasi dapat terjadi penolakan inovasi, misalnya penolakan dapat terjadi pada awal tahap pengetahuan, tahap bujukan, atau setelah konfirmasi dan sebagainya.

Terdapat dua macam penolakan inovasi yaitu: (1) penolakan aktif artinya penolakan inovasi setelah mempertimbangkan untuk menerima inovasi atau mencoba lebih dahulu, tetapi keputusan akhir menolak inovasi, dan (2) penolakan pasif, artinya penolakan inovasi tanpa pertimbangan.

d. Tahap Implementasi (*Implementation*)

Tahap implementasi dari proses keputusan inovasi terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi. Pada tahap implementasi ini berlangsung keaktifan baik mental maupun perbuatan. Keputusan penerimaan gagasan atau ide baru dibuktikan dalam praktik. Pada umumnya implementasi tentunya mengikuti hasil keputusan inovasi, tetapi dapat juga terjadi karena sesuatu hal, sesudah memutuskan menerima inovasi tersebut namun tidak diikuti implementasinya. Biasanya hal ini terjadi karena fasilitas penerapannya tidak tersedia.

Tahap implementasi berlangsung dalam waktu yang sangat lama, bergantung pada keadaan inovasi. Suatu

tanda bahwa tahap implementasi inovasi berakhir jika penerapan inovasi sudah melembaga dan menjadi hal-hal yang bersifat rutin atau merupakan hal yang baru lagi.

e. Tahap Konfirmasi (*Confirmation*)

Pada tahap konfirmasi ini seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya dan orang tersebut dapat menarik kesimpulan kembali keputusannya jika memang diperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi semula. Tahap konfirmasi sebenarnya berlangsung secara berkelanjutan sejak terjadi keputusan menerima atau menolak inovasi yang berlangsung dalam waktu yang tidak terbatas. Selama dalam konfirmasi, seseorang berusaha menghindari terjadi disonansi, paling tidak berusaha menguranginya.

Terjadinya perubahan tingkah laku antara lain disebabkan terjadinya ketidakseimbangan internal. Orang itu merasa dalam dirinya ada sesuatu yang tidak sesuai atau tidak selaras yang disebut disonansi, sehingga orang tersebut merasa tidak enak. Jika merasa dalam dirinya terjadi disonansi, maka ia akan berusaha menghilangkannya atau menguranginya dengan cara mengubah pengetahuan, sikap atau perbuatannya.

Usaha untuk mengurangi disonansi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Apabila seseorang menyadari suatu kebutuhan dan berusaha mencari sesuatu untuk memenuhi kebutuhan, misalnya dengan mencari informasi tentang inovasi. Hal ini terjadi pada tahap pengetahuan dalam proses keputusan inovasi.
- 2) Apabila seseorang tahu tentang inovasi dan telah bersikap menyenangi inovasi tersebut, tetapi belum menetapkan keputusan untuk menerima inovasi maka ia berusaha untuk menerimanya, untuk mengurangi adanya disonansi antara yang disenangi dan diyakini dengan yang dilakukan. Hal ini terjadi pada tahap keputusan inovasi dan tahap implementasi dalam proses keputusan inovasi.
- 3) Setelah menetapkan untuk menerima dan menerapkan inovasi, kemudian diajak untuk menolaknya, disonansi ini dapat dikurangi dengan cara tidak melanjutkan penerimaan dan penerapan inovasi. Ada kemungkinan juga seseorang yang telah menetapkan untuk menolak inovasi, kemudian diajak untuk menerimanya maka usaha mengurangi disonansi dengan cara menerima inovasi (mengubah

keputusan semula). Perubahan ini terjadi (tidak meneruskan inovasi atau mengikuti inovasi terlambat) pada tahap konfirmasi dari proses keputusan inovasi.

Ketiga cara mengurangi disonansi tersebut, berkaitan dengan perubahan tingkah laku seseorang sehingga antara sikap, perasaan, pikiran, perbuatan sangat erat hubungannya, bahkan sukar dipisahkan karena yang satu mempengaruhi yang lain. Itulah sebabnya, dalam kenyataan kadang-kadang sukar untuk mengubah keputusan yang sudah terlanjur mapan dan disenangi, walaupun secara rasional diketahui ada kelemahannya. Karena sering terjadi untuk menghindari timbulnya disonansi, itu hanya berubah mencari informasi yang dapat memperkuat keputusannya. Dengan lkata lain, orang itu melakukan seleksi informasi dalam tahap konfirmasi.

3. Tipe Keputusan Inovasi

Tipe keputusan inovasi dapat dibedakan atas beberapa tipe keputusan inovasi, di mana tipe-tipe itu terkait dengan dapat diterima atau tidaknya suatu inovasi oleh individu sebagai anggota sistem sosial atau keseluruhan anggota sistem sosial yang menentukan untuk menerima inovasi berdasarkan keputusan bersama atau berdasarkan paksaan (kekuasaan).

Setidaknya terdapat 4 (empat) tipe keputusan inovasi menurut Rusdiana (2014:72) yaitu: keputusan inovasi opsional, keputusan inovasi kolektif, keputusan inovasi otoritas dan keputusan inovasi kontingensi.

a. Keputusan inovasi opsional.

Keputusan inovasi opsional adalah pemilihan menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang ditentukan oleh individu secara mandiri tanpa bergantung atau terpengaruh dorongan anggota sistem sosial yang lain, meskipun orang yang mengambil keputusan itu berdasarkan norma sistem sosial atau hasil komunikasi interpersonal dengan anggota sistem sosial lainnya. Jadi hakikat pengertian keputusan opsional adalah individu yang berperan sebagai pengambil keputusan untuk menerima atau menolak inovasi.

b. Keputusan inovasi kolektif.

Keputusan inovasi kolektif adalah pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat secara bersama-sama dengan kesepakatan

antar anggota sistem sosial. Semua anggota sistem sosial harus menaati keputusan bersama yang telah dibuat. Misalnya, atas kesepakatan semua warga sekolah untuk tidak membeli alat tulis kantor (ATK) di sekitar sekolah yang kemudian disahkan pada rapat semua warga sekolah. Konsekuensinya semua warga sekolah tersebut harus menaati keputusan yang telah dibuat, walaupun mungkin secara pribadi masih ada beberapa individu yang masih berkeberatan.

c. Keputusan inovasi otoritas.

Keputusan inovasi otoritas adalah pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kedudukan, status, wewenang, atau kemampuan yang lebih tinggi daripada anggota lain dalam suatu sistem sosial.

Para anggota tidak mempunyai pengaruh atau peranan dalam membuat keputusan inovasi, mereka hanya melaksanakan hasil yang telah diputuskan oleh pengambil keputusan. Misalnya seorang pimpinan perusahaan memutuskan bahwa sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini mewajibkan para karyawannya setiap hari Kamis wajib memakai batik. Dengan demikian seluruh karyawan sebagai anggota sistem sosial dalam perusahaan tersebut harus melaksanakan hal-hal yang telah diputuskan oleh pimpinan perusahaan.

Ketiga tipe keputusan inovasi yang telah dipaparkan di atas merupakan rentangan (*continuum*) dari keputusan opsional (individu dengan penuh tanggung jawab secara mandiri mengambil keputusan), dilanjutkan dengan keputusan kolektif (individu memperoleh sebagian wewenang untuk mengambil keputusan), dan keputusan otoritas (individu tidak mempunyai hak untuk ikut mengambil keputusan).

Keputusan kolektif dan otoritas banyak digunakan dalam organisasi formal, seperti perusahaan, sekolah, perguruan tinggi, organisasi pemerintah dan sebagainya. Keputusan opsional sering digunakan dalam penyebaran inovasi kepada petani, konsumen atau inovasi yang sasarannya anggota masyarakat sebagai individu, bukan sebagai anggota organisasi tertentu.

Biasanya yang paling cepat diterimanya inovasi dengan menggunakan tipe keputusan otoritas, tetapi masih

juga bergantung pada pelaksanaannya. Sering terjadi juga kebohongan dalam pelaksanaan keputusan otoritas. Dapat juga terjadi bahwa keputusan opsional lebih cepat dari keputusan kolektif, jika ternyata untuk membuat kesepakatan dalam musyawarah antara anggota sistem sosial mengalami kesukaran. Cepat lambatnya difusi inovasi bergantung pada berbagai faktor.

d. Keputusan inovasi kontigensi.

Keputusan inovasi kontigensi yaitu pemilihan menerima atau menolak suatu inovasi dapat dilakukan setelah ada keputusan inovasi yang mendahuluinya. Misalnya, di sebuah perguruan tinggi, seorang dosen tidak mungkin untuk memutuskan secara opsional untuk memakai komputer sebelum didahului keputusan oleh pimpinan fakultasnya untuk melengkapi peralatan di fakultas dengan komputer. Jadi, ciri pokok dari keputusan inovasi kontingen adalah digunakannya dua atau lebih keputusan inovasi secara bergantian untuk menangani suatu difusi inovasi, baik keputusan opsional, kolektif, maupun otoritas.

Keputusan inovasi kontigensi dipengaruhi oleh sistem sosial yang terlibat secara langsung dalam proses keputusan inovasi kolektif, otoritas, dan kontingen, serta mungkin tidak secara langsung terlibat dalam keputusan inovasi opsional.

B. Proses Inovasi Pendidikan

1. Pengertian

Proses inovasi pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi, mulai sadar tahu adanya inovasi sampai menerapkan (implementasi) inovasi pendidikan (Sa'ud, 2015:45). Selanjutnya dijelaskan Sa'ud bahwa kata proses mengandung arti bahwa aktivitas itu dilakukan dengan memakai waktu dan setiap saat tentu terjadi perubahan. Berapa lama waktu yang dipergunakan selama proses itu berlangsung akan berbeda antara orang atau organisasi satu dengan yang lain tergantung pada kepekaan orang atau organisasi terhadap inovasi. Demikian pula selama proses inovasi itu berlangsung akan selalu terjadi perubahan yang berkesinambungan sampai proses itu dinyatakan berakhir.

2. Model Proses Inovasi Pendidikan

Para ahli mengidentifikasi kegiatan apa saja yang dilakukan oleh individu ataupun organisasi selama proses berlangsung serta perubahan apa yang terjadi dalam proses inovasi, maka hasilnya ditemukan pentahapan proses yang menjadi model dari proses inovasi tersebut. Dalam hal ini Rusdiana (2014:75) mencatat dua model proses inovasi yaitu: (1) model proses inovasi yang berorientasi pada individual, dan (2) model proses inovasi yang berorientasi pada organisasi. Berikut gambarannya dipaparkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Model Proses Inovasi Berorientasi Individual.

Tokoh	Orientasi
Lavidge dan Steiner (1961)	<ul style="list-style-type: none"> • Menyadari • Mengetahui • Menyukai • Memilih • Mempercayai dan membeli
Colley (1961)	<ul style="list-style-type: none"> • Belum menyadari • Menyadari • Memahami • Mempercayai • Mengambil tindakan
Rogers (1962)	<ul style="list-style-type: none"> • Menyadari • Menaruh perhatian • Menilai • Mencoba • Menerima (<i>adoption</i>)
Robertson (1971)	<ul style="list-style-type: none"> • Persepsi tentang masalah • Menyadari • Memahami • Menyikapi • Mengesankan • Mencoba • Menerima • Disonansi

Di samping model di atas, Sa'ud (2015:46) menambahkan model proses inovasi berorientasi individual lainnya adalah:

- a. Rogers dan Shoemakers (1971)
 - Pengetahuan
 - Persuasi (sikap)
 - Keputusan (menerima atau menolak)
 - Konfirmasi

- b. Klomglan dan Coward (1970)
 - Menyadari
 - Informasi
 - Evaluasi (menolak secara simbolik)
 - Menerima simbolik
 - Mencoba (diterima dan ditolak)
 - Percobaan diterima
 - Menggunakan

- c. Zaltman dan Brooker (1971)
 - Persepsi
 - Memotivasi
 - Menyikapi
 - Legitimasi
 - Mencoba
 - Evaluasi (menerima atau menolak)
 - Resolusi

Tabel 2.2 Model Proses Inovasi Berorientasi Organisasi

Tokoh	Orientasi
Milo (1971)	<ul style="list-style-type: none"> • Konseptualisasi • Tentatif adopsi • Penerimaan sumber • Implementasi • Institusionalisasi
Shepard (1967)	<ul style="list-style-type: none"> • Penemuan ide • Adopsi • Implementasi
Hage dan Aiken (1970)	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi • Inisiasi • Implementasi • Rutinitas
Wilson (1966)	<ul style="list-style-type: none"> • Konsepsi perubahan • Pengusulan perubahan • Adopsi dan implementasi

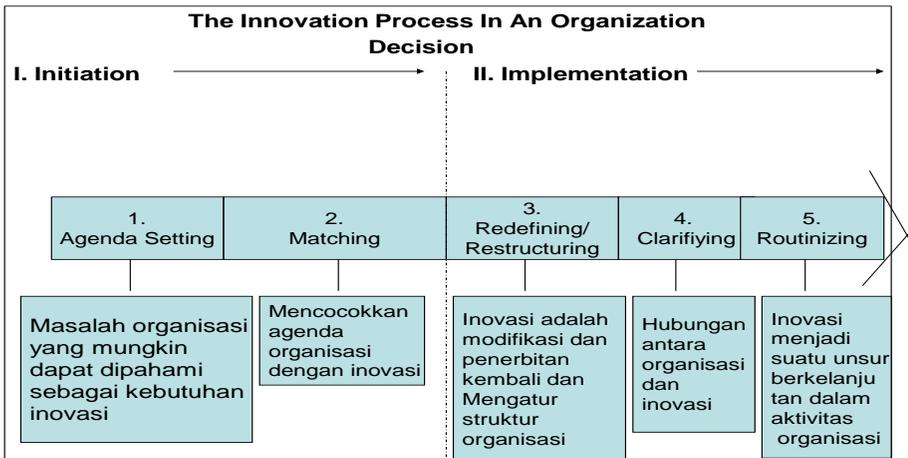
Di samping model di atas, Sa'ud (2015:48) menambahkan model proses inovasi berorientasi organisasi adalah:

- a. Rogers (1983)
 - Inisiasi
 - Agenda setting
 - Penyesuaian (*matching*)
 - Implementasi
 - Re-definisi/re-strukturisasi.

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

- Klarifikasi
 - Rutinisasi
- b. Zaltman, Duncan dan Holbeck (1973)
- Tahap permulaan (inisiasi):
 - 1) Langkah pengetahuan dan kesadaran.
 - 2) Langkah pembentukan sikap terhadap inovasi.
 - Tahap implementasi:
 - 1) Langkah awal implementasi.
 - 2) Langkah kelanjutan pembinaan.

Berikut penjelasan dari kedua model di atas.



Gambar 2.2. Proses Inovasi Dalam Organisasi Menurut Rogers

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa proses difusi dalam suatu organisasi terdiri dari dua bagian utama yaitu:

a. Inisiasi.

Secara umum tahapan inisiasi adalah proses mengumpulkan, mengkonsep, merencanakan, mengarahkan, mendahului keputusan untuk mengadopsi inovasi dalam organisasi.

Tahapan inisiasi terdiri dari dua aktivitas utama yaitu:

- 1) *Agenda setting* yaitu terkait dengan masalah organisasi yang mungkin dapat dipahami sebagai kebutuhan akan suatu inovasi didefinisikan. Proses *agenda setting* berlangsung sepanjang waktu dalam setiap sistem. *Agenda setting* adalah cara di mana kebutuhan, masalah dan isu

menggelembung ke atas sampai ke suatu sistem dan diprioritaskan dalam suatu hirarkhi untuk diperhatikan. Tahapan *agenda setting* dalam proses inovasi dalam organisasi adalah untuk mengidentifikasi dan membuat prioritas kebutuhan di satu sisi, dan untuk meneliti lingkungan organisasi untuk menempatkan inovasi yang berdaya guna potensial bertemu dengan masalah organisasi.

- 2) *Matching* yaitu mencocokkan agenda organisasi dengan inovasi yang akan diadopsi dan penyesuaian ini telah direncanakan dan didesain penerapan inovasi yang sudah sesuai dengan masalah yang dihadapi.

b. Implementasi.

Tahapan implementasi merupakan peristiwa, tindakan, dan keputusan untuk menggunakan inovasi dalam organisasi.

Tahapan implementasi terdiri dari tiga aktivitas utama yaitu:

- 1) *Redefining/restructuring* yaitu inovasi adalah modifikasi dan penerbitan kembali dan mengatur struktur organisasi. Pada tahap ini, inovasi yang diambil dari luar organisasi secara bertahap mulai menghilangkan karakter luarnya.

Redefining/restructuring terjadi ketika inovasi direayasa kembali untuk mengakomodasi kebutuhan dan struktur organisasi lebih dekat lagi dan ketika struktur organisasi dimodifikasikan agar sesuai dengan inovasi dan struktur organisasi. Tidak hanya inovasi yang dimodifikasi ke dalam organisasi, struktur organisasi mungkin dirubah untuk menyesuaikan dengan inovasi. Dalam kasus yang lain, inovasi mungkin mempengaruhi struktur dari keseluruhan organisasi, sebagaimana ketika sistem e-mail diperkenalkan dalam suatu organisasi. Tiba-tiba, setiap personil organisasi mempunyai akses komunikasi langsung dengan *top level* organisasi. Teknologi telah sering diasumsikan menjadi suatu sasaran dan kekuatan eksternal yang mempengaruhi struktur organisasi. Sesuatu yang lebih baru dan realistik memandang teknologi dalam suatu organisasi dilihat sebagai produk dari hubungan manusia, sebagaimana artinya adalah secara perlahan-lahan pekerjaan diambil setelah melewati diskusi.

- 2) *larifying* (klarifikasi) yaitu hubungan antara organisasi dan inovasi. Klarifikasi terjadi sebagaimana inovasi diletakkan ke dalam penggunaan secara lebih menyebar dalam suatu organisasi, maka makna dari ide-ide baru secara bertahap menjadi terungkap pada anggota organisasi. Terlalu cepat implementasi dari suatu inovasi pada tingkat klarifikasi sering menghasilkan malapetaka. Tahapan klarifikasi dalam proses inovasi dalam suatu organisasi mengandung konstruksi sosial. Ketika suatu ide baru pertama kali diimplementasikan dalam suatu organisasi, hal itu mempunyai sedikit makna bagi anggota organisasi.
- 3) *Routinizing* (rutinitas) yaitu menjadikan inovasi menjadi suatu unsur berkelanjutan dalam aktivitas organisasi. Rutinitas terjadi ketika inovasi telah menjadi bagian dari organisasi ke dalam aktivitas-aktivitas sehari-hari dalam organisasi dan inovasi kehilangan sebagian identitasnya. Pada point ini, proses inovasi dalam organisasi telah komplit. Anggota organisasi tidak berpikir panjang tentang inovasi sebagai suatu ide baru.

Kelima tahapan (*agenda setting, matching, redefining/restructuring clarifying dan routinizing*) ini biasanya muncul dalam kerangka yang berurutan, tetapi ini tidak selalu terjadi. Ketika aktivitas pada suatu tahap telah diselesaikan dengan baik, hanya secara implisit, tahapan berikutnya tidak dapat dimulai. Proses inovasi dapat berjalan dengan sangat lambat ataupun cepat, ia juga dapat bekerja secara mundur (surut) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam kategori permasalahan yang tidak dikenal. Hal ini akan sangat memungkinkan satu atau dua tahap dalam lima tahapan yang sebelumnya dijelaskan menjadi tertunda.

Selanjutnya proses inovasi dalam organisasi menurut Zaltman, Duncan dan Holbeck sebagai berikut:

a. Tahap permulaan (*intiation stage*).

Langkah-langkah pada tahap permulaan ini adalah:

- 1) Langkah pengetahuan dan kesadaran.
Jika inovasi dipandang sebagai suatu ide, kegiatan atau material yang diamati baru oleh unit adopsi (penerima inovasi), maka tahu adanya inovasi menjadi masalah yang pokok. Sebelum inovasi dapat diterima calon penerima sudah menyadari bahwa

ada inovasi, dan dengan demikian ada kesempatan untuk menggunakan inovasi dalam organisasi.

2) Langkah pembentukan sikap terhadap inovasi.

Dalam tahap ini anggota organisasi membentuk sikap terhadap inovasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap terhadap inovasi memegang peranan yang penting untuk menimbulkan motivasi untuk ingin berubah atau mau menerima inovasi. Paling tidak ada dua hal dari dimensi sikap yang dapat ditunjukkan anggota organisasi terhadap adanya inovasi yaitu:

- Sikap terbuka terhadap inovasi yang ditandai dengan adanya: (1) kemauan anggota organisasi untuk mempertimbangkan inovasi, (2) mempertanyakan inovasi, dan (3) merasa bahwa inovasi akan dapat meningkatkan kemampuan organisasi dalam menjalankan fungsinya.
- Memiliki persepsi tentang potensi inovasi yang ditandai dengan adanya pengamatan yang menunjukkan: (1) bahwa ada kemampuan bagi organisasi untuk menggunakan inovasi, (2) organisasi telah pernah mengalami keberhasilan pada masa lalu dengan menggunakan inovasi, dan (3) adanya komitmen atau kemauan untuk bekerja dengan menggunakan inovasi serta siap untuk menghadapi kemungkinan timbulnya masalah dalam penerapan inovasi.

Dalam mempertimbangkan pengaruh dari sikap anggota organisasi terhadap proses inovasi, maka perlu dipertimbangkan juga perubahan tingkah laku perbedaan antara sikap individu terhadap inovasi dengan perubahan tingkah laku yang diharapkan oleh pimpinan organisasi, maka terjadi disonansi inovasi yaitu penerimaan disonan dan penolakan disonan.

Penerimaan disonan terjadi jika anggota tidak menyukai inovasi tetapi organisasi mengharapkan menerima inovasi, sedangkan penolak disonan terjadi jika anggota menyenangi inovasi tetapi organisasi menolak inovasi.

Disonansi dapat dikurangi dengan dua cara sebagaimana dijelaskan Roger dan Shoemaker sebagaimana dikutip Sa'ud (2015:51) yaitu: (1) anggota organisasi merubah sikapnya menyesuaikan

dengan kemauan organisasi, dan (2) tidak melanjutkan menerima inovasi, menyalahgunakan inovasi atau menerapkan inovasi dengan penyimpangan, disesuaikan dengan kemauan anggota organisasi.

3) Langkah pengambilan keputusan.

Pada langkah ini segala informasi tentang potensi inovasi dievaluasi. Jika unit pengambil keputusan dalam organisasi menganggap bahwa inovasi itu memang dapat diterima dan ia senang untuk menerimanya maka inovasi akan diterima dan diterapkan dalam organisasi.

Demikian pula sebaliknya jika unit pengambil keputusan tidak menyukai inovasi dan menganggap inovasi tidak bermanfaat maka ia akan menolaknya. Pada saat akan mengambil keputusan peranan komunikasi sangat penting untuk memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya tentang inovasi, sehingga keputusan yang diambil benar-benar mantap dan tidak terjadi salah pilih yang dapat mengakibatkan kerugian bagi organisasi.

b. Tahap implementasi (*implementation stage*).

Pada langkah ini kegiatan dilakukan oleh anggota organisasi ialah menggunakan inovasi atau menerapkan inovasi. Dalam tahap ini terdapat dua langkah yaitu:

1) Langkah awal implementasi.

Pada langkah ini organisasi mencoba menerapkan sebagian inovasi. Misalnya setelah Dekan Fakultas memutuskan bahwa semua dosen harus membuat persiapan mengajar dengan model satuan acara perkuliahan, maka pada awal penerapannya setiap dosen diwajibkan membuat untuk satu matakuliah dulu, sebelum nanti akan berlaku untuk semua matakuliah.

2) Langkah lanjutan pembinaan penerapan inovasi.

Jika pada penerapan awal telah berhasil, para anggota telah mengetahui dan memahami serta memperoleh pengalaman dalam menerapkannya, maka tinggal melanjutkan dan menjaga kelangsungannya.

BAB III

SASARAN INOVASI

A. Guru

Guru sebagai tenaga pendidik yang dipandang memiliki keahlian tertentu dalam pendidikan dan pembelajaran, disertai tugas dan wewenang untuk mengelola kegiatan pembelajaran agar dapat mencapai tujuan tertentu yaitu terjadinya perubahan tingkah laku siswa dengan tujuan pendidikan nasional dan tujuan institusional yang telah dirumuskan. Menurut Danim (2002:15) guru memiliki multiperan yaitu sebagai pendidik, pengajar, dan pelatih. Istilah pendidik merujuk pada pembinaan dan pengembangan afeksi peserta didik, istilah pengajar merujuk pada pembinaan dan pengembangan pengetahuan atau asah otak, intelektual, sedangkan istilah pelatih merujuk pada pembinaan dan pengembangan keterampilan atau keprigelan peserta didik.

Namun demikian dalam pelaksanaan tugas pengelolaan kegiatan pembelajaran terdapat berbagai faktor yang menyebabkan orang memandang bahwa pengelolaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru adalah kegiatan yang kurang profesional, kurang efektif, dan kurang perhatian terhadap kemajuan peserta didik.

Sa'ud (2015:54) mencatat delapan alasan mengapa banyak pihak memandang tugas guru dalam melaksanakan pembelajaran masih terdapat kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

1. Keberhasilan tugas guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran sangat ditentukan oleh hubungan interpersonal antara guru dan siswa. Dengan demikian maka keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut juga sangat ditentukan oleh pribadi guru dan siswa. Dengan kemampuan guru yang sama belum tentu menghasilkan prestasi belajar yang sama jika menghadapi kelas yang berbeda, demikian pula sebaliknya dengan kondisi kelas yang sama diajar oleh guru yang belum tentu dapat menghasilkan prestasi belajar yang sama, meskipun para guru tersebut semuanya telah memenuhi persyaratan sebagai guru yang profesional.

2. Kegiatan belajar mengajar di kelas merupakan kegiatan yang terisolasi. Pada waktu guru mengajar dia tidak mendapatkan balikan dari teman sejawatnya. Kegiatan guru di kelas merupakan kegiatan yang terisolasi dari kegiatan kelompok. Apa yang dilakukan guru di kelas tanpa ketahui oleh guru yang lain. Dengan demikian maka sukar untuk mendapatkan kritik untuk pengembangan profesinya. Ia menganggap bahwa yang dilakukan sudah merupakan cara yang terbaik.
3. Berkaitan dengan kenyataan di atas tersebut, maka sangat minimal bantuan teman sejawat untuk memberikan bantuan saran atau kritik guna peningkatan kemampuan profesionalnya. Apa yang dilakukan guru di kelas seolah-olah sudah merupakan hak mutlak tanggungjawabnya, orang lain tidak boleh ikut campur tangan. Padahal apa yang dilakukan mungkin masih banyak kekurangannya.
4. Belum ada kriteria yang baku tentang bagaimana pengelolaan kegiatan pembelajaran yang efektif, dan memang untuk membuat kriteria keefektifan proses pembelajaran sukar ditentukan karena sangat banyak variabel yang ikut menentukan keberhasilan belajar siswa. Usaha untuk membuat kriteria tersebut sudah dilakukan misalnya dengan digunakannya alat penilaian kompetensi guru (APKG).
5. Dalam melaksanakan tugas mengelola kegiatan pembelajaran, guru menghadapi sejumlah siswa yang berbeda satu dengan yang lainnya baik mengenai kondisi fisik, mental intelektual, sifat, minat dan latar belakang sosial ekonominya. Guru tidak mungkin dapat melayani siswa dengan memperhatikan perbedaan individual satu dengan yang lain dalam jam-jam pelajaran yang sudah diatur dengan jadwal dan dalam waktu yang terbatas.
6. Berdasarkan data adanya perbedaan individual siswa, tentunya lebih tepat jika pengelolaan kegiatan pembelajaran dilakukan dengan cara yang sangat fleksibel, tetapi kenyataannya justru guru dituntut untuk mencapai perubahan tingkah laku yang sama sesuai dengan ketentuan yang telah dirumuskan. Jadi anak yang berbeda harus diarahkan menjadi sama. Jika guru tidak dapat mengatasi masalah ini dapat menimbulkan anggapan diragukan kualitas profesionalnya.

7. Guru juga menghadapi tantangan dalam usaha untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya yaitu tanpa adanya keseimbangan antara kemampuan dan wewenangnya mengatur beban tugas yang harus dilakukan, serta tanpa bantuan dari lembaga dan tanpa adanya insentif yang menunjang kegiatannya. Ada kemauan guru untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya, mungkin dengan cara belajar sendiri atau mengikuti kuliah di perguruan tinggi, tetapi tugas yang harus dilakukan masih terasa berat, jumlah muridnya dalam satu kelas, masih ditambah tugas administrative, ditambah lagi harus melakukan kegiatan untuk menambah penghasilan karena penghasilan yang kurang memadai, dan masih banyak lagi faktor yang lain. Jadi program pertumbuhan jabatan atau peningkatan profesi guru mengalami hambatan.
8. Guru dalam melaksanakan tugasnya mengelola kegiatan pembelajaran mengalami kesulitan untuk menentukan pilihan mana yang diutamakan karena adanya berbagai macam tuntutan. Dari satu segi meminta agar guru mengutamakan keterampilan proses belajar, tetapi dari sudut lain dia dituntut harus menyelesaikan sajian materi kurikulum yang harus diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, karena menjadi bahan ujian nasional. Demikian pula dari satu segi guru dituntut menekankan perubahan tingkah laku afektif, dalam evaluasi hasil belajar yang dipakai untuk menentukan kelulusan siswa hanya mengutamakan aspek kognitif. Apa yang harus dipilih guru? Melayani semua tuntutan?

Berdasarkan adanya kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan pembelajaran tersebut maka dapat merupakan sumber motivasi perlu adanya inovasi pendidikan untuk mengatasi kelemahan tersebut, atau bahkan dari sudut pandang yang lain dapat juga dikatakan bahwa dengan adanya kelemahan-kelemahan itu maka sukar penerapan inovasi pendidikan secara efektif.

Untuk itu diperlukan pencapaian kompetensi yang harus melekat pada diri guru dengan mengambil langkah-langkah perubahan pada aspek kompetensi yang harus dicapai yaitu: (1) merencanakan pembelajaran, (2) menerapkan pembelajaran, (3) melaksanakan tugas-tugas

administrasi, (4) berkomunikasi, (5) mengembangkan kemampuan pribadi, dan (6) mengembangkan kemampuan peserta didik (Rusdiana, 2014:52).

Inovasi yang dilakukan terhadap guru memberikan pengaruh terhadap pada peran dan fungsi guru dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran. Secara khusus dalam pembelajaran guru mempunyai peran dan fungsi untuk mendorong, membimbing dan memfasilitas siswa untuk belajar. Ki Hajar Dewantara menegaskan pentingnya peran dan fungsi dalam pendidikan dengan ungkapan: ***Ing ngarsa sung tulada*** berarti guru berada di depan memberi teladan, ***ing madya mangun karsa***, berarti guru berada ditengah menciptakan peluang untuk berprakarsa, dan ***tut wuri handayani*** berarti guru dari belakang memberikan dorongan dan arahan. Konsep yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara ini menjadi pedoman dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran di Indonesia.

Merujuk kepada konsep yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, maka guru merupakan faktor yang dominan dan penting dalam pendidikan, karena bagi siswa, guru dipersonifikasikan sebagai sosok teladan, sosok panutan dan sosok idola. Oleh karena itu seyogyanya guru harus menjalankan peran dan fungsinya sebagaimana konsep yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara tersebut.

Mencermati peran dan fungsi guru yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara tersebut maka sesungguhnya peran guru itu sungguhlah luas. Keluasan peran guru tersebut dipaparkan Adams dan Dickey sebagaimana dikutip Hamalik (2004:123) yaitu peran guru sesungguhnya sangat luas yang meliputi empat hal besar yaitu:

1. Guru sebagai pengajar (*teacher as instructor*).
Guru bertugas memberikan pengajaran di dalam sekolah (kelas) yaitu menyampaikan pelajaran agar peserta didik memahami dengan baik semua pengetahuan yang telah disampaikan itu.
Selain dari itu, guru juga berusaha agar terjadi perubahan pada diri peserta didik pada aspek sikap, keterampilan, kebiasaan, hubungan sosial, apresiasi dan sebagainya melalui pengajaran yang diberikannya secara sistematis dan terencana.
2. Guru sebagai pembimbing (*teacher as counsellor*).
Guru berkewajiban memberikan bantuan kepada peserta didik agar mampu menemukan masalahnya

sendiri, memecahkan masalahnya sendiri, mengenal dirinya sendiri dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Peserta didik membutuhkan guru dalam hal mengatasi kesulitan-kesulitan pribadi, kesulitan pendidikan, kesulitan memilih pekerjaan, kesulitan dalam hubungan sosial, dan interpersonal. Karena itu setiap guru perlu memahami dengan baik tentang teknik bimbingan kelompok, penyuluhan individual, teknik mengumpulkan keterangan, teknik evaluasi dan psikologi belajar.

3. Guru sebagai ilmuwan (*teacher as scientist*).
Guru dipandang sebagai orang yang paling berpengetahuan. Guru bukan saja berkewajiban untuk menyampaikan pengetahuan yang dimilikinya kepada peserta didik, tetapi juga berkewajiban mengembangkan pengetahuan dan terus menerus memupuk pengetahuan yang telah dimilikinya. Pengetahuan dan teknologi saat ini berkembang dengan pesat, guru harus mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut. Banyak cara yang dapat dilakukan, misalnya belajar sendiri, mengadakan penelitian, mengikuti pelatihan, menulis buku, menulis karya ilmiah sehingga perannya sebagai ilmuwan terlaksana dengan baik.
4. Guru sebagai pribadi (*teacher as person*).
Sebagai pribadi setiap guru harus memiliki sifat-sifat yang disenangi oleh peserta didiknya, oleh orang tua dan masyarakat. Sifat-sifat itu sangat diperlukan agar dapat melaksanakan pengajaran secara efektif. Karena itu wajib bagi guru berusaha untuk memupuk sifat-sifat pribadinya sendiri dan mengembangkan sifat-sifat pribadi yang disenangi oleh orang lain.

Selanjutnya untuk memberhasilkan pembelajaran di kelas maka kehadiran figur guru yang benar-benar efektif dalam melaksanakannya. Menurut Moedjiarto (2002:69) keefektifan guru merupakan salah satu karakteristik yang berpengaruh pada prestasi akademik siswa di sekolah, artinya semakin efektif seorang guru melakukan tugas dan kegiatannya maka akan semakin tinggi prestasi akademi siswa yang diperolehnya, sebaliknya semakin tidak efektif guru menjalankan tugasnya maka semakin rendah prestasi akademik siswa di sekolah tersebut.

Menurut Marno (2008:31) guru efektif adalah yang dapat menunaikan tugas dan fungsinya secara profesional. Untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional diperlukan berbagai persyaratan seperti kompetensi akademik, kompetensi metodologis, kematangan pribadi, sikap penuh dedikasi, kesejahteraan yang memadai, pengembangan karir, budaya kerja, dan suasana kerja yang kondusif.

Menurut Rosyada (2004:112) bahwa secara umum guru harus memenuhi dua kategori yaitu memiliki *capability* dan *loyalty*. *Capability* yaitu guru harus memiliki kemampuan dalam bidang ilmu yang diajarkannya, memiliki kemampuan teoritik tentang mengajar yang baik, mulai perencanaan, implementasi sampai evaluasi. *Loyalitas* keguruan yakni loyal terhadap tugas-tugas keguruan tidak semata di dalam kelas, tetapi sebelum dan sesudah di luar kelas.

Hal yang menarik mengkaji urgensi guru efektif karena saat ini terjadi perubahan kecenderungan peranan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Dalam hal ini Goble sebagaimana dikutip Mudlofir (2014:31) mengidentifikasi beberapa kecenderungan perubahan peranan guru sebagai berikut:

1. Kecenderungan ke arah diversifikasi fungsi-fungsi proses pembelajaran dan peningkatan tanggung jawab yang lebih besar dalam pengorganisasian isi dari proses pembelajaran.
2. Kecenderungan ke arah bergesernya titik berat dari pengajaran yang merupakan pengalihan/transformasi pengetahuan oleh guru kepada proses belajar oleh siswa, dengan memanfaatkan semaksimal mungkin penggunaan sumber-sumber belajar yang inovatif di lingkungan masyarakat.
3. Kecenderungan ke arah individualisasi proses belajar dan berubahnya struktur hubungan antara guru dan siswa.
4. Kecenderungan ke arah penggunaan teknologi pendidikan modern dan penguasaan atas pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan.
5. Kecenderungan ke arah diterimanya bentuk kerja sama yang ruang lingkupnya lebih luas bersama guru-guru yang mengajar di sekolah lain, dan berubahnya struktur hubungan antara para guru sendiri.
6. Kecenderungan ke arah kebutuhan untuk membina kerja sama yang lebih erat dengan orang tua dan

orang lain di dalam masyarakat serta meningkatkan keterlibatan di dalam kehidupan masyarakat.

7. Kecenderungan ke arah diterimanya partisipasi pelayanan sekolah dan kegiatan ekstra kurikuler.
8. Kecenderungan ke arah sikap yang menerima kenyataan bahwa otoritas tradisional dalam hubungannya dengan anak-anak telah berkurang terutama antara anak-anak yang lebih tua terhadap orang tuanya.

Gary dan Margaret dalam Mulyasa (2007:21) memaparkan bahwa guru yang efektif dan kompetensi secara professional memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Memiliki kemampuan menciptakan iklim belajar yang kondusif, berkaitan dengan:
 - a. Kemampuan interpersonal untuk menunjukkan empati dan penghargaan kepada peserta didik.
 - b. Hubungan baik dengan peserta didik.
 - c. Menerima dan memperhatikan peserta didik dengan tulus.
 - d. Menunjukkan minat dan antusias yang tinggi dalam mengajar.
 - e. Menciptakan iklim untuk tumbuhnya kerjasama.
 - f. Melibatkan peserta didik dalam mengorganisasikan dan merencanakan pembelajaran, mendengarkan dan menghargai hal peserta didik untuk berbicara dalam setiap diskusi.
 - g. Meminimalkan bahkan mengeliminasi setiap permasalahan yang sering terjadi dalam pembelajaran.
2. Memiliki kemampuan mengembangkan strategi dan manajemen pembelajaran, berkaitan dengan:
 - a. Kemampuan untuk menghadapi dan menangani peserta didik yang bermasalah, suka menyela, mengalihkan pembicaraan.
 - b. Mampu memberikan transisi substansi bahan ajar dalam pembelajaran.
 - c. Kemampuan bertanya yang memerlukan tingkat berpikir yang berbeda untuk semua peserta didik.
3. Memiliki kemampuan memberikan umpan balik (*feedback*) dan penguatan (*reinforcement*), berkaitan dengan:
 - a. Memberikan umpan balik yang positif terhadap respon peserta didik.
 - b. Memberikan respon yang sifatnya membantu terhadap peserta didik yang lambat belajar.
 - c. Memberikan tindak lanjut terhadap jawaban peserta didik yang kurang memuaskan.

- d. Kemampuan memberikan bantuan profesional kepada peserta didik jika diperlukan.
4. Memiliki kemampuan kemampuan untuk peningkatan diri, berkaitan dengan:
 - a. Menerapkan kurikulum dan metode mengajar secara inovatif.
 - b. Memperluas dan menambah pengetahuan tentang metode pembelajaran.
 - c. Memanfaatkan kelompok kerja guru (KKG) untuk menciptakan dan mengembangkan metode pembelajaran yang relevan.

B. Siswa

Prioritas utama di sekolah adalah berpusat pada minat dan kebutuhan siswa. Dalam hal ini seluruh unit pekerjaan di sekolah diabdikan dan didedikasikan pada kepentingan siswa sesuai dengan tujuan dari pendidikan di sekolah.

Siswa sebagai objek utama dalam pendidikan maka siswa memegang peran yang dominan, dalam hal mana siswa dapat menentukan keberhasilan belajar melalui penggunaan intelegensi, daya motorik, pengalaman, kemauan dan komitmen yang timbul dalam dirinya tanpa paksaan. Hal ini terjadi apabila siswa juga dilibatkan dalam proses inovasi pendidikan, walaupun hanya dengan mengenalkan kepada mereka tujuan perubahan, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Peran siswa dalam inovasi pendidikan adalah sebagai penerima pelajaran, pemberi materi pada sesama temannya, petunjuk bahkan menjadi guru bagi yang lainnya.

C. Kurikulum

Inovasi kurikulum terkait dengan gagasan atau praktek kurikulum baru dengan mengadopsi bagian-bagian yang potensial dari kurikulum tersebut dengan tujuan memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Dalam tataran institusi sekolah, maka kurikulum sekolah meliputi program pengajaran dan perangkatnya merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di sekolah.

Kurikulum sekolah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses pembelajaran di sekolah, sehingga dalam pelaksanaan inovasi pendidikan, kurikulum memegang peranan yang sama dengan unsur-unsur lain dalam pendidikan. Tanpa kurikulum inovasi pendidikan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan inovasi. Oleh

karena itu dalam inovasi pendidikan, semua perubahan yang hendak diterapkan harus sesuai dengan perubahan kurikulum. Dengan kata lain perubahan kurikulum diikuti dengan inovasi pendidikan dan tidak mustahil perubahan keduanya akan berjalan searah.

Dalam melakukan inovasi kurikulum haruslah memperhatikan faktor-faktor yang menjadi landasan sebagai aspek pertimbangan yang melingkupinya. Landasan-landasan yang harus diperhatikan dalam melakukan inovasi kurikulum dijelaskan oleh Sagala (2012:250) sebagai berikut:

1. Landasan filosofis.

Pendidikan ada dan berada dalam kehidupan masyarakat, sehingga apa yang dikehendaki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan diselenggarakan melalui pendidikan dalam arti seluas-luasnya. Segala kehendak yang dimiliki oleh masyarakat merupakan sumber nilai yang memberikan arah pada pendidikan. Dengan demikian pandangan dan wawasan yang ada dalam masyarakat merupakan landasan filosofis penyelenggaraan pendidikan. Filsafat boleh jadi didefinisikan sebagai suatu studi tentang hakekat realitas, hakekat ilmu pengetahuan, hakekat sistem nilai kebaikan, hakekat keindahan dan hakekat pikiran.

2. Landasan sosial budaya.

Realitas sosial budaya yang ada dalam masyarakat merupakan bahan kajian inovasi kurikulum untuk digunakan sebagai landasan. Masyarakat sebagai kelompok individu yang diorganisasikan mereka sendiri ke dalam kelompok-kelompok berbeda. Masyarakat sebagai kelompok individu mempunyai pengaruh terhadap individu dan sebaliknya individu pada taraf tertentu juga mempunyai pengaruh terhadap masyarakat.

Nilai sosial budaya masyarakat bersumber pada hasil karya akal budi manusia, sehingga dalam menerima, menyebarkan, melestarikan atau melepaskannya manusia menggunakan akalnya. Nilai keagamaan berhubungan erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap ajaran dan nilai-nilai agama yang mereka anut. Oleh karena itu nilai sosial budaya lebih bersifat sementara bila dibandingkan dengan nilai keagamaan. Oleh karena itu jelas dalam inovasi kurikulum haruslah berpijak pada nilai sosial budaya tersebut.

3. Landasan pengetahuan, teknologi dan seni.
Pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan hidup yang mengalami perubahan yang semakin pesat. Perubahan masyarakat mencakup nilai yang disepakati oleh masyarakat tersebut, sedangkan selurun nilai yang telah disepakati masyarakat dapat pula disebut sebagai kebudayaan. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah nilai-nilai yang bersumber pada pikiran atau logika, sedangkan seni bersumber dari perasaan atau estetika. Mengingat pendidikan merupakan upaya penyiapan siswa menghadapi perubahan yang semakin pesat, termasuk di dalamnya perubahan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, maka dalam melakukan inovasi kurikulum harus berlandaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Landasan kebutuhan masyarakat.
Inovasi kurikulum juga harus ditekankan pada pengembangan individu yang mencakup keterkaitannya dengan lingkungan sosial setempat, karena pada hakekatnya perkembangan kurikulum adalah kebutuhan masyarakat yang dilayani melalui kurikulum yang dikembangkan.
5. Landasan perkembangan masyarakat.
Ciri utama masyarakat adalah selalu berkembang. Perkembangan ini bisa lambat bisa juga cepat bahkan sangat cepat. Ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mendukung perkembangan masyarakat dan kebutuhan masyarakat akan membantu menetapkan perkembangan yang dilaksanakan. Perkembangan masyarakat akan menuntut tersedianya proses pendidikan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, maka diperlukan perancangan berupa kurikulum yang landasannya berupa perkembangan masyarakat itu sendiri.

Selanjutnya terkait dengan prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan inovasi kurikulum dijelaskan oleh Sagala (2012:252) sebagai berikut:

1. Prinsip relevansi.
Relevansi bearti sesuai antara komponen tujuan, isi/pengalaman belajar, organisasi dan evaluasi kurikulum, dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik dalam pemenuhan tenaga kerja maupun warga masyarakat yang diidealkan

termasuk di dalamnya proses penyampaian dan evaluasi.

2. Prinsip kontinuitas.

Prinsip kontinuitas atau berkesinambungan menghendaki inovasi kurikulum yang berkesinambungan secara vertical dan berkesinambungan secara horizontal. Secara vertical antara jenjang pendidikan yang satu dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dikembangkan kurikulumnya secara berkesinambungan tanpa ada jarak di antara keduanya, dari tujuan pembelajaran sampai ke tujuan pendidikan nasional juga berkesinambungan, demikian pula yang lain. Sedangkan berkesinambungan horizontal dapat diartikan bahwa inovasi kurikulum jenjang pendidikan dan tingkat/kelas yang sama tidak terputus-putus.

3. Prinsip fleksibilitas.

Inovator kurikulum harus menyadari bahwa kurikulum harus mampu disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat dan waktu yang selalu berkembang tanpa merombak tujuan pendidikan yang harus dicapai.

4. Prinsip berorientasi pada tujuan.

Tujuan kurikulum mengandung aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai, yang selanjutnya menumbuhkan perubahan tingkah laku peserta didik yang mencakup ketiga aspek tersebut dan bertalian dengan aspek-aspek yang terkandung dalam tujuan pendidikan.

5. Prinsip efisiensi dan efektivitas.

Inovasi kurikulum harus mempertimbangkan segi efisien dalam pendayagunaan dana, waktu, tenaga dan sumber-sumber yang tersedia agar dapat mencapai hasil optimal. Dana yang terbatas harus digunakan sedemikian rupa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran. Waktu yang tersedia bagi siswa belajar di sekolah juga terbatas harus dimanfaatkan secara tepat sesuai dengan mata ajaran dan bahan pembelajaran yang diperlukan.

6. Prinsip keseimbangan.

Dengan keseimbangan tersebut diharapkan terjalin perpaduan yang lengkap dan menyeluruh, yang satu sama lainnya saling memberikan sumbangannya terhadap pengembangan pribadi.

7. Prinsip keterpaduan.
Dengan keterpaduan ini diharapkan terbentuknya pribadi yang bulat dan utuh. Di samping itu juga dilaksanakan keterpaduan dalam proses pembelajaran, baik dalam interaksi antara siswa dan guru maupun antara teori dan praktek.
8. Prinsip mutu.
Pendidikan yang bermutu ditentukan oleh derajat mutu guru, kegiatan pembelajaran, peralatan/media yang bermutu.

D. Fasilitas

Fasilitas termasuk sarana dan prasarana pendidikan, tidak dapat diabaikan dalam proses pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran. Dalam inovasi pendidikan, fasilitas ikut mempengaruhi kelangsungan inovasi yang akan diterapkan. Tanpa fasilitas, pelaksanaan inovasi pendidikan tidak akan berjalan dengan baik.

Fasiltasi pendidikan terkait dengan semua benda bergerak maupun tidak bergerak yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaran proses pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fasilitas sekolah dipersiapkan untuk tiga komponen kegiatan yaitu: (1) keperluan manajemen dan administrasi ketatausahaan, (2) keperluan guru dalam mengajar, dan (3) keperluan siswa untuk belajar (Sagala, 2005:195).

Dalam kaitannya dengan inovasi pendidikan maka fasilitas pendidikan menurut Indriyanto sebagaimana dikutip Sagala (2005:194) terdapat dua fenomena yang diamati yaitu:

- a. Fenomena keterbatasan fasilitas merupakan salah satu faktor yang merupakan salah satu faktor yang menonjol dalam pelaksanaan kebijakan dan program pendidikan yang berada di perkotaan, apalagi yang di pedesaan. Keterbatasan ketersediaan fasilitas tidak saja terjadi pada tingkat sekolah, tetapi juga pada dinas pendidikan di tingkat kabupaten/kota maupun kecamatan.
- b. Fenomena pemanfaatan unit-unit kerja dan sekolah yang telah memiliki fasilitas yang memadai ternyata kurang memanfaatkannya. Ini terjadi karena ketersediaan fasilitas tidak dilihat dari fungsinya, tetapi sebagai simbol status yang tidak dilakukan dengan pertimbangan persyaratan yang diperlukan melainkan dengan tingkat ketersediaan dana.

Keadaan tersebut menunjukkan ketersediaan fasilitas yang tidak dapat menjamin kualitas pelayanan belajar yang menunjang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan dan program sekolah. Hal ini menunjukkan persyaratan pengadaan fasilitas perlu diperhatikan dengan membuat daftar prioritas keperluan pada setiap sekolah.

E. Lingkup Sosial Masyarakat

Sekolah adalah sub sistem dari sistem sosial, karena itu sekolah tidak dapat memisahkan diri atau terasing dari masyarakatnya. Bagaimanapun masukan siswa dan dana adalah berasal dari masyarakat. Lebih dari itu, di satu sisi sekolah memerlukan masyarakat dalam menyusun program yang relevan, sekaligus memerlukan dukungan dari masyarakat baik berupa calon murid/pendaftar, maupun pembiayaan berupa uang sekolah dalam melaksanakan program sekolah. Di lain pihak masyarakat memerlukan sekolah sebagai lembaga pelayanan jasa untuk mendapatkan program yang baik sesuai dengan yang diinginkan.

Penerapan inovasi pendidikan tidak terlepas dari lingkup sosial masyarakat baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perubahan tersebut yang dapat memberikan dampak baik positif maupun negatif dalam pelaksanaan inovasi pendidikan. Secara langsung ataupun tidak masyarakat terlibat dalam pendidikan, sebab apa ingin dilakukan dalam pendidikan sebenarnya mengubah masyarakat menjadi lebih baik terutama masyarakat tempat peserta didik itu berasal. Keterlibatan masyarakat dalam inovasi pendidikan membantu inovator dan pelaksana inovasi dalam melaksanakan inovasi pendidikan.

Perubahan yang terjadi di masyarakat dapat meliputi semua segi kehidupan masyarakat yaitu perubahan dalam cara berpikir dan interaksi sesama warga masyarakat menjadi semakin rasional, perubahan dalam sikap dan orientasi kehidupan ekonomi menjadi semakin komersial, perubahan dalam tata cara kerja sehari-hari yang semakin ditandai dengan pembagian kerja pada spesialisasi kegiatan yang semakin tajam, perubahan dalam kelembagaan dan kepemimpinan masyarakat yang semakin demokratis, perubahan dalam cara dan alat-alat kegiatan yang semakin modern dan efisien dan lain-lain. Perubahan dan perkembangan masyarakat yang demikian pada

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

dasarnya berarti penambahan diferensiasi dan integrasi, pembagian kerja, dan perubahan dari keadaan homogen dan heterogen.

BAB IV

STRATEGI DAN MODEL INOVASI

A. Strategi inovasi

Setidaknya terdapat empat jenis strategi inovasi sebagaimana dijelaskan Sa'ud (2015:63). Keempat macam strategi inovasi pendidikan tersebut yaitu: (1) strategi fasilitatif, (2) strategi pendidikan, (3) strategi bujukan, dan (4) strategi paksaan.

1. Strategi fasilitatif (*facilitative strategies*).

Pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi fasilitatif artinya untuk mencapai tujuan perubahan sosial yang telah ditentukan, diutamakan penyediaan fasilitas dengan maksud agar program perubahan sosial akan berjalan dengan mudah dan lancar.

Strategi fasilitatif akan dapat dilaksanakan dengan tepat jika diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Strategi fasilitatif dapat digunakan dengan tepat jika sasaran perubahan (klien):
 - Mengenal masalah yang dihadapi serta menyadari perlunya mencari target perubahan (tujuan).
 - Merasa perlu adanya perubahan atau perbaikan.
 - Bersedia menerima bantuan dari luar dirinya.
 - Memiliki kemauan untuk berpartisipasi dalam usaha merubah atau memperbaiki dirinya.
- b. Sebaiknya strategi fasilitatif dilaksanakan dengan disertai program menimbulkan kesadaran pada klien atas tersedianya fasilitas atau tenaga bantuan yang diperlukan.
- c. Strategi fasilitatif tepat juga digunakan sebagai kompensasi motivasi yang rendah terhadap usaha perubahan sosial.
- d. Menyediakan berbagai fasilitas akan sangat bermanfaat bagi usaha perbaikan sosial jika klien menghendaki berbagai macam kebutuhan untuk memenuhi tuntutan perubahan sosial yang diharapkan.
- e. Penggunaan strategi fasilitatif dapat juga dengan cara menciptakan peran yang baru dalam masyarakat jika ternyata peran yang sudah ada di

- masyarakat tidak sesuai dengan penggunaan sumber atau fasilitas yang diperlukan.
- f. Usaha perubahan dengan menyediakan berbagai fasilitas akan lebih lancar pelaksanaannya jika pusat kegiatan organisasi pelaksana perubahan sosial berada di lokasi tempat tinggal sasaran (klien).
 - g. Strategi fasilitatif dengan menyediakan dana serta tenaga akan sangat diperlukan jika klien tidak dapat melanjutkan usaha perubahan sosial karena kekurangan sumber dana dan tenaga.
 - h. Perbedaan sub bagian dalam klien akan menyebabkan perbedaan fasilitas yang diperlukan untuk penekanan perubahan tertentu pada waktu tertentu.
 - i. Strategi fasilitatif kurang efektif jika:
 - Digunakan pada kondisi sasaran perubahan yang sangat kurang untuk menentang adanya perubahan sosial.
 - Perubahan diharapkan berjalan dengan cepat, serta tidak sikap terbuka dari klien untuk menerima perubahan.

2. Strategi pendidikan (*re-educative strategies*).

Pendidikan dipandang sebagai strategi untuk mencapai tujuan perubahan sosial. Dengan menggunakan strategi pendidikan berarti untuk mengadakan perubahan sosial dengan cara menyampaikan fakta dengan maksud orang akan menggunakan fakta atau informasi itu untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Dengan dasar pemikiran bahwa manusia akan mampu untuk membedakan fakta serta memilihnya guna mengatur tingkah lakunya apabila fakta itu ditunjukkan kepadanya.

Penggunaan istilah *re-educative* menurut Zaltman sebagaimana dikutip Sa'ud (2015:65) dengan alasan bahwa dengan strategi ini mungkin seseorang harus belajar lagi tentang sesuatu yang dilupakan yang sebenarnya telah dipelajari sebelum mempelajari tingkah laku atau sikap yang baru.

Penggunaan strategi pendidikan dapat berlangsung secara efektif maka perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Strategi pendidikan akan dapat digunakan secara tepat dalam kondisi dan situasi sebagai berikut:
 - Apabila perubahan sosial yang diinginkan tidak harus terjadi dalam waktu yang singkat (tidak ingin segera cepat berubah).

- Apabila sasaran perubahan (klien) belum memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan program perubahan sosial.
 - Apabila menurut perkiraan akan terjadi penolakan yang kuat oleh klien terhadap perubahan yang diharapkan.
 - Apabila dikehendaki perubahan yang sifatnya mendasar dari pola tingkah laku yang sudah ada ke tingkah laku yang baru.
 - Apabila alasan atau latar belakang perlunya perubahan telah diketahui dan dimengerti atas dasar sudut pandang klien sendiri, serta diperlukan adanya kontrol dari klien.
- b. Strategi pendidikan untuk melaksanakan program perubahan akan efektif jika:
- Digunakan untuk menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai untuk digunakan sebagai dasar tindakan selanjutnya sesuai dengan tujuan perubahan sosial yang akan dicapai.
 - Disertai dengan keterlibatan berbagai pihak misalnya dengan adanya sumbangan dana, donator, serta berbagai penunjang lainnya.
 - Digunakan untuk menjaga agar klien tidak menolak perubahan atau kembali ke keadaan sebelumnya.
 - Digunakan untuk menanamkan pengertian tentang hubungan antara gejala dan masalah, menyadarkan adanya masalah dan memantapkan bahwa masalah yang dihadapi dapat dipecahkan dengan adanya perubahan.
- c. Strategi pendidikan akan kurang efektif jika:
- Tidak tersedia sumber yang cukup untuk menunjang kegiatan pendidikan.
 - Digunakan dengan tanpa dilengkapi dengan strategi yang lain.

3. Strategi bujukan (*persuasive strategies*).

Program perubahan sosial dengan menggunakan strategi bujukan artinya untuk mencapai tujuan perubahan sosial dengan cara membujuk agar sasaran perubahan (klien), mau mengikuti perubahan sosial yang direncanakan. Sasaran perubahan diajak untuk mengikuti perubahan dengan cara memberikan alasan, mendorong, atau mengajak untuk mengikuti contoh yang diberikan.

Strategi bujukan dapat berhasil berdasarkan alasan yang rasional, pemberian fakta yang akurat, tetapi mungkin juga justru dengan fakta yang salah sama sekali (rayuan gombal). Tentu saja yang terakhir ini hasilnya tidak akan tahan lama bahkan untuk selanjutnya akan merugikan. Oleh karena itu untuk berhasilnya penggunaan strategi bujukan ini perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Strategi bujukan tepat digunakan bila klien:
 - Tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial.
 - Berada pada tahap evaluasi atau legitimasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial.
 - Diajak untuk mengalokasikan sumber penunjang perubahan dari suatu kegiatan atau program ke kegiatan atau program yang lain.

- b. Strategi bujukan tepat digunakan jika:
 - Masalah dianggap kurang penting atau jika cara pemecahan masalah kurang efektif.
 - Pelaksana program perubahan tidak memiliki alat kontrol secara langsung terhadap klien.
 - Sebenarnya perubahan sosial sangat bermanfaat tetapi menganggap mengandung suatu resiko yang dapat menimbulkan perpecahan.
 - Perubahan tidak dapat dicobakan, sukar dimengerti, dan tidak dapat diamati kemanfaatannya secara langsung.
 - Dimanfaatkan untuk melawan penolakan terhadap perubahan pada saat awal diperkenalkannya perubahan sosial yang diharapkan.

4. Strategi paksaan (*power strategies*).

Pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi paksaan artinya dengan cara memaksa klien (sasaran perubahan) untuk mencapai tujuan perubahan. Apa yang dipaksa merupakan bentuk dari hasil target yang diharapkan. Kemampuan untuk melaksanakan paksaan tergantung daripada hubungan kontrol antara pelaksana perubahan dengan sasaran (klien). Jadi ukuran hasilnya target perubahan tergantung dari kepuasan pelaksanaan perubahan, sedangkan kekuatan paksaan artinya sejauhmana pelaksana

perubahan dapat memaksa klien tergantung dari tingkat ketergantungan klien dengan pelaksana perubahan.

Penerapan strategi paksaan ini dipengaruhi berbagai faktor antara lain: (1) ketatnya pengawasan yang dilakukan pelaksana perubahan terhadap klien, (2) tersedianya berbagai alternatif untuk mencapai tujuan perubahan, dan (3) ketersediaan dana untuk menunjang pelaksanaan program, misalnya untuk memberi hadiah kepada klien yang berhasil atau menghukum yang tidak mau dipaksa.

Selanjutnya penerapan strategi paksaan ini perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Strategi paksaan dapat digunakan apabila partisipasi klien terhadap proses perubahan sosial rendah dan tidak mau meningkatkan partisipasinya.
- b. Strategi paksaan juga tepat digunakan apabila klien tidak merasa perlu untuk berubah atau tidak menyadari perlunya perubahan sosial.
- c. Strategi paksaan tidak efektif jika klien tidak memiliki sarana penunjang untuk mengusahakan perubahan dan pelaksana perubahan juga tidak mau mengadakannya.
- d. Strategi paksaan tepat digunakan jika perubahan sosial yang diharapkan harus terwujud dalam waktu yang singkat, artinya tujuan perubahan harus segera tercapai.
- e. Strategi paksaan juga tepat dipakai untuk menghadapi usaha penolakan terhadap perubahan sosial atau untuk cepat mengadakan perubahan sosial sebelum usaha penolakan terhadapnya bergerak.
- f. Strategi paksaan dapat digunakan jika klien sukar untuk mau menerima perubahan sosial artinya sukar dipengaruhi.
- g. Strategi paksaan dapat juga digunakan untuk menjamin keamanan percobaan perubahan sosial yang telah direncanakan.

Selain keempat strategi inovasi pendidikan di atas, Kennedy sebagaimana dikutip Rusdiana (2014:96) menjelaskan tiga jenis strategi inovasi yaitu: (1) strategi pemaksaan, (2) strategi empiris rasional, dan (3) strategi normatif re-edukatif.

1. Strategi pemaksaan (*power coercive*).

Strategi pemaksaan berdasarkan kekuasaan merupakan pola inovasi yang sangat bertentangan dengan

kaidah-kaidah inovasi. Strategi ini cenderung memaksakan kehendak, ide, dan pikiran sepihak tanpa menghiraukan kondisi dan keadaan serta situasi inovasi itu akan dilaksanakan.

Kekuasaan memegang peranan yang sangat kuat dalam menerapkan ide-ide baru dan perubahan sesuai dengan kegadag dan pikiran pencipta inovasinya. Adapun pihak pelaksana yang sebenarnya merupakan objek utama inovasi yang tidak dilibatkan, baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaannya. Para inovator hanya menganggap pelaksana sebagai objek, bukan sebagai subjek yang harus diperhatikan serta dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pengimplementasiannya.

2. Strategi empiris rasional (*rational empirical*).

Asumsi dasar dalam strategi ini adalah manusia mampu memakai akalunya dan akan bertindak dengan cara-cara yang rasional. Oleh karena itu tugas inovator yang utama adalah mendemonstrasikan pembaharuan tertentu melalui metode terbaik yang sah (valid) dalam rangka memberi tambahan manfaat bagi penggunanya. Di samping itu strategi ini didasarkan atas pandangan optimis, sesuai dengan akal sehat dan berkaitan dengan situasi dan kondisi, bukan berdasarkan pengalaman semata.

Bennis dkk sebagaimana dikutip Wijaya dkk (1992:17) menjelaskan dasar strategi empiris rasional sebagai berikut:

- a. Riset dasar dan persebaran pengetahuan melalui pendidikan umum.

Strategi inovasi ini merupakan strategi yang paling umum di mana asumsi dasarnya ialah bahwa inovasi besar kemungkinan melalui perbuatan orang-orang, dan orang-orang itu akan memperbaharainya segera setelah pemahaman dasar mereka berubah.

- b. Pemilihan dan penempatan personel.

Sering sekali kesukdaran dalam menjamin keberhasilan tugas inovasi dipandang sebagai kesalahan personel. Strategi khusus dalam memilih personel untuk suatu tugas tertentu dapat dilakukan dengan penataran ilmiah melalui tes yang dikembangkan secara ilmiah untuk mengetahui potensi dan bakat personel.

- c. Sistem analisis dan konsultan.
Ini adalah suatu strategi yang memakai ilmu *behaviour* sebagai sistem analisis. Pendekatan ini menganggap inovasi sebagai suatu masalah yang besar. Dalam pendekatan ini semua input dan output di analisis. Penerapan teknologi pendidikan terhadap pengembangan kurikulum dipengaruhi faham ini. Pendekatan tersebut didasarkan atas *equilibrium model* yang mengubah suatu sistem dari beberapa sistem yang kurang menjadi suatu sistem yang harmonis.
- d. Riset terapan dan sistem-sistem mata rantai untuk difusi hasil-hasil riset.
Sistem ini telah dipakai untuk mengembangkan pelayanan dan perluasan yaitu mengaitkan kegiatan riset terapan dengan penelitian dasar pada suatu pihak dengan pihak-pihak yang sedang bekerja dan berpraktek pada pihak lain. Persoalannya adalah tentang bagaimana untuk mendapatkan riset yang baik dan bagaimana untuk menempatkan suatu inovasi dalam sistem pendidikan yang telah berjalan.
- e. Pemikiran kaum utopis sebagai suatu strategi perubahan.
Pendekatan ini mencoba memprediksi masa depan yang dilandasi atas kajian pengetahuan masa sekarang. Dengan kata lain, masa depan akan didasarkan atas *trend* dan tendensi yang dapat diobservasi sekarang ini.

3. Strategi normatif re-edukatif (*normative re-educative*).

Strategi normatif re-edukatif adalah strategi inovasi yang didasarkan pada pemikiran ahli pendidikan seperti Sigmund Freud, John Dewey, Kurt Lewin dan lainnya yang menekankan cara klien memahami permasalahan pembaharuan seperti perubahan sikap, kemampuan dan nilai-nilai yang berhubungan dengan manusia. Perubahan sikap justru sama perlunya dengan perubahan produk-produk. Menerima sistem nilai klien berarti mengurangi manipulasi dari luar. Pembaruan dibatasi sehingga kekuatan yang bersifat mengaktifkan di dalam sistem dapat diubah.

Dalam pendidikan, sebuah strategi yang menekankan pada pemahaman pelaksana dan penerima inovasi dapat dilakukan berulang-ulang. Misalnya dalam pelaksanaan perbaikan sistem pembelajaran di sekolah, guru sebagai pelaksana inovasi terus menerus melaksanakan perubahan sesuai dengan kaidah-kaidah pendidikan. Kecenderungan pelaksanaan model demikian lebih menekankan pada proses mendidik dibandingkan dengan hasil perubahan. Pendidikan yang dilaksanakan lebih mendapat porsi dominan sesuai dengan tujuan menurut pikiran rasionalitas yang dilakukan berulang-ulang agar semua tujuan yang sesuai dengan pikiran dan kehendak pencipta dan pelaksananya dapat tercapai.

Keefektifan strategi normatif re-edukatif antara lain didasarkan atas asumsi berikut:

- a. Perubahan-perubahan mulai dengan individu dan sikapnya, dan bukan dengan struktur sosial tempat di hidup. Bahayanya mungkin bahwa klien mudah menerima *status quo* dari lingkungannya dan bahwa tipe pembaharuan yang terjadi hanya merupakan perubahan-perubahan kecil saja di dalam suatu rancangan tertentu yang dianggap benar.
- b. Seseorang agen perubahan dapat bekerja dalam suatu *value vacuum*. Bahayanya ialah bahwa dia bisa saja memainkan suatu peran *social engineer*, akan tetapi dalam beberapa pendekatan nilai dari agen perubahan itu dibuat jelas (eksplisit).
- c. Perubahan-perubahan dapat terjadi tanpa suatu perubahan dalam kekuasaan atau sesudah itu diikuti oleh perubahan dalam hubungan-hubungan kekuasaan di antara individu-individu dan kelompok-kelompok.
- d. Dasar-dasar bagi perubahan yang berarti dalam konsensus antara *interest group* yang berbeda dalam sistem itu (Wijaya dkk, 1992:20).

B. Penerapan Strategi Inovasi Pendidikan

Rusdiana (2014:98) menjelaskan 9 (sembilan) langkah dalam menerapkan inovasi pendidikan khususnya di lembaga pendidikan. Kesembilan langkah tersebut adalah:

1. Membuat rumusan inovasi.

Langkah pertama adalah membuat rumusan yang jelas tentang inovasi yang akan diterapkan misalnya: (1) apa yang diperlukan sehingga diperlukan adanya perubahan,

dan (2) adakah hal-hal lain yang ikut menunjang penerapan inovasi.

Untuk mempermudah perumusan tentang kebutuhan dan inovasi yang akan diterapkan maka daftar pertanyaan berikut dapat dijadikan sebagai acuan yaitu:

- a. Mengatur sistem kepenasehatan siswa?
- b. Mengubah cara kerja konselor?
- c. Mengumpulkan data yang digunakan sebagai bahan mendiagnosis diri sendiri (*self diagnosis*) oleh siswa, guru dan supervisor yang memperhatikan bagaimana kelompok menggunakan waktu, dalam kegiatan apa saja, di mana kegiatan dilakukan, dengan siapa dilakukan dan apa hasilnya, dengan tujuan dapat mengadakan rediagnosis untuk mencapai perubahan yang konstruktif?
- d. Mengembangkan pembagian tugas dewan guru dalam menunjang kelancaran program sekolah (kejelasan tugas wakil kepala sekolah bidang pengajaran, kesiswaan, sarana dan sebagainya)?
- e. Mengembangkan sistem pengelolaan sekolah agar program sekolah dapat berjalan secara efektif di bawah pimpinan kepala sekolah?
- f. Membagi wewenang dan tanggung jawab kepala sekolah kepada guru, sehingga semua merasa ikut bertanggung jawab atas baik dan buruknya sekolah?
- g. Mengusahakan lebih produktif lagi dalam hal mendayagunakan waktu, uang, fasilitas, personel, dan berbagai macam sumber yang lain?
- h. Mengembangkan cara menilai program sekolah yang lebih reliabel dan valid?
- i. Membantu orang tua atau pihak lain untuk mengembangkan sikap positif terhadap program sekolah dengan cara meningkatkan saling pengertian serta ikut berpartisipasi secara positif dalam kebijakan dan prosedur untuk memperbaiki sekolah?
- j. Menambah, mengurangi atau mengubah persyaratan kurikulum?
- k. Menambah jumlah dan macam mata pelajaran pilihan?
- l. Mengadakan kursus singkat atau menambah apa yang sudah ada?
- m. Memiliki pengalaman yang lebih mendalam lagi tentang belajar jarak jauh.
- n. Menyarankan lebih banyak lagi atau dikurangi pemberian pekerjaan rumah bagi siswa?

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

- o. Mengadakan studi tentang hubungan antara jumlah uang yang digunakan di sekolah dengan peningkatan produktivitas yang dicapai setiap orang?
- p. Mengubah tahun ajaran sekolah menjadi lebih lama atau lebih pendek. Memperluas penggunaan sistem kredit semester?
- q. Mengubah peraturan kehadiran guru dan siswa agar bekerja dengan tempat yang memadai?
- r. Menghubungkan besar kecilnya jumlah anggota kelompok siswa dengan tujuan pembelajaran?
- s. Menambah atau mengurangi jumlah siswa yang akan diterima di sekolah?
- t. Mengubah model bangunan gedung sekolah dalam upaya mendayagunakan berbagai fasilitas yang ada dengan efisien dan efektif?
- u. Menambah atau mengubah sesuatu yang lain dalam arti mengusahakan agar lebih sesuai dengan kebutuhan local, permasalahan yang ada, kesempatan yang tersedia, dan personal yang ada?

Berikut ini pertanyaan penuntun yang dapat memudahkan inovator membuat keputusan tentang tindakan yang harus dilakukan untuk meningkatkan mutu sekolah sebagai berikut:

- a. Apakah anda secara pribadi menggunakan cara pendekatan komunikasi dua arah untuk memberikan motivasi kepada guru, siswa, orang tua siswa, warga masyarakat, dan pegawai tata usaha untu mencari cara yang tepat guna meningkatkan efektivitas proses pembelajaran?
- b. Apakah anda telah mempertimbangkan sejumlah besar alternatif dari segala macam aspek persekolahan yang mungkin perlu dilengkapi atau disempurnakan?
- c. Adakah kebutuhan siswa, guru dan orang di luar sekolah yang saat ini belum dilayani program sekolah?
- d. Data apa yang telah dimiliki atau mungkin akan segera diperoleh yang akan membantu untuk memberikan motivasi perlunya ada inovasi?
- e. Bagaimana anda akan menentukan inovasi yang mungkin dapat diterapkan dan mudah menanganinya sesuai dengan situasi di sekolah?
- f. Langkah positif mana yang dapat dilakukan untuk menekan perlawanan yang selalu muncul dalam berbagai macam bentuk dan tingkatan jika anda mengadakan perubahan atau inovasi?

- g. Bagaimana anda akan bersikap dalam situasi yang tidak dapat diatasi atau merupakan dilema dan sukar diselesaikan?
- h. Maukah anda secara pribadi menerima beban tanggung jawab untuk bekerja sama dengan orang lain dalam usaha menerapkan inovasi di sekolah tempat anda bekerja?

2. Penggunaan metode.

Terdapat beberapa metode atau cara yang memberi kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam usaha mengubah pribadi ataupun sekolah. Berikut ini cara yang dapat dilakukan oleh guru dan kepala sekolah dalam mengadakan atau menerapkan inovasi sebagai berikut:

- a. Tujuan diadakannya inovasi perlu dimengerti dan diterima oleh guru, siswa, orang tua siswa dan masyarakat. Harus dikemukakan dengan jelas alasan adanya inovasi. Demikian pula tujuan inovasi hendaknya dapat dirumuskan dengan jelas, baik pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Jika semua tujuan dapat ditunjukkan dengan jelas, maka guru, siswa dan orang tua siswa akan memahami hal-hal yang diharapkan oleh inovator. Usaha untuk memperjelas informasi inovasi ini perlu mendayagunakan segala fasilitas yang ada.
- b. Motivasi positif harus digunakan untuk memberikan rangsangan agar mau menerima inovasi. Motivasi dengan ancaman, dengan mengajak agar orang mengikuti yang dilakukan oleh orang lain, atau dengan menasehati agar orang menghindari kegagalan, belum tentu dapat berhasil. Kepandaian untuk menganalisis tujuan serta potensi hasil inovasi sangat diperlukan untuk memberikan motivasi yang tepat. Apakah tujuan merupakan hal yang sangat perlu atau hanya merupakan hal yang pantas untuk dicapai. Orang akan memberikan motivasi kepada orang lain harus memperhatikan adanya perbedaan individual. Usaha penerapan inovasi harus dapat diterima oleh guru dan siswa sebagai anggota masyarakat.
- c. Harus diusahakan agar individu ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan inovasi. Guru, siswa ataupun orang tua diberi kesempatan ikut berperan dalam mengambil keputusan menerima atau menolak inovasi. Mereka diberi kesempatan memikirkan, mendiskusikan, dan

mempertimbangkan perlunya inovasi. Untuk keperluan itu, perlu dipersiapkan berbagai alternatif cara pemecahan masalah atau memenuhi kebutuhan yang diperlukan.

Usahakan pemberian informasi yang sejelas-jelasnya tentang inovasi (apa, mengapa dan bagaimana), dengan menggunakan berbagai macam fasilitas dan media yang ada. Demikian pula, data tentang kondisi atau situasi sekolah yang berkaitan dengan inovasi dikumpulkan, kemudian dianalisis untuk menentukan cara atau prosedur yang tepat dalam penerapan inovasi.

- d. Perlu direncanakan tentang evaluasi keberhasilan program inovasi. Kejelasan tujuan dan cara menilai keberhasilan penerapan inovasi merupakan motivasi yang kuat untuk menyempurnakan pelaksanaan inovasi.

Di samping keempat hal tersebut, perlu diperhatikan juga urutan langkah pelaksanaan program yang harus dibuat dengan fleksibel, artinya jadwal kegiatan disesuaikan dengan perbedaan individual, baik dalam kemampuan, kesempatan, maupun kesibukan. Inovator harus menyadari bahwa tidak semua kegiatan harus dilakukan dalam jumlah waktu yang sama dan dengan jenis kegiatan yang sama. Hal yang penting adalah kejelasan pembagian tugas.

3. Penggunaan berbagai alternatif pilihan.

Penggunaan berbagai alternatif pilihan untuk mempermudah penerapan inovasi. Hal ini berdasarkan pemikiran bahwa pihak yang menerapkan inovasi, baik guru maupun siswa memiliki perbedaan individual. Menghendaki keseragaman untuk semua orang tentu akan sukar, akan tetapi semakin banyak memberikan peluang untuk memilih berarti semakin memberikan peluang untuk ikut mengambil bagian sesuai dengan minat dan kemampuannya. Misalnya, inovasi kurikulum akan mudah diterapkan jika memberikan berbagai alternatif tentang pemilihan mata pelajaran, ada yang wajib dan ada yang pilihan. Demikian pula, cara menilai atau penggunaan metode, semakin banyak pilihan yang disediakan guru, semakin mendapat kesempatan untuk melaksanakan sesuai dengan kemampuan dan situasi kondisi setempat.

4. Penggunaan data informasi.

Penggunaan data informasi yang sudah ada untuk bahan pertimbangan bahan dalam menyusun perencanaan

dan penerapan inovasi sebelum memulai merumuskan iden inovasi perlu diketahui terlebih dahulu dengan berdasarkan data yang akurat tentang kondisi dan situasi yang ada di sekolah. Kemudian mencoba mencari masalah apa yang sebenarnya dihadapi sekolah tersebut. Apakah dengan inovasi kurikulum, metode mengajar, penggunaan media, evaluasi dan sebagainya akan memecahkan permasalahan? Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, dan kemudian memecahkannya, dibuatka urutan prioritas yang harus dilakukan terlebih dahulu.

Demikian pula untuk melancarkan pelaksanaan inovasi, perlu menggunakan data hasil penelitian dan informasi dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. Misalnya dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa ada hubungan yang positif antara tingkat kesejahteraan dengan penerimaan inovasi. Semakin sejahtera kehidupan seseorang, semakin mudah menerima inovasi. Mungkin karena orang yang mampu semakin berani mengambil resiko, atau mungkin karena inovasi memerlukan biaya, yang mampu tentu lebih mudah menerima karena mampu membiayai. Berdasarkan data tersebut perlu dipertimbangkan penerapan inovasi di sekolah dengan melihat kemungkinan pelaksanaan program kegiatannya berdasarkan kemampuan atau kondisi sekolah tersebut. Usahakan cara yang paling sesuai dengan keadaan lingkungan.

5. Penggunaan tambahan data.

Penggunaan tambahan data untuk mempermudah fasilitas terjadinya penerapan inovasi. Dalam hal ini berbagai data dari berbagai aspek dan sudut pandang perlu didayagunakan. Misalnya untuk mengadakan perubahan tentang cara belajar siswa, maka inovator perlu mengetahui data hasil penilaian setiap siswa untuk setiap bidang studi, dan tentang kemampuan setiap siswa secara keseluruhan dibandingkan dengan kemampuan teman yang lain.

Data lain yang biasa diperlukan dalam penerapan inovasi yang ada di sekolah, antara lain:

- a. Pemahaman dan partisipasi siswa terhadap program yang ada atau dengan kata lain pengertian tentang program yang baru.
- b. Tingkat kemajuan tentang program baru.
- c. Analisis kemudahan dan kesukaran untuk mencapai tujuan.
- d. Penilaian terhadap bahan media pembelajaran yang diproduksi sekolah.

- e. Perubahan penampilan siswa berdasarkan instrumen yang telah dibakukan.
- f. Perubahan isi kurikulum dan organisasi kurikulum.
- g. Pandangan ahli tentang hasil pengamatannya terhadap program baru.

Di samping itu perlu diperhatikan juga hubungan inovasi dengan lembaga di luar sekolah yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan. Perubahan atau inovasi di sekolah dapat menimbulkan pertanyaan atau mungkin mendapat tantangan dari berbagai pihak, misalnya pemerintah daerah, universitas, organisasi guru dan sebagainya. Sebelum mengadakan inovasi, badan atau lembaga di luar sekolah yang ada hubungannya dengan aturan atau pengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan perlu dihubungi dan diberi penjelasan lebih lanjut.

6. Manfaatkan pengalaman dari lembaga lain.

Pengalaman sekolah yang telah menerapkan inovasi dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan pelaksanaan inovasi di sekolah, meskipun penentuannya harus dilakukan berdasarkan kondisi dan situasi di sekolah. Setidaknya terdapat 10 (sepuluh) hal yang dapat dipakai untuk melancarkan penerapan inovasi di sekolah sebagai berikut:

- a. Menggunakan guru penasehat.
Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok memiliki guru penasehat tersendiri. Guru penasehat akan membantu siswa dalam melaksanakan program belajarnya.
- b. Sediakan pilihan.
Dalam pengelolaan program belajar perlu disediakan berbagai pilihan, baik mengenai mata pelajaran yang harus diambil maupun cara belajarnya. Semakin banyak pilihan berarti semakin melayani adanya perbedaan individual siswa,
- c. Mengembangkan media.
Sebagai konsekuensi dengan adanya pilihan cara belajar, inovator perlu mengembangkan berbagai macam media pembelajaran.
- d. Merevisi kurikulum dengan menggunakan kursus singkat.
Dalam pelaksanaan revisi kurikulum digunakan dengan kursus dalam berbagai aspek kurikulum. Kursus singkat tentang penilaian, cara membuat persiapan, cara menyusun tes, dan sebagainya.
- e. Membuat tempat belajar lebih baik dalam gedung yang ada.

Agar siswa dapat belajar dengan tenang perlu disediakan tempat belajar khusus dalam gedung yang ada, misalnya dibuatkan ruang tempat belajar sendiri, tempat belajar kelompok, dan sebagainya.

- f. Membuat jadwal yang fleksibel.
Tidak semua kegiatan dengan jadwal jam yang sama. Untuk pelajaran yang banyak, inovator dapat menggunakan latihan/praktek perlu waktu yang lebih lama dari pelajaran yang hanya dengan ceramah, dan sebagainya.
- g. Meningkatkan penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar.
Banyak keadaan atau alam yang ada di sekitar dapat didayagunakan sebagai sumber belajar. Siswa diberi tugas untuk mengamati dan mengadakan wawancara dengan warga masyarakat dalam melakukan kegiatan belajar.
- h. Mengadakan penilaian program penerapan inovasi.
- i. Mengadakan penilaian dan pelaporan hasil belajar siswa.
Dengan laporan dapat diketahui sejauhmana hasil penerapan inovasi terhadap peningkatan prestasi belajar siswa.
- j. Membuat sistem supervisi.
Untuk mengawasi kegiatan, dibuat tim yang setiap anggotanya bertugas untuk mengawasi bidang tertentu, keamanan, ketertiban, kebersihan dan sebagainya. Kepala sekolah dapat mencurahkan pengawasan pada kegiatan pembelajaran.

7. Bertindak secara positif untuk mendapatkan kepercayaan.

Dunia pendidikan menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan zaman. Untuk itu maka pimpinan lembaga pendidikan haruslah melakukan berbagai antisipasi, diantaranya yang dapat dilakukan adalah:

- a. Kepala sekolah harus memahami tindakan yang perlu dilakukan untuk perbaikan sekolahnya.
- b. Kepada sekolah harus menghayati kenyataan bahwa inovasi perlu diadakan untuk perbaikan.
- c. Kepala sekolah harus yakin bahwa sekolah ini tepat untuk menerapkan inovasi.
- d. Kepala sekolah harus banyak mencurahkan waktu dan tenaganya, baik untuk kegiatan sekolah, luar sekolah, maupun masyarakat yang memerlukan tenaganya, guna menjalin hubungan yang akrab dengan segala pihak. Dengan cara demikian, diharapkan pihak lain mau mengerti dan

memberikan bantuan untuk kelancaran inovasi. Tidak mungkin inovasi akan berhasil jika kepala sekolah hanya duduk dikantornya tanpa berbuat dengan cepat dan tepat sesuai dengan keperluan.

8. Ciptakan kepemimpinan yang efektif.

Problem yang dihadapi kepala sekolah dalam menjalankan institusi pendidikan sangatlah kompleks. Perlunya kepemimpinan yang mantap, konsisten dan efektif saat ini sangat terasa karena kepala sekolah selalu dihadapkan pada berbagai macam hambatan dan tantangan, baik dari pemerintah berupa instruksi atau peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan, organisasi guru berupa saran perbaikan, kelompok masyarakat atau persatuan orang tua siswa berupa permintaan peningkatan kualitas hasil pendidikan di sekolah, atau mungkin juga dari berbagai yayasa pendidikan. Sekalipun demikian, banyak juga kepala sekolah yang tetap bersikap positif dan mampu melaksanakan kepemimpinan yang produktif di sela-sela berbagai macam tantangan dan permasalahan yang harus dipecahkan.

Untuk melaksanakan program inovasi dengan efektif dalam menghadapi berbagai macam tantangan tersebut, kepala sekolah perlu menggunakan sistem pengorganisasian yang tepat. Berdasarkan pengalaman dari pelaksana *Model Schools Project* Amerika Serikat, disarankan digunakannya "Team Manajemen Pengawasan" (*Supervisory-management* = S-M Team). Terdapat dua elemen dasar dalam S-M Team untuk meningkatkan kepemimpinan sekolah yaitu: (1) peranan kepemimpinan harus disebarluaskan melalui perluasan konsep tim manajemen-pengawasan, dan (2) S-M Team harus menggunakan pendekatan partisipatif dalam membina hubungan dengan segenap personal di sekolah ataupun dengan warga masyarakat.

Untuk sekolah yang kecil atau struktur organisasinya tanpa ada bagian-bagian, semua guru atau personel sekolah diikutsertakan dalam pembuatan perencanaan, pembuatan keputusan serta menilai perkembangan serta bagian program pendidikan. Di sekolah yang besar, pejabat bagian pendidikan (*educational department*) bekerja sama dengan S-M Team, untuk menunjukkan minat guru serta memperhatikan fungsi manajemen-pengawasan di semua sekolah. Kegiatan untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran, dilakukan

oleh semua personalia sekolah, sesuai dengan bidang garapannya masing-masing.

9. Mencari jawaban atas beberapa pertanyaan dasar tentang inovasi.

Inovasi yang dilakukan di sekolah bertujuan untuk meningkatkan kualitas sekolah. Tanda-tanda sekolah yang kualitasnya baik, antara lain proses pembelajaran efektif, prestasi hasil belajar siswa tinggi, guru mempunyai waktu yang cukup banyak serta kondisi yang baik dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya, kepala sekolah menggunakan sebagian besar waktunya untuk bekerja lebih akrab dengan siswa dan guru serta selalu berusaha untuk memperoleh balikan guna meningkatkan kualitas sekolah. Setiap orang yang bekerja di sekolah melakukan tugas sesuai dengan minat dan kemampuannya untuk mengembangkan karirnya.

Inovasi yang dilakukan sekolah seharusnya untuk meningkatkan kualitas sekolah, tetapi sering terjadi perubahan sekolah diadakan dengan tujuan yang tidak benar yaitu untuk membantu kelompok orang tertentu dengan biaya atas nama sekolah. Kejadian itu harus dihindari karena sangat merugikan nama sekolah. Singkat kata, inovasi diadakan untuk kemajuan sekolah.

C. Model Inovasi

1. Pengertian Model

Pribadi (2011:86) menjelaskan pengertian model adalah upaya untuk mengkonkretkan sebuah teori sekaligus juga merupakan sebuah analogi dan representasi dari variable-variabel yang terdapat di dalam teori tersebut. Selanjutnya Sagala (2012:175) menjelaskan model adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan.

Association for Educational Communication and Technology menjelaskan pengertian model yaitu: suatu bentuk yang secara konseptual sama dengan bentuk aslinya, bentuknya dapat berupa fisik, suatu deskripsi verbal atau bentuk grafik yang sama dengan sesungguhnya atau yang seharusnya, dan model merupakan bentuk tiruan (AECT,1986:194).

Richey, Klein dan Tracey (2011:8) menjelaskan model adalah representasi realitas yang disajikan dengan tingkat struktur dan keteraturan dan model adalah bentuk

ideal yang disederhanakan dari sebuah realitas. Dengan demikian dapat dipahami bahwa model dapat digunakan untuk mengorganisasikan pengetahuan dari berbagai sumber kemudian dipakai sebagai stimulus untuk mengembangkan hipotesis dan membangun teori ke dalam istilah/keadaan yang konkrit untuk menerapkannya pada praktek atau menguji teori.

Snelbecker (1974:32) menjelaskan model adalah konkretisasi teori yang bertujuan sebagai perantara proses dan variabel yang terdapat dalam teori tersebut. Selanjutnya Prawiradilaga (2007:33) menjelaskan model dapat diartikan sebagai tampilan grafis, prosedur kerja yang teratur atau sistematis serta mengandung pemikiran bersifat uraian atau penjelasan berikut saran.

Model menurut Gustafson dan Branch (2002:1) adalah *a simple representation of more complex form, processes, and functions of physical phenomena or ideas*. Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat Meyer seperti dikutip Al-Tabany (2014:23) bahwa model adalah sesuatu yang nyata dan dikonversi untuk sebuah bentuk yang lebih komprehensif. Pengertian ini menunjukkan bahwa sebuah model pada hakikatnya adalah sebuah representasi dari sesuatu yang lebih kompleks agar menjadi lebih sederhana. Sesuatu tersebut bisa berupa bentuk, proses, dan juga fungsi-fungsi dari suatu fenomena fisik atau ide-ide.

Berdasarkan pemaparan di atas dapatlah dimaknai bahwa model adalah sebuah rangkaian hubungan yang logis baik dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif yang mengaitkan ciri-ciri realitas yang relevan secara bersama dengan apa yang menjadi perhatian kita. Dengan demikian dalam sebuah model akan terkandung sejumlah komponen yang menjadi ciri dari suatu realita dan yang saling terhubung secara logis.

2. Beberapa Model Inovasi Pendidikan

a. Model Konfigurasi.

Model konfigurasi atau disebut juga konfigurasi teori difusi inovasi yang dikenal dengan istilah CLER (*configuration, linkage, environment, resources*). Model CLER ini merupakan model dengan pendekatan secara komprehensif untuk mengembangkan strategi inovasi pada situasi yang berbeda. Berikut paparan mengenai model CLER:

- 1) Konfigurasi (*configuration*) artinya menunjukkan bentuk hubungan innovator dengan penerima dalam

konteks sosial atau hubungan dalam situasi sosial dan politik. Ada empat konfigurasi yaitu individu, kelompok, lembaga dan kebudayaan. Setiap bagian dari keempat konfigurasi tersebut berperan sebagai inovator dan dapat berperan sebagai penerima inovasi (adopter).

- 2) Hubungan (*linkage*) yaitu hubungan antara pelaku dalam proses penyebaran inovasi. Inovator dan adopter harus berada dalam hubungan yang memungkinkan didengarkannya dan diperhatikannya inovasi yang didifusikan.
- 3) Lingkungan (*environment*) yaitu cara keadaan lingkungan sekitar menjadi tempat penyebaran inovasi. Lingkungan dalam pengertian ini mencakup semua hal, baik fisik, sosial, maupun intelektual yang secara umum dapat bersifat netral, mempengaruhi atau mungkin menghambat terhadap tingkah laku tertentu.
- 4) Sumber (*resource*) yaitu sumber yang tersedia bagi inovator dan penerima dalam proses transisi penerimaan inovasi. Sumber yang tersedia sangat penting, baik bagi inovator maupun adopter, karena keduanya memerlukan sumber inovasi untuk melaksanakan transaksi. Inovator memerlukan kejelasan konsep agar dapat menyusun desain pengembangan dan menentukan strategi inovasi. Demikian pula, adopter memerlukan kejelasan konsep untuk memahami inovasi sehingga dapat menerapkan inovasi sesuai yang diharapkan.

b. Model Penelitian, Pengembangan dan Difusi.

Model inovasi ini berdasarkan pemikiran bahwa setiap orang memerlukan perubahan. Unsur pokok perubahan ialah penelitian, pengembangan dan difusi.

c. Model Pengembangan Organisasi.

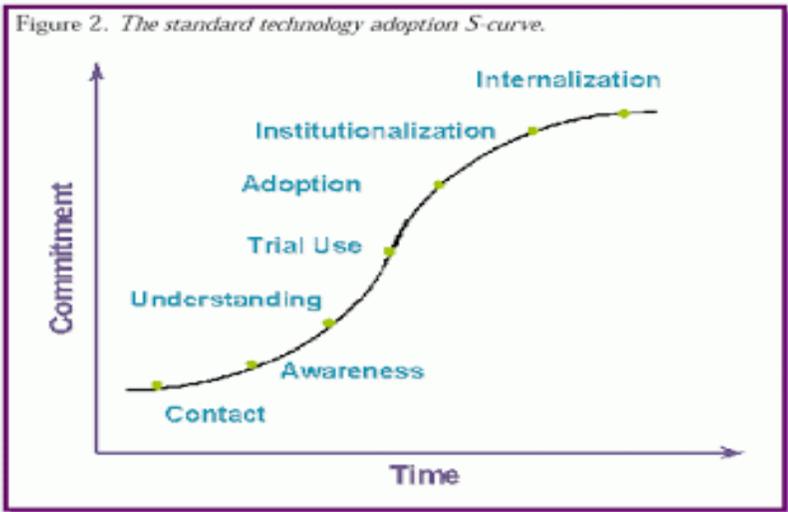
Model ini berorientasi pada organisasi daripada sistem sosial. Model ini berpusat pada sekolah. Model pengembangan organisasi ini berorientasi pada nilai yang tinggi, artinya model ini juga mendasarkan pada filosofi yang menyarankan agar sekolah tidak hanya diberi tahu tentang inovasi pendidikan disuruh menerimanya, tetapi sekolah hendaknya mampu mempersiapkan diri untuk memecahkan sendiri masalah pendidikan yang dihadapinya.

BAB VI

DIFUSI INOVASI

A. Pengertian Difusi Inovasi

Munculnya teori difusi inovasi di mulai pada awal abad ke-20, tepatnya tahun 1930, ketika seorang Sosiolog Perancis Gabriel Tarde, memperkenalkan kurva difusi berbentuk S (*S-shaped diffusion Curve*). Kurva ini pada dasarnya menggambarkan bagaimana suatu inovasi diadopsi seseorang atau sekelompok orang dilihat dari dimensi waktu. Pada kurva ini ada dua sumbu, di mana sumbu yang satu menggambarkan tingkat adopsi dan sumbu yang lainnya menggambarkan dimensi waktu.



Gambar 1. S-shaped diffusion Curve

Pemikiran Tarde menjadi penting karena secara sederhana bisa menggambarkan kecenderungan yang terkait dengan proses difusi inovasi. Rogers (2003) menyatakan “Tarde’s S-shaped diffusion curve is of current importance because “most innovation have an S-shaped rate of adoption”. Dan sejak itu tingkat adopsi atau tingkat difusi menjadi fokus kajian penting dalam penelitian-penelitian sosial.

Pada tahun 1940, Sosiolog Boyce Ryan dan Neal Gross mempublikasikan hasil penelitian difusi tentang

jagung hibrida kepada petani di Iowa, Amerika Serikat. Hasil penelitian ini memperbaharui sekaligus menegaskan tentang difusi inovasi model kurva S. Salah satu kesimpulan penelitian Ryan dan Gross menyatakan bahwa: “*the rate of adoption of the agricultural innovation followed an S-shaped normal curve when plotted on a cumulative basis over time*”.

Perkembangan berikutnya dari teori difusi inovasi terjadi pada tahun 1960, di mana penelitian difusi dikaitkan dengan berbagai topik yang lebih kontemporer, seperti dengan bidang pemasaran, budaya, dan sebagainya. Di sinilah muncul tokoh-tokoh teori difusi inovasi seperti Everett M. Rogers dengan karya besarnya *Diffusion of Innovation* (1961), F. Floyd Shoemaker yang bersama Rogers menulis *Communication of Innovation: A Cross Cultural Approach* (1971) sampai Lawrence A. Brown yang menulis *Innovation Diffusion: A New Perspective* (1981).

Rogers (2003:12) menjelaskan difusi adalah proses mengkomunikasikan inovasi melalui saluran dan jangka waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial. Senada dengan penjelasan Rogers, Sa'ud (2015:28) menjelaskan difusi adalah proses komunikasi inovasi antara warga masyarakat (anggota sistem sosial) dengan menggunakan saluran tertentu. Komunikasi dalam definisi ditekankan dalam arti terjadinya saling tukar informasi (hubungan timbal balik), antar beberapa individu baik secara memusat (konvergen) maupun memencar (divergen) yang berlangsung secara spontan. Dengan adanya komunikasi ini akan terjadi kesamaan pendapat antar warga masyarakat tentang inovasi.

Rusdiana (2014:26) menjelaskan difusi adalah jenis komunikasi khusus yang berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan sebagai ide baru. Dengan kata lain difusi adalah bentuk komunikasi yang bersifat khusus berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan yang berupa gagasan baru.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapatlah dipahami bahwa difusi inovasi adalah suatu proses pengkomunikasian ide, praktek atau objek yang dipandang baru oleh individu atau organisasi yang mengadopsi. Dalam hal ini apabila ide-ide baru ditemukan, disebarakan, dan diadopsikan atau ditolak, dan membawa dapat tertentu maka terjadinya perubahan sosial.

B. Unsur-Unsur Difusi Inovasi

Rogers (2003) menjelaskan 4 (empat) unsur pokok dalam difusi inovasi yaitu: inovasi, saluran komunikasi, waktu dan sistem sosial. Berikut penjelasannya

1. Inovasi.

Inovasi terkait dengan gagasan/ide, produk/objek, teknik/prosedur dan teknologi yang dianggap baru oleh seseorang dan kebaruannya itu bersifat relatif. Jika suatu ide, produk, teknik/prosedur, teknologi dianggap baru oleh seseorang maka hal tersebut adalah inovasi bagi individu tersebut.

Dalam inovasi mempunyai komponen ide, tetapi banyak inovasi yang tidak mempunyai wujud fisik, misalnya ideologi. Adapun inovasi yang mempunyai komponen ide dan komponen objek (fisik), misalnya handphone dan sebagainya. Inovasi yang memiliki komponen ide tidak dapat diadopsi secara fisik, sebab pengadopsiannya hanya berupa keputusan simbolis. Sebaliknya inovasi yang memiliki komponen ide dan komponen objek, pengadopsiannya diikuti dengan keputusan tindakan (tingkah laku nyata).

2. Saluran komunikasi.

Inti dari proses difusi adalah interaksi manusia untuk mengkomunikasikan ide baru kepada orang lain. Untuk itu diperlukan saluran komunikasi, dalam hal ini saluran komunikasi dapat berupa media interpersonal dan media massa.

Saluran interpersonal adalah saluran yang melibatkan pertemuan tatap muka (sumber dan penerima) antara dua orang atau lebih. Misalnya rapat atau pertemuan kelompok, percakapan langsung, pembicaraan dari mulut ke mulut. Sedangkan saluran media massa adalah alat-alat penyampai pesan yang memungkinkan sumber mencapai suatu audiens dalam jumlah besar, yang dapat menembus batasan waktu dan ruang. Misalnya radio, televisi, film, surat kabar, buku.

3. Waktu.

Proses keputusan inovasi sejak individu mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya dan pengukuhan terhadap keputusan ini sangat berkaitan dengan dimensi waktu, dengan kata lain waktu merupakan salah satu unsur penting dalam proses difusi.

Adopsi inovasi membutuhkan rentang waktu tertentu. Waktu merupakan salah satu unsur penting dalam proses difusi. Dimensi waktu dalam proses difusi berpengaruh dalam hal:

- a. Proses keputusan inovasi yaitu tahapan proses sejak seseorang menerima informasi pertama sampai ia menerima atau menolak inovasi. Terdapat lima langkah (tahap) dalam proses keputusan inovasi yaitu: (1) pengetahuan tentang inovasi, (2) bujukan atau imbauan, (3) penetapan atau keputusan, (4) penerapan/ implementasi, dan (5) konfirmasi.
- b. Kepekaan terhadap inovasi. Tidak semua orang dalam suatu sistem sosial menerima inovasi dalam waktu yang sama. Mereka menerima inovasi dari urutan waktu, artinya ada yang lebih terlebih dahulu, ada yang kemudian.
- c. Kecepatan penerimaan inovasi yaitu kecepatan relatif diterimanya inovasi oleh warga masyarakat. Kecepatan inovasi diukur berdasarkan lamanya waktu yang dipelrukan untuk mencapai persentase tertentu dari jumlah waktu masyarakat yang telah menerima inovasi.

4. Sistem sosial.

Inovasi terkait dengan sistem sosial berupa adat istiadat, budaya, norma dan nilai-nilai. Dalam hal ini sistem sosial dapat menghambat atau memudahkan cepat atau tidaknya penyebaran ide baru dan pengadopsian inovasi melalui apa yang disebut “efek sistem” atau “pengaruh sistem”.

Dalam difusi inovasi sangat penting untuk diingat bahwa proses difusi terjadi dalam sistem sosial. Sistem sosial adalah satu set unit yang saling berhubungan yang tergabung dalam upaya pemecahan masalah bersama untuk mencapai tujuan. Anggota suatu sistem sosial dapat berupa individu, kelompok informal, organisasi dan/atau subsistem. Proses difusi dalam kaitannya dengan sistem sosial ini dipengaruhi oleh struktur sosial, norma sosial, peran pemimpin, dan agen perubahan, tipe perubahan inovasi dan konsekuensi inovasi.

C. Diseminasi Inovasi.

Diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan dan dikelola. Apabila difusi terjadi secara spontan, diseminasi terjadi setelah ada perencanaan

(Rusdiana, 2014:65). Dalam pengertian ini, dapat juga direncanakan terjadinya difusi.

Misalnya dalam penyebaran inovasi penerapan Kurikulum 2013, setelah diadakan uji publik, ternyata penerapan kurikulum dapat dilakukan secara efektif dengan melakukan berbagai kegiatan pelatihan berjenjang. Selanjutnya hasil uji publik tersebut maka perlu dilakukan dideseminasikan secara meluas. Untuk menyebarluaskannya Kurikulum 2013 tersebut dilakukan dengan cara menatar instruktur tingkat nasional, tingkat propinsi dan tingkat kabupaten/kota. Diharapkan dengan pelatihan berjenjang ini maka difusi inovasi pendidikan yaitu pemberlakuan Kurikulum 2013 dapat berjalan dengan baik.

D. Strategi Difusi Inovasi

Suparman (2012:331) menyatakan terdapat dua strategi yang dilakukan dalam difusi inovasi yaitu: (1) strategi jalur terbuka, dan (2) strategi jalur organisasi.

1. Strategi jalur terbuka.

Strategi jalur terbuka ditempuh dengan menjual ide baru atau inovasi agar individu yang diharapkan dapat secara sukarela menerima dan menggunakan inovasi baru tersebut. Proses difusi yang dilakukan pada jalur terbuka adalah:

- a. Agen pembaharuan dalam hal ini pendesain inovasi ataupun pihak lain melakukan identifikasi individu atau kelompok individu yang dipandang sebagai calon pengguna utama yaitu individu atau kelompok yang dipandang membutuhkan produk inovasi baru dalam pekerjaannya.
- b. Memperkenalkan inovasi baru melalui berbagai media massa, surat selebaran, leaflet dan lain-lain. Perkenalan tersebut menyangkut karakteristik dari produk inovasi baru tersebut serta manfaatnya bagi mereka.
- c. Melakukaan kontak individual dan tatap muka dengan mereka untuk membujuk agar menerima produk inovasi baru tersebut, dalam hal ini manfaat produk inovasi baru dijelaskan dan ditekankan. Bujukan tersebut harus dilakukan dengan baik, misalnya melalui kunjungan atau pertemuan khusus sehingga pada akhirnya mereka mau menerimanya.
- d. Setiap ada individu atau kelompok yang menyatakan menerima produk inovadi baru atau

yang biasa disebut pengadopsi memerlukan pendampingan oleh agen pembaharuan. Tujuannya adalah meyakinkan pengadopsi bahwa produk inovasi baru tersebut telah dilaksanakan dengan baik sampai pengadopsi benar-benar merasa sukses dan mendapat manfaatnya.

- e. Proses pendampingan itu dapat dihentikan apabila para pengadopsi dipandang tidak membutuhkan lagi. Namun demikian mereka masih perlu diamati terus menerus untuk mengantisipasi adanya gejala menghentikan penggunaan produk inovasi baru. Dalam kasus seperti yang disebutkan terakhir, para pendamping dapat melakukan upaya penguatan kembali. Dalam situasi di mana para pengadopsi tidak lagi memerlukan pendamping, produk inovasi baru itu dapat dikatakan sudah menjadi bagian dari kehidupan pengadopsinya. Statusnya sebagai inovasi sudah berubah yaitu bukan inovasi lagi sebab ia bukan lagi sesuatu yang baru.
- f. Membujuk para pengdopsi yang sudah mantap untuk menjadi agen pembaruan, dengan mengajak individu lain menggunakan produk inovasi baru.

2. Strategi jalur organisasi.

Proses strategi difusi inovasi melalui jalur organisasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi daftar pengambil keputusan puncak sampai lini pertama, misalnya pejabat pada Kementerian Pendidikan Nasional, kepala dinas pendidikan propinsi, kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, atau organisasi yayasan pendidikan.
- b. Memperkenalkan produk inovasi baru kepada pengambil keputusan tersebut.
- c. Membujuk untuk meyakinkan kehebatan penggunaan inovasi baru dan pengaruhnya bila digunakan secara institusional oleh lembaga pendidikan yang berada di bawahnya. Kehebatan tersebut terkait dengan kualitas, relevansi dengan kebutuhan dan daya jangkauannya. Bujukan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan komitmen dari pengambil keputusan agar menggunakan produk inovasi baru.
- d. Membantu penggunaan produk inovasi baru pada organisasi tersebut sampai seluruh jajaran pimpinan

lini pertama terlibat dan memiliki komitmen yang sama.

- e. Memberi pendampingan bagi jajaran pimpinan tersebut sampai produk inovasi baru benar-benar digunakan oleh seluruh individu pada lembaga atau organisasi yang bersangkutan.

E. Hambatan-Hambatan Dalam Difusi Inovasi

Dalam implementasi difusi inovasi dalam organisasi terkadang sering mendapati beberapa hambatan yang berkaitan dengan difusi inovasi. Pengalaman menunjukkan bahwa hampir setiap individu atau organisasi memiliki semacam mekanisme penerimaan dan penolakan terhadap perubahan. Jika terdapat pihak yang berupaya mengadakan sebuah perubahan, penolakan atau hambatan akan sering ditemui. Orang-orang tertentu dari dalam ataupun dari luar sistem organisasi akan tidak menyukai, melakukan sesuatu yang berlawanan, melakukan sabotase atau mencoba mencegah upaya untuk mengubah praktek yang berlaku.

Penolakan ini mungkin ditunjukkan secara terbuka dan aktif atau secara tersembunyi dan pasif. Alasan mengapa ada yang ingin menolak perubahan walaupun kenyataannya praktek yang ada sudah kurang relevan, membosankan, sehingga dibutuhkan sebuah inovasi. Fenomena ini sering disebut sebagai penolakan terhadap perubahan. Banyak upaya telah dilakukan untuk menggambarkan, mengkategorisasikan dan menjelaskan fenomena penolakan ini.

Rogers (2003) menjelaskan faktor-faktor hambatan yang mempengaruhi secara alami alami/aturan dari proses difusi inovasi, yaitu:

- a. *Knowledge of innovation and reinvention* yaitu seberapa jauh kesadaran organisasi terhadap inovasi dan persepsinya tentang karakteristik mereka yang menonjol. Faktor pengetahuan ini dipengaruhi oleh sebagian oleh karakteristik personil-personil dalam organisasi.
- b. *External accountability* adalah tingkatan di mana suatu organisasi tergantung atau bertanggungjawab kepada lingkungannya.
- c. *Lack resources* adalah sumberdaya yang tidak siap digunakan pada maksud/tujuan yang lain.

- d. *Organizational structure* adalah susunan dari komponen – komponen dan subsistem – subsistem di dalam suatu sistem.

Dalam konteks difusi inovasi dalam organisasi terdapat beberapa hambatan yaitu:

1. Hambatan psikologis

Hambatan ini ditemukan apabila kondisi psikologis individu dalam organisasi menjadi faktor penolakan. Hambatan psikologis telah dan masih merupakan kerangka kunci untuk memahami apa yang terjadi apabila individu dan sistem melakukan penolakan terhadap suatu upaya perubahan.

Jenis hambatan ini dengan memilih satu faktor sebagai suatu contoh yaitu dimensi kepercayaan, keamanan, dan kenyamanan versus ketidakpercayaan, ketidakamanan, dan ketidaknyamanan. Faktor-faktor ini sebagai unsur inovasi yang sangat penting. Faktor-faktor psikologis lainnya yang dapat mengakibatkan penolakan terhadap inovasi baru adalah rasa enggan karena merasa sudah cukup dengan keadaan yang ada, tidak mau repot, atau ketidaktahuan tentang masalah yang terdapat dalam organisasi.

Di dalam suatu sistem sosial, organisasi atau kelompok akan ada individu yang pengalaman masa lalunya tidak positif akan mempengaruhi kemampuan dan keberaniannya untuk menghadapi perubahan dalam pekerjaannya. Jika sebuah inovasi berimplikasi berkurangnya kontrol (misalnya diperkenalkannya model pimpinan tim atau kemandirian masing-masing bagian), maka pemimpin itu biasanya akan memandang perubahan itu sebagai negatif dan mengancam. Perubahan itu dirasakannya sebagai kemerosotan, bukan perbaikan.

2. Hambatan praktis

Hambatan praktis adalah faktor-faktor penolakan yang lebih bersifat fisik. Faktor-faktor tersebut adalah waktu, sumber daya dan sistem. Faktor-faktor ini adalah faktor-faktor yang sering ditunjukkan untuk mencegah atau memperlambat perubahan dalam organisasi dan sistem sosial. Program pusat pelatihan sangat menekankan aspek-aspek bidang ini. Ini mungkin mengindikasikan adanya perhatian khusus pada keahlian praktis dan metode-metode yang mempunyai kegunaan praktis yang langsung. Oleh karena itu, inovasi dalam bidang ini dapat menimbulkan penolakan yang terkait dengan hal-hal yang bersifat praktis.

Artinya, semakin praktis sifat suatu bidang, akan semakin mudah individu dalam organisasi meminta penjelasan tentang penolakan praktis. Di pihak lain, dapat diasumsikan bahwa hambatan praktis yang sesungguhnya itu telah dialami oleh banyak individu dalam kegiatan sehari-hari, yang menghambat perkembangan dan pembaruan praktek. Tidak cukupnya sumber daya ekonomi, teknis dan material sering disebutkan.

Dalam hal mengimplementasikan perubahan, faktor waktu sering kurang diperhitungkan. Segala sesuatu memerlukan waktu. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengalokasikan banyak waktu apabila membuat perencanaan inovasi. Pengalaman menunjukkan bahwa masalah yang tidak diharapkan, yang mungkin tidak dapat diperkirakan pada tahap perencanaan, kemungkinan akan terjadi.

Masalah pada bidang keahlian dan sumber daya ekonomi sebagai contoh tentang hambatan praktis. Dalam perencanaan dan implementasi inovasi, tingkat pengetahuan dan jumlah dana yang tersedia harus dipertimbangkan. Ini berlaku terutama jika sesuatu yang sangat berbeda dari praktek di masa lalu akan dilaksanakan, dengan kata lain jika ada perbedaan yang besar antara yang lama dengan yang baru.

Dalam kasus seperti di atas, tambahan sumber daya dalam bentuk keahlian dan keuangan dibutuhkan. Pengalaman telah menunjukkan bahwa dana sangat dibutuhkan, khususnya pada awal dan selama masa penyebarluasan gagasan inovasi. Ini mungkin terkait dengan kenyataan bahwa bantuan dari luar, peralatan baru, realokasi, buku teks dan lain-lain diperlukan selama fase awal.

Sumber dana yang dialokasikan untuk perubahan sering kali tidak disediakan dari anggaran tahunan. Media informasi dan tindak lanjutnya sering dibutuhkan selama fase penyebarluasan gagasan inovasi. Dalam kaitan ini penting untuk dikemukakan bahwa dana saja tidak cukup untuk melakukan perbaikan dalam praktek di organisasi.

Sumber daya keahlian seperti pengetahuan dan keterampilan individu dalam organisasi yang dilibatkan dalam upaya inovasi ini merupakan faktor yang sama pentingnya. Dengan kata lain, jarang sekali dapat memilih

antara satu jenis sumber atau jenis sumber lainnya, melainkan memerlukan semua jenis sumber itu. Jelaslah bahwa kurangnya sumber tertentu dapat dengan mudah menjadi hambatan.

3. Hambatan Nilai

Hambatan nilai melibatkan kenyataan bahwa suatu inovasi mungkin selaras dengan nilai-nilai, norma-norma dan tradisi-tradisi yang dianut organisasi tertentu, tetapi mungkin bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut sejumlah organisasi lain. Jika inovasi berlawanan dengan nilai-nilai sebagian individu dalam organisasi, maka bentrokan nilai akan terjadi dan penolakan terhadap inovasi-pun akan muncul.

Berbicara tentang penolakan terhadap perubahan atau terhadap nilai-nilai dan pendapat yang berbeda, dalam banyak kasus itu tergantung pada definisi yang digunakan. Banyak inovator telah mengalami konflik yang jelas dengan orang lain, tetapi setelah dieksplorasi lebih jauh, ternyata ditemukan adanya kesepakatan dan aliansi dapat dibentuk. Pengalaman ini dapat dijelaskan dengan kenyataan bahwa sering kali orang dapat setuju mengenai sumber daya yang dipergunakan. Kadang-kadang hal ini terjadi tanpa memandang nilai-nilai. Dengan demikian kesepakatan atau ketidaksepakatan di permukaan mudah terjadi dalam kaitannya dengan aliansi. Sering kali aliansi itu terbukti sangat penting bagi implementasi inovasi.

BAB VI

INOVASI KELEMBAGAAN

A. Madrasah Model.

1. Historikal Madrasah Model

Program madrasah model sudah dimulai pada tahun 1993 melalui proyek *Junior Secondary Education Project* (JSEP). Kemudian pada tahun 1998 diteruskan dengan program *Basic Education Project* (BEP) untuk tingkat ibtidaiyah dan tsanawiyah. Pada tahun 2000 dikembangkan proyek *Development of Madrasah Aliyah Project* (DMAP) untuk tingkah Aliyah.

Program-program di atas dilakukan dengan dasar pemikiran bahwa pada saat itu citra madrasah sebagai lembaga pendidikan formal masih dianggap sebagai lembaga pendidikan kelas dua setelah sekolah umum. Pandangan ini terlihat dari kenyataan bahwa madrasah memiliki kelemahan dalam praktek penyelenggaraan pendidikan terutama dalam hal manajemen, profesionalitas guru, sarana dan prasarana.

Secara spesifik kelemahan-kelemahan yang terjadi pada institusi madrasah dipaparkan oleh Asmani (2013:69) yaitu: (1) sentralisasi figure, (2) sumber daya manusia, (3) fasilitas serba kurang, (4) budaya organisasi lemah, (5) hilangnya spirit kompetisi dan inovasi, (6) jaringan tidak berkembang, (7) kaderisasi tidak berjalan, (8) konsolidasi terbengkalai, (9) tidak adanya ekspansi, dan (10) pendanaan terbatas.

Untuk menepis anggapan tersebut maka Departemen Agama menunjukkan beberapa madrasah sebagai madrasah model di tiap-tiap propinsi dengan memberikan bantuan sarana, fasilitas belajar, gedung, guru hingga bantuan pendidikan atau beasiswa bagi guru-guru madrasah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang strata dua.

Misi yang diemban oleh madrasah model yang telah ditunjuk Departemen Agama di masing-masing propinsi adalah tidak hanya unggul sendirian, tetapi juga membantu madrasah di sekitarnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan, berperan sebagai lokomotif yang menarik

madrasah-madrasah swasta sehingga menjadi madrasah yang berkualitas.

2. Profil Madrasah Model

Madrasah model dimaksudkan sebagai *center for excellence* yang dikembangkan lebih dari satu buah untuk setiap propinsi. Madrasah model diproyeksikan sebagai wadah penampung putra-putri terbaik masing-masing daerah untuk dididik secara maksimal tanpa harus pergi ke daerah lain. Oleh karena menjadi *center for excellence* maka kesempatan belajar haruslah melalui proses seleksi yang ketat dan dengan berbagai ketentuan lainnya (Zayadi, 2005:57).

Secara rinci profil madrasah model dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Aspek manajemen.
 - Maksimal 6 kelas untuk tiap angkatan.
 - Tiap kelas terdiri dari 30 siswa.
 - Rasio guru kelas adalah 1:25.
 - Mendokumentasikan perkembangan tiap siswa.
 - Transparan dan akuntabel.
- b. Aspek ketenagaan.
 - 1) Kepala sekolah
 - Minimal S-2 untuk MA, S-1 untuk MTs dan MI.
 - Pengalaman minimal 5 tahun jadi kepala madrasah.
 - Mampu berbahasa Arab dan atau Inggris.
 - Lulus tes (*fit and proper test*).
 - 2) Guru
 - Minimal S-1.
 - Spesialisasi sesuai mata pelajaran.
 - Pengalaman mengajar minimal 5 tahun.
 - Mampu berbahasa Arab dan atau Inggris.
 - Lulus tes (*fit and proper test*).
 - 3) Tenaga lain:
 - Minimal S-1.
 - Spesialisasi sesuai bidang tugas
 - Pengalaman mengelola minimal 3 tahun.
- c. Aspek kesiswaan.

Input: lulus tes (akademik, Arab dan Inggris).
Output: menguasai berbagai disiplin ilmu dan siap bersaing untuk studi lanjut.

- d. Aspek kultur belajar.
- Full days school.
 - Student center learning.
 - Kurikulum dikembangkan dengan melibatkan seluruh elemen madrasah.
 - Pendekatan belajar dengan fleksibilitas tinggi dengan mengikuti perkembangan metode pembelajaran terbaru.
- e. Aspek sarana dan prasarana.
- Perpustakaan yang memadai.
 - Laboratorium Bahasa, IPA dan Matematika.
 - Mushalla.
 - Lapangan/Fasilitas Olahraga.
 - Fasilitas lainnya yang terkait dengan pembelajaran dan pengembangan minat, dan bakat siswa.

3. Performa Madrasah

Performa madrasah model diletakkan pada tiga karakter dasar madrasah yang dikembangkan secara holistik mendekati kriteria-kriteria idealisme pendidikan modern. Ketiga karakter dasar madrasah tersebut adalah:

a. Memiliki kultur yang kuat.

Kultur merupakan jiwa madrasah yang memberi makna bagi setiap kegiatan pendidikan madrasah dan menjadi jembatan antara aktivitas dan hasil yang dicapai. Kultur adalah sebuah keadaan yang mengantarkan siswa madrasah melebihi batas-batas kekurangan manusiawi menuju tingkatan kreativitas, seni dan intelek yang tinggi.

Kultur juga merupakan kendaraan (*vehicle*) untuk mentransmisikan nilai-nilai pendidikan. Karena itu kultur madrasah dalam hal ini kultur belajar, haruslah dibangun sejak awal agar semua elemen madrasah memiliki komitmen untuk kemajuan madrasah.

b. Kepemimpinan kolaboratif dan belajar kolektif.

Kepemimpinan dalam madrasah haruslah didefinisikan sebagai sebuah proses belajar bersama (*collective learning*) yang saling menguntungkan yang memungkinkan seluruh unsur masyarakat madrasah turut ambil bagian dalam membangun kesepakatan yang mengakomodir berbagai kepentingan (kolektif dan kolaboratif).

Kolaborasi yang dimaksud bukan hanya sekedar (setiap orang mampu menyelesaikan pekerjaannya) tetapi yang terpenting adalah semua dilakukan dalam suasana kebersamaan dan saling mendukung. Kolaborasi menjadi syarat jika ingin madrasah menjadi *learning organization* karena kolaborasi berhubungan erat dengan norma dan kesempatan bagi terjadi proses belajar yang terus menerus. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa proses belajar umumnya merupakan aktivitas komunal sebagai sebuah proses tukar menukar budaya antar individu atau kelompok.

Karena itu model kepemimpinan kolaboratif menjadi penting dikembangkan di madrasah. Model kepemimpinan kolaboratif ini menemukan titik relevansinya ketika setiap madrasah diharuskan memiliki majelis madrasah sebagai partner aktif madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikannya.

c. Pembiasaan siswa menghadapi perubahan.

Hidup adalah perubahan. Secara alami perubahan tidak bisa diprediksi. Agar dapat memahami dan berbuat dalam kondisi yang tidak bisa diprediksi tersebut sebuah upaya pendidikan yang terus menerus, seumur hidup menjadi sebuah keniscayaan. Dengan kata lain untuk menciptakan budaya belajar yang terus menerus maka perubahan perlu diciptakan.

Lebih jauh, perubahan dalam bentuk ketidakpastian dan keraguan perlu secara sengaja diciptakan di madrasah untuk mendorong terciptanya kegiatan belajar yang terus menerus. Argumentasinya jika intelegensi berarti kemampuan untuk mencari apa yang meragukan dan berusaha memahaminya, dan jika tujuan pendidikan formal adalah untuk memupuk intelegensi manusia, maka madrasah hendaknya membuka diri terhadap ketidakpastian. Sebuah lembaga pendidikan yang secara aktif merespon suasana ketidakpastian adalah penting untuk kelangsungan sebuah masyarakat belajar.

B. Universitas Islam Negeri

Inovasi terkini dalam dunia pendidikan Islam khususnya di Indonesia adalah perubahan lembaga setingkat institut yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Dalam hal ini perubahan IAIN menjadi UIN memiliki dasar pemikiran yang cukup kuat dan peran yang amat strategis bagi pengembangan Islam di Indonesia dan pemberdayaan umat dalam rangka menyongsong era globalisasi yang menuntut kualitas yang tinggi sehingga mampu bersaing di pasar global (Nata,2003: 75).

1. Rasionalitas

Setidaknya terdapat lima alasan yang melatar belakangi perlunya inovasi kelembagaan yaitu konversi IAIN menjadi UIN, sebagaimana dijelaskan Nata (2003:64) sebagai berikut:

- a. Adanya perubahan jenis pendidikan pada madrasah Aliyah (MA) merupakan sekolah agama, maka sekarang MA sudah menjadi sekolah umum yang bernuansa agama. Dengan kata lain muatan pelajaran umum pada MA sekarang lebih dominan dan lebih kuat dibandingkan MA pada masa sebelumnya. Pada masa sekarang ini di MA sudah terdapat jurusan eksakta, sosial, dan bahasa. Lulusan MA akan sulit masuk IAIN, jika IAIN sekarang ini hanya menyediakan jurusan dan program studi agama saja. Agar lulusan MA dapat diterima di IAIN, maka IAIN harus dirubah menjadi universitas. Jika tidak segera dilakukan perubahan, maka IAIN tidak dimasuki oleh para lulusan MA tersebut. Dengan demikian perubahan IAIN menjadi UIN akan memberikan peluang dan kesempatan yang tepat bagi lulusan MA.

Selanjutnya tidak itu saja, konversi IAIN menjadi UIN juga akan membuat kesempatan bagi tamatan sekolah menengah atas (SMA) untuk belajar di UIN. Hal ini penting dikemukakan karena selama ini IAIN secara umum hanya menampung tamatan MA dan belum banyak memberikan peluang bagi tamatan SMA. Dengan perubahan IAIN menjadi UIN, maka tamatan MA maupun SMA dan sejenisnya dapat diterima di UIN. Dengan demikian perubahan IAIN menjadi UIN ini mengemban misi pemberdayaan untuk masa depan.

- b. Adanya dikhotomi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Masalah dikhotomi tersebut antara lain dapat di atasi dengan program integrasi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum dengan cara mengkonversi IAIN menjadi UIN. IAIN yang sekarang ini fokus menyelenggarakan program studi agama saja dinilai hanya akan melestarikan dikhotomi tersebut. Dengan adanya perubahan IAIN menjadi UIN maka dikhotomi ini akan dapat dihilangkan.
- c. Perubahan IAIN menjadi UIN akan memberikan peluang yang lebih luas kepada para lulusannya untuk dapat memasuki lapangan kerja yang lebih luas. Selama ini para lulusan sarjana IAIN sebagai besar hanya bekerja di Kementerian Agama atau Kementerian atau instansi lainnya, namun bidang pekerjaannya tetap. Di antara lulusan IAIN memang ada yang menjadi pejabat seperti menjadi menteri, anggota legislatif, dan jabatan lainnya. Namun secara keseluruhan bidang pekerjaan mereka tetap saja bidang agama.
- d. Perubahan IAIN menjadi UIN dipelrukan dalam rangka memberikan peluang kepada lulusan IAIN untuk melakukan mobilitas vertikal yakni kesempatan dan peran untuk memasuki medan gerak yang lebih luas. Para lulusan UIN nantinya tidak akan termarginalisasikan lagi, melainkan akan dapat memasuki wilayah gerak yang lebih bervariasi dan bergengsi. Posisi mereka nantinya tidak hanya berada di wilayah pinggiran, suplemen da nasal kurang diperhitungkan, melainkan berada dalam wilayah strategis dan diperhitungkan. Mereka tidak hanya menjadi tukang membaca do'a, imam shalat dan sebagainya, melainkan juga dapat mengambil peran sebagai penentu dalam perjalanan sejarah bangsa, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya. Para lulusan UIN dapat mempelopori upaya mendidikan tuan di rumahnyasendiri, hal ini perlu dilakukan karena hingga saat ini peluang-peluang strategis tersebut kini berada di tangan orang lain. Melalui perubahan IAIN menjadi UIN ini kita menginginkan lahirnya umat Islam sebagai adidaya dan pelopor dalam gerakan peradaban umat manusia sebagaimana yang demikian itu pernah dilakukan oleh umat Islam di abad klasik.

- e. Perubahan IAIN menjadi UIN juga sejalan dengan tuntutan umat Islam yang selain menghendaki adanya pelayanan penyelenggaraan pendidikan yang profesional dan berkualitas tinggi juga lebih menawarkan banyaknya pilihan. Hal ini terjadi sebagai akibat dari adanya tuntutan dari era globalisasi yang menghendaki lahirnya manusia-manusia yang unggul dan mampu merebut peluang dalam situasi dan kondisi yang penuh tantangan dan kompetitif.

Selain itu karena telah terjadi perubahan pada tingkat ekonomi dan kesejahteraan umat yang makin baik, menyebabkan mereka memiliki kemampuan ekonomi untuk mendidik pada jurusan dan program pendidikan yang secara ekonomi menghendaki biaya yang lebih tinggi. Demikian pula adanya perubahan orientasi hidup dari yang semula semata-mata bersifat ukhrawi, menjadi orientasi hidup yang menghendaki keseimbangan dengan kehidupan duniawi. Hal ini menyebabkan umat Islam tidak hanya menghendaki kuliah pada bidang studi agama saja melainkan juga pada bidang non-keagamaan.

2. Pengembangan Fakultas dan Program Studi

Konversi IAIN menjadi UIN terkait dengan pengembangan fakultas dan program di lingkungan UIN. Sesuai peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0686 tahun 1991 dinyatakan bahwa sebuah universitas minimal memiliki 5 fakultas dan mengelola 10 program studi strata satu (S.1) yang mewakili 3 kelompok bidang ilmu yang berbeda, di mana 6 program studi eksakta dan 4 lagi program studi sosial dan humaniora.

Untuk itu maka dalam pendirian UIN haruslah merujuk kepada regulasi di atas dalam pengembangan fakultas dan program studinya. Dalam hal ini pengembangan fakultas dan program studi di lingkungan UIN setidaknya mengacu kepada 3 (tiga) dimensi yaitu: (a) universalitas Islam, (b) kebutuhan masyarakat masa depan, dan (3) regulasi.

- a. Dimensi universalitas Islam.

Bila ditelaah secara mendalam, maka salah satu ciri paling mendasar agama Islam adalah kekomprehensifan dan kemencakupan ajaran-ajarannya. Islam menyediakan panduan nilai-nilai dasar dalam segala bidang kehidupan dan aktivitas

manusia. Kemencakupan ajaran Islam itu juga mencakup persoalan keilmuan, karena itulah pendidikan yang memisahkan apalagi mempertentangkan ilmu-ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu umum senantiasa dipandang sebagai sesuatu yang tidak relevan oleh umat Islam.

- b. Dimensi kebutuhan masyarakat masa depan.
Kebutuhan masyarakat dan berbagai problema kehidupan kini dan masa depan, tidak lagi memungkinkan bila hanya didekati dan di atasi dengan bekal ilmu-ilmu keagamaan saja. Untuk mengatasi berbagai problema kehidupan yang semakin kompleks dan mengantisipasi perkembangan kehidupan di masa depa, maka umat Islam harus menguasai berbagai rumpun atau disiplin ilmu pengetahuan. Karenanya UIN harus memperluas wilayah kajiannya pada berbagai rumpun ilmu pengetahuan untuk memberikan bekal yang memadai bagi generasi muslim dalam menjalani dan mengisi kehidupan masa depan. Di tingkat operasional maka pembukaan jurusan-jurusan teknis dan vokasional menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan.
- c. Dimensi regulasi.
Berbeda dengan kelembagaan IAIN, Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, secara eksplisit menyatakan bahwa suatu perguruan tinggi yang berbentuk universitas dapat menyelenggarakan pendidikan dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan.

Menyahuti ketiga hal di atas, maka pengembangan fakultas dan program studi di lingkungan UIN ke depan tidak lagi hanya diarahkan pada upaya pengkajian, pengembangan dan pengaplikasian ilmu-ilmu keagamaan saja, tetapi pada berbagai rumpun ilmu pengetahuan. Bila selama ini IAIN berfokus pada kajian keilmuan keagamaan, maka ke depannya UIN membuka dan mengembangkan fakultas dan program studi dalam berbagai rumpun dan disiplin keilmuan umum. Hal ini dijelaskan Dauly (2001:158) bahwa hakekat dari UIN mengandung makna bahwa ilmu-ilmu yang dikembangkan tidak hanya ilmu-

ilmu agama saja tetapi telah dikembangkan ke berbagai disiplin ilmu-ilmu lainnya yang tergolong ilmu-ilmu kealaman, ilmu-ilmu sosial dan ilmu humaniora.

Pengembangan fakultas dan program studi sebagai ujung tombak sebuah lembaga pendidikan tinggi dalam kaitannya agar UIN dapat bersaing maka diperlukan penguatan fakultas dan program studi dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengupayakan implementasi standar-standar internasional dalam pengelolaan fakultas dan program studi misalnya dengan menerapkan *academic online*.
- b. Melakukan kerjasama akademik dengan perguruan tinggi dalam lembaga-lembaga riset di dalam dan luar negeri.
- c. Membuka kelas internasional.
- d. Menerbitkan secara berkala karya ilmiah yang berstandar internasional secara bertahap dan berkesinambungan.
- e. Melakukan tukar menukar dosen dan mahasiswa dengan lembaga pendidikan di luar negeri.

3. Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum di lingkungan UIN mengacu kepada 4 (empat) faktor yaitu: (a) perubahan pandangan filosofis, (b) perubahan kemasyarakatan, (c) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan (d) perubahan kebijakan dalam bidang pendidikan.

- a. Perubahan pandangan filosofis.

Faktor ini berkaitan dengan pergeseran pandangan hidup masyarakat yang fenomenal tentang nilai-nilai kehidupan. Jika perubahan itu sudah terjadi cukup signifikan, maka perlu dilakukan perubahan mendasar terhadap kurikulum pendidikan di UIN, guna menjawab dan atau memenuhi tuntutan masyarakat yang sedang berubah. Kajian-kajian filosofis kurikulum melingkupi kajian substansi keilmuan dan batang tubuh keilmuan yang akan diturunkan menjadi isi matakuliah untuk disampaikan kepada mahasiswa.

- b. Perubahan kemasyarakatan.

Perubahan kemasyarakatan berkaitan erat dengan pergeseran struktur sosial, pola hidup, pekerjaan, tata prilaku, norma, tata pergaulan dan keyakinan. Perubahan yang terjadi dalam aspek sosial ini dipandang cukup penting karena akan

mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Jika perubahan kemasyarakatan sudah benar-benar terjadi, maka perlu ditinjau kembali kurikulum yang ada untuk disusun kembali agar dapat mengantisipasi perubahan kemasyarakatan tersebut. Dalam peninjauan kurikulum yang berkaitan dengan perubahan-perubahan sosial ini diarahkan untuk mempersiapkan tenaga terdidik yang dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat yang berubah atau tenaga yang memiliki kompetensi untuk mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih baik.

- c. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kemajuan penting di abad ini yang patut dicermati adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berjalan cepat di bidang ekonomi, sosial budaya, manajemen, komunikasi, transportasi dan sebagainya. Kemajuan ilmu dan teknologi ini perlu direspon oleh pengembang kurikulum dengan cara yang positif dan antusias untuk dapat dimanfaatkan demi kepentingan pendidikan. Di satu sisi dampak perkembangan baru diadopsi untuk perbaikan kurikulum pendidikan dan di sisi lain perkembangan baru itu diantisipasi dengan persiapan tenaga terdidik yang sifatnya mengarah ke arah yang positif.
- d. Perubahan kebijakan dalam bidang pendidikan.
Seperti diketahui bahwa banyak teori pendidikan yang ditawarkan, ada teori klasik, ada teori modern dan ada teori kontemporer. Karena banyaknya teori yang dapat dipilih, pemerintah sering membuat kebijakan dengan menetapkan filosofi baru pendidikan yang berlaku secara nasional. Seperti yang sudah terjadi, kita tahu bahwa filosofi, arah dan tujuan pendidikan di negeri ini adalah sudah berulang kali diperbaiki atau dirubah. Hal ini dapat dipahami karena kepentingan Negara dengan pendidikan dan generasi penerus sangat besar karena keberlanjutan Negara ada di tangan mereka maka kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam pendidikan adalah representasi kepentingan Negara dalam sektor pendidikan.

Perubahan ini dan juga faktor lainnya, dengan sendirinya akan merubah visi dan misi dari UIN. Jika terjadi perubahan kebijakan, baik secara nasional maupun institusional, maka dengan sendirinya perlu segera direspon oleh setiap program studi agar segera merubah kurikulumnya sejalan dengan perubahan kebijakan tersebut.

Selanjutnya dalam pengembangan kurikulum di lingkungan program studi UIN memerlukan langkah-langkah sistematis dan terarah sehingga perubahan kurikulum dapat direalisasikan, dengan kata lain dipandang perlu untuk merumuskan langkah-langkah implementasi kurikulum. Untuk maksud itu terdapat lima prinsip dalam penyusunan kurikulum yang harus dicermati yaitu:

- a. Keseimbangan antara iman, etika dan logika.
Kurikulum merupakan input instrumental yang digunakan untuk menyeimbangkan pengalaman belajar yang mengembangkan antara imana, etika dan logika secara berimbang. Dalam penyusunan dan penerapan kurikulum, iman menjadi yang pertama dan utama. Pengembangan etika dilaksanakan dalam rangka penanaman nilai-nilai akhlak dan nilai budaya yang positif. Penekanan pada aspek iman dan etika tidak berarti menafikan logika atau pemikiran rasional. Kurikulum yang dikembangkan tetap menempatkan logika sebagai unsur penting, karena dengan penerapan logika dan prinsip rasional itulah ilmu pengetahuan dapat diserapkan dan dikembangkan. Lebih jauh, dari pemikiran rasional akan dilahirkan gagasan kreatif dan inovatif. Jadi kurikulum yang baik menurut prinsip ini adalah yang dapat memadukan secara seimbang antara kognisi, afeksi dan konasi.
- b. Keseimbangan identitas Islam dan Nasional.
Kurikulum yang dikembangkan berorientasi pada pembentukan pribadi muslim yang secara seimbang dengan menekankan pada identitas keIslaman dan keIndonesiaan. Output kurikulum ini memiliki kesadaran sebagai bagian masyarakat Islam, tetapi juga menyadari identitas dirinya sebagai warga Negara Indonesia. Lebih lanjut, materi kurikulum perlu menanamkan semangat dakwah sebagai instrumen penguatan *ghirah* keIslaman dan sekaligus menanamkan jiwa nasionalisme dan

patriotism sebagai instrumen untuk membela Negara.

- c. Keseimbangan antara *turats* Islam dengan sains modern.

Kurikulum yang dikembangkan berorientasi pada aktualisasi sains Islam yang digali dari sumber utama ajaran Islam dan kitab-kitab klasik dan modern warisan ualama dan sarjana muslim, dengan tetap membuka diri dan mengakomodasi perkembangan baru ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini anut prinsip integrasi, di mana ajaran Islam dengan sains modern dapat menyatu. Dalam pandangan ini, Islam dan sains tidak dapat dipisahkan, karena yang terjadi selama ini adalah pembedangan ilmu ke dalam berbagai disiplin. Karena itu kurikulum yang dikembangkan tetap menggunakan pengetahuan yang murni agamis yang digali dari wahyu Allah, pemikiran filosofis yang diperoleh dari kemampuan rasional dan pengetahuan teoritis yang digali dari penelitian empiris.

- d. Keseimbangan antara kepentingan hidup duniawi dan ukhrawi.

Pada dasarnya tujuan dari semua kegiatan pendidikan adalah untuk kesejahteraan. Sesuai dengan ajaran Islam, kurikulum yang dikembangkan di UIN berorientasi pada pencapaian kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Konten kurikulum yang berorientasi pada kesejahteraan duniawi menggunakan ilmu-ilmu keterampilan hidup (*life skill*), sedangkan konten yang berorientasi kesejahteraan akhirat menggunakan ilmu-ilmu yang dapat meningkatkan kesalehan dan ketaatan kepada Allah.

- e. Keseimbangan pusat belajar antara dosen dan mahasiswa.

Berdasarkan prinsip ini, dosen dan mahasiswa dipandang sebagai dua pihak yang bermitra dalam menggali, mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Di sini ada prinsip pengembangan kurikulum yang memposisikan dosen dan mahasiswa dalam kedudukan setara dalam hal penggalan ilmu. Karena itu dalam penyusunan dan penyempurnaan kurikulum perlu penekanan pada strategi pembelajaran partisipatif di mana

mahasiswa memperoleh peran utama dalam memperkaya pengetahuan mereka sendiri di bawah bimbingan dosen.

4. Pengembangan Bidang Penelitian

Penelitian merupakan satu dharma dari tridharma perguruan tinggi, oleh karena itu penelitian tidak dapat dilepaskan dari dua dharma lainnya yaitu pendidikan dan pengajaran dan pengabdian masyarakat. Penyelenggaraan penelitian di UIN diarahkan untuk mencapai tiga tujuan secara simultan yaitu: (1) untuk meningkatkan mutu penelitian, mencakup proses dan hasil yang diperoleh, (2) untuk meningkatkan diversifikasi penelitian mencakup penelitian akademik, penelitian pengembangan, penelitian kebijakan dan penelitian aksi, dan (3) untuk meningkatkan manfaat hasil penelitian, mencakup pengembangan ilmu dan penunjang kemajuan masyarakat Indonesia.

Dalam proses peningkatan penelitian perlu kesungguhan dan keberanian berbagai pihak, terutama pelaksana, pengelola penelitian, dan pengelola untuk melakukan perubahan mendasar terhadap paradigm penelitian yang digunakan adalah:

- a. Memanfaatkan ilmu bantu (penunjang) untuk memahami, mendeskripsikan dan menjelaskan subjek penelitian dengan memanfaatkan kelengkapan unsur informasi dan unsur metodologi dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Keberadaan ilmu bantu tersebut diharapkan menjadi sesuatu yang hidup dan dinamis.
- b. Mereformasi posisi beberapa ilmu bantu, mulai dari pengajaran hingga pengembangannya. Karena itu, dosen dituntut memiliki kemampuan untuk mengembangkan ilmu bantu tersebut untuk mengubah wajah pemahaman ajaran Islam yang menyentuh realitas kehidupan sosial yang berdimensi kekinian dan kedisinian.
- c. Mengkonstruksi kajian Islam di lingkungan UIN, terutama pada jenjang pendidikan pascasarjana. Hal ini dilakukan untuk menuju relativisasi ilmu agama Islam, yang sekaligus mereposisi ajaran Islam agar membumi dan menjadi pegangan dalam kehidupan di dunia.
- d. Mengembangkan berbagai disiplin dan bidang ilmu agama Islam yang berorientasi hanya untuk akhirat menuju kepada dunia yang realistik dan empirik. Untuk itu UIN kiranya mampu menjadikan ilmu bantu sebagai instrumen pengembangan ilmu agama

Islam, sehingga mampu memberi jawaban terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

5. Pengembangan Bidang Pengabdian Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat (PKM) memiliki banyak fungsi bagi civitas akademika UIN, beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. PKM merupakan corong civitas akademika untuk memperkenalkan UIN kepada masyarakat.
- b. PKM merupakan media bagi UIN dalam transfer pengetahuan kepada masyarakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan.
- c. PKM berfungsi sebagai laboratorium bagi mahasiswa untuk melatih diri dan memantapkan pengetahuan dan keahliannya agar benar-benar berguna bagi kehidupan mereka ke depan.
- d. PKM menjadi wadah pembinaan karakter mahasiswa agar terbiasa beradaptasi dengan masyarakat dalam interaksi yang wajar dalam proses transfer pengetahuan dan teknologi.
- e. PKM menjadi media pematangan teori-teori dan metode-metode pemberdayaan masyarakat yang telah dirancang secara akademis, agar dapat dipublikasikan untuk dimanfaatkan oleh pihak lain yang berminat.
- f. PKM merupakan cara alternatif untuk memperoleh umpan balik dan masukan bagi UIN dalam rangka peningkatan mutu akademik dan perbaikan pola pelaksanaan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut maka pola pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan UIN tidak dapat dipisahkan dari tridharma perguruan tinggi, dan secara holistik berkaitan pula dengan konstruk epistemologi, paradigma dan visi UIN yang sudah ditetapkan. Selain itu, kegiatan pengabdian masyarakat berkait erat dengan kegiatan pendidikan dan penelitian.

Secara spesifik tujuan PKM yang dilakukan diharapkan akan tercapai beberapa hal sebagai berikut:

- a. Melalui penyelenggaraan PKM menuju terbentuknya masyarakat belajar yang dinamis, inovatif, kreatif sehingga siap dan mampu mengantisipasi dampak perubahan ke arah yang lebih baik sesuai dengan nilai sosial dan budaya yang berlaku.

- b. Mewujudkan peningkatan keterkaitan tridharma perguruan tinggi dalam rangka peningkatan mutu akademik dan relevansi pengabdian pada masyarakat dengan pendidikan dan penelitian.
- c. Memperoleh umpan balik dan masukan bagi perguruan tinggi dalam rangka peningkatan mutu akademik dan relevansi pengabdian masyarakat dengan pendidikan dan penelitian sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan.
- d. Meningkatkan pemanfaatan pemberdayaan masyarakat dalam menerapkan hasil pendidikan dan penelitian untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat dalam mencapai hasil optimal dari misi perguruan tinggi.

Selanjutnya berkaitan dengan bentuk kegiatan PKM yang dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Perintisan.

Kegiatan perintisan merupakan kegiatan penerapan dan pematangan konsep-konsep atau metode yang baru dirumuskan secara akademis. Konsep atau metode tersebut merupakan hasil penelitian atau eksperimen yang sudah diujicobakan beberapa kali dalam proses penelitian.

- b. Penunjang.

Kegiatan penunjang merupakan kegiatan yang menunjang berbagai kegiatan pihak lain dengan tujuan mempercepat dan meningkatkan kualitas jalannya proses pembangunan serta keberhasilan pencapaian tujuan-tujuannya. Peran yang harus ditumbuhkembangkan adalah menambah jumlah tenaga kerja yang sudah ada. Kegiatan penunjang ini terdapat dua jenis yakni:

- Komplementer.

Kegiatan PKM yang hasilnya menunjang keberhasilan kegiatan yang dilakukan bersama-sama pihak lain. Misalnya partisipasi pakar dalam kegiatan masyarakat ekonomis syariah, sebagai pakar dalam lembaga pendidikan dan lain-lain.

- Suplementer.

Kegiatan PKM yang di dalam prosesnya memperkuat atau meningkatkan kualitas jalannya proses yang dilakukan pihak lain, meskipun dalam pelaksanaannya masing-masing berjalan sendiri-sendiri.

C. SMP Terbuka

1. Historikal SMP Terbuka.

Pada masa Pelita II, pemerintah telah menetapkan kebijakan dalam pembangunan pendidikan yang salah satunya adalah memperluas kesempatan belajar bagi usia 7 – 12 tahun. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut pada tahun 1974 keluarlah Inpres Nomor 10 yang salah satu diantaranya adalah pembangunan gedung-gedung SD Inpres secara besar-besaran yang dampaknya menimbulkan permasalahan baru untuk di tamping di tingkat SMP.

Melalui rapat kerja nasional tahun 1977 di Cipayung Bogor diputuskan beberapa alternatif pemecahan yaitu: (1) mengoptimalkan SMP yang ada, (2) penambahan jumlah SMP dengan membangun SMP baru, (3) membuka kursus-kursu ketrampilan, dan (4) membuka subsistem pendidikan tingkat SMP yang disebut dengan SMP terbuka.

SMP terbuka mulai dirintis pada tahun ajaran 1979-1980 di lima lokasi yaitu Kalianda-Lampung Selatan, Plumbon-Jawa Barat, Adiwerna-Jawa Tengah, Kalisat-Jawa Timur, dan Terara-NTB. Kelima lokasi SMP terbuka tersebut diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daed Joesoef secara simbolik pada tanggal 24 Juli 1979 di SMP terbuka Adiwerna Jawa Tengah. Namun demikian sampai pada tahun 1989-1990 jumlah lokasi SMP terbuka belum bertambah.

Pada awal Pelita V, pada tahun 1989-1990, SMP terbuka mulai dilirik kembali. Jumlah SMP terbuka mulai dipikirkan untuk dikembangkan lebih banyak lagi. Pada tahun 1990-1991, lokasi SMP terbuka bertambah 3 lokasi yaitu SMP terbuka Pujut di Lombok Tengah, SMP terbuka Surabaya dan Malang di Jawa Timur dan pada akhir Pelita V berjumlah 34 lokasi.

Pada bulan Mei 1994, Presiden RI waktu itu mencanangkan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun. Sejak itu sistem SMP terbuka dianggap sebagai salah satu pola yang dapat menopang keberhasilan wajib belajar tersebut, sehingga SMP terbuka dikembangkan secara besar-besaran. Hal ini ditambah lagi adanya kebijakan pemerintah bahwa wajib belajar harus dapat dituntaskan dalam 10 tahun yang semula direncanakan tuntas dalam 15 tahun.

Pada awal tahun 1996-1997 SMP terbuka yang telah beroperasi berjumlah 956 lokasi, tahun 1997-1998 bertambah lagi sebanyak 1.417 lokasi, dan akhir Pelita VI berjumlah 3.834 lokasi dengan jumlah siswa sekitar 350.000 orang. Sejak tahun 2000 lokasi SMP terbuka didata dan diverifikasi ulang dan diperoleh data jumlah SMP terbuka yang masih beroperasi sebanyak 2.870 lokasi dengan jumlah siswa sebanyak 232.395 orang.

2. Tujuan dan Sasaran SMP Terbuka

Tujuan SMP terbuka adalah sebagai salah satu upaya atau subsistem pada jenjang SMP untuk membantu lulusan SD-MI yang karena faktor sosial, ekonomis, geografis, waktu dan lain-lain tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP regular. Sebagai subsistem pendidikan pada jenjang SMP, tujuan institusional SMP terbuka adalah:

- a. Memberikan bekal kemampuan dasar yang merupakan perluasan serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di sekolah dasar yang bermanfaat bagi siswa untuk mengembangkan kehidupannya secara pribadi, anggota masyarakat dan warga negara sesuai dengan tingkat perkembangannya.
- b. Mempersiapkan siswa untuk hidup dalam masyarakat dan atau mengikuti pendidikan menengah.

Merujuk kepada tujuan pendirian SMP terbuka di atas, maka dengan sasaran dari SMP terbuka adalah: (1) siswa yang tidak dapat ditampung di SMP regular, (2) siswa SMP yang putus sekolah, (3) anak-anak di daerah terpencil dan terisolasi yang tidak ada SMP di sekitarnya, (4) anak-anak dari keluarga tidak mampu yang memaksa mereka tidak sekolah karena membantu orang tua untuk mencari nafkah.

3. Karakteristik SMP terbuka

Miarso (2004:239) memaparkan karakteristik SMP terbuka sebagai berikut:

- a. Siswanya lebih banyak belajar mandiri.
- b. Gurunya berbagi peran dengan orang (narasumber) lain, baik yang ada di sekitar lingkungan siswa, maupun yang terpisah jauh.
- c. Sumber belajarnya bervariasi, dengan bentuk utama bahan yang dikemas untuk belajar mandiri.
- d. Mempertimbangkan kondisi dan karakteristik siswa dalam penyelenggaraan pembelajaran.

- e. Kegiatan pembelajaran tidak terjadwal pada tempat dan waktu yang ketat.
- f. Memanfaatkan lingkungan tempat tinggal anak didik sebagai sumber belajar.

Menambahkan penjelasan di atas terkait dengan karakteristik SMP terbuka dijelaskan oleh Subandijah (1993:90) sebagai berikut:

- a. Terbuka bagi peserta didik tanpa pembatasan umur dan tanpa syarat-syarat akademik.
- b. Terbuka dalam memilih program belajar untuk mencapai ijazah formal untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jangka pendek yang bersifat praktis, incidental dan perorangan.
- c. Terbuka dalam proses pembelajaran yaitu tidak selalu diselenggarakan di ruang kelas secara tatap muka, dapat juga melalui media seperti radiop, media cetak, kaset, model dan gambar-gambar.
- d. Terbuka dalam keluar masuk sekolah sesuai dengan waktu yang tersedia bagi peserta didik.
- e. Terbuka dalam pengelolaan sekolah, sekolah dikelola oleh pegawai negeri dan orang lain yang diperlukan partisipasinya, misalnya pemimpin masyarakat, orang tua peserta didik dan pamong pemerintah setempat.

4. Komponen SMP terbuka

Komponen SMP terbuka sama dengan SMP regular, perbedaannya hanya terletak pada strategi pembelajarannya. Komponen SMP terbuka meliputi siswa, kurikulum, dan proses pembelajaran, bahan dan fasilitas belajar, tenaga kependidikan dan penilaian hasil belajar (Ibrahim, 2004:283).

a. Siswa.

Calon siswa SMP terbuka diutamakan peserta didik yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: (1) lulusan SD-MI atau setara lainnya, (2) berusia maksimal 18 tahun, dan (3) anak putus sekolah SMP-MTs di kelas 1 yang masih ingin melanjutkan pendidikannya.

b. Kurikulum.

SMP terbuka menggunakan kurikulum SMP yang berlaku. Dari kurikulum tersebut dikembangkan menjadi garis besar isi program media (GBIPM) sebagai acuan untuk mengembangkan berbagai

macam media belajar pada SMP terbuka. GBIPM ini sering disebut sebagai kurikulum SMP terbuka.

c. Proses pembelajaran.

Proses pembelajaran di SMP terbuka dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu belajar mandiri dan atau berkelompok di tempat kegiatan belajar (TKB) dan tutorial tatap muka di SMP induk atau ditempat lain yang telah disepakati.

Kegiatan belajar di TKB dilaksanakan 4-5 hari dalam seminggu, minimal 180 menit perharinya. Kegiatan belajar di TKB dibimbing dan diarahkan oleh seorang guru yang disebut guru pamong. Tugas guru pamong bukan hanya mengajar, tetapi bertugas untuk mengelola, mengarahkan, membimbing dan memotivasi siswa agar belajar.

Kegiatan belajar tutorial tatap muka lebih diutamakan untuk: (1) memecahkan kesulitan-kesulitan siswa pada waktu belajar mandiri dan atau berkelompok di TKB, dan (2) melaksanakan kegiatan belajar yang memerlukan peralatan yang tidak mungkin dilakukan di TKB seperti praktikum IPA, upacara bendera, praktek keterampilan dan lain-lain.

Bagi siswa SMP terbuka yang melaksanakan kegiatan belajar melalui tatap muka di luar SMP induk, kegiatan praktek IPA dan upacara bendera hamper sama sekali tidak dilaksanakan. Pada kegiatan belajar tatap muka diadakan oleh masing-masing guru mata pelajaran yang disebut guru bina. Kegiatan belajar ini berlangsung 1-2 hari dalam seminggu, minimal 6 x 45 menit per-hari.

d. Bahan dan fasilitas belajar.

Bahan belajar utama SMP terbuka adalah modul cetak. Modul ini disusun secara sederhana supaya dapat dipelajari secara mandiri oleh siswa. Dengan menggunakan modul siswa dapat memantau kemajuan belajarnya sendiri. Modul cetak ini ditunjang pula dengan media audiovisual yang berupa program radio, kaset audio, program TV, kaset video, dan lain-lain.

SMP terbuka pada dasarnya menggunakan fasilitas belajar yang ada pada SMP induk atau yang sudah ada seperti ruang belajar, perpustakaan, laboratorium, ruang keterampilan, lapangan olahraga, alat-alat kesenian serta ketrampilan. Semua ruang kelas SMP induk dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh SMP terbuka. Masing-masing SMP induk dari SMP terbuka telah dibangun sebuah sumber belajar yang disebut sangar belajar, di samping perpustakaan, laboratorium, dan ruang keterampilan. Sebagai TKB, SMP terbuka memanfaatkan gedung SD, balai desa, rumah penduduk, serambi mejadi, pesantren dan atau balai pertemuan warga.

e. Tenaga kependidikan.

SMP terbuka mempunyai tenaga kependidikan yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran (guru bina), guru bimbingan dan penyuluhan, guru pamong, guru pamong khusus, dan tenaga tata usaha. Kepala sekolah SMP induk otomatis menjadi kepala SMP terbuka dibantu oleh seorang wakil kepala sekolah yang diangkat dari salah satu guru senior pada SMP tersebut.

Untuk pelaksanaan pembelajaran melalui tatap muka, SMP terbuka mempunyai sejumlah guru bina yang dianggap dari guru mata pelajaran yang ada di SMP tersebut. Guru bina setiap SMP terbuka minimal setiap mata pelajaran dibina oleh satu orang guru bina. Beberapa orang guru bina dapat merangka menjadi wali kelas siswa SMP terbuka.

Guru bimbingan dan penyuluhan dapat dirangkap oleh guru bimbingan dan penyuluhan SMP induknya. Begitu pula tenaga tata usaha. Guru pamong SMP terbuka lebih banyak dari guru SD atau kepala SD. Ada beberapa TKB di beberapa SMP terbuka mengangkat guru pamong dari pensiunan, kepala desa, tokoh masyarakat, atau tokoh agama.

Sedangkan guru pamong khusus adalah tokoh masyarakat yang mempunyai keahlian khusus untuk membimbing siswa dalam mempelajari pendidikan agama, kerajinan dan kesenian, pendidikan jasmani, keterampilan dan muatan lokal.

f. Penilaian hasil belajar.

Pada SMP terbuka dikenal berbagai macam penilaian yaitu tes akhir modul, tes akhir unit (akhir beberapa modul), akhir catur wulan, dan ujian akhir. Tes akhir modul dilakukan apabila siswa telah menyelesaikan suatu modul. Siswa yang memperoleh nilai tes akhir modul minimal 65 atau 65% diperbolehkan untuk melanjutkan ke modul berikutnya. Sebaliknya siswa yang belum memperoleh nilai tes akhir modul 65 atau 65% dianjurkan untuk mempelajari kembali materi modul yang bersangkutan.

Setelah siswa menyelesaikan beberapa modul yang merupakan satu unit, maka diadakan tes akhir unit, sedangkan pada setiap akhir caturwulan diadakan tes akhir caturwulan. Untuk menentukan kelulusan SMP terbuka dilaksanakan ujian akhir yang biasa disebut dengan ujian akhir nasional (UAN).

Pada pelaksanaan tes akhir catur wulan dan ujian akhir, siswa SMP terbuka digabung dengan siswa SMP induk. Bagi siswa SMP terbuka yang lulus ujian diberikan surat tanda tamat belajar (STTB) yang sama dan diperlakukan sama dengan STTB siswa SMP regular.

BAB VII

INOVASI KURIKULUM

A. Historikal Kurikulum di Indonesia

Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diberikan oleh lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Penyusunan perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut. Lama waktu dalam satu kurikulum biasanya disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari sistem pendidikan yang dilaksanakan. Kurikulum ini dimaksudkan untuk dapat mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuannya.

Dalam perjalanan sejarah Republik ini sejak kemerdekaan tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional baik SD, SMP, maupun SMA telah mengalami perubahan: (1) kurikulum tahun 1947, (2) kurikulum tahun 1952, (3) Kurikulum tahun 1964, (4) kurikulum tahun 1968, (5) Kurikulum tahun 1975, (6) kurikulum tahun 1994, (7) kurikulum tahun 2004, (8) kurikulum 2006, dan (9) kurikulum tahun 2013.

Perubahan kurikulum tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan UUD 1945, perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya.

1. Kurikulum tahun 1947

Kurikulum tahun 1947 dikenal dengan istilah rencana pelajaran. Kurikulum ini lahir setelah pada bulan Desember 1945 dibentuklah Panitia Penyelidikan Pendidikan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan atau PP dan K (Idi, 2007:19). Kurikulum ini

mengantikan kurikulum yang dibuat oleh Belanda dan Jepang semasa penjajahan dengan periodenya adalah sejak tahun 1947–1952.

2. Kurikulum tahun 1952.

Kurikulum tahun 1952 dikenal dengan istilah rencana pengajaran terurai. Periode kurikulum 1952–1964, di masa ini pendidikan di Indonesia mengalami penyempurnaan. Tujuan pendidikan dan pengajaran dirumuskan yaitu membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.

Mata pelajaran yang ditekankan pada kurikulum ini adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Berhitung, Ilmu Alam, Ilmu Hayat, Ilmu Bumi dan Sejarah. Dalam satu tahun pelajaran terdapat 8 (delapan) bagian untuk masing-masing kelas. Guru dalam setiap kelasnya sudah memiliki pedoman mengenai hal-hal yang perlu diajarkan berdasarkan waktu yang telah ditentukan selama delapan bulan tersebut.

Selain mata pelajaran di atas maka dalam masa penerapan kurikulum ini dikenal juga Sapta Usaha Tama yaitu; (1) penertiban aparatur dan usaha-usaha kementerian PP dan K, (2) menggiatkan kesenian dan olahraga, (3) mengharuskan penabung, (4) mewajibkan usaha-usaha koperasi, (5) mengadakan kelas masyarakat, dan (6) membentuk regu kerja pada SLA dan universitas.

3. Kurikulum tahun 1964.

Kurikulum tahun 1964 ini merupakan perbaikan kurikulum sebelumnya yaitu ketika Direktorat Pendidikan Dasar/Prasekolah, Departemen PP dan K menerbitkan buku yang dinamakan Rencana Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar. Tujuan pendidikan pada masa ini adalah membentuk manusia Pancasila dan Manipol/Usdek yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual.

Sistem pendidikan pada masa ini dinamakan Sistem Panca Wardana atau sistem 5 (lima) aspek perkembangan yaitu: (1) perkembangan moral, (2) perkembangan inteligensi, (3) perkembangan emosional artistik, (4) perkembangan keprigelan, dan (5) perkembangan jasmaniah.

Kelima Wardana tersebut diuraikan menjadi beberapa bahan pelajaran yakni: (1) perkembangan moral; pendidikan kemasyarakatan, pendidikan agama/budi pekerti, (2) perkembangan inteligensi; bahasa Indonesia, bahasa daerah, berhitung dan pengetahuan alamiah, (3) perkembangan emosional artistik; seni sastra/musik, seni lukis/rupa, seni tari dan seni sastra/drama, (4) perkembangan keprigelan; pertanian/ peternakan, industri kecil/pekerjaan tangan, koperasi/tabungan dan keprogilan-keprigelan yang lain, dan (5) perkembangan jasmaniah; pendidikan jasmaniah, pendidikan kesehatan.

Di samping mata pelajaran Wardana, dikenal juga Krida yang berarti hari untuk berlatih menurut bakat dan minat siswa, misalnya kesenian, olahraga, lapangan kebudayaan dan permainan. Kesemuanya itu masih tetap dalam bimbingan guru.

4. Kurikulum tahun 1968.

Kurikulum tahun 1968 dikeluarkan oleh Departemen P dan K dengan menerbitkan Pedoman Kurikulum Sekolah Dasar yang dinamakan kurikulum SD sebagai reaksi terhadap Rencana Pendidikan TK dan SD yang sebelumnya berbau politik orde lama (ORLA). Perubahan-perubahan terletak pada landasan pendidikan yang berdasarkan Falsafah Negara Pancasila. Kurikulum ini berlaku mulai tahun 1968 – 1975.

Tujuan pendidikan nasional pada masa ini adalah membentuk manusia Pancasilais sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan di atas maka isi pendidikan adalah: (1) mempertinggi mental budi pekerti dan memperkuat keyakinan agama, (2) mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, dan (3) membina dan mempertinggi fisik yang kuat dan sehat.

Kurikulum tahun 1968 untuk sekolah dasar dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok besar yaitu:

- a. Kelompok pembinaan Pancasila yaitu: Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah dan Olahraga.
- b. Kelompok pembinaan pengetahuan dasar yaitu: Berhitung, Ilmu Pengetahuan Alam, Pendidikan Kesenian, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga.
- c. Kelompok kecakapan khusus yaitu: Kejuruan Agraria (Pertanian, Peternakan, Perikanan), Kejuruan Teknik

(Pekerjaan Tangan/ Perbekalan), Kejuruan
Ketatalaksanaan/Jasa (Koperasi, Tabungan).

Semua mata pelajaran diberikan kepada siswa sejak kelas I, kecuali Bahasa Indonesia yang baru diberikan pada kelas II sebagai pengganti Bahasa Daerah yang diajarkan kelas sebelumnya.

5. Kurikulum tahun 1975.

Pada masa kurikulum ini, tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan agar menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun diri sendiri dan bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Orientasi kurikulum dilakukan dengan pendekatan bidang studi program yang terdiri dari program umum, akademik/kejuruan, dan pendidikan keterampilan. Sedangkan orientasi pelajaran adalah keseimbangan antara kognitif, keterampilan, sikap, antara pelajaran teori dan praktek, menunjang akan tercapainya tujuan pendidikan dan pengajaran.

Metodologi pembelajaran pada kurikulum 1975 yaitu: (1) pendekatan prosedur pengembangan sistem instruksional (PPSI) dan model satuan pelajaran, (2) menggunakan konsep cara belajar siswa aktif (CBSA), (3) desain kurikulum berorientasi pada tujuan, efisiensi dan efektivitas, relevansi dengan kebutuhan, keluwesan dan keadaan, pendidikan seumur hidup, dan (4) penilaian dilakukan melalui penilaian formatif, sumatif, tes hasil belajar (THB), evaluasi belajar tahap akhir (EBTA) dan evaluasi belajar tahap akhir nasional (EBTANAS).

PPSI merupakan prosedur atau cara di dalam mengembangkan program pembelajaran dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) merumuskan tujuan-tujuan instruksional khusus yang ingin dicapai, (2) mengembangkan alat evaluasi, (3) menetapkan kegiatan belajar/materi pelajaran, (4) merencanakan program kegiatan, dan (5) melaksanakan program (Soetopo dan Soemanto, 1986:147).

6. Kurikulum tahun 1994.

Kurikulum 1994 berbasis pada pencapaian tujuan yaitu rumusan tujuan yang bersifat operasional menjadi target pencapaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirinci sedetail mungkin dan filsafat yang melandasinya adalah behaviorisme. Dalam kurikulum 1994 rumusan tujuan tercermin dalam garis besar pokok pengajaran (GBPP) setiap bidang studi yang berisi daftar tujuan yang ingin dicapai dan materi yang akan diajarkan (Nurhadi, 2004:27).

Kurikulum 1994 untuk tingkat dasar merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan dasar dan isi kurikulum pendidikan dasar wajib memuat sekurang-kurangnya bahan kajian pelajaran: Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Membaca dan Menulis, Matematika, Pengantar Sains dan Teknologi, Ilmu Bumi, Sejarah Nasional dan Sejarah Umum, Kerajinan Tangan dan Kesenian, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Menggambar dan Bahasa Inggris.

Isi kurikulum 1994 untuk tingkat sekolah menengah merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan menengah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional di mana isi kurikulumnya wajib memuat bahan kajian dan matapelajaran mengenai: Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan. Di samping itu kurikulum juga dapat menjabarkan dan menambahkan mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas sekolah menengah yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional.

Selanjutnya mengenai penilaian yang diberlakukan dalam kurikulum 1994 adalah penilaian yang dilakukan secara bertahap, berkesinambungan dan bersifat terbuka dalam memperoleh keterangan mengenai kegiatan dan kemajuan belajar siswa.

Secara spesifik Mulyasa (2004:166) memaparkan karakteristik kurikulum 1994 sebagai berikut:

- a. Menggunakan pendekatan penguasaan ilmu pengetahuan, yang menekankan pada isi atau materi berupa pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi yang diambil dari bidang-bidang ilmu pengetahuan.

- b. Standar akademi yang diterapkan secara seragam bagi peserta didik.
- c. Berbasis konten, sehingga peserta didik dipandang sebagai kertas putih yang perlu ditulis dengan sejumlah ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*).
- d. Pengembangan kurikulum dilalukan secara sentralisasi sehingga kementerian pendidikan dan kebudayaan memonopoli pengembangan ide dan konsepsi kurikulum.
- e. Materi yang dikembangkan dan diajarkan di sekolah seringkali tidak sesuai dengan potensi sekolah, kebutuhan dan kemampuan peserta didik, serta kebutuhan masyarakat sekitar sekolah.
- f. Guru merupakan kurikulum yang menentukan segala sesuatu yang terjadi di dalam kelas.
- g. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap dikembangkan melalui latihan seperti latihan mengerjakan soal.
- h. Pembelajaran cenderung hanya dilakukan di dalam kelas atau dibatasi oleh dinding kelas.
- i. Evaluasi nasional yang tidak dapat menyentuh aspek-aspek kepribadian peserta didik.

7. Kurikulum tahun 2004.

Kurikulum tahun 2004 dikenal dengan istilah kurikulum berbasis kompetensi (KBK). KBK dapat diartikan sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-tugas dengan standar performansi tertentu sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu (Mulyasa, 2004:39).

KBK memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) menekankan pada pencapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, (2) berorientasi pada hasil akhir dan keberagaman, (3) penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi, (4) sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif, dan (5) penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi.

Di samping karakteristik di atas, Mulyasa (2004:43) menjelaskan karakteristik KBK adalah:

- a. Sistem belajar dengan modul.

Sistem pembelajaran memiliki keunggulan yaitu: (1) berfokus pada kemampuan individual peserta didik,

karena pada hakekatnya mereka memiliki kemampuan untuk bekerja sendiri dan lebih bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya, (2) adanya kontrol terhadap hasil belajar melalui penggunaan standar kompetensi dalam setiap model yang harus dicapai oleh peserta didik, dan (3) relevansi kurikulum ditunjukkan dengan adanya tujuan dan cara pencapaiannya, sehingga peserta didik dapat mengetahui keterkaitan antara pembelajaran dan hasil yang akan diperoleh.

Komponen yang terdapat dalam modul yaitu lembar kegiatan peserta didik, lembar kerja, kunci lembar kerja, lembar sosial, lembar jawaban dan kunci jawaban.

b. Menggunakan keseluruhan sumber belajar.

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam proses pembelajaran.

Sumber belajar secara garis besar dapat dikelompokkan atas:

1. Manusia yaitu orang yang menyampaikan pesan secara langsung seperti guru dan narasumber lainnya.
2. Bahan yaitu sesuatu yang mengandung pesan pembelajaran baik yang diniati secara khusus yang biasanya disebut media pembelajaran maupun bahan yang bersifat umum yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan belajar.
3. Lingkungan yaitu ruang dan tempat di mana sumber-sumber dapat berinteraksi dengan peserta didik. Ruang dan tempat yang dirancang secara sengaja untuk kepentingan belajar misalnya ruang kelas, perpustakaan, laboratorium. Di samping itu ada pula ruang dan tempat yang dirancang secara khusus untuk kepentingan belajar namun dapat dimanfaatkan misalnya museum, kebun binatang, kebun raya, candi dan sbagainya.
4. Alat dan peralatan yaitu sumber belajar untuk produksi dan atau memainkan sumber-sumber lain.
5. Aktivitas yaitu sumber belajar yang biasanya merupakan kombinasi antara suatu teknik dengan sumber lain untuk memudahkan belajar.

c. Pengalaman lapangan.

KBK menekankan pada pengalaman lapangan untuk mengakrabkan hubungan antara guru dengan peserta didik. Pengalaman lapangan juga dapat secara sistematis melibatkan masyarakat dalam pengembangan program, aktivitas, dan evaluasi pembelajaran.

d. Strategi individual dan personal.

KBK mengusahakan strategi belajar individual dan personal. Belajar individual adalah pembelajaran yang dilakukan berdasarkan tempo belajar peserta didik. Sedangkan belajar personal adalah interaksi edukatif berdasarkan keunikan peserta didik seperti minat, bakat dan kemampuan (personalisasi).

e. Kemudahan belajar.

Kemudahan belajar dalam KBK diberikan melalui kombinasi antara pembelajaran individual personal dengan pengalaman lapangan, dan pembelajaran secara tim (*team teaching*). Belajar dilakukan melalui berbagai media komunikasi yang didayagunakan secara optimal untuk memberikan kemudahan belajar peserta didik dalam menguasai dan memahami kompetensi tertentu.

f. Belajar tuntas.

Belajar tuntas diterapkan dalam KBK sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan terutama dalam level mikro yaitu mengembangkan individu dalam proses pembelajaran di kelas. Dalam belajar tuntas peserta didik baru dapat melangkah pada pelajaran berikutnya setelah ia benar-benar menguasai bahan pelajaran sebelumnya sesuai dengan patokan yang ditetapkan.

Di samping itu pelaksanaan tes dilakukan secara teratur untuk memperoleh balikan terhadap bahan yang diajarkan sebagai alat untuk mendiagnosa kemajuan peserta didik, bagi siswa yang gagal atau belum mencapai taraf penguasaan penuh maka diberikan pelayanan bimbingan melalui pengajaran korektif dalam menuntaskan pemahaman siswa.

Selanjutnya mengenai prinsip-prinsip pengembangan KBK adalah: (1) keimanan, nilai, dan budi pekerti, (2) penguatan integritas nasional, (3) keseimbangan etika, logika dan estetika dan kinestetika, (4) kesamaan memperoleh kesempatan, (5) abad pengetahuan dan teknologi informasi, (6) pengembangan keterampilan untuk hidup, (7) belajar sepanjang hayat, (8) berpusat pada anak

dengan penilaian yang berkelanjutan dan komprehensif, dan (9) pendekatan menyeluruh dan kemitraan.

Pengembangan struktur KBK dilakukan melalui:

a. Identifikasi kompetensi.

Proses identifikasi kompetensi dilakukan dengan mencari berbagai sumber yaitu: daftar yang ada, penjabaran bidang studi, penjabaran mata pelajaran, analisis taksonomi, masukan dari profesi, membangun teori, masukan peserta didik dan masyarakat, dan analisis tugas.

b. Struktur kurikulum.

Struktur KBK dikembangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional mencakup:

1. Kurikulum Taman Kanak-Kanak dan Raudhatul Athfal, menekankan pada pengembangan moral dan nilai-nilai agama, pengembangan sosial dan emosional, dan pengembangan kemampuan dasar.
2. Kurikulum Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah, meliputi pendidikan agama, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sains, pengetahuan sosial, kesenian, keterampilan, dan pendidikan jasmani.
3. Kurikulum Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, meliputi pendidikan agama kewarganegaraan, bahasa dan sastra Indonesia, matematika, sains, pengetahuan sosial, bahasa Inggris, pendidikan jasmani, kesenian, keterampilan, dan teknologi informasi dan komunikasi.
4. Kurikulum Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah, meliputi struktur kurikulum dengan pengkhususan program studi, dan struktur kurikulum dengan non pengkhususan.

c. Deskripsi rumpun mata pelajaran.

1. Pendidikan agama mengembangkan kemampuan siswa untuk memperteguh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia/berbudi pekerti luhur dan menghormati penganut agama lain.
2. Kewarganegaraan memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, kritis, kreatif, terampil, dan berkarakter

sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

3. Bahasa Indonesia memfokuskan pada kemampuan berkomunikasi (lisan dan tulis) sebagai alat untuk mempelajari rumpun pelajaran lain, berpikir kritis dalam berbagai aspek kehidupan serta mengembangkan sikap menghargai bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional dan apresiatif terhadap karya sastra Indonesia.
4. Matematika berfokus pada menumbuhkembangkan kemampuan bernalar yaitu berpikir sistematis, logis dan kritis dalam mengkomunikasikan gagasan atau dalam pemecahan masalah.
5. Sains mempelajari alam yang mencakup proses perolehan pengetahuan melalui pengamatan, penggalan, penelitian dan penyampaian informasi dan produk (pengetahuan ilmiah dan terapannya) yang diperoleh melalui berpikir dan bekerja ilmiah.
6. Ilmu sosial mengkaji interaksi antara manusia dan masyarakat serta lingkungannya melalui konsep-konsep geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi dan antropologi.
7. Kesenian menggambarkan semua bentuk aktivitas dan cita rasa keindahan yang meliputi kegiatan berekspresi, bereksplorasi, berkreasi dan apresiasi dalam bahasa rupa, bunti, gerak dan peran.
8. Keterampilan berkaitan dengan mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap untuk menghasilkan produk guna memberikan pengalaman kepada siswa agar menjadi inovatif, adaptif, dan kreatif, hasil belajar ini melalui proses menggambar, merancang, membuat, mengkomunikasikan dan mengevaluasi.
9. Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan melalui penyediaan pengalaman belajar kepada peserta didik berupa aktivitas jasmani, bermain, dan atau olahraga yang direncanakan secara sistematis dengan memperhatikan tahap pertumbuhan dan perkembangan guna merangsang perkembangan fisik, keterampilan berpikir, emosional, sosial dan moral. Pembekalan pengalaman belajar diarahkan untuk membina, dan sekaligus membentuk gaya hidup sehat dan aktif di sepanjang hayat.

10. Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lain berkaitan dengan mengembangkan ketrampilan berkomunikasi lisan dan tulisan untuk memahami dan mengungkapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya.

8. Kurikulum tahun 2006.

Kurikulum tahun 2006 dikenal dengan istilah kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus.

Secara umum tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian wewenang (otonomi) kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum (Mulyasa, 2006:22). sedangkan secara khusus tujuan diterapkannya KTSP adalah: (1) meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia, (2) meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama, dan (3) meningkatkan kompetisi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai.

KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Penyusunan KTSP untuk pendidikan khusus dikoordinasi dan disupervisi oleh dinas pendidikan provinsi, dan berpedoman pada SI dan SKL serta panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh badan standar nasional pendidikan (BSNP).

KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya, (2) beragam dan terpadu, (3) tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, (4) relevan dengan kebutuhan kehidupan, (5)

menyeluruh dan berkesinambungan, (6) belajar sepanjang hayat, dan (7) seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

KTSP disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia, (2) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik, (3) keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan, (4) tuntutan pembangunan daerah dan nasional, (5) tuntutan dunia kerja, (6) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, (7) agama, (8) dinamika perkembangan global, (9) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan, (10) kondisi sosial budaya masyarakat setempat, (11) kesetaraan Jender, (12) karakteristik satuan pendidikan.

Komponen yang terdapat dalam KTSP adalah: (1) tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, dan (2) struktur dan muatan KTSP terdiri dari: (a) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan, (b) muatan lokal, (3) kegiatan pengembangan diri, (4) pengaturan beban belajar, (5) ketuntasan belajar, (6) kenaikan kelas dan kelulusan, (7) penjurusan, (8) pendidikan kecakapan hidup, (9) pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global.

9. Kurikulum tahun 2103.

Kurikulum ini merupakan inovasi terkini terkait dengan kurikulum yang diterapkan di Indonesia. Pembahasan terkait dengan kurikulum 2013 dibahas selanjutnya.

B. Kurikulum 2013

1. Rasionalitas

Rasionalitas yang menjadikan dasar untuk melakukan inovasi dalam kurikulum, dalam hal ini kurikulum 2013 adalah faktor-faktor terkait: (a) tantangan masa depan, (b) kompetensi masa depan, (c) persepsi masyarakat, dan (d) fenomena negatif yang mengemuka.

Tantangan masa depan meliputi: (1) globalisasi: WTO, ASEAN Community, APEC, CAFTA, (2) masalah lingkungan hidup, (3) kemajuan teknologi informasi, (4)

konvergensi ilmu dan teknologi, (5) ekonomi berbasis pengetahuan, (6) kebangkitan industri kreatif dan budaya, (7) pergeseran kekuatan ekonomi dunia, (8) pengaruh dan imbas teknologi dan sains, (9) mutu, investasi dan transformasi pada sektor pendidikan, dan (10) hasil TIMSS dan PISA.

Survei dari *Program for International Student Assessment* (PISA) yang di tahun 2009 menempatkan Indonesia di peringkat 10 besar paling akhir dari 65 negara peserta PISA. Kriteria penilaian mencakup kemampuan kognitif dan keahlian siswa membaca, matematika, dan sains. Hampir semua siswa Indonesia ternyata cuma menguasai pelajaran sampai level 3 saja. Sementara banyak siswa negara maju maupun berkembang lainnya, menguasai pelajaran sampai level 4, 5, bahkan 6. Hasil survai lainnya dari *Trends in International Math and Science* (TIMSS) oleh Global Institute pada tahun 2007. Menurut survei ini, hanya 5 persen siswa Indonesia yang mampu mengerjakan soal berkategori tinggi yang memerlukan penalaran. Sebagai perbandingan, siswa Korea yang sanggup mengerjakannya mencapai 71 persen. Sebaliknya, 78 persen siswa Indonesia dapat mengerjakan soal berkategori rendah yang hanya memerlukan hafalan. Sementara itu, siswa Korea yang bisa mengerjakan soal semacam itu hanya 10 persen.

Kompetensi masa depan meliputi: (1) kemampuan berkomunikasi, (2) kemampuan berpikir jernih dan kritis, (3) kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, (4) kemampuan menjadi warga negara yang bertanggungjawab, (5) kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, (6) kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal, (7) memiliki minat luas dalam kehidupan, (8) memiliki kesiapan untuk bekerja, (9) memiliki kecerdasan sesuai dengan bakat/minatnya, dan (10) memiliki rasa tanggungjawab terhadap lingkungan.

Persepsi masyarakat meliputi: (1) kurikulum yang berlaku sebelumnya terlalu menitikberatkan pada aspek kognitif, (2) beban siswa terlalu berat, dan (3) kurang bermuatan karakter.

Fenomena negatif yang mengemuka meliputi: (1) perkelahian pelajar, (2) narkoba, (3) korupsi, (4) plagiarisme, (5) kecurangan dalam ujian, dan (6) gejolak masyarakat (*social unrest*).

2. Landasan Penyempurnaan Kurikulum

Terdapat empat landasan utama yang digunakan dalam penyempurnaan kurikulum 2013 yaitu: (1) landasan yuridis, (2) landasan filosofis (3) landasan teoritis, dan (4) landasan empiris.

a. Landasan Yuridis

Secara yuridis, kurikulum adalah suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis di bidang pendidikan. Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi.

b. Landasan Filosofis

Pendidikan berfungsi mengembangkan segenap potensi peserta didik “menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab (UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Oleh karena itu pengembangan kurikulum haruslah berakar pada budaya bangsa, kehidupan bangsa masa kini, dan kehidupan bangsa di masa mendatang. Pendidikan berakar pada budaya bangsa. Proses pendidikan adalah suatu proses pengembangan potensi peserta didik sehingga mereka mampu menjadi pewaris dan pengembang budaya bangsa.

Melalui pendidikan berbagai nilai dan keunggulan budaya di masa lampau diperkenalkan, dikaji, dan dikembangkan menjadi budaya dirinya, masyarakat, dan bangsa yang sesuai dengan zaman dimana peserta didik tersebut hidup dan mengembangkan diri. Kemampuan menjadi pewaris dan pengembang budaya tersebut akan dimiliki peserta didik apabila pengetahuan, kemampuan intelektual, sikap dan kebiasaan, keterampilan sosial memberikan dasar untuk secara aktif mengembangkan dirinya sebagai individu, anggota masyarakat, warganegara, dan anggota umat manusia.

c. Landasan Teoritis

Kurikulum dikembangkan atas dasar teori pendidikan dan teori pendidikan berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal hasil belajar yang berlaku untuk setiap kurikulum. Standar kualitas nasional dinyatakan sebagai standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan tersebut adalah kualitas minimal lulusan suatu jenjang atau satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan).

d. Landasan Empiris

Sebagai negara bangsa yang besar dari segi geografis, suku bangsa, potensi ekonomi, dan beragamnya kemajuan pembangunan dari satu daerah ke daerah lain, sekecil apapun ancaman disintegrasi bangsa masih tetap ada. Kurikulum harus mampu membentuk manusia Indonesia yang mampu menyeimbangkan kebutuhan individu dan masyarakat untuk memajukan jatidiri sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan kebutuhan untuk berintegrasi sebagai satu entitas bangsa Indonesia.

Kecenderungan menyelesaikan persoalan dengan kekerasan dan kasus pemaksaan kehendak sering muncul di Indonesia. Kecenderungan ini juga menimpa generasi muda, misalnya pada kasus-kasus perkelahian massal. Walaupun belum ada kajian ilmiah bahwa kekerasan tersebut bersumber dari kurikulum, namun beberapa ahli pendidikan dan tokoh masyarakat menyatakan bahwa salah satu akar masalahnya adalah implementasi kurikulum yang terlalu menekankan aspek kognitif dan keterkungkungan peserta didik di ruang belajarnya dengan kegiatan yang kurang menantang peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum perlu direorientasi dan direorganisasi terhadap beban belajar dan kegiatan pembelajaran yang dapat menjawab kebutuhan ini.

Elemen masyarakat telah memberikan kritikan, komentar, dan saran berkaitan dengan beban belajar siswa, khususnya siswa sekolah dasar. Beban belajar ini bahkan secara kasatmata terwujud pada beratnya beban buku yang harus dibawa ke sekolah. Beban belajar ini salah satunya berhulu dari banyaknya mata pelajaran yang ada di tingkat sekolah dasar. Oleh karena itu kurikulum pada tingkat sekolah dasar perlu diarahkan kepada peningkatan 3 (tiga)

kemampuan dasar, yakni baca, tulis, dan hitung serta pembentukan karakter.

Berbagai kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, manipulasi, termasuk masih adanya kecurangan di dalam Ujian Nasional menunjukkan mendesaknya upaya menumbuhkan budaya jujur dan antikorupsi melalui kegiatan pembelajaran di dalam satuan pendidikan. Maka kurikulum harus mampu memandu upaya karakterisasi nilai-nilai kejujuran pada peserta didik.

Pada saat ini, upaya pemenuhan kebutuhan manusia telah secara nyata mempengaruhi secara negatif lingkungan alam. Pencemaran, semakin berkurangnya sumber air bersih, adanya potensi rawan pangan pada berbagai belahan dunia, dan pemanasan global merupakan tantangan yang harus dihadapi generasi muda di masa kini dan di masa yang akan datang. Kurikulum seharusnya juga diarahkan untuk membangun kesadaran dan kepedulian generasi muda terhadap lingkungan alam dan menumbuhkan kemampuan untuk merumuskan pemecahan masalah secara kreatif terhadap isu-isu lingkungan dan ketahanan pangan.

3. Elemen Perubahan Kurikulum 2013

Elemen perubahan yang terdapat pada kurikulum 2013 dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya (kurikulum 2006/kurikulum KTSP), setidaknya meliputi: standar kompetensi lulus (SKL), standar isi, standar proses dan standar penilaian.

Elemen perubahan standar kompetensi lulusan pada kurikulum 2013 yaitu adanya peningkatan dan keseimbangan *soft skills* dan *hard skills* yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan.

Elemen perubahan standar isi pada kurikulum 2013 yaitu: (1) kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi matapelajaran dikembangkan dari kompetensi, (2) struktur kurikulum bersifat holistik dan integratif berfokus kepada alam, sosial dan budaya, (3) pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan sains, (4) pada satuan pendidikan dasar jumlah matapelajaran dari 10 menjadi 6, dan (5) jumlah jam bertambah 4 JP/minggu akibat perubahan pendekatan pembelajaran yang diterapkan.

Elemen perubahan standar proses pada kurikulum 2013 yaitu: (1) Standar proses yang semula terfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi dilengkapi dengan mengamati, menanya, mengolah, menalar, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta, (2) belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat, (3) guru bukan satu-satunya sumber belajar, dan (4) sikap tidak diajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan.

Elemen perubahan standar penilaian pada kurikulum 2013 yaitu: (1) penilaian berbasis kompetensi, (2) pergeseran dari penilain melalui tes yang mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil saja menuju penilaian otentik yang mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil, (3) memperkuat penilaian acuan patokan (PAP) yaitu pencapaian hasil belajar didasarkan pada posisi skor yang diperoleh siswa terhadap skor ideal (maksimal), (4) penilaian tidak hanya pada level kompetensi dasar, tetapi juga kompetensi inti dan standar kompetensi lulusan, dan (5) mendorong pemanfaatan portofolio yang dibuat siswa sebagai instrumen utama penilaian.

4. Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten/mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten/mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa.

Struktur kurikulum adalah juga merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Pengorganisasian konten dalam sistem belajar yang digunakan untuk kurikulum yang akan datang adalah sistem semester sedangkan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran berdasarkan jam pelajaran per semester.

a. Struktur Kurikulum SD/MI

Beban belajar dinyatakan dalam jam belajar setiap minggu untuk masa belajar selama satu semester. Beban belajar di SD/MI kelas I, II, dan III masing-masing 30, 32, 34 sedangkan untuk kelas IV, V, dan VI masing-masing 36 jam setiap minggu. Jam belajar SD/MI adalah 35 menit. Struktur Kurikulum SD/MI adalah sebagai berikut:

MATA PELAJARAN		ALOKASI WAKTU BELAJAR PER MINGGU					
		I	II	III	IV	V	VI
Kelompok A							
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	4	4	4	4	4	4
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	5	6	6	4	4	4
3.	Bahasa Indonesia	8	8	10	7	7	7
4.	Matematika	5	6	6	6	6	6
5.	Ilmu Pengetahuan Alam	-	-	-	3	3	3
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	-	-	-	3	3	3
Kelompok B							
1.	Seni Budaya dan Prakarya	4	4	4	5	5	5
2.	Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan	4	4	4	4	4	4
Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu		30	32	34	36	36	36

Mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya dapat Bahasa Daerah. Integrasi Kompetensi Dasar IPA dan IPS didasarkan pada keterdekatan makna dari konten Kompetensi Dasar IPA dan IPS dengan konten Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, serta Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan yang berlaku untuk kelas I, II, dan III. Sedangkan untuk kelas IV, V dan VI, Kompetensi Dasar IPA dan IPS berdiri sendiri dan kemudian diintegrasikan ke dalam tema-tema yang ada untuk kelas IV, V dan VI.

b. Struktur Kurikulum SMP/MTS

Dalam struktur kurikulum SMP/MTs ada penambahan jam belajar per minggu dari semula 32, 32, dan 32 menjadi 38, 38 dan 38 untuk masing-masing kelas VII, VIII, dan IX. Sedangkan lama belajar untuk setiap jam belajar di SMP/MTs tetap yaitu 40 menit. Struktur Kurikulum SMP/MTS adalah sebagai berikut:

MATA PELAJARAN		ALOKASI WAKTU BELAJAR PER MINGGU		
		VII	VIII	IX
Kelompok A				
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	3	3	3
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	3	3
3.	Bahasa Indonesia	6	6	6
4.	Matematika	5	5	5
5.	Ilmu Pengetahuan Alam	5	5	5
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
7.	Bahasa Inggris	4	4	4
Kelompok B				
1.	Seni Budaya	3	3	3
2.	Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan	3	3	3
3.	Prakarya	2	2	2
Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu		38	38	38

Mata pelajaran Seni Budaya dapat memuat Bahasa Daerah. IPA dan IPS dikembangkan sebagai mata pelajaran *integrative science* dan *integrative social studies*, bukan sebagai pendidikan disiplin ilmu. Keduanya sebagai pendidikan berorientasi aplikatif, pengembangan kemampuan berpikir, kemampuan belajar, rasa ingin tahu, dan pengembangan sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan alam.

Di samping itu, tujuan pendidikan IPS menekankan pada pengetahuan tentang bangsanya, semangat kebangsaan, patriotisme, serta aktivitas masyarakat di bidang ekonomi dalam ruang atau *space* wilayah NKRI. IPA juga ditujukan untuk pengenalan lingkungan biologi dan alam sekitarnya, serta pengenalan berbagai keunggulan wilayah nusantara.

Seni Budaya terdiri atas empat aspek, yakni seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Masing-masing aspek diajarkan secara terpisah dan setiap satuan pendidikan dapat memilih aspek yang diajarkan sesuai dengan kemampuan (guru dan fasilitas) pada satuan pendidikan itu. Prakarya terdiri atas empat aspek, yakni

kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Masing-masing aspek diajarkan secara terpisah dan setiap satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran prakarya paling sedikit dua aspek prakarya sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah pada satuan pendidikan itu.

c. Struktur Kurikulum SMA/MA/SMK

Struktur kurikulum SMA/MA/SMK/MAK terdiri atas: (1) kelompok mata pelajaran wajib yang diikuti oleh seluruh peserta didik, dan (2) kelompok mata pelajaran peminatan yang diikuti oleh peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.

Adanya kelompok mata pelajaran wajib dan mata pelajaran peminatan dimaksudkan untuk menerapkan prinsip kesamaan antara SMA/MA dan SMK/MAK. Mata pelajaran wajib sebanyak 9 (sembilan) mata pelajaran dengan beban belajar 24 jam per minggu. Kelompok mata pelajaran peminatan SMA/MA terdiri atas 18 jam per minggu untuk kelas X, dan 20 jam per minggu untuk kelas XI dan XII. Kelompok mata pelajaran peminatan SMK/MAK masing-masing 24 jam per kelas. Kelompok mata pelajaran peminatan SMA/MA bersifat akademik, sedangkan untuk SMK/MAK bersifat vokasional. Struktur ini menempatkan prinsip bahwa peserta didik adalah subjek dalam belajar dan mereka memiliki hak untuk memilih sesuai dengan minatnya.

Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah adalah sebagaimana yang tertera di dalam tabel berikut ini:

MATA PELAJARAN		ALOKASI WAKTU BELAJAR PER MINGGU		
		X	XI	XII
Kelompok A (Wajib)				
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	3	3	3
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2
3.	Bahasa Indonesia	4	4	4
4.	Matematika	4	4	4
5.	Sejarah Indonesia	2	2	2
6.	Bahasa Inggris	2	2	2
Kelompok B (Wajib)				

7.	Seni Budaya	2	2	2
8.	Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan	3	3	3
9.	Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2
Jumlah Jam Pelajaran Kelompok A dan B per minggu		24	24	24
Kelompok C (Peminatan)				
Mata Pelajaran Peminatan Akademik (SMA/MA)		18	20	20
Jumlah Jam Pelajaran yang Harus Ditempuh per Minggu		42	44	44

Beban belajar di SMA/MA untuk Tahun X, XI, dan XII masing-masing 43 jam belajar per minggu. Satu jam belajar adalah 45 menit.

5. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 untuk semua jenjang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan ilmiah (saintifik). Langkah-langkah pendekatan saintifik (*scientific approach*) dalam proses pembelajaran disajikan sebagai berikut:

a. Mengamati (observasi)

Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran (*meaningfull learning*). Metode ini memiliki keunggulan tertentu, seperti menyajikan media obyek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang, dan mudah pelaksanaannya. Mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi.

Kegiatan mengamati dalam pembelajaran menghendaki guru membuka secara luas dan bervariasi kesempatan peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan: melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan, melatih mereka untuk memperhatikan (melihat, membaca, mendengar) hal yang penting dari suatu benda atau objek. Adapun kompetensi yang diharapkan adalah melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi.

b. Menanya

Setelah kegiatan mengamati, guru membuka kesempatan secara luas kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dibaca atau dilihat. Guru perlu membimbing peserta didik untuk dapat mengajukan pertanyaan: pertanyaan tentang yang hasil pengamatan objek yang konkrit sampai kepada yang abstrak berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, atau pun hal lain yang lebih abstrak. Pertanyaan yang bersifat faktual sampai kepada pertanyaan yang bersifat hipotetik.

Dari situasi di mana peserta didik dilatih menggunakan pertanyaan dari guru, masih memerlukan bantuan guru untuk mengajukan pertanyaan sampai ke tingkat di mana peserta didik mampu mengajukan pertanyaan secara mandiri. Dari kegiatan kedua dihasilkan sejumlah pertanyaan. Melalui kegiatan bertanya dikembangkan rasa ingin tahu peserta didik. Semakin terlatih dalam bertanya maka rasa ingin tahu semakin dapat dikembangkan. Pertanyaan tersebut menjadi dasar untuk mencari informasi yang lebih lanjut dan beragam dari sumber yang ditentukan guru sampai yang ditentukan peserta didik, dari sumber yang tunggal sampai sumber yang beragam.

Kegiatan “menanya” dalam kegiatan pembelajaran adalah mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik). Adapun kompetensi yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat.

c. Mengumpulkan Informasi/eksplorasi

Kegiatan “mengumpulkan informasi” merupakan tindak lanjut dari bertanya. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Untuk itu peserta didik dapat membaca buku yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen. Dari kegiatan tersebut terkumpul sejumlah informasi.

Aktivitas mengumpulkan informasi dilakukan melalui eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengamati objek/ kejadian/, aktivitas wawancara dengan narasumber dan sebagainya. Adapun kompetensi yang diharapkan adalah mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.

d. Mengasosiasikan/Mengolah Informasi/Menalar

Kegiatan “mengasosiasi/mengolah informasi/menalar” dalam kegiatan pembelajaran adalah memproses informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan/eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan. Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya, menemukan pola dari keterkaitan informasi tersebut. Adapun kompetensi yang diharapkan adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan.

Aktivitas ini juga diistilahkan sebagai kegiatan menalar, yaitu proses berfikir yang logis dan sistematis atas fakta-kata empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Aktivitas menalar dalam konteks pembelajaran pada Kurikulum 2013 dengan pendekatan ilmiah banyak merujuk pada teori belajar asosiasi atau pembelajaran asosiatif. Istilah asosiasi dalam pembelajaran merujuk pada kemampuan mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan beragam peristiwa untuk kemudian memasukannya menjadi penggalan memori. Selama mentransfer peristiwa-peristiwa khusus ke otak, pengalaman tersimpan dalam referensi dengan peristiwa lain. Pengalaman-pengalaman yang sudah tersimpan di memori otak berelasi dan berinteraksi dengan pengalaman sebelumnya yang sudah tersedia.

Setelah menemukan keterkaitan antar informasi dan menemukan berbagai pola dari keterkaitan tersebut, selanjutnya secara bersama-sama dalam satu kesatuan kelompok, atau secara individual membuat kesimpulan.

e. Mengkomunikasikan

Pada pendekatan saintifik, guru diharapkan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan menemukan pola. Hasil tersebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar peserta didik atau kelompok peserta didik tersebut.

Kegiatan “mengkomunikasikan” dalam kegiatan pembelajaran adalah menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Adapun kompetensi yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar.

6. Penilaian Pembelajaran

Pada kurikulum 2013, penilaian hasil belajar dilakukan oleh pendidik memiliki fungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Berdasarkan fungsinya penilaian hasil belajar oleh pendidik meliputi:

- a. **Formatif** yaitu memperbaiki kekurangan hasil belajar peserta didik dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada setiap kegiatan penilaian selama proses pembelajaran dalam satu semester, sesuai dengan prinsip Kurikulum 2013 agar peserta didik tahu, mampu dan mau. Hasil dari kajian terhadap kekurangan peserta didik digunakan untuk memberikan pembelajaran remedial dan perbaikan RPP serta proses pembelajaran yang dikembangkan guru untuk pertemuan berikutnya.
- b. **Sumatif** yaitu menentukan keberhasilan belajar peserta didik pada akhir suatu semester, satu tahun pembelajaran, atau masa pendidikan di satuan

pendidikan. Hasil dari penentuan keberhasilan ini digunakan untuk menentukan nilai rapor, kenaikan kelas dan keberhasilan belajar satuan pendidikan seorang peserta didik.

Tujuan dilakukannya penilaian hasil belajar oleh pendidik terhadap peserta didik adalah:

- a. Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai seorang/sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan.
- b. Menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu, yaitu harian, tengah semesteran, satu semesteran, satu tahunan, dan masa studi satuan pendidikan.
- c. Menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi bagi mereka yang diidentifikasi sebagai peserta didik yang lambat atau cepat dalam belajar dan pencapaian hasil belajar.
- d. Memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan semester berikutnya.

Acuan penilaian hasil belajar peserta didik dalam kurikulum 2013 adalah:

- a. Penilaian menggunakan acuan kriteria yang merupakan penilaian kemajuan peserta didik dibandingkan dengan kriteria capaian kompetensi yang ditetapkan. Skor yang diperoleh dari hasil suatu penilaian baik yang formatif maupun sumatif seorang peserta didik tidak dibandingkan dengan skor peserta didik lainnya namun dibandingkan dengan penguasaan kompetensi yang dipersyaratkan.
- b. Bagi yang belum berhasil mencapai kriteria, diberi kesempatan mengikuti pembelajaran remedial yang dilakukan setelah suatu kegiatan penilaian (bukan di akhir semester) baik secara individual, kelompok, maupun kelas. Bagi mereka yang berhasil dapat diberi program pengayaan sesuai dengan waktu yang tersedia baik secara individual maupun kelompok. Program pengayaan merupakan pendalaman atau perluasan dari kompetensi yang dipelajari.
- c. Acuan Kriteria menggunakan modus untuk sikap, rerata untuk pengetahuan, dan capaian optimum untuk keterampilan.

Prinsip penilaian hasil belajar oleh pendidik meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum dalam penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah sebagai berikut:

- a. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur.
- b. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.
- c. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
- d. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.
- e. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
- f. Holistik dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik.
- g. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.
- h. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.
- i. Edukatif, berarti penilaian dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan peserta didik dalam belajar.

Prinsip khusus dalam penilaian hasil belajar oleh pendidik berisikan prinsip-prinsip penilaian autentik sebagai berikut:

- a. Materi penilaian dikembangkan dari kurikulum.
- b. Bersifat lintas muatan atau mata pelajaran.
- c. Berkaitan dengan kemampuan peserta didik.
- d. Berbasis kinerja peserta didik.
- e. Memotivasi belajar peserta didik.
- f. Menekankan pada kegiatan dan pengalaman belajar peserta didik.
- g. Memberi kebebasan peserta didik untuk mengkonstruksi responnya.

- h. Menekankan keterpaduan sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- i. Mengembangkan kemampuan berpikir divergen.
- j. Menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran.
- k. Menghendaki balikan yang segera dan terus menerus.
- l. Menekankan konteks yang mencerminkan dunia nyata.
- m. Terkait dengan dunia kerja.
- n. Menggunakan data yang diperoleh langsung dari dunia nyata.
- o. Menggunakan berbagai cara dan instrumen.

Ketuntasan belajar terdiri atas ketuntasan penguasaan substansi dan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar. Ketuntasan penguasaan substansi yaitu ketuntasan belajar KD yang merupakan tingkat penguasaan peserta didik atas KD tertentu pada tingkat penguasaan minimal atau di atasnya, sedangkan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar terdiri atas ketuntasan dalam setiap semester, setiap tahun ajaran, dan tingkat satuan pendidikan.

Ketuntasan belajar dalam satu semester adalah keberhasilan peserta didik menguasai kompetensi dari sejumlah mata pelajaran yang diikutinya dalam satu semester. Ketuntasan Belajar dalam setiap tahun ajaran adalah keberhasilan peserta didik pada semester ganjil dan genap dalam satu tahun ajaran. Ketuntasan dalam tingkat satuan pendidikan adalah keberhasilan peserta didik menguasai kompetensi seluruh mata pelajaran dalam suatu satuan pendidikan untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

Nilai ketuntasan kompetensi sikap dituangkan dalam bentuk predikat, yakni predikat Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), dan Kurang (K). Ketuntasan Belajar untuk sikap (KD pada KI-1 dan KI-2) ditetapkan dengan predikat Baik (B).

Nilai ketuntasan kompetensi pengetahuan dan keterampilan dituangkan dalam bentuk angka dan huruf, yakni 4,00 – 1,00 untuk angka yang ekuivalen dengan huruf A sampai dengan D. Nilai ketuntasan pengetahuan dan keterampilan sebagai berikut:

3,85 – 4,00 A
3,51 – 3,84 A-
3,18 – 3,50 B+
2,85 – 3,17 B
2,51 – 2,84 B-
2,18 – 2,50 C+
1,85 – 2,17 C
1,51 – 1,84 C-
1,18 – 1,50 D+
1,00 – 1,17 D

Ketuntasan belajar untuk pengetahuan ditetapkan dengan skor rerata 2,67 untuk keterampilan ditetapkan dengan capaian optimum 2,67. Khusus untuk SD/MI ketuntasan sikap, pengetahuan dan keterampilan ditetapkan dalam bentuk deskripsi yang didasarkan pada modus, skor rerata dan capaian optimum.

Teknik dan instrumen yang dapat digunakan dalam kurikulum 2013 untuk menilai kompetensi pada aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan.

a. Penilaian Kompetensi Sikap.

Sikap bermula dari perasaan (suka atau tidak suka) yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu/objek. Sikap juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk, sehingga terjadi perubahan perilaku atau tindakan yang diharapkan.

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menilai sikap peserta didik, antara lain melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan penilaian jurnal. Instrumen yang digunakan antara lain daftar cek atau skala penilaian (*rating scale*) yang disertai rubrik, yang hasil akhirnya dihitung berdasarkan modus.

1. Observasi.

Sikap dan perilaku keseharian peserta didik direkam melalui pengamatan dengan menggunakan format yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati, baik yang terkait dengan mata pelajaran maupun secara umum. Pengamatan terhadap sikap dan perilaku yang terkait dengan mata pelajaran dilakukan oleh guru yang bersangkutan selama proses pembelajaran berlangsung, seperti: ketekunan belajar, percaya diri, rasa ingin tahu, kerajinan,

kerjasama, kejujuran, disiplin, peduli lingkungan, dan selama peserta didik berada di sekolah atau bahkan di luar sekolah selama perilakunya dapat diamati guru.

2. Penilaian diri (*self assessment*).

Penilaian diri digunakan untuk memberikan penguatan (*reinforcement*) terhadap kemajuan proses belajar peserta didik. Penilaian diri berperan penting bersamaan dengan bergesernya pusat pembelajaran dari guru ke peserta didik yang didasarkan pada konsep belajar mandiri (*autonomous learning*).

Untuk menghilangkan kecenderungan peserta didik menilai diri terlalu tinggi dan subyektif, penilaian diri dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas dan objektif. Untuk itu penilaian diri oleh peserta didik di kelas perlu dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- Menjelaskan kepada peserta didik tujuan penilaian diri.
- Menentukan kompetensi yang akan dinilai.
- Menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan.
- Merumuskan format penilaian, dapat berupa daftar tanda cek, atau skala penilaian.

Pada dasarnya teknik penilaian diri ini tidak hanya untuk aspek sikap, tetapi juga dapat digunakan untuk menilai kompetensi dalam aspek keterampilan dan pengetahuan.

3. Penilaian teman sebaya (*peer assessment*).

Penilaian teman sebaya atau antarpeserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar pengamatan antarpeserta didik. Penilaian teman sebaya dilakukan oleh peserta didik terhadap 3 (tiga) teman sekelas atau sebaliknya.

4. Penilaian jurnal (*anecdotal record*). Jurnal merupakan kumpulan rekaman catatan guru dan/atau tenaga kependidikan di lingkungan sekolah tentang sikap dan perilaku positif atau negatif, selama dan di luar proses pembelajaran mata pelajaran.

b. Penilaian Kompetensi Pengetahuan.

1. Tes tertulis.

Bentuk soal tes tertulis, yaitu: (1) memilih jawaban, dapat berupa: pilihan ganda, dua pilihan (benar-salah, ya-tidak), menjodohkan, dan sebab-akibat, dan (2) mensuplai jawaban, dapat berupa: isian atau melengkapi, jawaban singkat atau pendek dan uraian.

Soal tes tertulis yang menjadi penilaian autentik adalah soal-soal yang menghendaki peserta didik merumuskan jawabannya sendiri, seperti soal-soal uraian. Soal-soal uraian menghendaki peserta didik mengemukakan atau mengekspresikan gagasannya dalam bentuk uraian tertulis dengan menggunakan kata-katanya sendiri, misalnya mengemukakan pendapat, berpikir logis, dan menyimpulkan.

Kelemahan tes tertulis bentuk uraian antara lain cakupan materi yang ditanyakan terbatas dan membutuhkan waktu lebih banyak dalam mengoreksi jawaban.

2. Observasi Terhadap Diskusi, Tanya Jawab dan Percakapan.

Penilaian terhadap pengetahuan peserta didik dapat dilakukan melalui observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan percakapan. Teknik ini adalah cerminan dari penilaian autentik. Ketika terjadi diskusi, guru dapat mengenal kemampuan peserta didik dalam kompetensi pengetahuan (fakta, konsep, prosedur) seperti melalui pengungkapan gagasan yang orisinal, kebenaran konsep, dan ketepatan penggunaan istilah/fakta/prosedur yang digunakan pada waktu mengungkapkan pendapat, bertanya, atau pun menjawab pertanyaan.

Seorang peserta didik yang selalu menggunakan kalimat yang baik dan benar menurut kaedah bahasa menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki pengetahuan tata bahasa yang baik dan mampu menggunakan pengetahuan tersebut dalam kalimat-kalimat.

Seorang peserta didik yang dengan sistematis dan jelas dapat menceritakan misalnya hukum Pascal kepada temantemannya, pada waktu menyajikan tugasnya atau menjawab pertanyaan temannya memberikan informasi yang sah dan autentik tentang pengetahuannya mengenai hukum Pascal dan mengenai penerapan hukum Pascal jika yang bersangkutan menjelaskan bagaimana hukum Pascal digunakan dalam kehidupan (bukan mengulang cerita guru, jika mengulangi cerita dari guru berarti yang bersangkutan memiliki pengetahuan).

Seorang peserta didik yang mampu menjelaskan misalnya pengertian pasar, macam dan jenis pasar serta kaitannya dengan pemasaran memberikan informasi yang valid dan autentik tentang pengetahuan yang dimilikinya tentang konsep pasar.

Seorang peserta didik yang mampu menceritakan dengan kronologis tentang suatu peristiwa sejarah merupakan suatu bukti bahwa yang bersangkutan memiliki pengetahuan dan keterampilan berpikir sejarah tentang peristiwa sejarah tersebut.

Seorang peserta didik yang mampu menjelaskan makna lambang negara Garuda Pancasila merupakan suatu bukti bahwa yang bersangkutan memiliki pengetahuan dan keterampilan berpikir tentang kandungan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air.

3. Penugasan.

Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan/atau projek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas.

c. Penilaian Kompetensi Keterampilan.

Penilaian kompetensi keterampilan terdiri atas keterampilan abstrak dan keterampilan kongkret. Penilaian kompetensi keterampilan dapat dilakukan dengan menggunakan:

1. Unjuk kerja/kinerja/praktik.

Penilaian unjuk kerja/kinerja/praktik dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti: praktikum di laboratorium, praktik ibadah, praktik olahraga, presentasi, bermain peran, memainkan alat musik, bernyanyi, dan membaca puisi/deklamasi.

Penilaian unjuk kerja/kinerja/praktik perlu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- Langkah-langkah kinerja yang perlu dilakukan peserta didik untuk menunjukkan kinerja dari suatu kompetensi.
- Kelengkapan dan ketepatan aspek yang akan dinilai dalam kinerja tersebut.
- Kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas.
- Kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak, sehingga dapat diamati.
- Kemampuan yang akan dinilai selanjutnya diurutkan berdasarkan langkah-langkah pekerjaan yang akan diamati.

Pengamatan unjuk kerja/kinerja/praktik perlu dilakukan dalam berbagai konteks untuk menetapkan tingkat pencapaian kemampuan tertentu. Misalnya untuk menilai kemampuan berbicara yang beragam dilakukan pengamatan terhadap kegiatan-kegiatan seperti: diskusi dalam kelompok kecil, berpidato, bercerita, dan wawancara.

Dengan demikian, gambaran kemampuan peserta didik akan lebih utuh. Contoh untuk menilai unjuk kerja/kinerja/praktik di laboratorium dilakukan pengamatan terhadap penggunaan alat dan bahan praktikum. Untuk menilai praktik olahraga, seni dan budaya dilakukan pengamatan gerak dan penggunaan alat olahraga, seni dan budaya.

Untuk mengamati unjuk kerja/kinerja/praktik peserta didik dapat menggunakan instrumen sebagai berikut:

- Daftar cek.
Dengan menggunakan daftar cek, peserta didik mendapat nilai bila kriteria penguasaan kompetensi tertentu dapat diamati oleh penilai.
- Skala Penilaian (*Rating Scale*).
Penilaian kinerja yang menggunakan skala penilaian memungkinkan penilai memberi nilai tengah terhadap penguasaan kompetensi tertentu, karena pemberian nilai secara kontinum di mana pilihan kategori nilai lebih dari dua. Skala penilaian adalah rentang dari tidak sempurna sampai sangat sempurna. Misalnya: 4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, dan 1 = kurang.

2. **Projek.**

Penilaian projek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasi, kemampuan menyelidiki dan kemampuan menginformasikan suatu hal secara jelas. Penilaian projek dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan. Untuk itu, guru perlu menetapkan hal-hal atau tahapan yang perlu dinilai, seperti penyusunan desain, pengumpulan data, analisis data, dan penyiapan laporan tertulis/lisan. Untuk menilai setiap tahap perlu disiapkan kriteria penilaian atau rubrik.

3. **Produk.**

Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk, teknologi, dan seni, seperti: makanan (contoh: tempe, kue, asinan, bakso, dan *nata de coco*), pakaian, sarana kebersihan (contoh: sabun, pasta gigi, cairan pembersih dan sapu), alat-alat teknologi (contoh: adaptor ac/dc dan bel listrik), hasil karya seni (contoh: patung, lukisan dan gambar), dan barang-barang terbuat dari kain, kayu, keramik, plastik, atau logam.

Pengembangan produk meliputi 3 (tiga) tahap dan setiap tahap perlu diadakan penilaian yaitu:

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

- a. Tahap persiapan, meliputi: penilaian kemampuan peserta didik dan merencanakan, menggali, dan mengembangkan gagasan, dan mendesain produk.
- b. Tahap pembuatan produk (proses), meliputi: penilaian kemampuan peserta didik dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan teknik.
- c. Tahap penilaian produk (*appraisal*), meliputi: penilaian produk yang dihasilkan peserta didik sesuai kriteria yang ditetapkan, misalnya berdasarkan, tampilan, fungsi dan estetika.

Penilaian produk biasanya menggunakan cara analitik atau holistik. Cara analitik, yaitu berdasarkan aspek-aspek produk, biasanya dilakukan terhadap semua kriteria yang terdapat pada semua tahap proses pengembangan (tahap: persiapan, pembuatan produk, penilaian produk). Cara holistik, yaitu berdasarkan kesan keseluruhan dari produk, biasanya dilakukan hanya pada tahap penilaian produk.

4. Portofolio.

Penilaian portofolio pada dasarnya menilai karya-karya peserta didik secara individu pada satu periode untuk suatu mata pelajaran. Akhir suatu periode hasil karya tersebut dikumpulkan dan dinilai oleh guru dan peserta didik sendiri. Berdasarkan informasi perkembangan tersebut, guru dan peserta didik sendiri dapat menilai perkembangan kemampuan peserta didik dan terus menerus melakukan perbaikan.

Dengan demikian, portofolio dapat memperlihatkan dinamika kemampuan belajar peserta didik melalui sekumpulan karyanya, antara lain: karangan, puisi, surat, komposisi musik, gambar, foto, lukisan, resensi buku/literatur, laporan penelitian, sinopsis dan karya nyata individu peserta didik yang diperoleh dari pengalaman.

Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan penilaian portofolio yaitu:

- a. Peserta didik merasa memiliki portofolio sendiri.

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

- b. Tentukan bersama hasil kerja apa yang akan dikumpulkan.
 - c. Kumpulkan dan simpan hasil kerja peserta didik dalam 1 map atau folder.
 - d. Beri tanggal pembuatan.
 - e. Tentukan kriteria untuk menilai hasil kerja peserta didik.
 - f. Minta peserta didik untuk menilai hasil kerja mereka secara berkesinambungan.
 - g. Bagi yang kurang beri kesempatan perbaiki karyanya, tentukan jangka waktunya.
 - h. Bila diperlukan maka jadwalkan pertemuan dengan orang tua siswa.
5. Tertulis.
- Selain menilai kompetensi pengetahuan, penilaian tertulis juga digunakan untuk menilai kompetensi keterampilan, seperti menulis karangan, menulis laporan, dan menulis surat.

BAB VIII

INOVASI MANAJEMEN SEKOLAH

A. Pendahuluan

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Indonesia dirintis oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), beserta pemerintah daerah, yang didukung *The United Nations Children's Fund* (UNICEF), *United Nations Educational Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), sejak Tahun 1999 di 7 kabupaten pada 4 propinsi. Setelah dinyatakan berhasil pada beberapa sekolah *piloting*, program MBS memperoleh donor dari dalam dan luar negeri, antara lain NZAID, AUSAID, USAID, *Plan International*, *Citibank*, *Save the Children*, *Jica*, dan *Kartika Soekarno Foundation*.

Implementasi program MBS di Indonesia dievaluasi pada Tahun 2000, 2002, 2005, dan 2010. Hasil evaluasi pada Tahun 2000, 2002, 2005 menunjukkan bahwa program pembinaan MBS memberikan dampak positif, antara lain: (1) peningkatan manajemen sekolah yang lebih transparan, partisipatif, demokratis, dan akuntabel; (2) peningkatan mutu pendidikan; (3) menurunnya tingkat putus sekolah; (4) peningkatan implementasi pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan pendekatan Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM); dan (5) peningkatan peran serta masyarakat terhadap pendidikan di SD.

Berdasarkan pengawasan dan evaluasi tentang implementasi MBS maka dapat dinyatakan bahwa di Indonesia bervariasi dalam implementasi MBS baik kuantitas maupun kualitasnya, serta terdapat berbagai masalah dan kendala implementasi MBS. Oleh karena itu, keberlanjutan program MBS di Indonesia perlu segera dilaksanakan.

Keberlanjutan program MBS di Indonesia juga sebagai amanat kebijakan pemerintah, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Pasal 51 Ayat (1) dinyatakan bahwa: “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah”. Penggunaan Kurikulum sebagai salah satu muatan MBS diamanatkan dalam pasal 38 ayat (2) bahwa: “Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Propinsi untuk pendidikan menengah”, dan pasal 50 ayat (5) “Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal”.

Pentingnya partisipasi masyarakat diamanatkan dalam Pasal 9 bahwa: “Masyarakat berkewajiban untuk memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”; dan Pasal 54 Ayat (1) dan (2) “Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan”; serta “masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan”.

Pentingnya keberlanjutan program MBS dilandasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah lainnya yang relevan; serta beberapa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, antara lain Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Selanjutnya sebagai upaya untuk melanjutkan dan mengembangkan program MBS, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 mengamanatkan antara lain bahwa pada akhir tahun 2014 sebanyak 90% sekolah khususnya sekolah dasar di Indonesia telah menerapkan MBS dengan baik.

B. Pengertian MBS

MBS merupakan salah satu model inovasi pendidikan di Indonesia, sebagai muara dari desentralisasi pendidikan dalam kerangka proses reformasi pendidikan, dalam hal ini inovasi pendidikan adalah kegiatan mencobakan cara baru merupakan suatu keniscayaan (Siahaan, dkk. 2006:14).

Etheridge menyatakan MBS adalah sebuah proses formal yang melibatkan kepala sekolah, guru, orang tua siswa, siswa dan masyarakat yang berada dekat dengan sekolah dalam proses pengambilan berbagai keputusan. Hal senada dijelaskan oleh Short dan Greer bahwa MBS adalah sebuah strategi yang mengangkat konsep tentang pemberdayaan dan memberdayakan semua individu di sekolah (Rosyada, 2004:267).

Rusdiana (2014:169) menjelaskan MBS pada hakikatnya adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau mencapai tujuan pendidikan nasional.

Kamars (2004:252) menyatakan MBS berarti sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah (guru siswa, kepala sekolah, staf, orang tua siswa dan masyarakat), untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.

MBS diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi atau kemandirian yang lebih besar kepada sekolah dalam pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah sesuai standar mutu yang berkaitan dengan kebutuhan sarana prasarana, fasilitas sekolah, peningkatan kualitas kurikulum dan pertumbuhan jabatan guru (Sagala, 2005:133).

Selanjutnya dijelaskan Sujanto sebagaimana dikutip Syafaruddin dkk (2015:78) MBS adalah model manajemen sekolah yang memberikan otonomi kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan langsung semua warga sekolah dan masyarakat

yang dilayani dengan tetap selaras dengan kebijakan nasional tentang pendidikan.

Berdasarkan paparan di atas dapatlah dimaknai bahwa MBS adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah dan guru dibantu oleh komite sekolah dalam mengelola kegiatan pendidikan. Esensi MBS adalah pemberian otonomi sekolah dalam rangka peningkatan mutu sekolah. Otonomi sekolah juga dapat diartikan sebagai pemberian kewenangan yang lebih mandiri pada sekolah yang mengandung makna swakarsa, swakarya, swadana, swakelola, dan swasembada.

MBS dapat didefinisikan sebagai pengelolaan sumberdaya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah, dengan mengikutsertakan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah dalam pengambilan keputusan, untuk mencapai tujuan peningkatan mutu sekolah. Unsur-unsur penting yang terkandung dalam definisi MBS meliputi:

1. Pengelolaan dimaknai dari dua sudut pandang yakni proses dan komponen manajemen sekolah. Sebagai proses, manajemen sekolah berbentuk sistem yang komponennya meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Ditinjau dari komponennya, manajemen sekolah meliputi: (a) kurikulum dan pembelajaran, (b) peserta didik, (c) pendidik dan tenaga kependidikan, (d) pembiayaan, (e) sarana dan prasarana, (f) hubungan sekolah dan masyarakat, dan (g) budaya dan lingkungan sekolah.
2. Sumber daya sekolah meliputi manusia, dana, sarana dan prasarana.
3. Strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, antara lain PAKEM.
4. Implementasi budaya dan lingkungan sekolah yang kondusif.
5. Peran serta masyarakat.
6. Pencapaian tujuan peningkatan mutu sekolah.

C. Tujuan MBS

Secara umum MBS bertujuan meningkatkan kemandirian sekolah melalui pemberian kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumberdaya sekolah, dan mendorong keikutsertaan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu sekolah.

Secara khusus MBS bertujuan untuk:

1. Membina dan mengembangkan komponen manajemen kurikulum dan pembelajaran.
2. Membina dan mengembangkan komponen manajemen peserta didik.
3. Membina dan mengembangkan komponen manajemen pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Membina dan mengembangkan komponen manajemen sarana dan prasarana.
5. Membina dan mengembangkan komponen manajemen pembiayaan.
6. Membina dan mengembangkan komponen manajemen hubungan sekolah dan masyarakat.
7. Membina dan mengembangkan komponen manajemen budaya dan lingkungan sekolah.

Senada dengan penjelasan di atas, Sagala (2005:133) memaparkan tujuan MBS sebagai berikut:

1. Menjamin mutu pembelajaran anak didik yang berpijak pada asas pelayanan dan prestasi hasil belajar.
2. Meningkatkan kualitas transfer ilmu pengetahuan dan membangun karakter bangsa yang berbudaya.
3. Meningkatkan mutu sekolah dengan memantapkan pemberdayaan melalui kemandirian, kreativitas, inisiatif dan inovatif dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya sekolah.
4. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan dengan mengakomodir aspirasi bersama.
5. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah tentang mutu sekolah.
6. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.

Selanjutnya menurut Kamars (2004:253) menjelaskan tujuan MBS adalah:

1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian (otonomi) dan inisiatif (prakarsa) sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia.
2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama.
3. Meningkatkan tanggungjawab sekolah kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah tentang mutu sekolahnya.
4. Meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.

Berdasarkan pemaparan di atas maka terkait dengan tujuan MBS diterapkan maka hal ini menunjukkan rasionalitas dari diterapkannya MBS. Dalam hal ini alasan diterapkan dijelaskan oleh Kamars (2004:253) sebagai berikut:

1. Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi dirinya.
2. Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik.
3. Pengambilan keputusan yang akan dilakukan sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah.
4. Penggunaan sumber daya pendidikan lebih efisien dan efektif bilamana dikontrol oleh masyarakat setempat.
5. Keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat.
6. Sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan kepada pemerintah, orang tua peserta didik dan masyarakat.
7. Sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah dengan cepat.

D. Karakteristik MBS

Karakteristik MBS tidak terlepas dari karakteristik sekolah yang efektif yang dapat dipandang sebagai sebuah sistem maka dalam hal ini karakteristik MBS merupakan elemen-elemen yang perlu dimiliki yang dikategorikan

dalam input, proses dan output. Menurut Kamars (2004:255) karakteristik MBS adalah:

1. Output yang diharapkan.
Output dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu: prestasi akademik (NEM, lomba karya ilmiah remaja, lomba beberapa mata pelajaran, cara berpikir kritis, kreatif/divergen, nalar, induktif, deduktif, dan ilmiah), di samping itu juga prestasi non akademik (keingintahuan yang tinggi, harga diri, kejujuran, toleransi, dan sebagainya).
2. Proses.
 - Proses pembelajaran yang efektivitasnya tinggi.
 - Kepemimpinan sekolah yang kuat.
 - Lingkungan sekolah yang aman dan tertib.
 - Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif.
 - Sekolah memiliki budaya mutu.
 - Sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas dan dinamis.
 - Sekolah memiliki wewenang (kemandirian).
 - Partisipatif yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat.
 - Sekolah memiliki transparansi (keterbukaan) manajemen.
 - Sekolah memiliki kemauan untuk berubah (psikologis dan fisik).
 - Sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan.
 - Sekolah responsif dan antisipasi terhadap kebutuhan.
 - Sekolah memiliki komunikasi yang baik.
 - Sekolah memiliki akuntabilitas.
3. Input pendidikan.
 - Memiliki kebijakan dan sasaran mutu yang jelas.
 - Sumber daya tersedia dan siap.
 - Staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi.
 - Memiliki harapan prestasi yang tinggi.
 - Fokus harapan prestasi yang tinggi.
 - Fokus pada pelanggan khususnya siswa.
 - Input manajemen.

Selanjutnya menurut Mesiono (2010:102) MBS merupakan alternatif baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menenkan kepada kemandirian dan kreatifitas sekolah. Konsep ini lebih memfokuskan diri pada perbaikan proses pendidikan untuk mencapai hasil pendidikan yang

bermutu. Oleh karena itu karakteristik MBS sebagai berikut:

1. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib.
Suasana dan lingkungan sekolah, baik fisik maupun psikologis merupakan prasyarat utama terlaksananya suatu proses pembelajaran secara optimal, iklim sekolah yang kondusif memberikan perlindungan kepada siswa dan warga sekolah lainnya untuk melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai target rencana yang ditetapkan. Karena itu, salah satu ciri utama sekolah efektif terlihat dari lingkungan sekolah yang menyenangkan, aman dan tertib, sehingga siswa merasa betah belajar dan bersosialisasi dengan warga sekolah dalam kegiatan sehari-hari.
2. Perumusan visi, misi, dan target mutu yang jelas.
Sekolah efektif mempunyai visi dan misi lembaga yang akan dicapai secara jelas dan lugas. Visi ini merupakan pandangan masa depan lembaga tentang keberadaan dirinya dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Sedangkan, misi merupakan tugas-tugas yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi lembaga. Untuk mencapai visi dan misi ini, sekolah juga menetapkan target-target mutu yang akan dicapai baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan demikian arah kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah ini selalu berpegang kepada visi dan misi lembaga melalui upaya-upaya mencapai target-target mutu yang telah ditetapkan.
3. Kepemimpinan sekolah yang kuat.
Dalam sekolah efektif kepala sekolah mempunyai peran yang sangat sentral dalam mengelola dan menggerakkan semua sumber daya pendidikan yang tersedia. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang mendorong sekolah untuk dapat mewujudkan visi dan misi lembaganya melalui pencapaian target-target pendidikan secara terencana dan bertahap. Oleh karena itu, kepala sekolah dituntut mempunyai kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang memadai agar mampu mengambil inisiatif untuk memperbaiki kinerja sekolah.

4. Harapan prestasi yang tinggi.
Sekolah efektif mempunyai dorongan dan harapan yang tinggi untuk meningkatkan prestasi siswa dan lembaganya. Kepala sekolah mempunyai komitmen dan motivasi yang kuat untuk meningkatkan kinerja sekolah secara optimal. Guru mempunyai harapan yang tinggi bahwa anak didiknya dapat mencapai tingkat prestasi yang maksimal, walaupun dengan segala keterbatasan sumber daya pendidikan yang ada di sekolah. Sedangkan murid mempunyai motivasi untuk selalu meningkatkan diri untuk berprestasi sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Harapan tinggi dari ketiga unsur ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan sekolah selalu dinamis untuk selalu menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya.

5. Pengembangan staf sekolah secara terus menerus.
Pengembangan staf sekolah baik tenaga kependidikan maupun administratif merupakan salah satu usaha sekolah efektif untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Pengembangan staf ini berupa *in service* atau *on service training* dilaksanakan berdasarkan kebutuhan guru dan tenaga lainnya. Bukan berdasarkan permintaan pihak luar sekolah, karena itu kepala sekolah secara terus menerus melakukan pengamatan, supervisi dan peninjauan kebutuhan dan kemampuan setiap staf pengajar dan tenaga lainnya, sehingga mereka mendapatkan *training* yang sesuai dengan kebutuhan individu masing-masing.

6. Evaluasi belajar untuk penyempurnaan pembelajaran.
Evaluasi belajar secara teratur bukan hanya ditujukan untuk mengetahui tingkat daya serap dan kemampuan anak didik, tetapi yang terpenting adalah bagaimana memanfaatkan hasil evaluasi belajar tersebut untuk memperbaiki dan menyempurnakan proses pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu fungsi evaluasi menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan kemampuan dan prestasi siswa dan kinerja sekolah secara keseluruhan.

7. Komunikasi dan dukungan orang tua dan masyarakat.

Peran serta dan dukungan orang tua dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan memberi andil yang besar bagi efektivitas suatu sekolah. Dukungan ini bukan hanya dalam bentuk sumbangan dana pendidikan, tetapi yang lebih penting adalah sumbangan pemikiran untuk memperbaiki kinerja sekolah dan prestasi siswa. Karena itu sekolah efektif selalu melakukan komunikasi intensif dengan orang tua, tokoh masyarakat dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya dalam perencanaan target mutu, pengambilan keputusan, dan monitoring penyelenggaraan pendidikan secara umum.

E. Prinsip-Prinsip MBS

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 48 Ayat (1) menyatakan bahwa, “Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik”. Sejalan dengan amanat tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 49 Ayat (1) menyatakan: “Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas”.

Berdasarkan kedua isi kebijakan tersebut, prinsip MBS meliputi: (1) kemandirian, (2) keadilan, (3) keterbukaan, (4) kemitraan, (5) partisipatif, (6) efisiensi, dan (7) akuntabilitas.

1. Kemandirian

Kemandirian berarti kewenangan sekolah untuk mengelola sumberdaya dan mengatur kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi seluruh warga sekolah sesuai peraturan perundangan. Kemandirian sekolah hendaknya didukung oleh kemampuan sekolah dalam mengambil keputusan terbaik, demokratis, mobilisasi sumberdaya, berkomunikasi yang efektif, memecahkan masalah, antisipatif dan adaptif terhadap inovasi pendidikan, sehingga dapat bersinergi, berkolaborasi, dan memenuhi kebutuhan sekolah sendiri.

2. Keadilan

Keadilan berarti sekolah tidak memihak terhadap salah satu sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya sekolah, dan dalam pembagian sumber daya untuk kepentingan peningkatan mutu sekolah. Sumber daya manusia yang terlibat, baik warga sekolah maupun pemangku kepentingan lainnya diberikan kesempatan yang sama untuk ikut serta memberikan dukungan guna peningkatan mutu sekolah sesuai dengan kapasitas mereka. Pembagian sumber daya untuk pengelolaan semua substansi manajemen sekolah dilakukan secara bijaksana untuk mempercepat dan keberlanjutan upaya peningkatan mutu sekolah. Dengan diperlakukan secara adil, maka semua pemangku kepentingan akan memberikan dukungan terhadap sekolah seoptimal mungkin.

3. Keterbukaan

Manajemen dalam konteks MBS dilakukan secara terbuka atau transparan, sehingga seluruh warga sekolah dan pemangku kepentingan dapat mengetahui mekanisme pengelolaan sumber daya sekolah. Selanjutnya sekolah memperoleh kepercayaan dan dukungan dari pemangku kepentingan. Keterbukaan dapat dilakukan melalui penyebarluasan informasi di sekolah dan pemberian informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sumber daya sekolah, untuk memperoleh kepercayaan publik terhadap sekolah. Tumbuhnya kepercayaan publik merupakan langkah awal dalam meningkatkan peran serta masyarakat terhadap sekolah.

4. Kemitraan

Kemitraan yaitu jalinan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat, baik individu, kelompok/organisasi, maupun dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Dalam prinsip kemitraan antara sekolah dengan masyarakat dalam posisi sejajar, yang melaksanakan kerjasama saling menguntungkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Keuntungan yang diterima sekolah antara lain meningkatnya kemampuan dan keterampilan peserta didik, meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sekolah, diperolehnya sumbangan ide untuk pengembangan sekolah, diperolehnya sumbangan dana untuk peningkatan mutu sekolah, dan terbantunya tugas kepala sekolah dan guru. Keuntungan bagi masyarakat biasanya dirasakan secara tidak langsung, misalnya tersedianya tenaga kerja terdidik, terbinanya anggota masyarakat yang berakhlakul karimah, dan terciptanya

tertib sosial. Sekolah bisa menjalin kemitraan, antara lain dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dunia usaha, dunia industri, lembaga pemerintah, organisasi profesi, organisasi pemuda, dan organisasi wanita.

5. Partisipatif

Partisipatif dimaksudkan sebagai keikutsertaan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan sekolah dalam mengelola sekolah dan pembuatan keputusan. Keikutsertaan mereka dapat dilakukan melalui prosedur formal yaitu komite sekolah, atau keterlibatan pada kegiatan sekolah secara insidental, seperti peringatan hari besar nasional, mendukung keberhasilan lomba antar sekolah, atau pengembangan pembelajaran. Bentuk partisipasi dapat berupa sumbangan tenaga, dana, dan sarana prasarana, serta bantuan teknis dalam rangka pengembangan sekolah.

6. Efisiensi

Efisiensi dapat diartikan sebagai penggunaan sumberdaya (dana, sarana prasarana dan tenaga) dengan jumlah tertentu untuk memperoleh hasil seoptimal mungkin. Efisiensi juga berarti hemat terhadap pemakaian sumberdaya namun tetap dapat mencapai sasaran peningkatan mutu sekolah.

7. Akuntabilitas

Akuntabilitas menekankan pada pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan di sekolah utamanya pencapaian sasaran peningkatan mutu sekolah. Sekolah dalam mengelola sumberdaya berdasar pada peraturan perundangan dan dapat mempertanggungjawabkan kepada pemerintah, seluruh warga sekolah dan pemangku kepentingan lainnya. Pertanggungjawaban meliputi implementasi proses dan komponen manajemen sekolah. Pertanggungjawaban dapat dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis disertai bukti-bukti administratif yang sah dan bukti fisik (seperti bangunan gedung, bangku, dan alat-alat laboratorium).

Sejalan dengan adanya pemberian otonomi yang lebih besar terhadap sekolah untuk mengambil keputusan, maka implementasi ketujuh prinsip MBS di sekolah sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah. Sekolah boleh menambah prinsip implementasi MBS yang sesuai dengan karakteristik sekolah, guna mempercepat upaya peningkatan mutu sekolah baik secara akademis maupun non akademis.

F. Proses MBS

1. Perencanaan

Perencanaan adalah proses menetapkan tujuan, kegiatan, sumber daya, waktu, tempat dan prosedur penyelenggaraan komponen manajemen berbasis sekolah. Dalam kaitannya dengan perencanaan sekolah berkaitan dengan dua hal sebagaimana dijelaskan oleh Tatang (2015:125) sebagai berikut:

- a. Perencanaan yang berkaitan dengan sekolah sebagai lembaga pendidikan.
- b. Perencanaan sekolah berkaitan dengan pendidikan yaitu proses merumuskan program yang dilakukan sekolah pada masa yang akan datang. Perencanaan menduduk posisi strategis maka sekolah harus memiliki program yang baik. Selain itu tingkatan kualitas dan keunggulan sekolah dapat dilihat dari seberapa baik perencanaan yang dimilikinya. Pada era otonomi daerah seperti saat ini, perencanaan pendidikan yang patut dipilih adalah perencanaan pendidikan berbasis sekolah.

Perencanaan meliputi beberapa hal pokok sebagai berikut:

- a. Asumsi yang berdasarkan fakta-fakta, artinya perencanaan hendaknya disusun berdasarkan asumsi yang didukung dengan fakta atau bukti yang ada. Hal ini menjadi penting karena hasil perencanaan merupakan dasar bagi pelaksanaan kegiatan atau aktivitas.
- b. Alternatif atau pilihan sebagai dasar penentuan kegiatan yang akan dilakukan, artinya penyusunan rencana perlu memperhatikan berbagai alternatif sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Tujuan yang ingin dicapai, perencanaan merupakan suatu alat/sarana untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan kegiatan.
- d. Bersifat memprediksi sebagai langkah untuk mengantisipasi kemungkinan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perencanaan.
- e. Kebijaksanaan sebagai hasil keputusan yang harus dilaksanakan.

Untuk itu maka syarat-syarat perencanaan dalam manajemen sekolah meliputi: (1) tujuan yang jelas, (2) sederhana, (3) realistis, (4) praktis, (5) terinci, (6) fleksibel, (7) menyeluruh, dan (8) efektif dan efisien. Untuk itu perencanaan perlu menjawab 5 W dan 1 H (*why, what, who, when, where, dan how*). Produk perencanaan adalah

rencana kegiatan. Secara spesifik penjelasan tentang 5 W dan 1 H dipaparkan dalam Tabel 3.1.

Tabel 8.1 Tata Cara Menyusun Perencanaan Sekolah

No	5 W dan 1 H	Penjelasan
1	<i>Why</i>	Latar belakang kegiatan komponen manajemen sekolah yang sedang direncanakan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Sejarah kegiatan • Peraturan perundangan yang melandasi kegiatan • Pentingnya komponen manajemen tersebut dilaksanakan
2	<i>What</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep dasar komponen manajemen sekolah yang sedang direncanakan: pengertian, tujuan, dan prinsip-prinsip • Jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan • Rincian sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan (manusia, dana, sarana dan prasarana)
3	<i>Who</i>	Pelaksana kegiatan komponen manajemen sekolah yang sedang direncanakan.
4	<i>When</i>	Rincian waktu atau jadwal pelaksanaan manajemen sekolah yang sedang direncanakan.
5	<i>Where</i>	Rincian tempat kegiatan pelaksanaan untuk tiap-tiap jenis kegiatan yang sedang direncanakan.
6	<i>How</i>	<i>Standard Operational Procedure (SOP)</i> , berupa prosedur pelaksanaan kegiatan komponen manajemen sekolah yang sedang direncanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa perencanaan program meliputi: (1) perumusan visi, (2) perumusan misi, (3) perumusan tujuan, dan (4) perumusan rencana kerja sekolah.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi merupakan rumusan umum mengenai tindakan (upaya-upaya) yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Tujuan yaitu rumusan mengenai apa yang diinginkan pada kurun waktu tertentu; Sasaran/tujuan situasional adalah rumusan spesifik mengenai apa yang diinginkan pada kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan tantangan nyata yang dihadapi (sasaran merupakan jabaran tujuan).

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah proses menghubungkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi tertentu dan menyatupadukan tugas serta fungsinya dalam organisasi. Dalam proses pengorganisasian dilakukan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara terperinci berdasarkan bagian dan bidang masing-masing sehingga terintegrasikan hubungan kerja yang sinergis, kooperatif yang harmonis dan seirama dalam mencapai tujuan yang telah disepakati (Tatang, 2015:143).

Dari penjelasan di atas dapatlah dipahami bahwa pengorganisasian adalah proses kegiatan memilih, membentuk hubungan kerja, menyusun deskripsi tugas dan wewenang orang-orang yang terlibat dalam kegiatan komponen manajemen sekolah tertentu sehingga terbentuk kesatuan tugas dan struktur organisasi yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan peningkatan mutu sekolah.

Memilih orang-orang yang dilibatkan dalam kegiatan tertentu mempertimbangkan karakteristik dan latar belakang yang bersangkutan, antara lain: karakteristik fisik dan psikis (minat, kemampuan, emosi, kecerdasan, dan kepribadian); serta latar belakang (pendidikan, pengalaman, dan jabatan sebelumnya). Membentuk hubungan kerja menjadi satu kesatuan berarti bahwa penempatan orang-orang dalam kegiatan tertentu dibentuk berupa susunan dan atau struktur organisasi, lengkap dengan deskripsi tugas dan wewenangnya.

Prinsip-prinsip pengorganisasian yaitu: (1) adanya kejelasan tugas dan wewenang, (2) adanya kesatuan perintah, (3) fleksibel, (4) semua orang atau unit kerja memahami tujuan yang akan dicapai, (5) Teknik dalam penggunaan sumber daya, dan (6) Memahami strategi dan metode/ teknik yang digunakan dalam melaksanakan tugasnya.

Struktur organisasi sekolah berisi tentang sistem penyelenggaraan dan administrasi yang diuraikan secara jelas dan transparan. Semua pimpinan, pendidik, dan tenaga kependidikan mempunyai uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas tentang keseluruhan penyelenggaraan dan administrasi sekolah.

Pedoman yang mengatur tentang struktur organisasi sekolah yaitu: (1) memasukkan unsur staf administrasi dengan wewenang dan tanggungjawab yang jelas untuk menyelenggarakan administrasi secara optimal, (2) dievaluasi secara berkala untuk melihat efektifitas mekanisme kerja pengelolaan sekolah, dan (3) diputuskan oleh kepala sekolah dengan mempertimbangkan pendapat dari komite sekolah.

Kepala sekolah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan pengelolaan sekolah. Guru melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai agen pembelajaran yang memotivasi, memfasilitasi, mendidik, membimbing, dan melatih peserta didik sehingga menjadi manusia berkualitas dan mampu mengaktualisasikan potensi kemanusiaannya secara optimum.

Konselor melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik. Tenaga perpustakaan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan pengelolaan sumber belajar di perpustakaan. Tenaga laboratorium melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya membantu guru mengelola kegiatan praktikum di laboratorium. Teknisi sumber belajar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran. Tenaga administrasi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan pelayanan administratif. Tenaga kebersihan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan layanan kebersihan lingkungan.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan berarti implementasi dari perencanaan dan pengorganisasian yang telah disusun. Dalam pelaksanaan perlu diberikan motivasi, supervisi, dan pemantauan. Pemberian motivasi merupakan upaya mendorong pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah agar selalu meningkatkan mutu kegiatan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.

Supervisi yaitu pemberian bantuan perbaikan dan pengembangan kegiatan implementasi komponen manajemen sekolah agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan peningkatan mutu sekolah. Supervisi meliputi supervisi manajerial dan akademik, yang dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh kepala sekolah, atasan dan pemangku kepentingan lainnya. Pemantauan dilakukan oleh kepala sekolah, atasan, dan pemangku kepentingan lainnya secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan komponen manajemen sekolah. Prinsip pelaksanaan meliputi: (1) penetapan standar operasional kegiatan, (2) penentuan ukuran keberhasilan kegiatan, (3) melakukan pengembangan kegiatan atau tindakan koreksi jika diperlukan.

Pelaksanaan kegiatan sekolah yang tidak sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan perlu mendapat persetujuan melalui rapat dewan pendidik dan komite sekolah. Kepala sekolah bertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan bidang akademik pada rapat dewan pendidik dan bidang non-akademik pada rapat komite sekolah dalam bentuk laporan pada akhir tahun ajaran yang disampaikan sebelum penyusunan rencana kerja tahunan berikutnya.

Dalam melaksanakan program sekolah, sekolah membuat dan memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait. Perumusan pedoman sekolah: (1) mempertimbangkan visi, misi dan tujuan sekolah, dan (2) ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Pedoman sekolah berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan operasional. Pedoman pengelolaan sekolah meliputi:

- a. Implementasi kurikulum.
- b. Kalender pendidikan/akademik.
- c. Struktur organisasi sekolah.
- d. Pembagian tugas di antara guru.
- e. Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan.
- f. Peraturan akademik.
- g. Tata tertib sekolah.
- h. Kode etik sekolah.
- i. Biaya operasional sekolah.

4. Pengawasan

Pengawasan diartikan sebagai proses kegiatan untuk membandingkan antara standar yang telah ditetapkan dengan hasil pelaksanaan kegiatan. Pengawasan berguna untuk mengukur keberhasilan dan penyimpangan, memberikan laporan dan menerapkan sistem umpan balik bagi keseluruhan kegiatan komponen manajemen sekolah. Pengawasan meliputi kegiatan evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Kegiatan pengawasan juga didasarkan atas kegiatan pemberian motivasi, pengarahan, supervisi, dan pemantauan.

Sekolah menyusun program pengawasan secara obyektif, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Penyusunan program pengawasan di sekolah didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan. Program pengawasan disosialisasikan ke seluruh pendidik dan tenaga kependidikan. Pengawasan pengelolaan sekolah meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pemantauan pengelolaan sekolah dilakukan oleh komite sekolah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkelanjutan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan. Supervisi pengelolaan akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah.

Guru melaporkan hasil evaluasi dan penilaian sekurang-kurangnya setiap akhir semester yang ditujukan kepada kepala sekolah dan orang tua/wali peserta didik. Tenaga kependidikan melaporkan pelaksanaan teknis dari tugas masing-masing sekurang-kurangnya setiap akhir semester yang ditujukan kepada kepala sekolah.

Kepala sekolah secara terus menerus melakukan pengawasan pelaksanaan tugas tenaga kependidikan. Kepala sekolah melaporkan hasil evaluasi kepada komite sekolah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.

Pengawas sekolah melaporkan hasil pengawasan di sekolah kepada bupati/walikota melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan sekolah yang bersangkutan, setelah dikonfirmasi pada sekolah terkait. Pengawas melaporkan hasil pengawasan di Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota, setelah dikonfirmasi pada sekolah terkait.

Setiap pihak yang menerima laporan hasil pengawasan menindaklanjuti laporan hasil pengawasan tersebut dalam rangka meningkatkan mutu sekolah, termasuk memberikan sanksi atas penyimpangan yang ditemukan. Sekolah mendokumentasikan dan menggunakan hasil pemantauan, supervisi, evaluasi, dan pelaporan serta catatan tindak lanjut untuk memperbaiki kinerja sekolah, dalam pengelolaan pembelajaran dan pengelolaan secara keseluruhan.

Sekolah melakukan evaluasi diri terhadap kinerja sekolah. Sekolah menetapkan prioritas indikator untuk mengukur, menilai kinerja, dan melakukan perbaikan dalam rangka pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan. Evaluasi diri sekolah dilakukan secara periodik berdasar pada data dan informasi yang sah. Sekolah melaksanakan: (1) evaluasi proses pembelajaran secara periodik, sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, pada akhir semester akademik, dan (2) evaluasi program kerja tahunan secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, pada akhir tahun anggaran sekolah.

Dalam proses pengawasan sekolah, sekolah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengikuti akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekolah harus selalu berusaha meningkatkan status akreditasi, dengan menggunakan lembaga akreditasi eksternal yang memiliki legitimasi. Sekolah harus terus meningkatkan kualitas kelembagaannya secara holistik dengan menindaklanjuti saran-saran hasil akreditasi.

G. Komponen MBS

1. Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran

Manajemen kurikulum dan pembelajaran berbasis sekolah adalah pengaturan kurikulum dan pembelajaran yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum dan pembelajaran di sekolah, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip implementasi manajemen berbasis sekolah.

Merujuk pada Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Nasional Pendidikan, kegiatan pembelajaran didasarkan pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi,

dan peraturan pelaksanaannya, serta Standar Proses dan Standar Penilaian. Mutu pembelajaran di sekolah dikembangkan dengan:

- a. Model kegiatan pembelajaran yang mengacu pada standar proses, melibatkan peserta didik secara aktif, demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong kreativitas, dan dialogis.
- b. Tujuan agar peserta didik mencapai pola pikir dan kebebasan berpikir sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual yang berupa berpikir, berargumentasi, mempertanyakan, mengkaji, menemukan, dan memprediksi.
- c. Pemahaman bahwa keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses belajar yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam untuk mencapai pemahaman konsep, tidak terbatas pada materi yang diberikan oleh guru.

Kepala sekolah bertanggungjawab terhadap kegiatan pembelajaran sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Pemerintah. Setiap guru bertanggungjawab terhadap mutu perencanaan kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diampunya agar peserta didik mampu:

- a. Meningkatkan rasa ingin tahunya.
- b. Mencapai keberhasilan belajarnya secara konsisten sesuai dengan tujuan pendidikan.
- c. Memahami perkembangan pengetahuan dengan kemampuan mencari sumber informasi.
- d. Mengolah informasi menjadi pengetahuan.
- e. Menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah; mengkomunikasikan pengetahuan pada pihak lain.
- f. Mengembangkan belajar mandiri dan kelompok dengan proporsi yang wajar.

Setiap guru bertanggungjawab terhadap mutu kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diampunya dengan cara:

- a. Merujuk perkembangan metode pembelajaran mutakhir.
- b. Menggunakan metoda pembelajaran yang bervariasi, inovatif dan tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran; menggunakan fasilitas, peralatan, dan alat bantu yang tersedia secara efektif dan efisien.
- c. Memperhatikan sifat alamiah kurikulum, kemampuan peserta didik, dan pengalaman belajar sebelumnya yang bervariasi serta kebutuhan khusus

bagi peserta didik dari yang mampu belajar dengan cepat sampai yang lambat.

- d. Memperkaya kegiatan pembelajaran melalui lintas kurikulum, hasil-hasil penelitian dan penerapannya; mengarahkan kepada pendekatan kompetensi agar dapat menghasilkan lulusan yang mudah beradaptasi, memiliki motivasi, kreatif, mandiri, mempunyai etos kerja yang tinggi, memahami belajar seumur hidup, dan berpikir logis dalam menyelesaikan masalah.

Ruang lingkup manajemen kurikulum dan pembelajaran berbasis sekolah meliputi:

- 1) Implementasi kurikulum.
- 2) Penyusunan Kalender Pendidikan.
- 3) Pembagian tugas mengajar dan penyusunan jadwal mengajar.
- 4) Proses pembelajaran meliputi: perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran, analisis hasil penilaian, tindak lanjut hasil penilaian (program remedial dan pengayaan), dan pengawasan melalui supervisi pembelajaran
- 5) Penyusunan peraturan akademik
- 6) Penentuan beban belajar meliputi: sistem pembelajaran dan beban belajar
- 7) Pemilihan strategi pembelajaran aktif kreatif, inovatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM).
- 8) Pengawasan dan evaluasi serta pelaporan.

Manajemen kurikulum mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Proses perencanaan kurikulum meliputi menganalisis dan menjabarkan silabus, menyusun program tahunan pembelajaran, program semester, program satuan pelajaran dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian tahap mengorganisasikan kurikulum meliputi proses membagi tugas guru, membuat jadwal pelajaran, menata program perbaikan atau pengayaan, penataan program ekstra kurikuler, melakukan pembinaan/penyegaran guru.

Selanjutnya dapat dipahami bahwa pelaksanaan pembelajaran mencakup pelaksanaan tugas mengajar, dan supervisi pembelajaran oleh kepala sekolah. Sedangkan tahap pengendalian merupakan proses penggunaan sumber daya guru dan staf, biaya, waktu, sarana

prasarana/fasilitas, dan pengendalian kualitas produk/lulusan sekolah, naik kelas dan lulusan.

2. Manajemen Peserta Didik

Manajemen peserta didik berbasis sekolah adalah pengaturan peserta didik yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan peserta didik di sekolah, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip implementasi MBS.

Berdasarkan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa sekolah menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional mengenai proses penerimaan peserta didik yang meliputi kriteria calon peserta didik, tata cara penerimaan peserta didik di sekolah, dan orientasi peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru di sekolah dilakukan: (1) secara obyektif, transparan, dan akuntabel sebagaimana tertuang dalam aturan sekolah, (2) tanpa diskriminasi atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi bagi sekolah penerima subsidi dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dan (3) sesuai dengan daya tampung sekolah.

Ruang lingkup manajemen peserta didik berbasis sekolah meliputi:

1) Pendataan calon peserta didik.

Pendataan peserta didik merupakan kegiatan pendataan jumlah anak didik secara akurat dalam angka menentukan animo dan kapasitas penerimaan peserta didik yang akan datang, sesuai dengan daerah jangkauan sekolah. Dengan data yang akurat anak-anak calon peserta didik, maka dapat diproyeksikan dengan tepat berapa jumlah calon peserta didik pada tahun tertentu.

Teknik yang digunakan antara lain: analisis kohort, atau dengan pencatatan periodik, buku daftar siswa tiap tahun, dan perkembangan anak usia sekolah di daerah tertentu. Kegiatan sensus sekolah dapat dilakukan bekerjasama dengan instansi lain, misalnya Badan Pusat Statistik, Komite sekolah, Dewan Pendidikan, dan Petugas Sensus Penduduk di daerah. Selanjutnya yang dilakukan sekolah meliputi: (a) mengadakan sensus calon siswa minimal 5 tahun yang akan datang, (b) melaporkan jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga

kependidikan yang ada saat ini, dan (c) mengusulkan jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan saat ini sampai dengan lima tahun yang akan datang.

- 2) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Tujuan PPDB adalah memberikan layanan bagi anak usia sekolah/lulusan untuk memasuki satuan pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah, dan berkualitas. Prinsip PPDB meliputi: (a) semua anak usia sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi, (b) tidak ada penolakan PPDB bagi yang memenuhi syarat, kecuali jika daya tampung di sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan ketentuan waktu proses PPDB telah berakhir, dan (c) sejak awal pendaftaran calon peserta didik dapat menentukan pilihannya, ke sekolah negeri atau ke sekolah swasta

Asas PPDB terdiri atas: (a) objektif, artinya bahwa PPDB baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan, (b) transparan, artinya PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, (c) akuntabel, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya, (d) tidak diskriminatif, artinya PPDB tidak membedakan Suku, Agama, dan Golongan, dan (e) kompetitif, artinya PPDB dilakukan melalui seleksi berdasarkan kompetensi yang disyaratkan oleh satuan pendidikan tertentu.

- 3) Pengenalan sekolah/orientasi peserta didik. Dalam Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan dinyatakan bahwa orientasi bagi peserta didik baru bersifat akademik dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan dengan pengawasan guru.
- 4) Pengelompokan peserta didik. Pengelompokan disebut pula *grouping* atau *classification* (klasifikasi). Pengelompokan peserta didik didasarkan asumsi bahwa: (a) peserta didik memiliki sejumlah kesamaan sekaligus memiliki sejumlah perbedaan satu dengan lainnya, (b)

perkembangan atau kematangan peserta didik satu dengan lainnya bisa berbeda. Agar kematangan yang lebih dulu tidak menunggu kematangan yang lambat, atau sebaliknya, maka peserta didik perlu dikelompokkan berdasarkan tingkat kematangannya, (c) memudahkan pelayanan kepada peserta didik yang memiliki karakteristik tertentu yang hampir sama, misalnya kemampuan, dan (d) engan pengelompokan tertentu, peserta didik lebih mudah dikenali, dan lebih mudah memberikan pelayanan secara individual yang optimal.

Jenis-jenis pengelompokan peserta didik antara lain: (a) *ability grouping* yaitu pengelompokan yang didasarkan kemampuan peserta didik dalam *setting* sekolah. Peserta didik di sekolah dikelompokkan berdasarkan kemampuannya, di mana peserta didik yang pandai dikelompokkan bersama peserta didik yang pandai pula, dan sebaliknya yang kurang pandai dikelompokkan bersama dengan yang kurang pandai dalam seting sekolah, dan (b) *sub grouping with in the class* yaitu pengelompokan berdasarkan kemampuan peserta didik dalam seting kelas. Peserta didik pada tiap-tiap kelas dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil berdasarkan karakteristik individu. Dalam hal ini memungkinkan seorang peserta didik masuk ke dalam lebih dari satu kelompok.

Macam-macam *sub grouping with in the class* antara lain: (1) *Interest grouping*, yaitu pengelompokan berdasarkan minat peserta didik. Peserta didik yang berminat pada kegiatan tertentu atau pokok bahasan tertentu membentuk kelompok yang sama, (2) *Special need grouping*, adalah pengelompokan berdasarkan kebutuhan khusus peserta didik, misalnya ketrampilan khusus, (3) *Team grouping*, yakni pengelompokan yang dibentuk karena dua atau lebih peserta didik ingin bekerja sama atau belajar bersama untuk memecahkan masalah khusus, (4) *Tutorial grouping*, yaitu peserta didik bersama guru merencanakan kegiatan belajarnya dalam kelompok. Dengan demikian kegiatan yang dilaksanakan kelompok direncanakan antara peserta didik dan guru. Kegiatan kelompok satu dengan lainnya bisa berbeda, karena kelompok memiliki otonomi menentukan kegiatannya guna mencapai tujuan atau membahas tema tertentu, (5) *Research*

grouping, adalah pengelompokan peserta didik yang terdiri atas dua atau lebih anggota dalam rangka menemukan sesuatu dan melaporkan di depan kelas. Sistem kerja dalam penelitian bervariasi satu kelompok dengan lainnya sesuai kesepakatan kelompok, (6) *Full class grouping*, yakni pengelompokan dalam kelas yang dimana mereka ingin mempelajari atau memperoleh pengalaman yang sama tiap kelompok, misalnya berlatih drama, tari, musik atau lainnya, (7) *Combined class grouping*, dimana beberapa kelas dikelompokkan menjadi satu dalam rangka memperoleh pengalaman atau kegiatan yang sama, misalnya menonton film pendidikan, slide, TV, atau media *audio visual* lainnya, (8) *Friendship grouping*, adalah pengelompokan peserta didik berdasarkan pertemanan/keakraban mereka. Dalam hal ini yang menentukan pemimpin dan anggota kelompok adalah peserta didik sendiri berdasarkan keakraban mereka dengan asumsi bahwa dengan keakraban mereka memperoleh hasil yang lebih baik dalam kelompoknya dan lebih menyenangkan dalam bekerjasama, (9) *Achievement grouping*, yaitu pengelompokan berdasarkan kemampuan atas prestasi peserta didik, (10) *Aptitude grouping*, yakni pengelompokan berdasarkan minat dan bakat peserta didik, (11) *Attention or interest grouping*, adalah pengelompokan berdasarkan minat atau perhatian mereka terhadap tema atau kegiatan tertentu, dan (12) *Intelegent grouping*, adalah pengelompokan berdasarkan hasil tes kecerdasan atau intelegensi peserta didik.

5) Pembinaan disiplin peserta didik.

Disiplin peserta didik yaitu keadaan tertib dan teratur serta tidak adanya pelanggaran peserta didik di sekolah. Untuk menegakkan disiplin peserta didik di sekolah diperlukan deskripsi hak dan kewajiban peserta didik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan hak dan kewajiban peserta didik. Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: (1) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; (2) mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; (3) mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

membiyai pendidikannya; (4) mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; (5) pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; dan (6) menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

- 6) Penyelenggaraan layanan khusus.
Layanan khusus di sekolah adalah penataan semua sumber (manusia dan non-manusia) dalam rangka penyelenggaraan layanan secara khusus guna mencapai tujuan lembaga/sekolah secara lebih optimal.
- 7) Pengawasan, evaluasi dan pelaporan.
Ruang lingkup manajemen kesiswaan di atas harus dilakukan dalam pengawasan, evaluasi dan pelaporan yang akuntabel.

Di samping ruang lingkup tersebut dalam Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Nasional Pendidikan ditambahkan ruang lingkup manajemen peserta didik yaitu: (1) memberikan layanan konseling kepada peserta didik, (2) melaksanakan kegiatan ekstra dan kokurikuler untuk para peserta didik, (3) melakukan pembinaan prestasi unggulan, dan (4) melakukan pelacakan terhadap alumni.

Dalam melakukan manajemen kesiswaan terdapat prinsip yang harus diperhatikan sebagaimana dijelaskan Syafaruddin dan Nurmawati (2011:254) bahwa terdapat 4 (empat) prinsip dalam manajemen peserta didik yaitu:

- 1) Siswa harus diperlakukan sebagai subjek bukan objek sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan dengan kegiatan mereka.
- 2) Kondisi siswa sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial, ekonomi, minat dan lainnya. Karena itu diperlukan wahana kegiatan yang beragam sehingga setiap siswa memiliki wahana untuk berkembang secara optimal.
- 3) Siswa hanya akan termotivasi belajar, jika mereka menyenangi apa yang diajarkan.
- 4) Pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, afektif dan psikomotorik.

3. Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan berbasis sekolah adalah pengaturan pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan yang terkait dengan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip implementasi manajemen berbasis sekolah.

Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, sekolah menyusun program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan. Program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan harus disusun dengan memperhatikan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan dikembangkan sesuai dengan kondisi sekolah, termasuk pembagian tugas, mengatasi bila terjadi kekurangan tenaga, menentukan sistem penghargaan, dan pengembangan profesi bagi setiap pendidik dan tenaga kependidikan serta menerapkannya secara profesional, adil, dan terbuka.

Sekolah perlu mendukung upaya:

- a. Promosi pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan asas kemanfaatan, kepatutan, dan profesionalisme.
- b. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan yang diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum dan sekolah.
- c. Penempatan tenaga kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan baik jumlah maupun kualifikasinya dengan menetapkan prioritas.
- d. Mutasi tenaga kependidikan dari satu posisi ke posisi lain didasarkan pada analisis jabatan dengan diikuti orientasi tugas oleh pimpinan tertinggi sekolah yang dilakukan setelah empat tahun, tetapi bisa diperpanjang berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan untuk tenaga kependidikan tambahan tidak ada mutasi.

Ruang lingkup manajemen pendidik dan tenaga kependidikan berbasis sekolah meliputi:

- 1) Perencanaan kebutuhan.
Mempersiapkan rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dalam jumlah yang tepat, perlu dibantu adanya data kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan serta prediksi jumlah siswa yang akan masuk di tiap-tiap sekolah di daerah

tertentu. Pemerintah kabupaten/kota perlu mengadakan pendataan pendidik dan tenaga kependidikan serta jumlah calon siswa pada kurun waktu tertentu.

Dengan adanya perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan, maka keperluan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan jenis kualifikasi dan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan dapat diperhitungkan dengan cermat. Meskipun dalam perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS di sekolah, kepala sekolah kurang memiliki kewenangan menentukan, namun sekolah tetap harus memetakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolahnya. Utamanya yang mengadakan sendiri dalam bentuk guru tidak tetap atau honorer. Dengan demikian, secara keseluruhan pada dasarnya sekolah harus merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah.

Tujuan perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan meliputi: (a) mengurangi beban kerja, mengurangi kelebihan dan kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan, (b) dasar pengembangan dan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan seoptimal mungkin, (c) meningkatkan efektifitas sekolah secara menyeluruh, dan (d) kesempatan mengadakan analisis jabatan.

2) Rekrutmen/pengadaan.

Rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan adalah usaha mencari dan mendapatkan calon-calon tenaga kerja yang potensial dengan jumlah dan kualitas yang memadai sehingga sekolah/daerah bisa memilih tenaga-tenaga yang sesuai dengan kebutuhan jabatan.

Tujuan rekrutmen meliputi: (a) menentukan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan, (b) meningkatkan jumlah calon/pelamar, (c) meningkatkan kualitas calon karena banyaknya jumlah pelamar kerja, (d) mengurangi adanya kemungkinan berhenti atau mutasi setelah diangkat, dan (e) pemerataan jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan.

Rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah meliputi kegiatan pengangkatan, penempatan dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan, yang pelaksanaannya diatur oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga yang mengangkatnya. Untuk kepentingan rekrutmen, harus memperhatikan kualifikasi dan kompetensi serta tugas dan tanggung jawab pendidik dan tenaga kependidikan yang dibutuhkan.

3) Pembinaan dan pengembangan.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakannya. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Berdasarkan standar pengelolaan pendidikan yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007, dinyatakan bahwa sekolah perlu mendukung upaya: (a) promosi pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan asas kemanfaatan, kepatutan, dan profesionalisme, (b) pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan yang diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum dan sekolah, (c) penempatan tenaga kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan baik jumlah maupun kualifikasinya dengan menetapkan prioritas, dan (d) mutasi tenaga kependidikan dari satu posisi ke posisi lain didasarkan pada analisis jabatan dengan diikuti orientasi tugas oleh pimpinan tertinggi sekolah/madrasah yang dilakukan setelah empat tahun, tetapi bisa diperpanjang berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan untuk tenaga kependidikan tambahan tidak ada mutasi.

Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain: (1) studi lanjut, (2) supervisi, (3) pelatihan, (4) pendidikan dan pelatihan, (5) lokakarya, (6) kursus ketrampilan, (7) rapat, (8) pertemuan anggota seprofesi, (9) diskusi, (10) seminar, (11) wawancara *face-to-face*, (12) studi banding, (13) kunjungan lapangan, (14) tukar pengalaman, (15) penilaian diri sendiri, dan (16) penilaian pelaksanaan pekerjaan.

Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan dengan memperhatikan prinsip dasar antara lain: (a) memotivasi pendidik dan tenaga kependidikan, (b) adanya pengakuan perbedaan individu, (c) adanya pemberian kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan praktis sesuai bidang tugasnya, (d) adanya pemberian penguatan. (e) memperhatikan tujuan belajar yang ingin dicapai, dan (f) adanya tindak lanjut.

4) Pemberian motivasi.

Pemotivasian dapat dimaknai pemberian penguatan positif dan negatif kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Penguatan positif diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang menunjukkan kinerja atau prestasi yang baik, sebaliknya yang menunjukkan kinerja atau prestasi yang buruk diberikan pembinaan. Penguatan positif berhubungan pula dengan pemenuhan kewajiban bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Bagi mereka yang telah memenuhi kewajibannya secara kompetitif dipertimbangkan untuk diberikan penguatan positif.

Diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 40, bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban: (a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, (b) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pemotivasian juga dapat berupa pemenuhan hak bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 40, bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh: (a) penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, (b) penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas,(c) pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas,(d) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual, dan (e) kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

5) Mutasi/Rotasi kerja.

Mutasi pendidik dan tenaga kependidikan dari satu posisi ke posisi lain didasarkan pada analisis jabatan/tugas, yang dilakukan kepala sekolah atau penyelenggara pendidikan sesuai keperluan. Mutasi juga bertujuan untuk penyegaran dan pemberian pengalaman kepada pendidik dan tenaga kependidikan.

6) Pemberhentian.

Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai negeri sipil didasarkan atas peraturan perundangan yang berlaku. Pemberhentian PNS diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 atau peraturan lain yang berlaku di daerah. Pemberhentian PNS daerah yang berpangkat Pembina Tingkat I (golongan IV/b) ke bawah ditetapkan oleh Pembina Pegawai Daerah. Khusus untuk pemberhentian PNS pusat daerah karena mencapai batas usia pensiun, meninggal dunia, cacat karena dinas ditetapkan oleh BKN. Sedangkan yang berstatus bukan pegawai negeri diatur tersendiri oleh sekolah atau penyelenggara pendidikan.

Secara umum pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan disebabkan antara lain: (1) menggunakan hak pensiun, (2) permintaan sendiri, (3) sakit fisik atau mental, (4) hukuman jabatan, (5) keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan (6) meninggal dunia.

- 7) Pengawasan, evaluasi kinerja dan pelaporan.
Ruang lingkup manajemen pendidik dan tenaga kependidikan di atas harus dilakukan dalam pengawasan, evaluasi kinerja dan pelaporan yang akuntabel.

4. Manajemen Sarana dan Prasarana

Manajemen sarana dan prasarana berbasis sekolah adalah pengaturan sarana dan prasarana yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan sarana dan prasarana di sekolah, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip implementasi manajemen berbasis sekolah.

Dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa sekolah menetapkan kebijakan program secara tertulis mengenai pengelolaan sarana dan prasarana. Program pengelolaan sarana dan prasarana mengacu pada Standar Sarana dan Prasarana dalam hal:

- a. Merencanakan, memenuhi dan mendayagunakan sarana dan prasarana pendidikan.
- b. Mengevaluasi dan melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana agar tetap berfungsi mendukung proses pendidikan.
- c. Melengkapi fasilitas pembelajaran pada setiap tingkat kelas di sekolah.
- d. Menyusun skala prioritas pengembangan fasilitas pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing tingkat.
- e. Pemeliharaan semua fasilitas fisik dan peralatan dengan memperhatikan kesehatan dan keamanan lingkungan.

Seluruh program pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan disosialisasikan kepada pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik. Pengelolaan sarana prasarana sekolah: (1) direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik dengan mengacu Standar Sarana dan Prasarana, dan (2) dituangkan dalam rencana pokok (*master plan*) yang meliputi gedung dan laboratorium serta pengembangannya.

Ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana berbasis sekolah meliputi:

1) Analisis kebutuhan dan perencanaan.

Perencanaan sarana dan prasarana membutuhkan kegiatan analisis kebutuhan. Kebutuhan sarana dan prasarana sekolah bersifat dinamis bukan statis. Oleh sebab itu kebutuhan sarana dan prasarana di suatu sekolah bisa berbeda pada tahun tertentu dengan tahun sebelum dan sesudahnya. Analisis kebutuhan sarana dan prasarana sekolah dilakukan bersama antara pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, wali murid, komite sekolah dan *stakeholders* lainnya.

Analisis kebutuhan dilakukan melalui: (a) mendata keperluan sarana dan prasarana pada menjelang tahun ajaran baru, dan (b) mengidentifikasi/mendata sarana dan prasarana yang ada dan masih dalam kondisi baik, yang perlu diperbaiki karena rusak ringan dan yang perlu dihapus karena rusak berat.

2) Pengadaan.

Pengadaan sarana dan prasarana adalah proses memikirkan dan menetapkan program pengadaan sarana dan prasarana sekolah pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Perencanaan sarana dan prasarana harus jelas dan rinci spesifikasinya, antara lain jumlah, jenis, serta harganya. Di samping itu memperhatikan faktor *utility* yaitu kegunaannya di sekolah dan standar kualitasnya. Dalam pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana sekolah dianjurkan sekolah membuat daftar cek, tentang sarana dan prasarana yang sudah diadakan dan belum.

Langkah-langkah pengadaan meliputi: (a) menampung usulan semua pengadaan dari berbagai sumber seperti guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, *stakeholders*, (b) menyesuaikan dengan analisis kebutuhan yang sudah dibuat sebelumnya, (c) menyesuaikan antara kebutuhan sarana dan prasarana baru dengan anggaran yang tersedia, dan (d) menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana dalam kurun waktu minimum 1 tahun.

3) Inventarisasi.

Inventarisasi sarana dan prasarana adalah kegiatan pencatatan dan pembuatan kode barang serta pembuatan laporan pengadaan barang. Pencatatan sarana dan prasarana di sekolah dilakukan pada: (a) buku penerimaan barang, mencatat semua barang yang diterima sekolah, (b) buku asal-usul barang, mencatat asal usul barang seperti pembelian, hibah/hadiah/sumbangan, tukar menukar, dan meminjam/menyewa, (c) buku golongan inventaris, sebagai buku pembantu untuk mencatat barang inventaris menurut golongan barang yang telah ditentukan, (d) buku induk inventaris, mencatat semua barang inventaris milik Negara atau yayasan dalam lingkungan sekolah menurut urutan tanggal penerimaannya, (e) buku bukan inventaris, mencatat semua barang habis pakai seperti: kapur, pensil, penghapus papan tulis, kertas HVS, tinta, dan sebagainya, dan (f) buku stok barang, mencatat barang habis pakai yang masuk/ diterima dan barang yang keluar/ digunakan dan sisa barang/stok barang.

Kode khusus diberikan terhadap barang yang tergolong barang inventaris. Kode ditulis pada barang inventaris, diletakkan di tempat yang mudah dibaca. Kode berbentuk numeric yang menunjukkan kementerian, asal barang, sekolah, dan jenis barang. Keadaan dan jumlah sarana dan prasarana sekolah harus dilaporkan secara berkala misalnya tiap 3 bulan, 1 semester, dan 1 tahun.

4) Pendistribusian dan pemanfaatan.

Sarana dan prasarana yang sudah diinventarisasi, didistribusikan sesuai dengan penggunaannya, untuk selanjutnya dimanfaatkan sesuai keperluan. Pemanfaatan barang harus memperhatikan prinsip efisien dan efektif. Pemanfaatan atau penggunaan sarana dan prasarana sekolah memperhatikan dan dibuatkan SOP nya agar ada pengaturan yang jelas tentang pemanfaatan sarana dan prasarana tertentu.

Jika sarana dan prasarana yang ada di sekolah melebihi dari jumlah penggunanya, maka pengaturan penggunaan tidak terlalu penting. Sebaliknya jika jumlah sarana dan prasarana lebih sedikit dibandingkan dengan pemakainya, maka

penggunaannya harus diatur. Penggunaan ruang kelas ada yang system plot dan non plot. Sistem plot adalah salah satu ruang digunakan hanya untuk kelas/ruang tertentu, misalnya untuk kelas XA, XIIB, dan lainnya. Jika sistem plot yang digunakan, maka pengaturan ruang tidak terlalu menjadi persoalan. Namun jika sistem penggunaan ruang dengan nonplot, maka harus dibuatkan pengaturan jadwalpemakaian tiap jam, hari dan minggu, yang ditempel pada ruang yang bersangkutan.

Alat-alat elektronik dan alat lain yang mahal atau relatif sulit pengoperasiannya harus dibuatkan cara pemakaian secara jelas. Karena alat-alat demikian kadang petunjuk cara pemakaian diredaksikan dalam bahas asing dan belum tentu diketahui oleh pemakainya. Oleh sebab itu perlu dibuatkan petunjuk cara pemakaiannya dengan bahasa yang mudah dimengerti bahkan jika mungkin disertai gambar agar lebih jelas.

Sekolah harus memiliki buku pengguna sarana dan prasarana agar diketahui pendidik dan tenaga kependidikan siapa saja yang rajin dan tidak rajin menggunakan/pinjam sarana dan prasarana sekolah. Untuk pemerataan, bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak pernah memakaimeminjam dimotivasi untuk menggunakannya. Dengan daftar peminjam/pengguna juga dapat diketahui spesifikasi barang yang lebih sering dipinjam/digunakan dan mana yang jarang atau tidak pernah. Ini penting untuk pengadaan sarana dan prasarana yang akan datang, dengan memperhatikan spesifikasi barang yang sering dan tidak pernah dipinjam.

5) Pemeliharaan.

Sarana dan prasarana di sekolah idealnya adalah selalu siap pakai. Untuk itu, sarana dan prasarana harus ditata, digunakan dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, sarana dan prasarana di sekolah lebih enak dipandang, mudah digunakan dan tidak cepat rusak.

Macam-macam pemeliharaan yang dilakukan sekolah dibedakan menjadi dua yaitu: (1) ditinjau dari sifatnya, pemeliharaan sarana dan prasarana

dibedakan menjadi empat, yaitu: pertama, pemeliharaan yang bersifat pengecekan, pencegahan, perbaikan ringan dan perbaikan berat, dan (2) ditinjau dari waktu pemeliharaan dibedakan ada pemeliharaan setiap hari misalnya menyapu, mengepel, membersihkan pintu; dan pemeliharaan berkala, contohnya pengontrolan genting dan pengecatan tembok.

Pemeliharaan sehari-hari yang dilakukan sekolah juga menyangkut pemakaian aliran listrik, misalnya pada siang hari di ruang yang sudah cukup mendapat penerangan dari sinar matahari tidak usah menggunakan lampu, pada malam hari untuk ruang yang tidak digunakan lampu dimatikan; pemakaian panel/kotak sekering; bola-bola lampu mungkin ada yang putus/mati harus segera diganti. Pemeriksaan berkala antara lain dilakukan pada pemakaian listrik dan air, apakah ada kelainan atau kejanggalan. Kabel-kabel juga diperiksa secara berkala, jika ada kerusakan kecil diperbaiki sendiri, jika tidak bisa maka mendatangkan petugas PLN.

Yang perlu juga diperhatikan adalah pemeliharaan sarana dan prasarana elektronik. Pemeliharaan yang perlu dilakukan antara lain penggantian *spare-part*, penggantian dengan spesifikasi program/alat yang baru agar tidak ketinggalan. Sarana lain yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan rutin antara lain lampu, saklar, sikring, kran air, stop kontak, pesawat radio, televisi, tape recorder, VCD/DVD, *stabilizer voltage (stavolt)*, pompa air, LCD, kabel listrik, *mikrophon*, dan *sound system*. Pemeliharaan sarana tersebut membuat sarana yang bersangkutan siap pakai ketika akan digunakan.

Pemeliharaan sarana dan prasarana ada yang sifatnya ringan ada yang berat. Pemeliharaan dapat dilakukan sendiri oleh sekolah ada yang melalui jasa orang lain atau agen tertentu. Kepala sekolah harus dapat mempertimbangkan besar kecilnya pemeliharaan dan efektif tidaknya pemeliharaan yang dilakukan sendiri atau melalui jasa orang/agen lain. Dengan demikian pemeliharaan lebih efisien dari segi biaya dan waktu serta tenaga.

6) Penghapusan.

Tujuan penghapusan adalah: (a) mencegah pengeluaran yang besar untuk biaya pengamanan dan/atau pemeliharaan, dan (b) meringankan beban inventarisasi.

Barang inventaris yang boleh dihapus meliputi barang-barang yang: (a) dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi, (b) barang tidak sesuai dengan kebutuhan, (c) kuno yang penggunaannya tidak sesuai lagi dengan keperluan saat ini, (d) yang terkena larangan, (e) biaya pemeliharaannya terlalu tinggi dan tidak seimbang dengan nilai kemanfaatannya, (f) jumlahnya berlebihan dan tidak digunakan lagi, (g) hilang atau diselewengkan, dan (h) terkena bencana, misalnya terbakar, gempa, dan longsor.

Prosedur penghapusan meliputi: (a) identifikasi dan pengelompokan barang yang akan dihapus, (b) mencatat secara spesifik barang-barang yang akan dihapus (nama, merek, jenis, jumlah, keadaan, tahun pembuatan, (c) mengajukan usulan penghapusan, bisa dilakukan dengan membentuk panitia penghapusan), (d) mengadakan pemeriksaan terhadap barang-barang yang akan dihapus dan mencocokkan kembali dengan usulan yang dibuat, dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang akan dihapus, (e) pembuatan surat keputusan (dari sekolah atau Dinas Pendidikan atau Pemerintah) tentang penghapusan barang, dan (f) pelaksanaan penghapusan yang dapat dilakukan dengan cara dilelang, dibuang ke laut, dibakar, ditanam, dihibahkan atau ditukar.

7) Pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

Ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana di atas harus dilakukan dalam pengawasan, evaluasi dan pelaporan yang akuntabel.

Secara umum tujuan manajemen sarana dan prasarana adalah memberikan layanan profesional di bidang sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Tujuan pengelolaan sarana dan prasarana sebagai berikut:

- 1) Untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan

dan pengadaan yang hati-hati dan skesama. Dengan perkataan ini, melalui manajemen perlengkapan sekolah diharapkan semua perlengkapan yang didapatkan oleh sekolah adalah sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan sekolah dan dengan dana yang efisien.

- 2) Untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien.
- 3) Untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap diperlukan oleh semua personel sekolah (Bafadal, 2003:5).

Adapun sarana dan prasarana pendidikan di sekolah yang perlu dikelola adalah sarana pendidikan yang bergerak dan sarana yang tidak bergerak. Selain itu, sarana dan prasarana pendidikan di sekolah diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu: (1) sarana dan prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar yaitu ruang belajar, perpustakaan, ruang praktek, laboratorium dan lainnya, dan (2) sarana dan prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk kegiatan pembelajaran tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya kegiatan pembelajaran. Prasarana yang terkait dengan kegiatan dimaksud adalah kantor, kantin, kamar mandi/WC, unit kesehatan sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah, tempat parkir dan sebagainya.

5. Manajemen Pembiayaan

Manajemen pembiayaan berbasis sekolah adalah pengaturan pembiayaan yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan pembiayaan di sekolah, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip implementasi manajemen berbasis sekolah.

Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa sekolah harus menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional yang mengacu pada Standar Pembiayaan. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional Sekolah mengatur:

- a. Sumber pemasukan, pengeluaran dan jumlah dana yang dikelola.
- b. Penyusunan dan pencairan anggaran, serta penggalangan dana di luar dana investasi dan operasional.

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

- c. Kewenangan dan tanggungjawab kepala sekolah dalam membelanjakan anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya.
- d. Pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan anggaran, untuk dilaporkan kepada komite sekolah, serta institusi di atasnya.

Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah diputuskan oleh komite sekolah dan ditetapkan oleh kepala sekolah serta mendapatkan persetujuan dari institusi di atasnya. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah untuk menjamin tercapainya pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel.

Ruang lingkup manajemen pembiayaan berbasis sekolah meliputi:

- 1) Penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS)/Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Rencana Kerja Sekolah (RKS) adalah dokumen satuan pendidikan yang memuat Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), dan disusun empat tahun sekali. Rencana Kerja Tahunan (RKT) disusun setiap tahun oleh sekolah berdasarkan RKJM, dengan masa implementasi satu tahun. Dengan demikian, dokumen RKJM memuat rencana strategis yang akan dicapai oleh sekolah dalam jangka waktu 4 (empat) tahun, dan dokumen RKT memuat program/kegiatan strategis dan kegiatan operasional sekolah yang akan dicapai oleh sekolah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan RKS oleh sekolah didasarkan pada beberapa kebijakan. **Pertama**, Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab VIII tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 53, ayat (1) dinyatakan bahwa: "Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun". **Kedua**, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Bagian Keenam, Pasal 51 dinyatakan bahwa: "Kebijakan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar,

Dituangkan dalam: (a) rencana kerja tahunan satuan pendidikan; (b) anggaran pendapatan dan belanja tahunan satuan pendidikan; dan (c) peraturan satuan atau program pendidikan. **Ketiga**, Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang dinyatakan bahwa: sekolah wajib membuat: (1) Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan, (2) Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Jangka Menengah.

Penyusunan RKAS (RAPBS) terdiri dari tiga langkah: (a) menghitung biaya operasional, (b) menghitung rencana biaya dan sumber pendanaan program dan kegiatan operasional, dan (c) menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah.

Pada langkah menghitung biaya operasional perlu dipahami bahwa biaya operasional adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan rutin satuan pendidikan agar dapat berlangsung kegiatan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional secara teratur dan berkelanjutan.

Penghitungan biaya operasional perlu ditentukan terlebih dahulu biaya satuan pendidikan. Biaya operasionalnya meliputi: (a) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, (b) bahan atau peralatan habis pakai, dan (c) biaya operasional pendidikan tidak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dll.

Perhitungan biaya operasional satuan pendidikan dasar antara lain meliputi unsur: gaji, belanja barang habis pakai, langganan daya dan jasa, kegiatan belajar mengajar, kegiatan rapat,

peringatan hari besar, biaya perjalanan dinas dan biaya pemeliharaan sarana prasarana.

Setelah program dan kegiatan operasional dirumuskan, langkah selanjutnya adalah menghitung biaya pelaksanaan program dan kegiatan operasional tersebut sehingga dapat diketahui dengan pasti berapa besar biaya program dan kegiatan operasional yang diperlukan, dari mana sumbernya dan kecukupannya untuk melaksanakan program dan kegiatan operasional.

Setelah mengetahui berapa kebutuhan sekolah untuk membiayai program dan kegiatan operasional, maka langkah berikutnya adalah membuat Rencana Pendanaan. Rencana Pendanaan dibuat untuk memperkirakan sumber dan jumlah dana yang diperkirakan didapatkan oleh sekolah/madrasah. Beberapa sumber dana yang dapat diharapkan oleh sekolah, antara lain: BOS, BOS kab/kota, BOS Provinsi, Sumbangan Masyarakat melalui Komite Sekolah atau Paguyuban Kelas, donatur, dan sebagainya.

Rencana biaya dan sumber pendanaan program dan kegiatan operasional sekolah meliputi: pengembangan kompetensi lulusan, pengembangan proses pembelajaran, pengembangan sistem penilaian, pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan manajemen sekolah, pembinaan peserta didik dan ekstrakurikuler, budaya dan lingkungan sekolah dan pendidikan karakter dan budaya bangsa

2) Penggalian sumber-sumber.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar, terkait sumber-sumber pendanaan pendidikan dinyatakan berikut:

- a. Pendanaan pendidikan bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Prinsip keadilan berarti bahwa besarnya pendanaan pendidikan dari pemerintah,

pemerintah daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing. Prinsip kecukupan dimaksudkan bahwa pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Prinsip keberlanjutan yaitu pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

- b. Sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah: (1) anggaran pendapatan dan belanja Negara, (2) anggaran pendapatan dan belanja daerah, (3) sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya, (4) sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan dasar di luar peserta didik atau orang tua/walinya, (5) bantuan lembaga lainnya yang tidak mengikat, dan (6) bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau Sumber lain yang sah.
- c. Sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat: (1) bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan, (2) pungutan, dan/atau sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya, (3) bantuan dari masyarakat di luar peserta didik atau orang tua/walinya, (4) bantuan pemerintah, (5) bantuan pemerintah daerah, (6) bantuan pihak asing yang tidak mengikat (7) bantuan lembaga lain yang tidak mengikat, dan (8) hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan, dan/atau sumber lain yang sah.
- d. Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan masyarakat, yang tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional dapat menerima bantuan biaya operasional dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Namun jika terdapat penolakan terhadap bantuan biaya operasional, maka satuan pendidikan dilarang memungut biaya tersebut dari peserta didik atau orang tua/walinya.

- e. Pungutan yang dilakukan oleh satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: (1) didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, (2) perencanaan investasi dan/atau operasi diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, komite sekolah, dan penyelenggara satuan pendidikan dasar, (3) dimusyawarahkan melalui rapat komite sekolah, dan (4) dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan dasar terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan dasar dan disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan dasar. Sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total dana pungutan peserta didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan.
- f. Beberapa larangan terkait pungutan meliputi: (1) satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan, (2) satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapatkan bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat memungut biaya pendidikan yang digunakan hanya untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi, dan (3) satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak sedang mendapatkan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat memungut biaya satuan pendidikan.

Pungutan tidak boleh: (1) dilakukan kepada peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis; (2) dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; dan/atau (3) digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau

lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.

Bagi satuan pendidikan dasar yang telah melakukan pungutan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini harus mengembalikan sepenuhnya kepada peserta didik/orang tua/wali peserta didik. Pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana pungutan dan sumbangan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, komite sekolah, dan penyelenggara satuan pendidikan dasar.

3) Pembukuan.

Badan atau satuan pendidikan yang menerima, menyimpan dan membahas uang atau surat-surat berharga milik Negara diwajibkan membuat catatan secara tertib dan sistematis serta benar. Setiap ali pembukuan harus cepat diketahui posisi mutasi pembukuan yang paling akhir. Berdasarkan pembukuan yang baik, tertib, teratur, lengkap dan *up to date* akan dapat disajikan pelaporan yang baik, lengkap dan bermanfaat.

Sekolah diharuskan menyelenggarakan pembukuan pembiayaan sekolah. Pembukuan menyangkut sumber dana, penggunaan dan besarnya dana untuk tiap-tiap penggunaan. Untuk tertibnya pembukuan pembiayaan, sekolah harus memiliki: buku kas, legel gaji, buku kas harian, buku catatan SPMU, buku/daftar SPJ, buku pemeriksaan, buku setoran pajak, buku tabungan, daftar lembur dan atau daftar honorarium, tempat penyimpanan uang, kertas berharga dan tanda bukti pengeluaran, brand kas, pembukuan dana BOS dan Bosda, penerimaan dan penggunaan dana bantuan Komite Sekolah dan *stakeholders*, penerimaan dan penyeteroran PPh dan PPn, berita acara penutupan kas, tanda bukti pengeluaran, laporan penggunaan keuangan menurut sumbernya kepada atasan yang bersangkutan, peringatan/teguran tertulis kepada Bendaharawan apabila ada penggunaan uang yang tidak sesuai dengan tanda bukti yang ada dan penggunaan diluar rencana.

Untuk menunjang terlaksananya pengelolaan keuangan yang baik dan benar, kepala sekolah dan pengelola keuangan di sekolah hendaknya memperhatikan: (1) perlengkapan administrasi keuangan sekolah, yaitu tempat buku-buku, alat hitung, dan keperluan lain yang perlu, misalnya alat pendeteksi uang palsu; (2) RAPBS yang telah disahkan, dimana semua kegiatan yang tercantum dalam RAPBS harus dilaksanakan sebaliknya yang tidak ada dalam rencana tidak perlu dilaksanakan; dan (3) pengadministrasian keuangan, yaitu sekolah memiliki sejumlah buku untuk membukukan keuangan sekolah secara lengkap.

- 4) Penggunaan sesuai peraturan perundangan. Penggunaan pembiayaan sekolah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pos-pos anggaran tidak boleh menyimpang dari ketentuan. Dalam penggunaan keuangan sekolah utamanya keuangan yang bersumber dari pemerintah, harus memperhatikan asas umum pengeluaran keuangan Negara, yaitu manfaat penggunaan uang Negara minimal harus sama apabila uang tersebut digunakan sendiri oleh masyarakat. Asas ini sama dengan prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan APBN antara lain efisien, dan pola hidup sederhana.

Setiap menggunakan keuangan utamanya keuangan Negara ada asas-asas yang mengikat, antara lain: pembatasan-pembatasan, dan larangan-larangan. Penggunaan harus sesuai jumlahnya dengan yang sudah direncanakan, tidak boleh ditambah atau dikurangi. Kegiatan yang tidak tercantum dalam mata anggaran tidak boleh diadakan.

Keuangan yang berasal dari masyarakat, oleh sekolah bisa digunakan untuk: (1) kegiatan peningkatan mutu pendidikan seperti pengembangan guru, supervisi pendidikan, dan evaluasi, (2) kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka, PMR, olah raga, kesenian, dan berbagai lomba, (3) bahan pengajaran praktik seperti bahan dan alat praktik di laboratorium, (4) gaji dan kesejahteraan kepala sekolah, guru dan pegawai lainnya di sekolah, (5) pembelian alat kantor dan alat tulis kantor, (6) pengembangan perpustakaan, (7) pembangunan sarana fisik sekolah, (8) biaya rekening listrik, air, *telepon* dan suat menyurat, (9)

dana sosial, dan (10) pemeliharaan gedung dan sarana lainnya seperti pengecatan dan pemeliharaan lainnya.

- 5) Pengawasan, evaluasi dan pelaporan.
Ruang lingkup manajemen pembiayaan di atas harus dilakukan dalam pengawasan, evaluasi dan pelaporan yang akuntabel.

6. Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat

Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat berbasis sekolah adalah pengaturan hubungan sekolah dan masyarakat yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip implementasi manajemen berbasis sekolah.

Sekolah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah dalam mengelola pendidikan. Warga sekolah dilibatkan dalam pengelolaan akademik. Masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam pengelolaan non-akademik. Keterlibatan peranserta warga sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan.

Setiap sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output, dan pemanfaatan lulusan. Kemitraan sekolah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah. Sistem kemitraan sekolah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis.

Ruang lingkup manajemen hubungan sekolah dan masyarakat berbasis sekolah meliputi:

- 1) Analisis kebutuhan.
Analisis kebutuhan sekolah dan kebutuhan masyarakat perlu menjadi perhatian bagi pengelola sekolah dalam kerangka hubungan sekolah dan masyarakat. Masyarakat mau membantu sekolah apabila mereka merasakan kebutuhannya terpenuhi. Demikian juga sekolah memiliki sejumlah kebutuhan pemecahan masalah dan pengembangan lembaga yang pemenuhannya perlu melibatkan masyarakat. Untuk itu perlu kegiatan analisis kebutuhan pemecahan masalah yang melibatkan masyarakat dan analisis kebutuhan pengembangan

lembaga yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Untuk menganalisis kebutuhan perlu dilakukan pertemuan antara sekolah dan masyarakat yang terkait dengan program pendidikan atau seringkali disebut dengan *stakeholders*. Komite sekolah merupakan wahana yang bisa digunakan untuk kegiatan ini.

Sekolah dapat memerankan fungsinya secara maksimal bila didukung oleh semua komponen yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan yaitu keluarga, pemerintah dan masyarakat. Sementara ini secara umum yang sudah relatif berjalan baik yaitu keterlibatan keluarga (orang tua siswa) dan pemerintah dalam menyediakan sumber daya untuk pelaksanaan pendidikan. Sedangkan pihak masyarakat dan swasta belum optimal keterlibatannya.

Untuk mengelola pendidikan, sekolah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam hal ini pemerintah daerah bertanggung jawab mendorong dan atau mengatur kerja sama yang saling menguntungkan antara dunia usaha dan dunia pendidikan.

2) Penyusunan program.

Penyusunan program humas dilaksanakan dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat. Perencanaan program pada dasarnya merupakan proses penetapan kegiatan di masa akan datang dengan mengatur berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang seoptimal mungkin sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Di dalam pembuatan program ada aktivitas merumuskan program, merumuskan indikator keberhasilan, menetapkan kegiatan, merinci kegiatan, dan menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan. Program diupayakan dibuat dalam jangka panjang yaitu untuk 5 tahun dan jangka pendek 1 tahun. Rumusan program yang matang akan menghasilkan suatu program kerja yang efektif sesuai dengan visi dan tujuan yang akan dicapai dan

misi yang yang diemban oleh lembaga yang bersangkutan.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat program, agar benar-benar terarah kepada apa yang ingin dicapai: (a) kegiatan yang akan diprogramkan hendaknya didasarkan pada hasil analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan serta data-data pendukung lainnya, (b) kegiatan yang diprogramkan harus benar-benar kegiatan yang sangat urgen dalam mendukung pencapaian tujuan lembaga pendidikan yang bersangkutan, (c) program yang akan dilaksanakan harus mempunyai tujuan yang jelas dan mendukung pencapaian tujuan lainnya, (d) program kegiatan harus memiliki nilai ganda dan *multy player effect*. Artinya kegiatan yang akan diprogramkan harus memberikan nilai tambah baik untuk sekolah maupun nilai tambah bagi masyarakat, orang tua murid, dan *stakeholders* lainnya, (e) program kegiatan harus mampu membangun citra positif bagi lembaga dan bagi masyarakat sekolah, (f) program yang disusun, hendaknya berorientasi pada produk yang akan dihasilkan, dan (g) program yang disusun, hendaknya memperhatikan sumber daya yang tersedia di dalam sekolah.

3) Pembagian tugas pelaksana.

Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan, maka pembagian tugas pelaksana perlu dilakukan agar semua kegiatan yang harus dilakukan ada yang bertanggung jawab melaksanakannya. Secara umum kebijakan terkait bidang kehumasan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Namun dalam pelaksanaannya beberapa tugas dilimpahkan kepada guru, tenaga administrasi sekolah.

Beberapa tugas yang harus dilakukan di bidang humas antara lain: (a) merencanakan, mengembangkan, mengarahkan, mengawasi pelaksanaan kegiatan humas dilaksanakan oleh kepala sekolah (b) menyusun cara-cara memperoleh bantuan masyarakat dilaksanakan oleh kepala sekolah, guru, atau petugas yang ditunjuk oleh kepala sekolah (c) memberikan informasi tentang kegiatan kehumasan kepada masyarakat atau pihak-pihak lain yang terkait dilaksanakan oleh guru, atau petugas yang ditunjuk oleh kepala

sekolah, (d) merekam kondisi yang berkembang dalam masyarakat tentang masalah pendidikan dilaksanakan oleh guru, atau petugas yang ditunjuk oleh kepala sekolah, (e) melakukan berbagai teknik kehumasan dilaksanakan oleh guru, atau petugas yang ditunjuk oleh kepala sekolah, dan (f) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan humas dilaksanakan oleh guru, atau petugas yang ditunjuk oleh kepala sekolah.

4) Pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan humas dilaksanakan melalui berbagai teknik dan pendekatan. Kehumasan dalam MBS melibatkan semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan menekankan perlunya bekerja sama dengan masyarakat.

Tujuan dari kerjasama masyarakat adalah mendorong masyarakat setempat supaya mereka merasa memiliki sekolah dan lebih berperan dalam kegiatan sekolah. Di beberapa sekolah orang tua dan masyarakat telah membentuk paguyuban kelas untuk mendampingi kegiatan di kelas secara langsung, dan ada pula orang tua yang membantu guru di kelas.

Ada banyak teknik peningkatan kerjasama masyarakat dengan sekolah. Penerapan teknik yang berhasil memperhatikan komitmen masyarakat terhadap pendidikan. Masyarakat perlu dibangkitkan komitmennya dengan cara menyentuh hati mereka agar mereka merasa perlu pendidikan yang berkualitas. Pepatah Jawa mengatakan “Jer basuki mawa bea”. Setiap kegiatan butuh biaya. Kalau ingin sesuatu yang baik maka membutuhkan biaya yang mahal.

Pada dasarnya kalau pendidikan berkualitas maka yang memetik hasilnya juga masyarakat. Misalnya suatu sekolah yang menyelenggarakan pendidikan komputer dengan baik, siswa-siswa mampu memprogram dan mengoperasikan komputer dengan baik, maka pihak pemakai lulusan dapat diuntungkan.

Tenaga yang mampu dan trampil dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu perusahaan. Langkah awal agar masyarakat merasakan perlunya pendidikan yang berkualitas, perlu diterapkan pendekatan budaya, yaitu diupayakan masyarakat mengetahui dan mengenal pendidikan, meyakini manfaat pendidikan, dan percaya terhadap mutu pendidikan. Dengan proses ini diharapkan masyarakat merasa bahwa pendidikan mutlak diperlukan.

- 5) Pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.
Ruang lingkup manajemen hubungan sekolah dan masyarakat di atas harus dilakukan dalam pengawasan, evaluasi dan pelaporan yang akuntabel.

7. Manajemen Budaya dan Lingkungan

Manajemen budaya dan lingkungan berbasis sekolah adalah pengaturan budaya dan lingkungan yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan budaya dan lingkungan sekolah, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip implementasi manajemen berbasis sekolah.

Sekolah menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pembelajaran yang efisien dalam prosedur pelaksanaan. Prosedur pelaksanaan penciptaan suasana, iklim, dan lingkungan pendidikan: (1) berisi prosedur tertulis mengenai informasi kegiatan penting minimum yang akan dilaksanakan, (2) memuat judul, tujuan, lingkup, tanggung jawab dan wewenang, serta penjelasannya, dan (4) diputuskan oleh kepala sekolah dalam rapat dewan pendidik.

Sekolah menetapkan pedoman tata-tertib yang berisi: (1) tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, termasuk dalam hal menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana pendidikan, dan (2) petunjuk, peringatan, dan larangan dalam berperilaku di Sekolah, serta pemberian sanksi bagi warga yang melanggar tata tertib.

Ruang lingkup manajemen budaya dan lingkungan sekolah berbasis sekolah meliputi:

- 1) Perencanaan program.
Dalam perencanaan penyediaan budaya dan pengaturan lingkungan sekolah perlu dirumuskan

terlebih dahulu target atau sasarannya. Kemudian menyusun program dan menentukan strategi mencapai tujuan/target. Profil budaya dan lingkungan sekolah yang diharapkan perlu dinyatakan dengan tegas. Program yang dibuat digolongkan menjadi dua (2) besar, yaitu program penataan lingkungan sekolah (utamanya fisik), dan program pengembangan lingkungan psikologis-sosial-kultural sekolah.

2) Sosialisasi program.

Sosialisasi program budaya dan lingkungan sekolah dapat dilakukan melalui bebsarapa cara berikut:

- a. Sosialisasi program kepada pendidik. Ini dimaksudkan agar budaya dan lingkungan sekolah diketahui oleh pendidik sebagai pedoman berperilaku dan pemberian teladan kepada peserta didik. Guru adalah pelaku utama pembinaan dan pengembangan budaya dan lingkungan sekolah. Melalui pembelajaran, pembiasaan dan keteladanan guru, penyemaian budaya dan penciptaan lingkungan yang kondusif di sekolah dapat terealisasi.
- b. Sosialisasi kepada peserta didik. Bertujuan menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya peran peserta didik dalam implementasi pembinaan dan pengembangan budaya dan lingkungan sekolah. Dengan disosialisasikannya program tersebut, maka peserta didik diharapkan lebih aktif dalam mengimplementasikannya.
- c. Sosialisasi melalui media cetak: buku, brosur, buletin, dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk memperluas informasi pembinaan dan pengembangan budaya dan lingkungan sekolah yang tidak hanya kepada warga di sekolah, melainkan juga untuk komite sekolah, orang tua dan *stakeholders* lainnya.
- d. Sosialisasi melalui internet.
- e. Sosialisasi melalui pemasangan poster, baliho, dan spanduk. Pemasangan dilakukan di tempat strategis.
- f. Sosialisasi melalui kampanye pentingnya pembinaan dan pengembangan budaya dan lingkungan sekolah. Kampanye dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain televise, parade seni, pameran, zikir bersama, isighosah, lomba-lomba, dan safari.

3) Pelaksanaan program.

Langkah-langkah yang dilakukan sekolah kaitannya dengan pelaksanaan program yaitu: (a) membentuk tim pengembang budaya dan lingkungan sekolah yang terdiri atas kepala sekolah, guru, komite sekolah, wakil orang tua dan wakil peserta didik, (b) menyusun deskripsi tugas tim, (c) tim yang dibentuk menyusun target kegiatan, menyusun program kegiatan, menyusun strategi pelaksanaan program, memilih dan menyusun alat dan strategi pengawasan, (d) melaksanakan program sesuai rambu-rambu yang telah dirumuskan, dan (e) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program secara bertahap.

Untuk merealisasikan proram, tim pengembang menyusun program jangka panjang, menengah dan pendek bagi pembinaan dan pengembangan budaya dan lingkungan sekolah. Program jangka panjang, menengah dan pendek berisi jabaran tentang: (a) target jangka panjang, (b) kegiatan jangka panjang, (c) strategi pelaksanaan jangka panjang, dan (d) evaluasi program jangka panjang.

4) Pengawasan, evaluasi dan pelaporan program.

Ruang lingkup manajemen budaya dan lingkungan di atas harus dilakukan dalam pengawasan, evaluasi dan pelaporan yang akuntabel.

H. Strategi Pelaksanaan MBS.

Dalam rangka mengimplementasikan konsep manajemen peningkatan mutu yang berbasis sekolah ini, maka melalui partisipasi aktif dan dinamis dari orang tua, siswa, guru dan staf lainnya termasuk institusi yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan sekolah harus melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan basis data dan sebagai profil sekolah presentatif, akurat, valid, dan secara sistematis menyangkut berbagai aspek akademis, administratif (siswa, guru, staf) dan keuangan.
2. Melakukan evaluasi diri (*self assessment*) untuk menganalisa kekuatan dan kelemahan mengenai sumber daya sekolah, personil sekolah, kinerja dalam mengembangkan dan mencapai target kurikulum dan hasil-hasil yang dicapai siswa.

3. Berdasarkan analisis tersebut sekolah harus mengidentifikasi kebutuhan sekolah dan merumuskan visi, misi dan tujuan dalam rangka menyajikan pendidikan yang berkualitas bagi siswanya sesuai dengan konsep pembangunan pendidikan nasional yang akan dicapai. Hal penting yang perlu diperhatikan sehubungan dengan identifikasi kebutuhan dan perumusan visi, misi dan tujuan adalah bagaimana siswa belajar, menyediakan sumber daya dan pengelolaan kurikulum termasuk indikator pencapaian peningkatan mutu tersebut.
4. Berangkat dari visi, misi dan tujuan peningkatan mutu tersebut sekolah bersama-sama dengan masyarakatnya merencanakan dan menyusun program jangka panjang atau jangka pendek (tahunan) termasuk anggarannya. Dua aspek penting yang harus diperhatikan dalam kegiatan ini adalah kondisi alamiah total sumber daya yang tersedia dan prioritas untuk melaksanakan program.
5. Prioritas seringkali tidak dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun program sekolah, oleh karena itu sekolah harus membuat strategi perencanaan dan pengembangan jangka panjang melalui identifikasi kunci dan kebijakan dan prioritas.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk meyakinkan apakah program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan, apakah tujuan telah tercapai dan sejauhmana pencapaiannya. Karena fokus kita adalah mutu meneliti efektivitas dan efisiensi dari program sekolah dan kebijakan yang terkait dalam rangka pencapaian mutu pendidikan.

H. Tantangan Pelaksanaan MBS.

Menurut Umaedi sebagaimana dikutip Mesiono (2010:108) setidaknya ada tiga tantangan yang dihadapi oleh sekolah untuk melaksanakan MBS sebagai berikut:

1. Kemampuan sekolah (*capacity building*).
Tantangan utama pelaksanaan manajemen pendidikan MBS adalah rendahnya kemampuan sekolah untuk melaksanakan manajemen ini, karena kurangnya sumberdaya pendidikan.

Sebagaimana telah dijelaskan, keberhasilan manajemen ini sangat bergantung pada faktor *leadership* dan ketersediaan *resources* yang memadai. Namun harus diakui, kemampuan rata-rata kepemimpinan kepala sekolah dewasa ini merupakan masalah yang paling utama dalam manajemen pendidikan. Sementara sumber daya pendidikan yang lain, seperti pembiayaan dan sarana prasarana pendidikan jauh dari standar minimal yang diperlukan sekolah untuk bisa operasional secara optimal.

Untuk mengatasi masalah *capacity building* tersebut di atas, maka diperlukan seleksi kepala sekolah secara ketat, peningkatan kemampuan manajemen kepala sekolah secara profesional, serta uji profesi dan sertifikat kepemimpinan dan manajemen kepala sekolah secara berkala. Sementara itu, pembiayaan dan sarana prasarana pendidikan perlu dipenuhi oleh pemerintah sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan. Kekurangan sumber daya lainnya perlu diupayakan oleh sekolah melalui kegiatan-kegiatan produktif dan dukungan masyarakat setempat.

2. **Transparan manajemen.**
Tantangan kedua adalah bagaimana menciptakan iklim dan budaya keterbukaan (transparansi) dalam manajemen sekolah. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa manajemen sekolah khususnya yang berkaitan dengan perencanaan dan penggunaan biaya pendidikan amat tertutup. Hanya kepala sekolah dan bendaharawan sekolah yang mengetahui berapa besar dana yang terhimpun sekolah baik dari pemerintah pusat (rutin dan pembangunan), pemerintah daerah, maupun dari masyarakat. Mereka juga mengetahui untuk apa dana tersebut dibelanjakan dan bagaimana dan dipertanggungjawabkan.
3. **Akuntabilitas.**
Tantangan ketiga adalah seberapa jauh pertanggunggugatan sekolah terhadap kegiatan dan hasil pendidikan yang telah dicapai. Masalah akuntabilitas selama ini hampir tidak mendapat perhatian. Apakah suatu kinerja sekolah menunjukkan suatu prestasi atau tidak, sekolah tidak memperoleh penghargaan atau sanksi apa-apa. Sehingga yang terjadi, sekolah hanya melaksanakan

rutinitas sepanjang tahun dan selama bertahun-tahun tanpa target yang jelas. Karena MBS memberikan kewenangan dan tanggungjawab yang cukup besar dalam penyelenggaraan pendidikan, maka sekolah perlu mempertanggungjawabkan proses dan hasil pendidikan yang telah dicapai kepada para *stakeholder* pendidikan.

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan sekolah terhadap keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang telah dilaksanakan. Akuntabilitas ini berbentuk laporan prestasi yang dicapai baik kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan laporan hasil program ini, mereka dapat menilai apakah MBS ini telah mencapai tujuan yang dikehendaki atau tidak. Bilamana berhasil, maka orang tua, masyarakat, dan pemerintah perlu memberikan penghargaan kepada sekolah yang bersangkutan, sehingga menjadi faktor pendorong untuk terus meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang. Sebaliknya apabila tidak berhasil, maka sekolah perlu dimintai pertanggungjawaban atas kegagalan dalam penyelenggaraan pendidikan bagi siswa dan diberikan teguran atau sanksi lain atas hasil kinerjanya yang dianggap memenuhi syarat.

BAB IX

INOVASI PEMBELAJARAN

A. *E-learning*

1. Pengertian *e-learning*

E-learning terdiri dari dua bagian penggalan kata yaitu "e" yang merupakan singkatan dari *electronic*, dan "learning" yang berarti pembelajaran. Jadi *e-learning* berarti pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronika khususnya perangkat komputer. Karena itu, maka *e-learning* sering disebut pulan dengan *online course* (Soekartawi, 2004: 197).

Littlejohn dan Pegler (2007:228) menjelaskan *e-learning* adalah istilah yang luas digunakan untuk menggambarkan pembelajaran elektronik dengan menggunakan komputer melalui akses *online* atau internet. Selanjutnya Hartley sebagaimana dikutip Wahono (2014:2) menjelaskan bahwa *e-Learning* merupakan suatu jenis pembelajaran yang memungkinkan tersampainya bahan ajar kepada mahasiswa dengan menggunakan media internet, intranet atau media jaringan komputer lain. Pengertian ini menunjukkan bahwa *e-learning* tidak selamanya harus menggunakan internet, tetapi juga bisa menggunakan fasilitas intranet.

Pernyataan di atas sejalan dengan pengertian *e-learning* yang terdapat dalam *Glossary of e-learning Terms* sebagaimana dikutip Wahono (2014:2) yang mengartikan *e-learning* sebagai sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung pembelajaran dengan media Internet, jaringan komputer, maupun komputer *stand alone*. Pengertian ini juga menunjukkan bahwa *e-learning* dapat dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi elektronik, dan juga komputer *stand alone*.

Sa'ud (2015:185) menjelaskan *e-learning* sebagai upaya menghubungkan pembelajar/siswa dengan sumber belajar(data base/pakar/guru, perpustakaan) yang secara fisik terpisah atau bahkan berjauhan. Interaktivitas dalam hubungan tersebut dapat dilakukan secara langsung (*synchronous*) maupun tidak langsung (*asynchronous*).

Simamora (2003:349) menjelaskan *e-laerning* merupakan pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi, misalnya internet, video, CD-ROM (*synchronous* dan *asynchronous*). Selanjutnya Simamora juga mengutip pendapat Thompson dkk bahwa *e-learning* merupakan suatu pengalaman yang disampaikan melalui teknologi elektronika.

Departemen Pendidikan Nasional (2008:8) menghimpun beberapa pendapat pakar mengenai pengertian *e-learning* diantaranya:

- a. *E-learning* didefinisikan sebagai sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung pembelajaran dengan media internet, jaringan komputer, dan lain-lain (Learn Frame.Com 2001).
- b. *E-learning* merupakan suatu jenis pembelajaran yang memungkinkan tersampainya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan internet, intranet atau media jaringan komputer lain (Hartley, 2001).
- c. *E-learning* adalah semua yang mencakup pemanfaatan komputer dalam menunjang peningkatan kualitas pembelajaran, termasuk di dalamnya penggunaan *mobile technologies* seperti PDA dan *MP3 players*. Penggunaan *teaching materials* berbasis *web* dan *hypermedia*, multimedia *CD-Room* atau *web sites*, forum diskusi, perangkat lunak kolaboratif, email, *computer aided assessment*, animasi pendidikan, simulasi, permainan, perangkat lunak manajemen pembelajaran, dan lain sebagainya. Juga dapat berupa kombinasi dari penggunaan media yang berbeda (Thomas Toth, 2003).
- d. *E-learning* sebagai sembarang pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik (LAN, WAN atau internet) untuk menyampaikan isi pembelajaran, interaksi atau bimbingan (Koran, 2002).
- e. *E-learning* sebagai kegiatan belajar melalui perangkat elektronik komputer yang memperoleh bahan belajar yang sesuai dengan kebutuhannya (Dong, 2002).

Istilah *e-learning* juga tidak lepas dari istilah *distance learning*, karena ada juga sementara ahli yang mendefinisikan *e-learning* sebagai pembelajaran jarak jauh (*distance learning*) yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer dan/atau Internet. Pelaksanaan *e-learning* tidak selamanya harus memanfaatkan jaringan

internet atau intranet secara *on-line*, tetapi bisa juga dilakukan secara *off-line*. Hal ini bergantung pada media yang digunakan dalam *e-learning* tersebut. Apabila materi yang akan dipelajari mahasiswa dikembangkan dalam bentuk CD/DVD dan mahasiswa juga dapat mempelajarinya di mana saja dan kapan saja, maka pola *e-learning* seperti ini dilaksanakan secara *off-line*. Sebaliknya apabila materi yang akan dipelajari mahasiswa disajikan berbasis web yang dapat diakses dengan menggunakan internet ataupun intranet, maka pola *e-learning* seperti ini dilaksanakan secara *online*, yang dikenal juga dengan *online learning*.

Di samping menunjukkan bahwa *online learning* itu dapat diakses dengan menggunakan internet dan berbasis web, pengertian *online learning* tersebut juga menunjukkan bahwa dalam *online learning* lingkungan tempat mahasiswa belajar terbuka dan tersebar. Artinya proses belajar yang dilakukan mahasiswa tidak harus dilakukan dalam ruang dan waktu tertentu. Mahasiswa dapat belajar dimana saja dan kapan saja. Namun interaksi yang terjadi tetap memperhatikan aspek-aspek pedagogis, sehingga terjadi suatu proses belajar secara efektif dan bermakna.

2. Karakteristik *E-learning*

Untuk dapat secara optimal memanfaatkan internet untuk pembelajaran, maka pengajar perlu mengetahui apa yang menjadi karakteristik *e-learning*. Dalam hal ini Kitao dan Kitao sebagaimana dikutip Siahaan (2003:440) bahwa karakteristik *e-learning* sebagai berikut:

a. Memiliki sumber yang sangat banyak.

Internet bagaikan sebuah perpustakaan yang sangat besar dan dapat dikatakan juga sebagai perpustakaan yang terbesar dari perpustakaan yang ada di dunia. Oleh karena besarnya, sangat sulit untuk mengetahui atau menghitung berapa banyak jumlah sumber informasi yang tersedia yang dapat diakses melalui internet. Setiap hari, semakin banyak jumlah informasi yang ditambahkan yang dapat diakses melalui internet. Sebagian besar informasi yang tersedia dapat diakses melalui internet secara gratis sehingga faktor ini turut mendukung penyelenggaraan kegiatan *e-learning*.

b. Menyediakan berbagai jenis media.

Pengguna internet dapat mengakses informasi yang dikemas dalam berbagai jenis media, mulai dari yang berupa teks, foto, suara, sampai dengan yang berupa

video. Dari waktu ke waktu, teknologi yang lebih maju terus digunakan untuk mengembangkan berbagai sumber informasi secara lebih baik pula.

- c. Menitikberatkan pada independensi.
Sumber-sumber yang dapat diakses melalui internet dikembangkan dan dipelihara oleh para individu atau sekelompok individu yang bekerja secara independen. Artinya, hanya individu atau kelompok individu inilah yang senantiasa memeriksa informasi dan menemukan serta memperbaiki kesalahan yang ada. Dapat saja terjadi bahwa sumber-sumber yang dapat diakses melalui internet itu ada mirip, bertentangan atau bahkan kadaluarsa, dan mungkin juga kurang akurat. Dalam kaitan ini, penggunaan internet sendiri harus menilai informasi yang tersedia yang dapat diakses.
- d. Memungkinkan penggunaan yang meluas.
Semua sumber yang tersedia yang dapat diakses melalui internet adalah tersebar dan meluas di seluruh dunia. Penggunaan internet dapat dilakukan oleh siapa saja yang membutuhkan termasuk para siswa dan guru.
- e. Memungkinkan akses yang sangat cepat.
Setiap orang dapat mengakses sumber yang sama yang tersedia melalui internet hanya dalam hitungan detik dari manapun tempatnya. Tidak terlalu banyak pengaruh perbedaan waktu dalam mengakses berbagai informasi yang tersedia melalui internet.

Sa'ud (2015:189) menjelaskan karakteristik *e-learning* sebagai berikut ini:

- a. Sebagai media interpersonal dan juga sebagai media massa yang memungkinkan terjadinya komunikasi *one-to-one* maupun *one-to-many*.
- b. Memiliki sifat interaktif.
- c. Memungkinkan terjadinya komunikasi secara sinkron (*synchronous*) maupun tertunda (*asynchronous*) sehingga memungkinkan terselenggaranya ketiga jenis dialog/komunikasi yang merupakan syarat terselenggaranya suatu proses pembelajaran.

Soekartawi (2004:199) memaparkan karakteristik *E-learning* sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan jasa teknologi elektronik, di mana guru dan siswa, siswa dan sesama siswa atau guru

dan sesama guru dapat berkomunikasi dengan relatif mudah dengan tanpa dibatasi oleh hal-hal protokoler.

- b. Memanfaatkan keunggukan komputer (*digital media dan computer networks*).
- c. Menggunakan bahan ajar bersifat mandiri (*self learning materials*) disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh guru dan siswa, kapan saja dan di mana saja bila yang bersangkutan memerlukan.
- d. Memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat pada setiap saat dikomputer.

3. Kelebihan dan Kelemahan *E-learning*.

Kelebihan penggunaan *e-learning* dalam pembelajaran dijelaskan oleh Soekartawi (2004:201) sebagai berikut:

- a. Tersedianya fasilitas *e-moderating* di mana guru dan siswa dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet secara reguler atau kapan saha kegiatan berkomunikasi itu dilakukan dengan tanpa dibatasi oleh jarak, tempat dan waktu.
- b. Guru dan siswa dapat menggunakan bahan ajar atau petunjuk belajar yang terstruktur dan terjadwal melalui internet, sehingga keduanya bisa saling menilai sampai berapa jauh bahan ajar dipelajari.
- c. Siswa dapat belajar atau mereview bahan ajar setiap saat dan di mana saja kalau dipelrukan mengingat bahan ajar tersimpan di komputer.
- d. Biasanya siswa memerlukan tambahan informasi yang berkatan dengan bahan yang dipelajarinya, maka ia dapat melakukan akses di internet.
- e. Baik guru maupun siswa dapat melakukan diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta yang banyak, sehingga menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas.
- f. Berubahnya peran siswa dari yang biasanya pasif menjadi aktif.
- g. Relatif lebih efisien, misalnya bagi mereka yang tinggal jauh dari perguruan tinggi atau sekolah konvensional, bagi mereka yang sibuk bekerja, bagi mereka yang bertugas di kapal, di luar negeri, dan sebagainya.

Kelebihan penggunaan *e-learning* dalam pembelajaran dijelaskan oleh Simamora (2003:268) sebagai berikut:

- a. Kelas tidak membutuhkan bentuk fisik lagi, semuanya dapat dibangun dalam aplikasi internet.

- b. Melalui internet, lembaga pendidikan akan dapat lebih fokus pada penyelenggaraan program pendidikan/pelatihan.
- c. Program *e-learning* dapat dilaksanakan dan di-*update* secara cepat.
- d. Dapat diciptakan interaksi yang bersifat *real time* maupun non *real time*.
- e. Dapat mengakomodasi keseluruhan proses belajar, mulai dari registrasi, penyampaian materi, diskusi, evaluasi, dan juga transaksi.
- f. Dapat diakses dari lokasi mana saja dan bersifat global.
- g. Peserta belajar dapat terhubungna ke berbagai perpustakaan maya di seluruh dunia dan menjadikannya sebagai media penelitian dalam meningkatkan pemahaman pada bahan ajar.
- h. Guru dapat secara cepat menambahkan referensi bahan ajar yang bersifat studi kasus, trend kekinian melalui berbagai sumber untuk menambah wawasan peserta terhadap bahan ajarnya.

Sementara itu Departemen Pendidikan Nasional (2008:9) menjelaskan kelebihan penggunaan *e-learning* sebagai berikut:

- a. *E-learning* dapat mempersingkat waktu pembelajaran dan membuat biaya studi lebih ekonomis (dalam kasus tertentu). *E-learning* mempermudah interaksi antara peserta didik dengan bahan atau mater, peserta didik dengan guru maupun sesama peserta didik.
- b. Peserta didik dapat saling berbagi informasi dan dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang, dengan kondisi yang demi-kian itu peserta didik dapat lebih memantapkan penguasaannya terhadap materi pembelajaran.
- c. Kehadiran guru tidak mutlak diperlukan.
- d. Guru akan lebih mudah melakukan alternatif bahan-bahan belajar yang mutakhir sesuai dengan tuntutan perkembangan keilmuan, mengembangkan diri atau melakukan penelitian guna meningkatkan wawasannya, dan mengontrol kegiatan belajar peserta didik.
- e. Siswa dapat belajar atau *me-review* bahan ajar setiap saat dan di mana sa-ja kalau diperlukan mengingat bahan ajar tersimpan di komputer.
- f. Berubahnya peran siswa dari yang biasanya pasif menjadi aktif.

Selanjutnya terkait dengan kelemahan dari penggunaan *e-learning* dijelaskan Soekartawi (2004:201) sebagai berikut:

- a. Kurangnya interaksi antara guru dan siswa atau bahkan antar siswa itu sendiri. Kurangnya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya *values* dalam proses belajar dan mengajar.
- b. Kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek bisnis/komersial.
- c. Proses belajar dan mengajarnya cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan.
- d. Berubahnya peran guru dari yang semua menguasai teknik pembelajaran konvensional, kini juga dituntut mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan ICT.
- e. Siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal.
- f. Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet (mungkin hal ini berkaitan dengan masalah tersedianya listrik, telepon ataupun komputer).
- g. Kurangnya mereka yang mengetahui dan memiliki keterampilan soal-soal internet.
- h. Kurangnya penguasaan bahasa komputer.

Kelemahan penggunaan *e-learning* menurut Simamora (2003:369) adalah:

- a. Buruknya atau kurang terencanaannya perancangan aplikasi sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna, misalnya tidak *user friendly*, tidak reliabel, dan proses yang tidak jelas.
- b. Para pengguna tidak mengetahui dan mengenal secara baik sistem yang digunakan akibat tidak adanya sosialisasi dari sistem (*user guide*).
- c. Permasalahan *bandwith* yang kecil dapat mengakibatkan lamanya waktu akses hal ini juga dapat disebabkan oleh buruknya perancangan materi yang memiliki ukuran file yang besar sebagai akibat adanya unsur video dan audio).

Sementara itu Departemen Pendidikan Nasional (2008:9) menjelaskan kelemahan penggunaan *e-learning* sebagai berikut:

- a. Untuk sekolah tertentu terutama yang berada di daerah, akan memerlukan investasi yang mahal untuk membangun *e-learning*.
- b. Siswa yang tidak memiliki motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal.

- c. Keterbatasan jumlah komputer yang dimiliki oleh sekolah akan menghambat pelaksanaan *e-learning*.
- d. Bagi siswa yang gagap teknologi, sistem ini sulit untuk diterapkan.
- e. Berubahnya peran guru dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional, kini dituntut mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan ICT.
- f. Kurangnya interaksi antara guru dan siswa atau bahkan antar siswa itu sendiri. Kurangnya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya nilai dalam proses belajar dan mengajar (Departemen Pendidikan Nasional, 2008:9)

4. Manfaat E-Learning

Secara umum penerapan *e-learning* dalam pembelajaran memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Peningkatan produktivitas.

Melalui *e-learning* waktu untuk perjalanan dapat direduksi sehingga produktivitas seseorang pendidik tidak akan hilang karena kegiatan yang harus ia lakukan untuk memberikan proses pendidikan/pelatihan. Hal ini sangat berarti personol kunci (*key personnel*) yang memiliki peran yang besar dalam institusinya. Hal yang sama juga terjadi pada peserta didik, apabila mereka menggunakan internet maka proses pembelajaran dapat tetap dilaksanakan tanpa meninggalkan pekerjaan atau kegiatan lainnya.

- b. Menciptakan nilai (value) pada organisasi.

Identik dengan aset suatu institusi, kompetensi sumber daya manusia juga dapat mengalami depresiasi yang pada akhirnya tidak mampu lagi memberi nilai pada organisasinya. Pembaruan kompetensi ini harus dilakukan secara berkesinambungan dan melalui *e-learning* kompetensi tersebut akan dapat diteruskan diselaraskan dengan tujuan institusi secara efektif untuk menghasilkan kreatifitas dan inovasi sumber daya manusia pada akhirnya memberi nilai pada organisasi.

- c. Efisiensi.

Proses pembangunan kompetensi dapat dilakukan dalam waktu yang relatif lebih singkat dan mencakup jumlah yang lebih besar,

- d. Fleksibel dan interaktif.

Kegiatan *e-learning* dapat dilakukan dari lokasi mana saja selama ia memiliki akses dan koneksi dengan sumber pengetahuan tersebut dan interaktivitas

dimungkinkan secara langsung atau tidak langsung dan dapat menampilkan bentuk visualisasi lengkap (multimedia) ataupun tidak.

5. Faktor yang Perlu Dipertimbangkan dalam Memanfaatkan *E-learning*

Ahli-ahli pendidikan menyarankan beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum seseorang memilih *e-learning* untuk kegiatan pembelajaran. Faktor-faktor tersebut adalah:

a. Analisis Kebutuhan (*Need Analysis*)

Dalam tahap awal, satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah apakah memang memerlukan *e-learning*. Apabila analisis ini telah dilaksanakan dan jawabannya adalah memerlukan *e-learning*, maka tahap berikutnya adalah membuat studi kelayakan yang komponen penilaiannya adalah:

- Apakah secara teknis dapat dilaksanakan (*technically feasible*) misalnya jaringan internet bisa dipasang, apakah infrastruktur pendukungnya seper-ti telepon, listrik, komputer tersedia, apakah tenaga teknis yang bisa mengoperasikannya tersedia, dan lain sebagainya.
- Apakah secara ekonomis menguntungkan (*economically profitable*) misalnya dengan adanya *e-learning* dapat memberikan keuntungan.
- Apakah secara sosial penggunaan *e-learning* tersebut diterima oleh masyarakat (*socially acceptable*)

b. Rancangan Instruksional

Aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam menentukan rancangan instruksional (Soekartawi, et al, 1999; Yusup Hashim and Razmah, 2001) yaitu:

- *Course Content and Learning Unit Analysis* seperti isi pelajaran, cakupan dan topik yang relevan.
- *Learner Analysis*, seperti latar belakang pendidikan siswa, usia, seks, status pekerjaan, dan sebagainya.
- *Learning Context Analysis*, seperti kompetensi pembelajaran yaitu menge-nai apa yang diinginkan hendaknya dibahas secara mendalam pada bagian ini.
- *State Instructional Objectives*. Tujuan instruksional ini dapat disusun ber-dasarkan hasil dari analisis instruksional.

- *Construct Criterion Test Items*. Penyusunan tes ini dapat didasarkan dari tujuan instruksional yang telah ditetapkan.
- *Select Instructional Strategy*. Strategi instruksional dapat ditetapkan berdasarkan fasilitas yang ada.

c. Tahap Pengembangan

Berbagai upaya dalam rangka pengembangan *e-learning* dapat dilakukan mengikuti perkembangan fa-silitas ICT yang tersedia. Hal ini terjadi karena kadang-kadang fasilitas ICT tidak dilengkapi dalam waktu yang bersamaan, begitu pula dengan bahan ajar dan rancangan instruksional yang akan dipergunakan hendaknya dikembangkan dan dievaluasi secara terus menerus.

d. Tahap Pelaksanaan

Prototype yang lengkap bisa dipindahkan ke komputer (LAN) dengan menggunakan format tertentu misalnya format *Hyper Text Markup Language* (HTML) dan uji *prototype* hendaknya terus menerus dilakukan. Dalam tahap ini sering kali ditemukan berbagai hambatan, misalnya bagaimana menggunakan *management course tool* secara baik, apakah bahan ajarnya benar-benar memenuhi standar bahan ajar mandiri.

e. Tahap Evaluasi

Sebelum program dimulai, ada baiknya diujicobakan dengan mengambil beberapa sampel orang yang dimintai tolong untuk ikut mengevaluasi.

Proses dari kelima tahapan di atas diperlukan waktu yang relatif lama, karena *prototype* perlu dievaluasi secara terus menerus. Masukan dari orang lain atau dari siswa perlu diperhatikan secara serius. Proses dari tahapan satu sampai lima dapat dilakukan berulang kali, karena prosesnya terjadi terus menerus.

Masalah-masalah yang sering dihadapi dalam *e-learning* adalah: (1) masalah akses untuk bisa melaksanakan *e-learning* seperti ketersediaan jaringan internet, listrik, telepon dan infrastruktur yang lain, (2) masalah ketersediaan *software* (piranti lunak). Bagaimana mengusahakan piranti lunak yang tidak mahal, (3) masalah dampaknya terhadap kurikulum yang ada, (4) masalah *skill* dan *knowledge* dan (5) *attitude* (perilaku) terhadap ICT.

Oleh karena itu perlu diciptakan bagaimana semuanya mempunyai sikap yang positif terhadap ICT, bagaimana semuanya bisa mengerti potensi ICT dan dampaknya ke siswa sehingga penggunaan teknologi baru bisa mempercepat pembangunan.

6. Faktor Pendukung Pembelajaran Melalui E-Learning.

Untuk terlaksananya pembelajaran melalui *e-learning* perlu mendapat dukungan dari berbagai faktor yang melingkupinya, hal ini menjadi urgen karena tanpa dukungan faktor tersebut maka pembelajaran melalui *e-learning* hanya sebuah keniscayaan saja. Faktor-faktor pendukung tersebut dijelaskan oleh Sa'ud (2015:191) adalah: (a) institusi, (b) masyarakat, (c) guru, (d) siswa, dan (e) teknologi.

a. Institusi.

Peranan institusi yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan komitmen sangat menentukan terselenggaranya pemanfaatan internet untuk pendidikan dalam lingkungan sekolah. Institusi yang paling pertama yang dituntut untuk memiliki komitmen dalam pendayagunaan internet untuk pembelajaran tentu saja adalah sekolah. Hal ini terutama berkaitan berkaitan dengan penggunaan teknologi tinggi yang menyangkut keharusan menyediakan sejumlah dana untuk penyediaan peralatan yang dibutuhkan dalam pembelajaran *e-learning* seperti komputer dan perlengkapannya, jaringan, biaya berlangana internet, dan sebagainya.

Peranan institusi lain yang tak kalah penting ialah dalam memberikan kesadaran (*awareness*) baik terhadap guru maupun siswa tentang teknologi komunikasi dan informasi terutama potensi internet sebagai media pembelajaran. Kemudian dilanjutkan pemberian pengetahuan mengenai prosedur dan tata cara memanfaatkan internet, melalui berbagai kegiatan dan pelatihan yang terus menerus, sehingga tidak secara langsung akan tercipta lingkungan yang akrab teknologi.

b. Masyarakat.

Lingkungan yang perlu mendapat perhatian ialah lingkungan keluarga siswa, karena dari lingkungan keluarga diharapkan munculnya dukungan yang mampu memberikan dorongan untuk memotivasi siswa dalam memanfaatkan internet untuk keperluan pendidikan. Selain keluarga, lingkungan yang paling dekat lainnya yang mempengaruhi siswa dalam menggunakan internet ialah

teman sebaya (*peer group*). Oleh karena itu, lingkungan siswa juga dipersiapkan dan disentuh agar tercipta suasana yang kondusif dan mampu memberikan dukungan terhadap siswa dalam memanfaatkan internet untuk pendidikan.

c. Guru.

Peranan guru tak kalah menentukannya terhadap keberhasilan pemanfaatan internet di sekolah. Pemantauan sementara di beberapa sekolah umumnya menunjukkan bahwa inisiatif pemanfaatan internet di sekolah justru banyak dari guru-guru yang memiliki kesadaran lebih awal tentang potensi internet guna menunjang proses pembelajaran.

Keberhasilan pembelajaran berbasis *e-learning* secara signifikan ditentukan oleh karakteristik guru-guru yang akan dilibatkan dalam pemanfaatan internet. Untuk itu perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- Guru perlu diberikan pemahaman berbagai keuntungan termasuk kelebihan dan kelemahan penggunaan internet untuk pembelajaran, sehingga mereka memiliki motivasi dan komitmen yang cukup tinggi.
- Guru nantinya akan berperan sebagai pengembang dan pengguna maupun yang diproyeksikan sebagai pengelola sistem pembelajaran berbasis internet, harus dibekali dengan kesadaran, wawasan, pengetahuan dan keterampilan tentang internet.
- Guru yang akan dilibatkan dalam pengembangan dan pemanfaatan internet untuk pembelajaran hendaknya memiliki pengalaman dan kemampuan mengajar yang cukup.
- Jumlah guru yang akan dilibatkan dalam pengembangan dan pemanfaatan internet untuk pembelajaran, hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dan dilakukan secara bertahap.
- Guru harus memiliki komitmen dan keseriusan dalam menangani pengembangan dan pemanfaatan internet untuk pembelajaran.
- Tetap menjaga gaya mengajar tiap-tiap, karena hal itu akan dicerminkan dalam cara pembelajaran mereka kelak di sistem pembelajaran internet.

d. Siswa.

Pemahaman tentang audiens didapat melalui analisis dengan menggunakan data demografi maupun psikografu, antara lain dengan menguji perbedaan-

perbedaan karakteristik, sikap dan perilaku audiens. Pemilihan atau pengelompokan diperlukan dalam kaitannya untuk bisa membuat suatu pendekatan atau strategi pendayagunaan internet lebih tepat sasaran, mengingat bahwa sasaran didik tersegmentasi dalam kelompok sekolah-sekolah yang berbeda. Pemahaman tentang perbedaan motif penggunaan internet berdasarkan aspek demografi dan psikografi tersebut, menjadi penting agar pengembangan program pendidikan dengan mendayagunakan internet bisa lebih menyentuh kondisi riil sasaran.

Sesungguhnya sasaran didik terkelompok dalam segmen-segmen tertentu yang menghendaki adanya perlakuan yang berbeda pula, sehingga dalam menerapkan pendayagunaan internet di sekolah akan lebih baik apabila melakukan segmentasi secara lebih homogen baik ditinjau dari aspek demografi maupun psikografi walaupun sesungguhnya pendekatan segmentasi ini lebih dikenal dalam konsep pemasaran yang menghendaki diketahuinya kelompok-kelompok sasaran dengan jelas melalui pendekatan segmentasi pasar, namun pendekatan ini sesungguhnya juga bisa diterapkan dalam semua bidang kegiatan termasuk dalam bidang pendidikan.

Pelaksanaan pembelajaran secara umum maupun pelaksanaan pembelajaran *e-learning* secara khusus sangat ditentukan oleh sejauhmana kita mengenali siswa. Apabila pendidik menganggap siswa mereka sebagai manusia (*human being*) dengan segala hak-hak dan perbedaan-perbedaan motivasinya, maka siswa merupakan bagian atau subjek dari suatu proses pembelajaran.

e. Teknologi.

Terselenggaranya kegiatan pembelajaran dengan dukungan internet, maka setelah faktor-faktor sebelumnya dipenuhi dengan kondisi yang telah diuraikan, maka faktor teknologi merupakan suatu hal yang juga mutlak harus tersedia dan harus memenuhi standar minimal yang dipersyaratkan baik yang berkaitan dengan peralatan, infrastruktur, pengoperasian dan perawatannya.

Idealnya dalam pemanfaatan internet untuk pembelajaran harus tersedia sejumlah komputer yang bisa mengakses internet untuk pembelajaran. Cara yang efektif dan efisien untuk menghubungkan sejumlah komputer ke internet adalah dengan membangun jaringan *local area*

network (LAN). Dengan adanya jaringan maka hanya diperlukan satu sambungan saja ke internet yang bisa dipergunakan secara bersama-sama oleh komputer yang tergabung dalam jaringan tersebut. Satu hal yang paling penting dari jaringan dan koneksi ke internet untuk kepentingan pembelajaran ialah keandalannya untuk dapat digunakan setiap saat selama 24 jam dengan tingkat gangguan atau kegagalan yang minim.

2. Hybrid Learning.

Istilah “*hybrid learning*” seringkali dipertukarkan dengan istilah “*blended learning*”, dalam hal ini banyak ahli yang menyatakan bahwa keduanya memiliki pemaknaan yang sama antara *hybrid learning* dengan *blended learning* yaitu merujuk kepada kombinasi atau perpaduan pembelajaran tradisional (tatap muka) dengan *online/e-learning*.

Pernyataan di atas dipertegas oleh Delialioğlu (2015) bahwa *hybrid learning* juga dikenal dengan beragam istilah diantaranya adalah *blended learning*, *hybrid instruction*, *mediated learning*, *technology-enhanced instruction*, *web-enhanced instruction*, dan *web assisted instruction*. Meskipun memiliki beragam istilah, namun dalam prakteknya, kesemua istilah tersebut merujuk kepada proses yang sama yaitu kombinasi antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran *online*. Diantaranya ahli yang menyamakan istilah *hybrid learning* dan *blended learning* adalah seperti Buzzeto-Moore dan Sweet Guy, Mason dan Rennie, Thomson, Alshwiah, dan Wong (Sham, 2009:1588).

Stacey dan Gerbic (2009:2) mengutip pendapat Allen, Seaman dan Garrett yang mendefinisikan *hybrid learning* adalah: pembelajaran yang dilakukan 30–79% dengan penyampaian *online*. Smaldino dkk (2008:182) menjelaskan *hybird learning* adalah: “kombinasi *e-learning* dengan pembelajaran tatap muka langsung.

Bates (2005:8) menjelaskan *hybrid learning* adalah model gabungan yang mengkombinasikan pengajaran tatap muka dan *online*. Selanjutnya Jaesoon (2009) mendefinisikan *hybrid learning* adalah: “*courses that combine face-to-face classroom instruction with online learning and reduced classroom contact hours (reduced seat time)*).

Barenfanger (2005:14) mendefinisikan *hybrid learning* adalah intergrasi pembelajaran mandiri dan atau *e-learning* dengan pembelajaran kelas klasik terutama mendorong

perkembangan yang diinginkan seperti belajar lebih individual dan fleksibel. Selanjutnya dijelaskan oleh Bärenfänger bahwa *hybrid learning* bukan kombinasi sederhana dari pembelajaran kelas dengan *e-learning*, namun terdiri dari pengaturan pembelajaran standar (pertemuan kelas) serta kegiatan secara *offline* di luar kelas (tutorial, kelas dari lembaga lain di kampus, *peer-review*, lokakarya) dan belajar di mediasi komputer (pelajaran *online*).

More dan Guy (2005:155) menjelaskan *hybrid learning* adalah: interaksi pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran *online*. Hal senada dijelaskan Coolis dan Moonen sebagaimana dikutip Ahmad dan Ismail (2013:99) bahwa *hybrid learning concept according to is a learning concept that practice traditional face to face and online learning concept*.

Sorden sebagaimana dikutip Klimova dan Kacetl (2013:478) menegaskan bahwa *hybrid learning* bukanlah sekedar kombinasi tatap muka dan pembelajaran *online* saja tetapi adalah kombinasi dari metodologi pelatihan yang menggunakan metode pengiriman terbaik untuk keberhasilan pencapaian tujuan pelajaran yang membutuhkan tidak hanya pengajar/tutor yang fleksibel dan berpengalaman tetapi juga pelajar mandiri/otonom.

Penerapan *hybrid learning* setidaknya memiliki 5 (lima) alasan sebagaimana dijelaskan Klimova dan Kacetl (2013:478) yaitu:

1. Memberikan kontribusi untuk pedagogi karena mendukung strategi yang lebih interaktif, tidak hanya mengajar tatap muka.
2. Mendorong pembelajaran kolaboratif, mahasiswa atau pendidik dapat bekerjasama dalam beberapa proyek dari masa saja dan kapan saja.
3. Memperdalam kesadaran antarbudaya karena menempatkan bersama-sama peneliti, pendidik dan siswa dari belahan dunia manapun.
4. Mengurangi biaya mengajar dan belajar karena mahasiswa tidak perlu melakukan banyak perjalanan rutin untuk menyelesaikan pendidikannya.
5. Tepat untuk gaya belajar mahasiswa, meskipun tidak ada konsensus yang jelas tentang masalah ini.

Berdasarkan pemaparan di atas dapatlah dimaknai bahwa model pembelajaran *hybrid learning* adalah perpaduan model pembelajaran tatap muka dan pembelajaran *online* yang memberikan banyak keuntungan

pada pemberian materi pelajaran kepada mahasiswa, akses terhadap bahan ajar yang luas dan kegiatan yang mendukung pembelajaran lebih tinggi dapat berbentuk penugasan serta pembelajaran berbasis proyek.

Model pembelajaran *hybrid learning* bukan hanya sekadar percampuran antara pembelajaran *online* dan pembelajaran tatap muka saja tetapi lebih berfokus pada optimalisasi pencapaian tujuan pembelajaran melalui penerapan teknologi pembelajaran yang benar dan tepat agar mahasiswa belajar dengan benar dengan waktu yang tepat dan pencapaian tujuan pembelajaran yang dimaksud adalah komunikasi lisan melalui pembelajaran tatap muka dan komunikasi tertulis melalui pembelajaran *online* dapat terintegrasi secara optimal sehingga kekuatan masing-masing pembelajaran dicampur menjadi pengalaman belajar yang unik dan kongruen dengan konteks tujuan pembelajaran.

Mengkaji masalah *model pembelajaran hybrid learning* tidak bisa lepas dari pembahasan konsep pembelajaran tatap muka (*face-to-face*) dan pembelajaran *online*, karena dalam pelaksanaan *hybrid learning* di dalamnya terdapat bentuk interaksi antara peserta didik dengan pengajar yang dilakukan secara kombinasi antara pembelajaran yang dilakukan secara tatap-muka dengan *online learning*.

Pembelajaran tatap muka merupakan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi langsung antara dosen dengan mahasiswa dalam waktu dan tempat yang sama. Pembelajaran biasanya berlangsung dalam suatu ruangan yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung, seperti meja, kursi, dan papan tulis, serta untuk beberapa kelas lain dilengkapi juga dengan media elektronik, video/audio, komputer/laptop. Pembelajaran berlangsung selama waktu tertentu yang sudah terjadwal, sehingga interaksi pembelajaran antara peserta didik dengan pengajar dosen menjadi relatif terbatas, yaitu hanya dalam waktu yang terjadwal tertentu.

Keberhasilan pembelajaran tatap muka sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi antara mahasiswa dengan dosen. Interaksi yang berkualitas ditandai oleh terjadinya interaksi multi-arah, bukan hanya dari pengajar kepada mahasiswa, tetapi juga antara mahasiswa kepada dosen, dan antar mahasiswa sendiri. Indikator lain adalah

interaksi terjadi penuh semangat, penuh kehangatan, adanya keterlibatan mental dan psikologis dari pengajar dan mahasiswa. Hal lain yang terpenting adalah interaksi tersebut berdampak pada ketercapaian tujuan pembelajaran.

Sebagai sebuah sistem, pembelajaran tatap muka sangat dipengaruhi oleh komponen-komponen pembelajaran yang terlibat di dalamnya, termasuk sumber belajar yang digunakan. Sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai kebutuhan pencapaian tujuan merupakan keharusan untuk terjadinya pembelajaran yang berkualitas. Lebih lanjut, kondisi ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan dosen mengelola kelas dalam memanfaatkan sumber belajar yang ada.

Terdapat banyak pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan oleh dosen dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa (*student centered learning*) adalah pendekatan yang banyak dikembangkan, seperti pembelajaran aktif (*active learning*), pembelajaran kolaboratif (*collaborative learning*), pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*), dan sebagainya.

Dilihat dari karakteristiknya, pembelajaran tatap muka memiliki sejumlah keunggulan, di antaranya:

1. Ekspresif.
Ekspresif artinya dalam pembelajaran tatap muka pengajar dapat menggunakan ekspresi wajah dan bahasa tubuh untuk memperkuat penjelasan suatu materi.
2. Hubungan interpersonal lebih kuat.
Dalam pembelajaran tatap muka pengajar dapat menyapa dan menegur peserta didik dengan penuh kehangatan dan keakraban, sehingga akan terbangun suasana yang kondusif untuk terjadinya suatu proses pembelajaran.
3. Komunikasi lebih kuat.
Dalam pembelajaran tatap muka, materi yang disampaikan melalui komunikasi lisan dapat dipertegas dengan menggunakan intonasi dan tempo kalimat yang diatur sedemikian rupa, sehingga dapat dilakukan penekanan-penekanan pada bagian-bagian yang dianggap penting.
4. Komunikasi lebih luas dan dalam.
Pembahasan materi dapat dilakukan lebih luas dan mendalam melalui diskusi kelas dengan melibatkan

peserta didik secara aktif, terutama untuk membahas materi yang dianggap baru dan memerlukan latihan yang intensif.

5. Pemberian *feedback* dengan segera.

Melalui pembelajaran tatap muka pengajar dapat langsung memberikan tanggapan dan koreksi atas hasil belajar yang ditunjukkan oleh peserta didik.

Di samping kelebihan-kelebihan di atas, pembelajaran tatap muka tidak lepas dari kelemahan. Sejumlah kelemahan yang mungkin terjadi diantaranya adalah:

1. Waktu untuk melakukan interaksi pembelajaran terbatas dan terjadwal. Terbatas karena pertemuan dalam kelas tatap muka dibatasi oleh aturan pertemuan, yaitu untuk pertemuan tatap muka dengan waktu tertentu. Terjadwal artinya waktu pertemuan telah ditetapkan, baik hari maupun jam pertemuannya. Akibat dari kedua kondisi ini adalah baik pengajar maupun peserta didik harus menyiapkan waktu khusus untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Bila pengajar maupun peserta didik tidak dapat hadir pada waktu tersebut, maka hilanglah kesempatan untuk mengikuti pembelajaran.
2. Tempat untuk melaksanakan pembelajaran tertentu. Dalam pembelajaran tatap muka, tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran telah ditetapkan lokasinya. Semua orang yang akan terlibat dalam pembelajaran harus menuju dan hadir di tempat yang telah ditentukan. Akibatnya bagi mereka yang tinggal di tempat yang jauh sering menghadapi kendala. Tidak jarang akhirnya mereka gagal hadir ke tempat belajar, karena menghadapi hambatan seperti transportasi.
3. Seringkali sumber belajar yang digunakan terbatas. Kondisi ini juga sering terjadi, di mana sumber belajar yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran tatap muka hanya mengandalkan materi dari pengajar atau buku-buku rujukan yang disampaikan oleh pengajar. Bahkan tidak jarang materi itu hanya berupa file presentasi yang isinya berupa pointer materi atau berupa *handout* dari pengajar. Kondisi seperti ini tentu berakibat pada terbatasnya bahan/materi yang dipelajari oleh mahasiswa.

Berdasarkan uraian tentang pembelajaran tatap muka dan pembelajaran *online* di atas, dapat diidentifikasi perbedaan di antara keduanya sebagaimana dijelaskan oleh Dabbagh dan Ritland (2005:53) berikut ini:

Tabel 9.1. Peran Pengajar dan Peserta Didik dalam Kelas Tatap Muka dengan Kelas *Online Learning*

Tipe	Peran Pengajar	Peran Peserta Didik	Lingkungan Belajar
Pembelajaran Tatap Muka	Manajer, ahli, penegak disiplin, pengontrol, penyampai informasi, penentu tujuan, penentu waktu	Pendengar, penerima, pemula, pasif, percaya pada dosen untuk mengukur belajar	<i>Objectivist</i> , berpusat pada guru, guru melakukan perancah, terstruktur dengan ketat
<i>Online learning</i>	Nara sumber, bagian dari peserta, bagian dari siswa, moderator, fasilitator, pelatih, monitor, penasihat	Orang yang memecahkan masalah, penjelajah, peneliti, kolaborator, penentu tujuan, moderator, fasilitator, perancah, peserta	<i>Constructivist</i> , berpusat pada siswa, menekankan pada belajar kolaboratif, guru kurang melakukan perancah, "miskin" perancah

Sementara dilihat dari karakteristik lingkungan belajarnya, dapat diidentifikasi perbedaan-perbedaan sebagai berikut:

Tabel 9.2. Karakteristik Lingkungan Belajar

Lingkungan Belajar Tradisional	Lingkungan Belajar Berbasis Online
Memiliki batas	Tidak memiliki batas
Tatap muka (interaksi langsung)	Pergantian waktu: komunikasi yang <i>asynchronous</i> dan perputaran yang cepat
Dikontrol oleh Instruktur	Kontrol oleh masing-masing pemelajar

Linier	<i>Hypermedia</i> : ruang multidimensional, navigasi penghubung, multimedia
Sumber-sumber yang teredit	Kemampuan pencarian yang tidak terfilter
Sumber informasi yang stabil	Dinamis, Informasi yang real-time
<i>Familiar technology</i>	Teknologi berkembang terus menerus

Melihat pemaparan mengenai pembelajaran *online* dan pembelajaran tatap muka, *hybrid learning* memiliki keunggulan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan aktivitas belajar mahasiswa. Perpaduan antara *online* dan pembelajaran tatap muka ini sangat memperhatikan tujuan khusus belajar, konteks belajar, dan pendekatan pembelajaran.

Pemilihan bentuk belajar, kapan dilaksanakan secara online dan kapan secara tatap muka harus mempertimbangkan karakteristik tujuan pembelajaran yang harus dikuasai mahasiswa. Untuk tujuan pembelajaran yang bersifat pemahaman dan pengembangan konsep sangat mungkin dilakukan secara *online*. Namun untuk tujuan pembelajaran berupa keterampilan yang menuntut proses belajar dalam bentuk kegiatan praktek, maka bentuk belajar yang dipilih dalam bentuk tatap muka.

Demikian juga dengan konteks pembelajaran, pilihan untuk menggunakan *online learning* didasarkan pada suatu kondisi di mana mahasiswa mengalami kesulitan untuk tatap-muka di suatu tempat yang ditentukan tetapi sesungguhnya mereka dapat berkomunikasi baik pada waktu yang bersamaan (*synchronous*) maupun dalam waktu yang berbeda (*asynchronous*). Sebaliknya apabila mereka dapat bertemu dalam waktu dan tempat yang sama, sebaiknya menggunakan pembelajaran tatap muka.

Dilihat dari faktor pendekatan pembelajaran yang digunakan dosen juga akan berdampak pada pemanfaatan *hybrid learning*. Artinya apabila dosen cenderung menggunakan pendekatan pembelajaran yang mendorong mahasiswa aktif mencari, menemukan dan merumuskan sendiri hasil belajarnya, maka model pembelajaran *online* dapat menjadi pilihan. Sedangkan kalau dosen cenderung

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

menggunakan pendekatan yang berorientasi pada dosen,
maka pembelajaran tatap muka menjadi pilihan.

BAB X

INOVASI TENAGA PENDIDIK

A. Kualifikasi Dan Kompetensi Guru

Terkait dengan kualifikasi dan kompetensi guru maka dapat dirujuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru dapat dilihat bahwa kualifikasi guru terdiri dari:

1. Kualifikasi Akademik Guru Melalui Pendidikan Formal.

Kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi akademik guru pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-kanak/Raudatul Atfal (PAUD/TK/RA), guru sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), guru sekolah menengah pertama/madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), guru sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), guru sekolah dasar luar biasa/sekolah menengah luar biasa/sekolah menengah atas luar biasa (SDLB/SMPLB/SMALB), dan guru sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK), sebagai berikut:

a. Kualifikasi Akademik Guru PAUD/TK/RA.

Guru pada PAUD/TK/RA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

b. Kualifikasi Akademik Guru SD/MI.

Guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

c. Kualifikasi Akademik Guru SMP/MTs.

Guru pada SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

d. Kualifikasi Akademik Guru SMA/MA.

Guru pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

e. Kualifikasi Akademik Guru SDLB/SMPLB/SMALB.

Guru pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

f. Kualifikasi Akademik Guru SMK/MAK.

Guru pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

2. Kualifikasi Akademik Guru Melalui Uji Kelayakan dan Kesetaraan.

Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan

oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya.

Selanjutnya terkait dengan kompetensi guru Indonesia meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi professional. *Kompetensi pedagogik* adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. *Kompetensi kepribadian* adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. *Kompetensi profesional* adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. *Kompetensi sosial* adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Deskripsi detail terkait dengan kompetensi guru mulai dari guru taman kanak (TK), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) SMA dipaparkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

1. Standar Kompetensi Guru PAUD/TK/RA

a. Kompetensi Pedagogik

- 1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.
 - Memahami karakteristik peserta didik usia TK/PAUD yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, dan latar belakang sosial-budaya.
 - Mengidentifikasi potensi peserta didik usia TK/PAUD dalam berbagai bidang pengembangan.
 - Mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik usia TK/PAUD dalam berbagai bidang pengembangan.
 - Mengidentifikasi kesulitan peserta didik usia TK/PAUD dalam berbagai bidang pengembangan.
- 2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
 - Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip bermain sambil belajar dan prinsip-prinsip terkait dengan berbagai bidang pengembangan di TK/PAUD.

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

- Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik bermain sambil belajar yang bersifat holistik, otentik, dan bermakna, yang terkait dengan berbagai bidang pengembangan di TK/PAUD.
- 3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu.
- Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum.
 - Menentukan tujuan kegiatan pengembangan yang mendidik.
 - Menentukan kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pengembangan.
 - Memilih materi kegiatan pengembangan yang mendidik yaitu kegiatan bermain sambil belajar sesuai dengan tujuan pengembangan
 - Menyusun perencanaan semester, mingguan dan harian dalam berbagai kegiatan pengembangan di TK/PAUD.
 - Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian.
- 4) Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik.
- Memahami prinsip-prinsip perancangan kegiatan pengembangan yang mendidik dan menyenangkan.
 - Mengembangkan komponen-komponen rancangan kegiatan pengembangan yang mendidik dan menyenangkan.
 - Menyusun rancangan kegiatan pengembangan yang mendidik yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, maupun di luar kelas.
 - Menerapkan kegiatan bermain yang bersifat holistik, otentik, dan bermakna.
 - Menciptakan suasana bermain yang menyenangkan, inklusif, dan demokratis
 - Memanfaatkan media dan sumber belajar yang sesuai dengan pendekatan bermain sambil belajar.
 - Menerapkan tahapan bermain anak dalam kegiatan pengembangan di TK/PAUD.
 - Mengambil keputusan transaksional dalam kegiatan pengembangan di TK/PAUD sesuai dengan situasi yang berkembang.

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

- 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik.
 - Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan pengembangan yang mendidik.
- 6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
 - Menyediakan berbagai kegiatan bermain sambil belajar untuk mendorong peserta didik mengembangkan potensinya secara optimal termasuk kreativitasnya.
- 7) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
 - Memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik dan santun, baik secara lisan maupun tulisan.
 - Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun secara siklikal dari (a) penyiapan kondisi psikologis peserta didik, (b) memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespons, (c) respons peserta didik, (d) reaksi guru terhadap respons peserta didik, dan seterusnya.
- 8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
 - Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik lima mata pelajaran SD/MI.
 - Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik lima mata pelajaran SD/MI.
 - Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
 - Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

- Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen.
 - Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan.
 - Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar.
- 9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
- Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar.
 - Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan.
 - Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan.
 - Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
- 10) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.
- Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.
 - Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran.
 - Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

b. Kompetensi Kepribadian.

- 1) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.
- Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat-istiadat, daerah asal, dan gender.
 - Bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, serta kebudayaan nasional Indonesia yang beragam.
- 2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
- Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi.
 - Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan, dan akhlak mulia.

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

- Berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik dan anggota masyarakat di sekitarnya.
- 3) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.
 - Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil.
 - Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan berwibawa.
 - 4) Menunjukkan etos kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.
 - Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi.
 - Bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri.
 - Bekerja mandiri secara profesional.
 - 5) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.
 - Memahami kode etik profesi guru.
 - Menerapkan kode etik profesi guru.
 - Berperilaku sesuai dengan kode etik guru

c. Kompetensi Sosial

- 1) Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.
 - Bersikap inklusif dan objektif terhadap peserta didik, teman sejawat dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran.
 - Tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik dan lingkungan sekolah karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status sosial-ekonomi.
- 2) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.
 - Berkomunikasi dengan teman sejawat dan komunitas ilmiah lainnya secara santun, empatik dan efektif.
 - Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik, dan

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik.

- Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik.
- 3) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.
- Beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka meningkatkan efektivitas sebagai pendidik, termasuk memahami bahasa daerah setempat.
 - Melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang bersangkutan.
- 4) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.
- Berkomunikasi dengan teman sejawat, profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah lainnya melalui berbagai media dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.
 - Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran kepada komunitas profesi sendiri secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

d. Kompetensi Profesional

- 1) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- Menguasai konsep dasar matematika, sains, bahasa, pengetahuan sosial, agama, seni, pendidikan jasmani, kesehatan dan gizi sebagai saranapengembangan untuk setiap bidang pengembangan anak TK/PAUD.
 - Menguasai penggunaan berbagai alat permainan untuk mengembangkan aspek fisik, kognitif, sosial-emosional, nilai moral, sosial budaya, dan bahasa anak TK/PAUD.
 - Menguasai berbagai permainan anak.

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

- 2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
 - Memahami kemampuan anak TK/PAUD dalam setiap bidang pengembangan.
 - Memahami kemajuan anak dalam setiap bidang pengembangan di TK/PAUD.
 - Memahami tujuan setiap kegiatan pengembangan.
- 3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
 - Memilih materi bidang pengembangan yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
 - Mengolah materi bidang pengembangan secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
- 4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
 - Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus.
 - Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan.
 - Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan.
 - Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber.
- 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.
 - Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi.
 - Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri.

2. Standar Kompetensi Guru Kelas SD/MI

a. Kompetensi Pedagogik

- 1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.
 - Memahami karakteristik peserta didik usia sekolah dasar yang berkaitan dengan aspek

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya.

- Mengidentifikasi potensi peserta didik usia sekolah dasar dalam lima mata pelajaran SD/MI.
 - Mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik usia sekolah dasar dalam lima mata pelajaran SD/MI.
 - Mengidentifikasi kesulitan peserta belajar usia sekolah dasar dalam lima mata pelajaran SD/MI.
- 2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
- Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan lima mata pelajaran SD/MI.
 - Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam lima mata pelajaran SD/MI.
 - Menerapkan pendekatan pembelajaran tematis, khususnya di kelas-kelas awal SD/MI.
- 3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
- Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum.
 - Menentukan tujuan lima mata pelajaran SD/MI.
 - Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan lima mata pelajaran SD/MI.
 - Memilih materi lima mata pelajaran SD/MI yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran.
 - Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik usia SD/MI.
 - Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian.
- 4) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
- Memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik. Mengembangkan

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

komponen-komponen rancangan pembelajaran.

- Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan.
 - Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan.
 - Menggunakan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan lima mata pelajaran SD/MI untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh.
 - Mengambil keputusan transaksional dalam lima mata pelajaran SD/MI sesuai dengan situasi yang berkembang.
- 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.
- Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.
- 6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
- Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi belajar secara optimal.
 - Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya.
- 7) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
- Memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik dan santun, baik secara lisan maupun tulisan.
 - Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun secara siklikal dari (a) penyiapan kondisi psikologis peserta didik, (b) memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespons, (c) respons peserta didik, (d) reaksi guru terhadap respons peserta didik, dan seterusnya.

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

- 8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
 - Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik lima mata pelajaran
 - Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik lima mata pelajaran SD/MI.
 - Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
 - Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
 - Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen.
 - Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan.
 - Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar.

- 9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
 - Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar.
 - Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan.
 - Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan.
 - Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

- 10) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.
 - Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.
 - Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan lima mata pelajaran SD/MI.
 - Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran lima mata pelajaran SD/MI

b. Kompetensi Kepribadian

- 1) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.
 - Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat-istiadat, daerah asal, dan gender.
 - Bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, serta kebudayaan nasional Indonesia yang beragam.
- 2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
 - Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi.
 - Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia.
 - Berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik dan anggota masyarakat di sekitarnya.
- 3) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.
 - Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil.
 - Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan berwibawa.
- 4) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.
 - Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi.
 - Bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri.
 - Bekerja mandiri secara profesional.
- 5) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.
 - Memahami kode etik profesi guru.
 - Menerapkan kode etik profesi guru.
 - Berperilaku sesuai dengan kode etik guru.

c. Kompetensi Sosial

- 1) Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

- Bersikap inklusif dan objektif terhadap peserta didik, teman sejawat dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran.
 - Tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik dan lingkungan sekolah karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status sosial-ekonomi.
- 2) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.
- Berkomunikasi dengan teman sejawat dan komunitas ilmiah lainnya secara santun, empatik dan efektif.
 - Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik.
 - Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik.
- 3) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.
- Beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka meningkatkan efektivitas sebagai pendidik, termasuk memahami bahasa daerah setempat.
 - Melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang bersangkutan.
- 4) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.
- Berkomunikasi dengan teman sejawat, profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah lainnya melalui berbagai media dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.
 - Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran kepada komunitas profesi sendiri secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

d. Kompetensi Profesional.

- 1) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.

Bahasa Indonesia

- Memahami hakikat bahasa dan pemerolehan bahasa.
- Memahami kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia.
- Menguasai dasar-dasar dan kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- Memiliki keterampilan berbahasa Indonesia (menyimak, berbicara, membaca, dan menulis)
- Memahami teori dan genre sastra Indonesia.
- Mampu mengapresiasi karya sastra Indonesia, secara reseptif dan produktif.

Matematika

- Menguasai pengetahuan konseptual dan prosedural serta keterkaitan keduanya dalam konteks materi aritmatika, aljabar, geometri, trigonometri, pengukuran, statistika, dan logika matematika.
- Mampu menggunakan matematisasi horizontal dan vertikal untuk menyelesaikan masalah matematika dan masalah dalam dunia nyata.
- Mampu menggunakan pengetahuan konseptual, prosedural, dan keterkaitan keduanya dalam pemecahan masalah matematika, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
- Mampu menggunakan alat peraga, alat ukur, alat hitung, dan piranti lunak komputer.

IPA

- Mampu melakukan observasi gejala alam baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Memanfaatkan konsep-konsep dan hukum-hukum ilmu pengetahuan alam dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari.
- Memahami struktur ilmu pengetahuan alam, termasuk hubungan fungsional antarkonsep, yang berhubungan dengan mata pelajaran IPA.

IPS

- Menguasai materi keilmuan yang meliputi dimensi pengetahuan, nilai, dan keterampilan IPS.
- Mengembangkan materi, struktur, dan konsep keilmuan IPS.
- Memahami cita-cita, nilai, konsep, dan prinsip-prinsip pokok ilmu-ilmu sosial dalam konteks kebhinnekaan masyarakat Indonesia dan dinamika kehidupan global.
- Memahami fenomena interaksi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kehidupan agama, dan perkembangan masyarakat serta saling ketergantungan global.

PKn

- Menguasai materi keilmuan yang meliputi dimensi pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku yang mendukung kegiatan pembelajaran PKn.
 - Menguasai konsep dan prinsip kepribadian nasional dan demokrasi konstitusional Indonesia, semangat kebangsaan dan cinta tanah air serta bela negara.
 - Menguasai konsep dan prinsip perlindungan, pemajuan HAM, serta penegakan hukum secara adil dan benar.
 - Menguasai konsep, prinsip, nilai, moral, dan norma kewarganegaraan Indonesia yang demokratis dalam konteks kewarganegaraan negara dan dunia.
- 2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
- Memahami standar kompetensi lima mata pelajaran SD/MI.
 - Memahami kompetensi dasar lima mata pelajaran SD/MI.
 - Memahami tujuan pembelajaran lima mata pelajaran SD/MI.
- 3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
- Memilih materi lima mata pelajaran SD/MI yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

- Mengolah materi lima mata pelajaran SD/MI secara integratif dan kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
- 4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
 - Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara\ terus menerus.
 - Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan.
 - Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan.
 - Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber.
 - 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.
 - Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi.
 - Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri

3. Standar Kompetensi Guru Mata Pelajaran SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK/MAK

a. Kompetensi Pedagogik.

- 1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.
 - Memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya.
 - Mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu.
 - Mengidentifikasi bekal-ajar awal peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu.
 - Mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu.
- 2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
 - Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu.

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

- Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu.
- 3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu.
- Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum.
 - Menentukan tujuan pembelajaran yang diampu.
 - Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diampu.
 - Memilih materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran.
 - Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik.
 - Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian.
- 4) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
- Memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik.
 - Mengembangkan komponen rancangan pembelajaran.
 - Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan.
 - Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan.
 - Menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh.
 - Mengambil keputusan transaksional dalam pembelajaran yang diampu sesuai dengan situasi yang berkembang.
- 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

- Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang diampu.
- 6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
- Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal.
 - Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya.
- 7) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
- Memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik, dan santun, secara lisan, tulisan, dan/atau bentuk lain.
 - Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi kegiatan/permainan yang mendidik yang terbangun secara siklikal dari:
 - a) Penyiapan kondisi psikologis peserta didik untuk ambil bagian dalam permainan melalui bujukan dan contoh.
 - b) Ajakan kepada peserta didik untuk ambil bagian.
 - c) Respons peserta didik terhadap ajakan guru.
 - d) Reaksi guru terhadap respons peserta didik, dan seterusnya.
- 8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
- Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu.
 - Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu.
 - Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
 - Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

- Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen.
 - Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan.
 - Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar.
- 9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
- Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar
 - Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan.
 - Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan.
 - Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
- 10) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.
- Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.
 - Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu.
 - Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu.

b. Kompetensi Kepribadian

- 1) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.
- Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat-istiadat, daerah asal, dan gender.
 - Bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan sosial yang berlaku dalam masyarakat, dan kebudayaan nasional Indonesia yang beragam.
- 2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
- Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi.

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

- Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia.
 - Berperilaku yang dapat diteladan oleh peserta didik dan anggota masyarakat di sekitarnya.
- 3) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.
- Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil.
 - Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan berwibawa.
- 4) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.
- Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi.
 - Bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri.
 - Bekerja mandiri secara profesional.
- 5) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.
- Memahami kode etik profesi guru.
 - Menerapkan kode etik profesi guru.
 - Berperilaku sesuai dengan kode etik profesi guru.

c. Kompetensi Sosial.

- 1) Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.
- Bersikap inklusif dan objektif terhadap peserta didik, teman sejawat dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran.
 - Tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik dan lingkungan sekolah karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status sosial-ekonomi.
- 2) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

- Berkomunikasi dengan teman sejawat dan komunitas ilmiah lainnya secara santun, empatik dan efektif.
 - Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik.
 - Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik.
- 3) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.
- Beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka meningkatkan efektivitas sebagai pendidik.
 - Melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang bersangkutan.
- 4) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.
- Berkomunikasi dengan teman sejawat, profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah lainnya melalui berbagai media dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran.
 - Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran kepada komunitas profesi sendiri secara lisan dan tulisan maupun bentuk lain.

d. Kompetensi Profesional

- 1) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- a. Guru mata pelajaran Pendidikan Agama pada SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, SMK/MAK*
- 1.1 Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam
- Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

- Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

1.2 Kompetensi Guru Pendidikan Agama

Kristen

- Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Kristen.
- Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Kristen.

1.3 Kompetensi Guru Pendidikan Agama

Katolik

- Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Katolik.
- Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Katolik.

1.4 Kompetensi Guru Pendidikan Agama Hindu

- Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Hindu.
- Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Hindu.

1.5 Kompetensi Guru Pendidikan Agama

Buddha

- Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Buddha.

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

- Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Buddha.

1.6 Kompetensi Guru Pendidikan Agama

Konghucu

- Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Konghucu.
 - Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Konghucu.
- b. Kompetensi Guru mata pelajaran PKn pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK
- Memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
 - Memahami substansi Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), nilai dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*), dan ketrampilan kewarganegaraan (*civic skills*).
 - Menunjukkan manfaat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan.
- c. Kompetensi Guru mata pelajaran Seni Budaya pada SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, SMK/MAK*
- Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan (mencakup materi yang bersifat konsepsi, apresiasi, dan kreasi/rekreasi) yang mendukung pelaksanaan pembelajaran seni budaya (seni rupa, musik, tari, teater) dan keterampilan.
 - Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Seni Budaya.

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

- d. Kompetensi Guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan pada SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, SMK/MAK
- Menjelaskan dimensi filosofis pendidikan jasmani termasuk etika sebagai aturan dan profesi.
 - Menjelaskan perspektif sejarah pendidikan jasmani.
 - Menjelaskan dimensi anatomi manusia, secara struktur dan fungsinya.
 - Menjelaskan aspek kinesiology dan kinerja fisik manusia.
 - Menjelaskan aspek fisiologis manusia dan efek dari kinerja latihan.
 - Menjelaskan aspek psikologi pada kinerja manusia, termasuk motivasi dan tujuan, kecemasan dan stress, serta persepsi diri.
 - Menjelaskan aspek sosiologi dalam kinerja diri, termasuk dinamika sosial; etika dan perilaku moral, dan budaya, suku, dan perbedaan jenis kelamin.
 - Menjelaskan teori perkembangan gerak, termasuk aspek-aspek yang mempengaruhinya.
 - Menjelaskan teori belajar gerak, termasuk keterampilan dasar dan kompleks dan hubungan timbal balik di antara domain kognitif, afektif dan psikomotorik.
- e. Kompetensi Guru mata pelajaran Matematika pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK
- Menggunakan bilangan, hubungan di antara bilangan, berbagai sistem bilangan dan teori bilangan.
 - Menggunakan pengukuran dan penaksiran.
 - Menggunakan logika matematika.
 - Menggunakan konsep-konsep geometri.
 - Menggunakan konsep-konsep statistika dan peluang.
 - Menggunakan pola dan fungsi.
 - Menggunakan konsep-konsep aljabar.
 - Menggunakan konsep-konsep kalkulus dan geometri analitik.

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

- Menggunakan konsep dan proses matematika diskrit.
 - Menggunakan trigonometri.
 - Menggunakan vektor dan matriks.
 - Menjelaskan sejarah dan filsafat matematika.
 - Mampu menggunakan alat peraga, alat ukur, alat hitung, piranti lunak komputer, model matematika, dan model statistika.
- f. Mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK
- Mengoperasikan komputer personal dan periferalnya.
 - Merakit, menginstalasi, men-*setup*, memelihara dan melacak serta memecahkan masalah (*troubleshooting*) pada komputer personal.
 - Melakukan pemrograman komputer dengan salah satu bahasa pemrograman berorientasi objek.
 - Mengolah kata (*word processing*) dengan komputer personal.
 - Mengolah lembar kerja (*spreadsheet*) dan grafik dengan komputer personal.
 - Mengelola pangkalan data (*data base*) dengan komputer personal atau komputer server.
 - Membuat presentasi interaktif yang memenuhi kaidah komunikasi visual dan interpersonal.
 - Membuat media grafis dengan menggunakan perangkat lunak publikasi.
 - Membuat dan memelihara jaringan komputer (kabel dan nirkabel).
 - Membuat dan memelihara situs laman (*web*).
 - Menggunakan sarana telekomunikasi (*telephone, mobilephone, faximile*).
 - Membuat dan menggunakan media komunikasi, termasuk pemrosesan gambar, audio dan video.

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

- Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam disiplin atau materi pembelajaran lain dan sebagai media komunikasi.
- Mendesain dan mengelola lingkungan pembelajaran/sumber daya dengan memperhatikan standar kesehatan dan keselamatan.
- Mengoperasikan perangkat keras dan perangkat lunak pendukung pembelajaran.
- Memahami EULA (*End User Licence Agreement*) dan keterbatasan serta keluasaan penggunaan perangkat lunak secara legal.

g. Kompetensi Guru mata pelajaran IPA pada SMP/MTs

- Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori IPA serta penerapannya secara fleksibel.
- Memahami proses berpikir IPA dalam mempelajari proses dan gejala alam
- Menggunakan bahasa simbolik dalam mendeskripsikan proses dan gejala alam.
- Memahami hubungan antar berbagai cabang IPA, dan hubungan IPA dengan matematika dan teknologi.
- Bernalar secara kualitatif maupun kuantitatif tentang proses dan hukum alam sederhana.
- Menerapkan konsep, hukum, dan teori IPA untuk menjelaskan berbagai fenomena alam.
- Menjelaskan penerapan hukum-hukum IPA dalam teknologi terutama yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.
- Memahami lingkup dan kedalaman IPA sekolah.
- Kreatif dan inovatif dalam penerapan dan pengembangan IPA.
- Menguasai prinsip-prinsip dan teori-teori pengelolaan dan keselamatan kerja/belajar di laboratorium IPA sekolah.

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

- Menggunakan alat-alat ukur, alat peraga, alat hitung, dan piranti lunak komputer untuk meningkatkan pembelajaran IPA di kelas, laboratorium.
- Merancang eksperimen IPA untuk keperluan pembelajaran atau penelitian
- Melaksanakan eksperimen IPA dengan cara yang benar.
- Memahami sejarah perkembangan IPA dan pikiran-pikiran yang mendasari perkembangan tersebut.

h. Kompetensi Guru Mata pelajaran Biologi pada SMA/MA, SMK/MAK

- Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori biologi serta penerapannya secara fleksibel.
- Memahami proses berpikir biologi dalam mempelajari proses dan gejala alam.
- Menggunakan bahasa simbolik dalam mendeskripsikan proses dan gejala alam/biologi.
- Memahami struktur (termasuk hubungan fungsional antar konsep) ilmu
- Biologi dan ilmu-ilmu lain yang terkait.
- Bernalar secara kualitatif maupun kuantitatif tentang proses dan hukum biologi.
- Menerapkan konsep, hukum, dan teori fisika kimia dan matematika untuk menjelaskan/mendeskripsikan fenomena biologi.
- Menjelaskan penerapan hukum-hukum biologi dalam teknologi yang terkait dengan biologi terutama yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.
- Memahami lingkup dan kedalaman biologi sekolah.
- Kreatif dan inovatif dalam penerapan dan pengembangan bidang ilmu biologi dan ilmu-ilmu yang terkait.
- Menguasai prinsip-prinsip dan teori-teori pengelolaan dan keselamatan

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

kerja/belajar di laboratorium biologi sekolah.

- Menggunakan alat-alat ukur, alat peraga, alat hitung, dan piranti lunak komputer untuk meningkatkan pembelajaran biologi di kelas, laboratorium dan lapangan.
- Merancang eksperimen biologi untuk keperluan pembelajaran atau penelitian.
- Melaksanakan eksperimen biologi dengan cara yang benar.
- Memahami sejarah perkembangan IPA pada umumnya khususnya biologi dan pikiran-pikiran yang mendasari perkembangan tersebut.

i. Kompetensi Guru mata pelajaran Fisika pada SMA/MA, SMK/MAK

- Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori fisika serta penerapannya secara fleksibel.
- Memahami proses berpikir fisika dalam mempelajari proses dan gejala alam.
- Menggunakan bahasa simbolik dalam mendeskripsikan proses dan gejala alam.
- Memahami struktur (termasuk hubungan fungsional antar konsep) ilmu
- Fisika dan ilmu-ilmu lain yang terkait.
- Bernalar secara kualitatif maupun kuantitatif tentang proses dan hukum fisika.
- Menerapkan konsep, hukum, dan teori fisika untuk menjelaskan fenomena biologi, dan kimia.
- Menjelaskan penerapan hukum-hukum fisika dalam teknologi terutama yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.
- Memahami lingkup dan kedalaman fisika sekolah.
- Kreatif dan inovatif dalam penerapan dan pengembangan bidang ilmu fisika dan ilmu-ilmu yang terkait.
- Menguasai prinsip-prinsip dan teori-teori pengelolaan dan keselamatan

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

kerja/belajar di laboratorium fisika sekolah.

- Menggunakan alat-alat ukur, alat peraga, alat hitung, dan piranti lunak komputer untuk meningkatkan pembelajaran fisika di kelas, laboratorium, dan lapangan.
 - Merancang eksperimen fisika untuk keperluan pembelajaran atau penelitian.
 - Melaksanakan eksperimen fisika dengan cara yang benar.
 - Memahami sejarah perkembangan IPA pada umumnya khususnya fisika dan pikiran-pikiran yang mendasari perkembangan tersebut.
- j. Kompetensi Guru mata pelajaran Kimia pada SMA/MA, SMK/MAK
- Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori kimia yang meliputi struktur, dinamika, energetika dan kinetika serta penerapannya secara fleksibel.
 - Memahami proses berpikir kimia dalam mempelajari proses dan gejala alam.
 - Menggunakan bahasa simbolik dalam mendeskripsikan proses dan gejala alam/kimia.
 - Memahami struktur (termasuk hubungan fungsional antar konsep) ilmu
 - Kimia dan ilmu-ilmu lain yang terkait.
 - Bernalar secara kualitatif maupun kuantitatif tentang proses dan hukum kimia.
 - Menerapkan konsep, hukum, dan teori fisika dan matematika untuk menjelaskan/mendeskripsikan fenomena kimia.
 - Menjelaskan penerapan hukum-hukum kimia dalam teknologi yang terkait dengan kimia terutama yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.
 - Memahami lingkup dan kedalaman kimia Sekolah.

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

- Kreatif dan inovatif dalam penerapan dan pengembangan bidang ilmu yang terkait dengan mata pelajaran kimia.
 - Menguasai prinsip-prinsip dan teori-teori pengelolaan dan keselamatan kerja/belajar di laboratorium kimia sekolah.
 - Menggunakan alat-alat ukur, alat peraga, alat hitung, dan piranti lunak komputer untuk meningkatkan pembelajaran kimia di kelas, laboratorium dan lapangan.
 - Merancang eksperimen kimia untuk keperluan pembelajaran atau penelitian.
 - Melaksanakan eksperimen kimia dengan cara yang benar.
 - Memahami sejarah perkembangan IPA pada umumnya khususnya kimia dan pikiran-pikiran yang mendasari perkembangan tersebut.
- k. Kompetensi Guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada SMP/MTs
- Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir mata pelajaran IPS baik dalam lingkup lokal, nasional, maupun global.
 - Membedakan struktur keilmuan IPS dengan Ilmu-ilmu Sosial.
 - Menguasai konsep dan pola pikir keilmuan dalam bidang IPS.
 - Menunjukkan manfaat mata pelajaran IPS.
- l. Kompetensi Guru mata pelajaran Ekonomi pada SMA/MA, SMK/MAK
- Memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran Ekonomi.
 - Membedakan pendekatan-pendekatan Ekonomi.
 - Menunjukkan manfaat mata pelajaran Ekonomi.

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

- m. Kompetensi Guru mata pelajaran Sosiologi pada SMA/MA, SMK/MAK
- Memahami materi, struktur, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran Sosiologi.
 - Memahami langkah-langkah kerja ilmuwan sosial.
 - Menunjukkan manfaat mata pelajaran Sosiologi.
- n. Kompetensi Guru mata pelajaran Antropologi pada SMA/MA, SMK/MAK
- Memahami materi, struktur, dan konsep pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran Antropologi.
 - Membedakan jenis-jenis Antropologi.
 - Menunjukkan manfaat mata pelajaran Antropologi.
- o. Kompetensi Guru mata pelajaran Geografi pada SMA/MA, SMK/MAK
- Menguasai hakikat struktur keilmuan, ruang lingkup, dan objek geografi.
 - Membedakan pendekatan-pendekatan geografi.
 - Menguasai materi geografi secara luas dan mendalam.
 - Menunjukkan manfaat mata pelajaran geografi.
- p. Kompetensi Guru mata pelajaran Sejarah pada SMA/MA, SMK/MAK
- Menguasai hakikat struktur keilmuan, ruang lingkup, dan objek Sejarah.
 - Membedakan pendekatan-pendekatan Sejarah.
 - Menguasai materi Sejarah secara luas dan mendalam.
 - Menunjukkan manfaat mata pelajaran Sejarah.
- q. Kompetensi Guru mata pelajaran Bahasa Indonesia pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK
- Memahami konsep, teori, dan materi berbagai aliran linguistik yang terkait

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

dengan pengembangan materi pembelajaran bahasa.

- Memahami hakekat bahasa dan pemerolehan bahasa.
- Memahami kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia.
- Menguasai kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- Memahami teori dan genre sastra Indonesia.
- Mengapresiasi karya sastra secara reseptif dan produktif.

r. Kompetensi Guru mata pelajaran Bahasa Asing

1.1 Kompetensi Guru Bahasa Inggris pada SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, SMK/MAK

- Memiliki pengetahuan tentang berbagai aspek kebahasaan dalam bahasa Inggris (linguistik, wacana, sosiolinguistik, dan strategis).
- Menguasai bahasa Inggris lisan dan tulis, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik, wacana, sosiolinguistik, dan strategis).

1.2. Kompetensi Guru Bahasa Arab pada SMA/MA, SMK/MAK

- Memiliki pengetahuan tentang berbagai aspek kebahasaan dalam bahasa Arab (linguistik, wacana, sosiolinguistik, dan strategis).
- Menguasai bahasa Arab lisan dan tulis, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik, wacana, sosiolinguistik, dan strategis).

1.3. Kompetensi Guru Bahasa Jerman pada SMA/MA, SMK/MAK

- Memiliki pengetahuan tentang berbagai aspek kebahasaan dalam

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

bahasa Jerman (linguistik, wacana, sosiolinguistik, dan strategis).

- Menguasai bahasa Jerman lisan dan tulis, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik, wacana, sosiolinguistik, dan strategis).

1.4. Kompetensi Guru Bahasa Perancis pada SMA/MA, SMK/MAK

- Memiliki pengetahuan tentang berbagai aspek kebahasaan dalam bahasa Perancis (linguistik, wacana, sosiolinguistik, dan strategis).
- Menguasai bahasa Perancis lisan dan tulis, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik, wacana, sosiolinguistik, dan strategis).

1.5. Kompetensi Guru Bahasa Jepang pada SMA/MA, SMK/MAK

- Memiliki pengetahuan tentang berbagai aspek kebahasaan dalam bahasa Jepang (linguistik, wacana, sosiolinguistik, dan strategis).
- Menguasai bahasa Jepang lisan dan tulis, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik, wacana, sosiolinguistik, dan strategis).

1.6. Kompetensi Guru Bahasa Mandarin pada SMA/MA, SMK/MAK

- Memiliki pengetahuan tentang berbagai aspek kebahasaan dalam bahasa Mandarin (linguistik, wacana, sosiolinguistik, dan strategis).
- Menguasai bahasa Mandarin lisan dan tulis, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik, wacana, sosiolinguistik, dan strategis).

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

- 2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.
 - Memahami standar kompetensi mata pelajaran yang diampu.
 - Memahami kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.
 - Memahami tujuan pembelajaran yang diampu.
- 3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
 - Memilih materi pembelajaran yang diampu sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
 - Mengolah materi pelajaran yang diampu secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
- 4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
 - Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus.
 - Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan.
 - Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan.
 - Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber.
- 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.
 - Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi.
 - Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri.

B. Sertifikasi Guru

1. Pengertian

National Commision on Educational Services (NCES) memaparkan sertifikasi merupakan prosedur untuk menentukan apakah seseorang calon guru layak diberikan izin dan kewenangan untuk mengajar. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.

Pernyataan di atas dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru pasal 1 ayat 3 yaitu: sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru, dan pasal 4 yaitu sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga professional. Selanjutnya pada pasal 4 ayat 1 dinyatakan sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat dan ditetapkan oleh pemerintah.

Mulyasa (2007:33) menjelaskan sertifikasi guru adalah suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain sertifikasi adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik.

2. Tujuan Dan Manfaat Sertifikasi

Sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi professional. Oleh karena itu proses sertifikasi dipandang sebagai bagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Melalui sertifikasi yang dijalani guru merupakan bukti pengakuan atas kompetensi guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Mencermati hal di atas, Wibowo sebagaimana dikutip Mulyasa (2007:35) menjelaskan sertifikasi bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
- b. Melindungi masyarakat dari praktek-praktek yang tidak kompeten, sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan.
- c. Membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan, dengan menyediakan rambu-rambu dan instrumen untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten.
- d. Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan.

- e. Memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan.

Terkait dengan manfaat dari sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, dijelaskan Mulyasa (2007:35) sebagai berikut:

- a. Pengawasan mutu.
- Lembaga sertifikasi yang telah mengidentifikasi dan menentukan seperangkat kompetensi yang bersifat unik.
 - Untuk setiap jenis profesi dapat mengarahkan praktisi untuk mengembangkan tingkat kompetensinya secara berkelanjutan.
 - Peningkatan profesionalisme melalui mekanisme seleksi, baik pada waktu awal masuk organisasi profesi maupun pengembangan karir selanjutnya.
 - Proses seleksi yang lebih baik, program pelatihan yang lebih berutu maupun usaha belajar secara mandiri untuk mencapai peningkatan profesionalisme.
- b. Penjaminan mutu.
- Adanya proses pengembangan profesionalisme dan evaluasi terhadap kinerja praktisi akan menimbulkan persepsi masyarakat dan pemerintah menjadi lebih baik terhadap organisasi profesi beserta anggotanya. Dengan demikian pihak berkepentingan, khususnya pada pengguna akan makin menghargai organisasi profesi dan sebaliknya organisasi profesi dapat memberikan jaminan atau melindungi pengguna.
 - Sertifikasi menyediakan informasi yang berharga bagi pengguna yang ingin memperkerjakan orang dalam bidang keahlian dan ketrampilan tertentu.

3. Proses Sertifikasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru pasal 8 menyatakan sertifikasi pendidik bagi calon guru harus dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel. Untuk mendapat sertifikat pendidik yang diidam-idamkan guru maupun calon guru dapat diperoleh melalui beberapa cara.

Dalam hal ini Nasution dan Siahaan (2009:138-156) mencatat 3 (tiga) jalur yang dapat ditempuh guru dalam proses memperoleh sertifikat pendidikan. Ketiga jalur tersebut adalah: (1) jalur portofolio, (2) jalur pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG), dan (3) jalur pendidikan.

a. Jalur portofolio.

Portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai selama menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu. Dokumen ini terkait dengan unsur pengalaman, karya dan prestasi selama guru yang bersangkutan menjalankan peran sebagai agen pembelajaran. Dokumen portofolio guru berisi data dan informasi catatan pengalaman guru dalam upaya meningkatkan profesionalitasnya dalam proses pembelajaran.

Komponen-komponen yang terdapat dalam dokumen portofolio yang harus diisi dan dilengkapi guru sebagai peserta sertifikasi terdiri dari 10 (sepuluh) unsur sebagai berikut:

- 1) Kualifikasi akademik.
Ijazah pendidikan tinggi yang dimiliki guru pada saat yang bersangkutan mengikuti sertifikasi baik pendidikan bergelas S1, S2 dan S3 maupun non gelar atau D.IV, baik di dalam maupun di luar negeri. Bukti fisik kualifikasi akademik berupa ijazah atau sertifikat diploma.
- 2) Pendidikan dan pelatihan.
Kegiatan pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti guru dalam rangka pengembangan dan/atau peningkatan kompetensi selama melaksanakan tugas sebagai pendidik, baik tingkat kecamatan, kabupaten/kota, propinsi, nasional maupun internasional.
Workshop/lokakarya yang sekurang-kurangnya dilaksanakan 8 jam dan menghasilkan karya dapat dikategorikan ke dalam komponen ini. Bukti fisik komponen pendidikan dan pelatihan ini berupa sertifikat atau piagam yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara. Bukti fisik untuk workshop/lokakarya berupa sertifikat/piagam disertai hasil karya. Apabila sertifikat

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

workshop/lokakarya tidak mencantumkan lama waktu pelaksanaan dan hasil karya dikategorikan sebagai forum ilmiah.

- 3) Pengalaman belajar.
Masa kerja sebagai guru pada jenjang, jenis, dan satuan pendidikan formal tertentu. Bukti fisik dari komponen pengalaman belajar ini berupa surat keputusan, surat tugas, atau surat keterangan yang dilengkapi dengan bukti lain yang relevan dari lembaga yang berwenang dalam hal ini pemerintah, yayasan, sekolah dan/atau kelompok masyarakat penyelenggara pendidikan.

- 4) Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.
Perencanaan pembelajaran adalah persiapan pembelajaran yang akan dilaksanakan untuk satu topik atau kompetensi tertentu. Perencanaan pembelajaran sekurang-kurangnya memuat perumusan tujuan/ kompetensi, pemilihan dan pengorganisasian materi, pemilihan sumber/ media pembelajaran, skenario pembelajaran dan penilaian proses dan hasil belajar. Bukti fisik perencanaan pembelajaran berupa dokumen perencanaan pembelajaran yaitu RPP/RP/SP, hasil karya guru yang bersangkutan sebanyak lima satuan yang beda. Khusus untuk guru bimbingan dan konseling, dokumen ini berupa program pelayanan bimbingan dan konseling yang akan dilaksanakan.
Pelaksanaan pembelajaran adalah kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Kinerja guru tersebut meliputi tahapan pra pembelajaran, kegiatan inti dan penutup. Bukti fisik pelaksanaan pembelajaran berupa dokumen hasil penilaian kepala sekolah dan/atau pengawas terhadap kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Khusus untuk guru bimbingan konseling, komponen pelaksanaan pembelajaran yang dimaksud adalah kinerja guru bimbingan dan konseling dalam mengelola dan mengevaluasi pelayanan bimbingan dan konseling yang meliputi bidang pelayanan bimbingan pendidikan/belajar, karir, pribadi, sosial,

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

akhlak mulia/budi pekerti. Jenis dokumen yang dilaporkan berupa agenda kerja guru bimbingan dan konseling, daftar konseli (siswa), data kebutuhan dan permasalahan konseli, laporan bulanan, laporan semesteran/tahunan, aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling dan laporan hasil evaluasi program bimbingan dan konseling. Bukti fisik pelaksanaan pembelajaran khusus guru bimbingan konseling berupa fotokopi rekaman/dokumen laporan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling yang dibuat oleh guru bimbingan konseling.

- 5) Penilaian dari atasan dan pengawas.
Penilaian atasan terhadap kompetensi kepribadian dan sosial. Aspek yang dinilai meliputi: ketaatan menjalankan ajaran agama, tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan, keteladanan, etos kerja, inovasi dan kreativitas, kemampuan menerima kritik dan saran, kemampuan berkomunikasi dan kemampuan bekerjasama.

- 6) Prestasi akademik.
Prestasi yang dicapai guru dalam pelaksanaan tugasnya sebagai agen pembelajaran yang mendapat pengakuan dari lembaga/panitia penyelenggara, baik tingkat kecamatan, kabupaten/kota, propinsi, nasional maupun internasional. Komponen ini meliputi lomba dan karya akademik (juara lomba atau penemuan karya monumental di bidang pendidikan atau non kependidikan), sertifikat keahlian/ketrampilan tertentu pada guru SMK dan guru olahraga, pembimbingan teman sejawat (instruktur, guru inti, tutor, pamong PPL calon guru) dan pembimbingan siswa kegiatan ekstrakurikuler (pramuka, drumband, majalah dinding, karya ilmiah remaja, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya). Bukti fisik komponen ini berupa sertifikat, piagam, atau surat keterangan disertai bukti relevan yang dikeluarkan oleh lembaga/panitia penyelenggara.

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

- 7) Karya pengembangan profesi.
Hasil karya dan/atau aktivitas guru yang menunjukkan adanya upaya pengembangan profesi. Komponen ini meliputi:
- Buku yang dipublikasikan pada tingkat kabupaten/kota, propinsi, atau nasional.
 - Artikel yang dimuat dalam media jurnal/majalah yang tidak terakreditasi, terakreditasi nasional dan internasional.
 - Reviewer buku, penulis soal UN/UASDA.
 - Modul/diktat cetak lokal yang minimal mencakup materi pembelajaran selama satu semester.
 - Media/alat pembelajaran dalam bidangnya.
 - Laporan penilaian di bidang pendidikan (individu/kelompok).
 - Karya teknologi (teknologi tepat guna) dan karya seni (patung, kriya, lukis, sastra, musik, tari, suara dan karya seni lainnya).
- 8) Keikutsertaan dalam forum ilmiah.
Partisipasi guru dalam forum ilmiah (seminar, semiloka, simposium, sarasehan, diskusi panel) pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, propinsi, nasional atau internasional, baik sebagai narasumber/pemakalah maupun sebagai peserta. Bukti fisik keikutsertaan guru dalam forum ilmiah berupa makalah dan sertifikat/ piagam bagi narasumber/pemakalah dan sertifikat/piagam bagi peserta.
- 9) Pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial.
Keikutsertaan guru menjadi pengurus organisasi kependidikan atau organisasi sosial pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/ kota, propinsi, nasional atau internasional, dan/atau mendapat tugas tambahan.
- 10) Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.
Penghargaan yang diperoleh guru atas dedikasinya dalam pelaksanaan tugas sebagai agen pembelajaran dan memenuhi kriteria kuantitatif (lama waktu, hasil, lokasi/geografis), dan kualitatif (komitmen,

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

etos kerja), baik pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan antara lain tingkat nasional: satyalencana karya satya 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun untuk tingkat propinsi/kabupaten/kota/kecamatan adalah penghargaan guru favorit/guru inovatif, dan penghargaan lain sesuai dengan kekhasan daerah/penyelenggara. Bukti komponen ini berupa sertifikat, piagam atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Dokumen portofolio yang berisikan 10 (sepuluh) komponen yang disusun guru dinilai oleh dua orang asesor yang memiliki nomor induk asesor (NIA) yang dikeluarkan oleh lembaga yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Batas minimal kelulusan (*passing grade*) adalah skor 850. Penilaian yang diberikan asesor terhadap dokumen portofolio dikelompokkan ke dalam 6 (enam) kategori sebagai berikut:

- 1) Lulus portofolio (L).
Peserta yang dinyatakan lulus penilaian portofolio apabila mendapatkan skor penilaian portofolio sama dengan atau di atas sekolah minimal kelulusan.
- 2) Melengkapi administrasi (MA).
Peserta yang harus melengkapi administrasi apabila skor hasil penilaian portofolionya telah mencapai batas kelulusan, tetapi masih ada kekurangan administrasi. Misalnya ijazah belum dilegalisasi, pernyataan peserta pada portofolio sudah ditandatangani tanpa dibubuhi materai, dan sebagainya.
- 3) Melengkapi substansi (MS).
Peserta dengan hasil penilaian portofolio belum mencapai skor minimal kelulusan yaitu skor 841 – 849 maka harus memenuhi skor minimal dengan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi pendidik untuk melengkapi kekurangan portofolio.

- 4) Mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru (MPLPG).
Peserta yang memiliki skor penilaian portofolio belum mencapai skor minimal kelulusan harus mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru dan diakhir kegiatan dilakukan uji kompetensi.
- 5) Klarifikasi (K).
Peserta yang melampirkan sebagian atau keseluruhan dokumen portofolio yang diragukan keaslian/kebenarannya, maka diberikan kategori klarifikasi. Jika peserta terbukti melakukan pemalsuan dokumen maka peserta akan didiskualifikasi.
- 6) Diskualifikasi (D).
Peserta sertifikasi akan diskualifikasi apabila: (1) tidak sesuai dengan kriteria penetapan peserta atau (2) terbukti secara sengaja melakukan usaha penyuapan.

b. Jalur pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG).

Pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) merupakan bagian dari upaya meningkatkan mutu kompetensi guru. Hal ini tercermin dari standar kompetensi lulusan yang diharapkan dari peserta sertifikasi jalur PLPG yaitu:

- 1) Memahami karakteristik peserta didik dan mampu merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran yang mendidik.
- 2) Memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan berakhlak mulia.
- 3) Menguasai keilmuan, kajian kritis, dan pendalaman isi dalam konteks kurikulum sekolah.
- 4) Mampu berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, kolega dan masyarakat.

Penyelenggaraan PLPG dilakukan berdasarkan proses baku sebagai berikut:

- a. Pembelajaran PLPG diawali tes kemampuan awal sesuai bidang studi/ mata pelajaran.
- b. PLPG diselenggarakan dengan bobot 90 jam pertemuan (JP), dengan alokasi 30 JP teori dan 60

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

JP praktek. Satu JP setara 50 menit. Distribusi alokasi waktu tersebut adalah:

- 1) 4 JP teori untuk penyampaian materi pengembangan profesionalitas guru.
 - 2) 8 JP teori dan 12 JP praktek untuk penyampaian materi pendalaman materi mata pelajaran yang belum dikuasai oleh sebagian besar guru.
 - 3) 10 JP teori dan 12 JP praktek untuk penyampaian materi model-mode pembelajaran inovatif, asesmen, dan pemanfaatan media disesuaikan dengan karakteristik isi mata pelajaran dan peserta didik yang mengacu pada rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk meningkatkan pengetahuan, teknologi dan seni termasuk keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.
 - 4) 4 JP teori dan 6 JP praktek untuk penyampaian materi penelitian tindakan kelas dan penulisan karya ilmiah.
 - 5) 30 JP praktek pelaksanaan pembelajaran (*peer teaching*).
 - 6) 4 JP teori untuk ujian tulis.
- c. PLPG dilaksanakan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan yang telah ditetapkan pemerintah.
- d. Materi PLPG yang disusun memperhatikan empat kompetensi guru yaitu pedagogik, professional, kepribadian dan sosial.
- e. Instruktur PLPG ditetapkan oleh ketua Rayon LPTK dengan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:
- 1) Warga negara Indonesia yang berstatus sebagai dosen pada rayon LPTK penyelenggara sertifikasi. Dalam hal rayon LPTK tidak mempunyai bidang syudi yang relevan maka dapat meminta bantuan rayon lain.
 - 2) Sehat jasmani/rohani dan memiliki komitmen, kinerja yang baik serta sanggup melaksanakan tugas.
 - 3) Berpendidikan minimal S2 (dapat S1 dan S2 kependidikan, atau S1 kependidikan dan S2 nonkependidikan, atau S1 nonkependidikan dan S2 kependidikan. Khusus untuk guru bidang kejuruan, instruktur dapat berkualifikasi S1 dan S2 nonkependidikan yang relevan dan memiliki akta V atau sertifikat *applied approach*.

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

- 4) Memiliki pengalaman mengajar pada bidang yang relevan sekurang-kurangnya 10 tahun, khusus bagi instruktur pelatihan guru BK diutamakan memiliki pengalaman menjadi konselor.
- 5) Instruktur *peer teaching* diutamakan yang memiliki nomor induk asesor (NIA) dan memiliki pengalaman menjadi instruktur/narasumber/fasilitator pada bidang yang relevan.
- f. Pelaksanaan PLPG bertempat di LPTK atau di kabupaten/kota dengan memperhatikan kelayakannya (representatif dan kondusif) untuk proses pembelajaran.
- g. Rombongan belajar (rombel) PLPG diupayakan satu bidang keahlian/ mata pelajaran. Dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan dari segi jumlah rombel dapat dilakukan berdasarkan rumpun bidang studi/mata pelajaran.
- h. Dalam satu rombel maksimal 30 orang peserta dan dalam satu kelompok *peer teaching* maksimal 10 peserta.
- i. Dalam proses pembelajaran, instruktur menggunakan multi media dan multi metode yang berbasis pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM).
- j. PLPG diakhiri dengan uji kompetensi yang mengukur kompetensi dasar peserta dengan mengacu pada rambu-rambu pelaksanaan PLPG. Uji kompetensi meliputi uji tulis dan uji kinerja (praktek pembelajaran).
- k. Ujian tulis pada akhir PLPG dilaksanakan dengan pengaturan tempat duduk yang layak dan setiap 30 peserta diawasi oleh dua orang pengawas.
- l. Ujian praktek dilaksanakan terpadu dengan kegiatan *peer teaching* pada penampilan ketiga.
- m. Penentuan kelulusan peserta PLPG dilakukan secara objektif dan didasarkan pada rambu-rambu penilaian yang telah ditentukan.
- n. Peserta yang lulus mendapatkan sertifikat pendidik, sedangkan yang tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang sebanyak-banyaknya dua kali.
- o. Peserta yang belum lulus pada ujian ulang yang kedua diserahkan kembali ke dina pendidikan kabupaten/kota untuk dibina lebih lanjut.

Melalui PLPG diharapkan akan muncul guru yang sadar akan profesinya dan setiap saat mampu meningkatkan profesinya. Dikatakan demikian karena bekal yang peserta peroleh melalui PLPG akan mampu merangsang melakukan peningkatan keprofesionalannya secara terus menerus.

c. Jalur pendidikan.

Jalur pendidikan atau secara lengkap disebut dengan sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan. Peserta belajar selama 2 (dua) semester di lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK). Peserta sertifikasi melalui jalur pendidikan ini diutamakan adalah guru-guru yang memiliki prestasi dan memiliki keunggulan. Proses seleksinya dilakukan oleh LPTK yang ditunjuk oleh pemerintah.

Secara umum tujuan sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan adalah meningkatkan kompetensi peserta agar mencapai standar kompetensi yang ditentukan. Secara khusus program sertifikasi jalur pendidikan bertujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi guru dalam bidang ilmunya.
- b. Memantapkan kemampuan mengajar guru.
- c. Mengembangkan kompetensi guru secara holistik sehingga mampu bertindak secara professional.
- d. Meningkatkan kemampuan guru dalam kegiatan penelitian dan kegiatan ilmiah lain, serta memanfaatkan teknologi komunikasi informasi untuk kepentingan pembelajaran dan perluasan wawasan.

Jalur pendidikan menerapkan sistem pembelajaran yang menekankan pada pengembangan kemampuan guru peserta program sertifikasi yang mempersyaratkan pemahaman konsep-konsep yang mantap dan kemudian diterapkan dalam praktek. Dalam hal ini sistem pembelajaran tidak cukup menekankan pada segi apa, dan mengapa, tetapi pada segi bagaimana penerapannya. Dengan demikian proses pembelajaran dalam program ini perlu memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Program pendidikan diselenggarakan selama-lamanya dua semester.

- b. Pengembangan bahan ajar dilakukan berdasarkan standar isi kurikulum dengan mempertimbangkan kondisi setempat.
- c. Dalam proses pembelajaran, dosen mampu berperan sebagai model bagi guru sehingga peserta mendapat gambaran nyata tentang perilaku guru yang harus ditampilkan ketika mengajar.
- d. Kegiatan pembelajaran menerapkan pendekatan yang dapat melibatkan peserta didik dalam pemerolehan konsep dan makna materi kajian melalui pengalaman langsung dalam suasana pembelajaran yang menyenangkan.
- e. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara bervariasi, sehingga memungkinkan terbentuknya dampak langsung dan dampak pengiring, seperti keterbukaan, kemampuan kerjasama, berpikir kritis, dan saling menghargai.
- f. Kegiatan pembelajaran memanfaatkan media dan sumber belajar yang dapat menumbuhkan kreativitas peserta didik untuk memilih alternatif media dan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dari yang paling sederhana sampai yang paling canggih saat berada di sekolah.
- g. Pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka penuh waktu yang dilaksanakan di kampus induk, sedangkan kegiatan pemantapan kemampuan mengajar (PKM) dilakukan di sekolah mitra.

4. Urgensi Uji Kompetensi Dalam Sertifikasi Guru

Uji kompetensi baik secara teoritis maupun praktis memiliki urgensi yang penting dalam program sertifikasi guru, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas guru. Pentingnya uji kompetensi dalam sertifikasi guru dikemukakan Mulyasa (2007:192-194) sebagai berikut:

a. Alat untuk mengembangkan standar kompetensi guru.

Uji kompetensi guru dapat digunakan untuk mengembangkan standar kompetensi guru. Berdasarkan hasil uji dapat diketahui kemampuan rata-rata para guru, aspek mana yang perlu ditingkatkan dan siapa guru yang perlu mendapatkan pembinaan secara kontiniu, serta siapa guru yang telah mencapai standar kemampuan minimal.

b. Alat seleksi penerimaan guru.

Pada saat ini telah banyak calon guru lulusan dari lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta yang antri menunggu pengangkatan. Banyaknya calon mengakibatkan perlunya seleksi untuk memilih guru sesuai dengan kebutuhan. Untuk kepentingan tersebut, perlu ditetapkan kriteria secara umum kompetensi-kompetensi dasar yang perlu dipenuhi sebagai syarat menjadi guru.

Kriteria calon guru merupakan pedoman penting bagi para administrator, dan pemerintah dalam memilih dan menentukan mana guru yang diperlukan untuk sekolah tertentu. Kriteria ini akan mendorong calon guru untuk meningkatkan kualitas dan kompetensinya, sehingga dapat diterima dan lolos uji kompetensi. Melalui uji kompetensi, diharapkan dapat terjaring guru-guru yang kompeten sehingga mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolahnya.

Dengan uji kompetensi yang digunakan sebagai alat seleksi penerimaan guru baru dapat dilakukan secara profesional, tidak didasarkan atas suka-tidak suka, atau alasan subjektif lain, yang bermuara pada korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), tetapi berdasarkan standar kompetensi yang objektif dan berlaku secara umum untuk semua calon guru. Jika uji kompetensi digunakan secara profesional dalam penerimaan guru baru, maka akan sangat membantu peningkatan kualitas pendidikan, karena akan terjaring guru-guru kompetensi dan siap melaksanakan tugasnya secara kreatif, profesional dan menyenangkan.

c. Pengelompokan guru.

Hasil uji kompetensi guru dapat digunakan untuk mengelompokkan dan menentukan mana guru profesional yang berhak menerima tunjangan profesional, tunjangan jabatan, dan penghargaan profesi serta guru yang tidak profesional yang tidak berhak menerimanya. Dalam hal ini, guru-guru dapat dikelompokkan berdasarkan hasil uji kompetensi misalnya kelompok tinggi, kelompok sedang dan kelompok kurang. Untuk kelompok kurang harus mendapat perhatian dan pembinaan agar dapat

meningkatkan kompetensinya, karena jika dalam kurun waktu tertentu tidak dapat meningkatkan kompetensinya dan tidak lulus uji kompetensi maka mereka dapat diberhentikan sebagai guru, atau dialihfungsikan menjadi tenaga non guru, misalnya tenaga administrasi.

d. Bahan acuan dalam pengembangan kurikulum.

Keberhasilan pendidikan tercerin dalam kualitas pembelajaran dan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Hal ini harus dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan yang mempersiapkan calon guru atau calon tenaga kependidikan, karena keberhasilan tersebut terletak pada berbagai komponen dalam proses pendidikan di lembaga pendidikan. Secara khusus keberhasilan lembaga pendidikan dalam mempersiapkan calon guru ditentukan oleh berbagai komponen dalam lembaga tersebut, antara lain kurikulum.

Oleh karena itu, kurikulum lembaga pendidikan yang mempersiapkan calon guru harus dikembangkan berdasarkan kompetensi guru. Tujuan, program pendidikan, sistem pembelajaran dan evaluasi perlu direncanakan sedemikian rupa agar sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan kompetensi guru. Melalui proses yang demikian, diharapkan guru mampu menjalankan tugasnya dengan tenang dan menyenangkan, karena apa yang diperlukan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya telah dipersiapkan sejak dalam pendidikan melalui kurikulum lembaga pendidikan.

e. Alat pembinaan guru.

Untuk memperoleh guru yang ideal seperti yang diharapkan peserta didik, maka perlu ditetapkan jenis kompetensi yang perlu dibenahi sebagai syarat agar seseorang dapat diterima menjadi guru. Dengan adanya syarat yang menjadi kriteria calon guru, maka akan terdapat pedoman bagi para administrator dalam memilih, menseleksi dan menempatkan guru sesuai dengan karakteristik dan kondisi, serta jenjang sekolah.

Asumsi yang mendasari kriteria ini adalah bahwa setiap calon guru yang memenuhi syarat diharapkan berhasil dalam mengemban tugas dan fungsinya, serta mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan demikian, pemilihan atau seleksi guru tidak dilakukan berdasarkan atas suka – tidak suka, atau karena alasan yang bersifat subjektif, melainkan dilakukan guru secara objektif dan berlaku secara umum untuk semua calon guru.

f. Mendorong kegiatan dan hasil belajar.

Kegiatan belajar dan hasil belajar peserta didik tidak saja ditentukan oleh manajemen sekolah, kurikulum, sarana dan prasarana pembelajaran, tetapi sebagian besar ditentukan oleh guru. Oleh karena itu, uji kompetensiguru akan mendorong terciptanya kegiatan dan hasil belajar yang optimal, karena guru yang teruji kompetensinya akan senantiasa menyesuaikan kompetensinya dengan perkembangan kebutuhan dan pembelajaran.

Guru yang teruji kompetensinya akan lebih mampu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, kreatif, efektif, inovatif dan menyenangkan (PAIKEM), sehingga mampu mengembangkan potensi seluruh peserta didiknya secara optimal. Dengan demikian, uji kompetensi guru merupakan sesuatu yang penting untuk dilakukan terhadap setiap guru dan calon guru. Hal ini penting, terutama untuk mempersiapkan guru kreatif, profesional, dan menyenangkan.

5. Efek Rantai Sertifikasi

Proses sertifikasi guru menuju profesionalisasi pelaksanaan tugas dan fungsinya memberikan efek kepada kenaikan kesejahteraan, sistem rekrutmen, pendidikan dan pembinaan guru, dan peningkatan karir guru.

1. Kenaikan kesejahteraan.

Berkaitan dengan kesejahteraan guru dapat diukur dari gaji dan insentif yang diperoleh. Gaji guru di Indonesia masih relatif rendah, rendahnya kesejahteraan guru bisa mempengaruhi kinerja guru, semangat pengabdianya dan juga upaya mengembangkan profesionalismenya. Kenaikan gaji dilakukan bersamaan dengan perbaikan pada aspek-aspek kesejahteraan lain yaitu prosedur

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

kenaikan pangkat, jaminan rasa aman, kondisi kerja, kepastian karir, penghargaan terhadap tugas atau peran keguruan.

Tunjangan fungsional yang merupakan insentif bagi guru sebaiknya diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. Kesulitan tempat bertugas.
- b. Kemampuan, ketrampilan dan kreativitas guru.
- c. Fungsi, tugas dan peranan guru di sekolah.
- d. Prestasi guru dalam mengajar, menyiapkan bahan ajar, menulis, meneliti dan membimbing, serta berhubungan dengan stakeholder. Dalam hal ini guru perlu diberi kesempatan bersaing untuk memperoleh penghargaan berbentuk insentif.

2. Sistem rekrutmen.

Sistem rekrutmen guru dan penempatannya memerlukan kebijakan yang tepat mengingat banyak calon guru yang sering memilih tugas ditempat yang diinginkannya. Dalam hal rekrutmen dan penempatan perlu dipertimbangkan beberapa hal berikut:

- a. Asal tempat calon guru.
- b. Memperketat persyaratan calon guru yang diangkat dengan melihat hasil pendidikan dan seleksi.
- c. Menetapkan batas waktu tugas untuk bisa mengajukan mutasi atau pindah.
- d. Memberikan insentif dan jaminan lain bagi calon guru yang ditempatkan di daerah terpencil.
- e. Memperkuat disiplin di tempat tugas dan menerapkan sanksi bagi yang melanggar.
- f. Memintakan partisipasi dan tanggung jawab masyarakat untuk menjamin kesejahteraan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan guru, terutama guru yang berasal dari daerah lain.
- g. Untuk mengisi kekurangan guru sebaliknya memberdayakan lulusan yang ada di tempat tersebut.

3. Pendidikan dan pembinaan guru.

Pendidikan dan pembinaan tenaga guru dapat ditempuh melalui tiga cara yaitu pendidikan prajabatan, pendidikan dalam jabatan, dan pendidikan akta mengajar.

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

- a. Pembinaan calon guru melalui pendidikan prajabatan memerlukan pertimbangan sebagai berikut:
 - Peningkatan mutu pelayanan akademik pada lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan (LPTK) yang meliputi sumber daya manusia (SDM) dan sarana/prasarana.
 - Seleksi calon yang ketat dalam hal intelegensi, latar belakang, sifat dan sikap pribadi.
 - Pendidikan guru yang dapat menjamin mutu penguasaan ilmu-ilmu pendidikan, keguruan, psikologi dan ilmu bidang khusus yang menjadi spesialisasinya serta penguasaan praktek mengajar.
 - Calon guru harus dapat menguasai ilmu dan keterampilan meneliti, menulis, membaca, sosial, budaya dan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
 - Untuk mampu mengikuti perkembangan maka calon guru harus trampil menggunakan komputer, familiar dengan perpustakaan, olahraga dan kesenian.
 - Calon guru minimal satu tahun mengalami hidup dalam asrama untuk membina pemahaman kerjasama, sikap hidup bersama, dan terutama mampu menyelami dan menghargai sifat dan watak yang berbeda-beda.

- b. Pembinaan guru melalui program dalam jabatan biasanya diberikan oleh lembaga-lembaga pelatihan, dinas pendidikan maupun organisasi profesi seperti persatuan guru Republik Indonesia (PGRI). Untuk membina karir guru melalui pelatihan dalam jabatan ini perlu dikembangkan:
 - Program yang tidak mengganggu tugas guru.
 - Pelatihan-pelatihan jangka pendek yang baik dan praktis mengenai metode/strategi mengajar, manajemen, kepemimpinan, pengembangan keilmuan maupun keterampilan lainnya yang harus dikuasai guru, penelitian dan penulisan.
 - Sebaiknya tiap enam bulan atau satu tahun diadakan evaluasi kinerja guru, dan hasil evaluasi itu ditindak lanjuti dengan mengembangkan pelatihan dalam jabatan,

~ INOVASI PENDIDIKAN ~

dengan menerapkan peningkatan mutu berbasis sekolah.

- Setiap peningkatan mutu selayaknya mendapat dukungan dana dari pusat, daerah dan stakeholder. Oleh sebab itu, perlu digalakkan program pembinaan dalam jabatan yang kontiniu baik di sekolah, luar sekolah, antar sekolah, antar bidang dan dalam bidang studi.
 - Khusus pembinaan peningkatan guru sekolah melalui pendidikan guru sekolah dasar (PGSD) yang belajar jarak jauh perlu ada biaya dari pusat dan daerah.
- c. Pembinaan calon guru melalui akta mengajar bagi lulusan diploma dan sarjana non keguruan. Dalam hal ini perlu dilakukan seleksi sebelum mereka mengikuti akta mengajar, sehingga profesi guru bukan tempat pelarian untuk mencari kerja.
4. Peningkatan karir guru.
- Pengembangan kariri guru terkait dengan profesionalisme dan daya tarik jabatan guru memerlukan kebijakan sebagai berikut:
- a. Menumbuhkembangkan kesadaran guru terhadap kode etik sebagai guru yang profesional, serta mencintai tugasnya dan bertanggung jawab untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya.
 - b. Menyederhanakan prosedur dan birokrasi penilaian kenaikan jabatan fungsional guru.
 - c. Beban yang tidak terkait dengan fungsi dan tugas guru sebaiknya dihilanhkan karena akan mengganggu perhatian guru pada tugas pokoknya.
 - d. Pengangkatan kepala sekolah/madrasah perlu dilakukan melalui seleksi yang ketat dan adil, mempertimbangkan latar belakang mental dan prestasi kerja, serta melibatkan lembaga profesi.
 - e. Pengawasan kepada semua jenjang pendidikan harus dilaksanakan secara teratur, terkendali dan terus menerus dengan menggunakan paradigma penilaian yang akademik.

Selanjutnya apabila ditinjau dalam ruang lingkup manajemen dapat dimaknai bahwa program sertifikasi guru sebagai cara yang praktis dan produktif untuk mendapatkan yang terbaik. Dengan sertifikasi maka keuntungan yang diperoleh antara lain mutu, komitmen,

gagasan, dan sebagainya. sertifikasi yang dilakukan akan memunculkan kecakapan baru yang meliputi:

1. Membuat mampu (**enabling**) di mana segala sumber daya yang diperlukan dapat diberdayakan secara penuh. Sumber-sumber daya itu mencakup waktu, personel, uang dan sebagainya yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Memperlancar (**facilitating**) dalam kaitan ini dituntut untuk meniadakan halangan, rintangan dan penundaan yang menghalangi pekerjaan sebaik-baiknya. Secara organisasional biasanya halangan dan rintangan tersebut berupa sistem dan prosedur. Hal ini bisa dimengerti mengingat sistem dan prosedur merupakan salah satu alat manajemen untuk melakukan pengendalian. Dengan demikian memperlancar berarti memperhatikan apa yang perlu dilakukan oleh orang yang diberdayakan, lalu menyediakan jalan selampang mungkin.
3. Berkonsultasi (**consulting**), dalam kaitan ini yang diberdayakan tidak saja berkaitan dengan kegiatan sehari-hari melainkan juga menyangkut masalah-masalah strategis. Konsultasi tersebut tidak terbatas hanya pada pendapat dan gagasan saja. Bisa juga dengan menyediakan kotak saran. Melalui upaya ini diharapkan akan saling mengisi kekurangan masing-masing pihak.
4. Kerjasama (**collaborating**) di mana lembaga pendidikan dan stakeholder pendidikan hendaknya melakukan kerjasama dari setiap program pembedayaan. Hanya dengan kerjasama bebas, terbuka, dan penuh, seluruh kekayaan, kecakapan dan pengetahuan dalam organisasi dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan organisasi. Kerjasama juga merupakan ujian akhir yang akan membuktikan tidak hanya seberapa besar kecakapan manajer dalam pemberdayaan, melainkan juga seberapa kuat kemampuan melaksanakannya secara penuh.

Namun hal itu tidak berarti manajer tidak mampu memulai perubahan strategis, sebab untuk itu diperlukan dukungan dari berbagai pihak, khususnya mereka yang diberdayakan. Justru melalui kerjasama dapat membantu memastikan perubahan yang strategis yang dipikirkan secara lebih matang. Hal itu berarti bahwa kerjasama merupakan kecakapan yang berkembang melalui praktek.

5. Membimbing (**mentoring**) bertambahnya kematangan dan pengalaman akan sampai kepada kesadaran untuk mencapai lebih banyak dan memperluas pengaruh melalui kerjasama dengan orang lain. Diharapkan suka menularkan apa yang dipelajari dari pada menerapkan pengetahuan secara langsung sehingga dapat mencapai lebih banyak dengan cara ini dari pada mengerjakannya sendiri. Proses ini disebut membimbing, yaitu bertindak sebagai teladan dan pelatih.
6. Mendukung (**supporting**) baik mengetahui perlunya mendukung orang yang diberdayakan dan membantu mereka untuk mandiri. Dampak nyata pemberdayaan baru muncul bila para manajer melihat bahwa peran utama mereka adalah memberi dukungan yang tepat. Untuk itu diperlukan upaya memimpin dari belakang yang mengarahkan pada kemandirian mereka yang diberdayakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zaiha dan Ismail, Isma Zuriyya. *Utilization of Hybrid Learning in Accomplishing Learning Satisfaction as Perceived by University Student International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning, Vol. 3, No. 2, April 2013.* <http://www.ijeeee.org/Papers/200-ET004.pdf>
- Ahmadi, R. (2014). *Pengantar Pendidikan. Asas dan Filsafat Pendidikan.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Al-Tabany, T.I.B. (2014). *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progresif Dan Kontekstual.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Asmani, J.M. (2013). *Kiat Melahirkan Madrasah Unggulan, Merintis dan Mengelola Madrasah Yang Kompetitif.* Yogyakarta: Diva Press.
- Association for Educational Communication and Technology, 1977. The Definition of Educational Terminology.* Washington: AECT, Alihbahasa: Arief S. Sadiman dkk, Jakarta: Rajawali.
- Bafadal, I. (2003). *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Bärenfänger, Olaf. *Learning Management: A New Approach to Structuring Hybrid Learning Arrangement.* Electronic Journal of Foreign Language Teaching, Centre for Language Studies National University of Singapore Vol. 2 No. 2. 2005.
- Basri, H. (2013). *Landasan Pendidikan.* Bandung: Pustaka Setia.
- Bates, A.W. 2005. *Technology, E-Learning and Distance Education, Second Edition.* New York: Routledge.
- Dabbagh, Nada dan Ritland, Brenda Bannan. 2005. *Online Learning Concepts, Strategies, and Application.* New Jersey: Pearson Merrill Prentice Hall.

- Danim, S. (2002). *Inovasi Pendidikan, Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dalin, P. (1978). *Limits to Educational Change*. New York: St. Martin Press.
- Daradjat, Z. (1994). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Daulay, H.P. (2001). *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media.
- Delialioglu, [http://www.emhaemen.com/2015/04/sekilas-tentang hybrid learning dalam dunia pendidikan.html?m=0](http://www.emhaemen.com/2015/04/sekilas-tentang-hybrid-learning-dalam-dunia-pendidikan.html?m=0).
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pembelajaran*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.
- Ekosusila, Madyo dan Kasihadi, RB. 1988. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Semarang: Effhar Publishing.
- Gustafson, Kent L. dan B, R.M. (2002). *Survey of Instructional Development Models*. New York: Eric Clearinghouse on Information & Technology, Syracuse University.
- Hafid, Anwar dkk. (2014). *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Hamalik, O. (2004). *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasbullah. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ibrahim, N. (2004). *25 Tahun SMP Terbuka. Dalam Mozaik Teknologi Pendidikan*. Dewi Salma Prawiradilaga dan Eveline Siregar (ed). Jakarta: Prenada Media.
- Jamaris, M. (2010). *Orientasi Baru Dalam Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Yayasan Penamas Murni.

- Jaesoon, AN. *How Do You Define Hybrid/Blended Course*
<http://teaching.uncc.edu/blog/2009-11-06/how-do-you-define-hybridblended-course>.
- Kamars, M. D. (2004). *Administrasi Pendidikan. Teori Dan Praktek*. Padang: Suryani Indah.
- Klimova, Blanka Frydrychova dan Kacetl, Jaroslav . *Hybrid Learning and Its Current Role in the Teaching of Foreign Languages*. Procedia Social and Behavioral Sciences Journal Nol. 93, 2013.
- Littlejohn, A dan P, Chris. (2007). *Preparing for Blended E-Learning*. New York: Routledge.
- Marimba, A.D. (1987). *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Marno, (2008). *Strategi Dan Metode Pengajaran*. Jakarta: Ar-Ruzz.
- Mesiono. (2010). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Dalam Mardianto (ed). *Administrasi Pendidikan. Menata Pendidikan Untuk Kependidikan Islam*. Bandung: Citapustaka Media.
- Miarso, Y. (2004). *Landasan Sekolah Menengah Pertama Terbuka*. Dalam Yusufhadi Miarso. *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media.
- Moedjiarto. (2002). *Sekolah Unggul. Metodologi Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Jakarta: Duta Graha Pustaka.
- More, Nicole A. Buzetto dan Guy, Retta Sweat. *Incorporating the Hybrid Learning Model into Minority Education at a Historically Black University*, Journal of Information Technology Education, Vol 5. 2006. <http://jite.informingscience.org/documents/Vol5/v5p153-164 Buzzetto130.pdf>.
- Mudlofir, A. (2014). *Pendidik Profesional. Konsep, Strategi dan Aplikasinya Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Mulyasa, E. (2004). *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- _____. (2006), *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Suatu Panduan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____. (2007). *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif Dan Menyenangkan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____. (2007). *Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____. (2013). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, I. dan Siahaan, A. (2009). *Manajemen Pengembangan Profesionalitas Guru*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Nata, Abuddin. (2003). *Manajemen Pendidikan, Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Nurhadi. (2004). *Kurikulum 2004 Pertanyaan dan Jawaban*. Jakarta: Grasindo.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- Prawiradilaga, D.S. (2007). *Prinsip Disain Pembelajaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pribadi, Benny A. (2011). *Model Desain Sistem Pembelajaran*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Purwanto, M.N. (2007). *Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Richey, Rita C., Klein, James D., dan Tracey, Monica W. (2011). *The Instructional Design Knowledge Base, Theory, Research And Practice*. New York: Routledge.

- Rogers, E.M. (2003). *Diffusion of Innovation*, New York: The Free Press.
- Rosyada, D. (2004). *Paradigma Pendidikan Demokratis, Sebuah Model Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rusdiana, A. (2014). *Konsep Inovasi Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sagala, S. (2005). *Manajemen Berbasis Sekolah Dan Masyarakat, Strategi Memenangkan Persaingan Mutu*. Jakarta: Nimas Multima.
- _____. (2012), *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.
- Salam, B. (2011). *Pengantar Pedagogik. Dasar-Dasar Ilmu Mendidik*. Jakarta Rineka Cipta.
- Saud, Udin. S. (2015). *Inovasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Shams, I.E. (2013). *Hybrid Learning and Iranian EFL Learners; Autonomy in Vocabulary Learning*. *Procedia Social and Behavioral Sciences Journal* Nol. 93,
- Siahaan, A dkk. (2006). *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*. Jakarta: Quantum Teaching.
- Siahaan, S. (2003). *Pembelajaran Elektronik (E-Learning) di SLTA: Perkembangan, Tantangan, dan Permasalahannya*. Dalam Durri Andriani, dkk. *Cakrawala Pendidikan. E-Learning Dalam Pendidikan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Simamora, L. (2003). *E-Learning, Konsep Dan Perkembangan Teknologi yang Mendukungnya*. Dalam Durri Andriani, dkk. *Cakrawala Pendidikan. E-Learning Dalam Pendidikan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Snellbecker, G. N. (1974). *Learning Theory, Instructional Theory, and Psycho Educational Design*. New York: Mc. Graw-Hill Inc.

- Smaldino, Sharon E., L, D L. dan R, James D. (2008). *Instructional Technology and Media for Learning*. Ninth Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Soekartawi. (2004). *E-Learning Untuk Pendidikan Khususnya Pendidikan Jarak Jauh Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Dalam Dewi Salma Prawiradilaga dan Eveline Siregar. *Mozaik Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media
- Soetopo, H dan S, Wasty. (1986). *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Stacey, E dan G, Philippa. (2009). *Effective Blended Learning Practices: Evidence-Based Perspectives in ICT-Facilitated Education*. New York: Informastion Science Reference.
- Subandijah. (1993). *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Suparman, A. (2012). *Desain Instruksional Modern. Panduan Para Pengajar dan Inovator Pendidikan*, Jakarta: Erlangga.
- Suwarno. (1985). *Pengantar Umum Pendidikan*. Jakarta: Aksara Baru.
- Syafaruddin dkk. (2015). *Inovasi Pendidikan, Suatu Analisis Terhadap Kebijakan Baru Pendidikan*. Medan: Perdana Publishing.
- Syafaruddin dan N. (2011). *Pengelolaan Pendidikan. Mengembangkan Keterampilan Manajemen Pendidikan Menuju Sekolah Efektif*. Medan: Perdana Publishing.
- Tatang, S. (2015). *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tilaar, H.A.R. (1999). *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____. (2000). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Tim Dosen FIP IKIP Malang. (1988). *Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.
- Wijaya, C. dkk. (1992). *Upaya Pembaharuan Dalam Pendidikan Dan Pengajaran*. Bandung; Remaja Rosdakarya.
- Wahono, Rommy Satria. *Pengantar e-Learning dan Pengembangannya*, www.ilmukomputer.com
- Yamin, M dan Maisah. (2012). *Orientasi Baru Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Referensi.
- Zayadi, A. (2005). *Desain Pengembangan Madrasah*. Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

RIWAYAT PENULIS



Rusydi Ananda, Lahir di Tanjung Pura Langkat, dengan Ayah yang bernama H. Thaharuddin AG (Alm) dan Ibu Hj. Rosdiani. Anak pertama dari 6 bersaudara. Menempuh pendidikan SD di Medan tamat tahun 1984, melanjutkan ke SMP di Medan tamat tahun 1987, kemudian menyelesaikan SMU di Medan tamat pada tahun 1990. Melanjutkan pendidikan strata 1 (S.1) di IAIN SU jurusan Tadris Matematika yang diselesaikan pada tahun 1995. Meraih gelar Magister Pendidikan dari Universitas Negeri Medan dengan konsentrasi studi Teknologi Pendidikan pada tahun 2005. S3 di Universitas Negeri Jakarta pada program studi Teknologi Pendidikan.

Menikah dengan Tien Rafida, yang berprofesi sebagai PNS/Dosen di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara. Saat ini dikarunia Allah SWT 3 (tiga) orang anak, yaitu: Annisa Arfitha, Salsabila Hadiyanti dan Faturrahman.

Pengalaman kerja dimulai sebagai tenaga guru matematika di SMP Perguruan Bandung tahun 1996-1997. Guru Matematika di SMA UISU Medan Tahun 1997-1999. tahun 2000-sekarang bekerja sebagai PNS/Dosen di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara. Sejak tahun 2006-2008 bertugas di pusat penelitian UIN Sumatera Utara dan tahun 2008 – 2011 dipercaya sebagai ketua program studi Pendidikan Matematika UIN Sumatera Utara. Sejak 2017- sekarang sebagai Sekretaris Jurusan Prodi Magister Pendidikan Agama Islam FITK UIN-SU Medan. Aktivitas lainnya yang digeluti adalah sebagai trainer di Widya Pustpita tahun 2003 – 2009, trainer pada kegiatan yang dikelola DBE2 USAID tahun 2006 – 2010, dan trainer di AUSAID sejak tahun 2014 - 2015.

Karya berupa buku yang sudah diterbitkan adalah Evaluasi Pembelajaran (2014), Penelitian Tindakan Kelas (2015), Pengantar Kewirausahaan, Rekayasa Akademik Melahirkan Enterpreneurship (2016), Evaluasi Program (2017).

RIWAYAT PENULIS



Amiruddin, Lahir di Muara Tiga 14 Agustus 1982, dengan Ayah yang bernama Amaran Hasibuan (Alm) dan Ibu Mahyuni Br Sarumpaet. Anak kelima dari 6 bersaudara. Menempuh pendidikan SD di Sukaramai (Riau) tamat tahun 1997, melanjutkan ke Pondok Pesantren Darussalam di Saran Kabun (Riau) tamat tahun 2001, kemudian menyelesaikan MAS Aliyah PP. Darusslam di Saran Kabun (Riau) pada tahun 2004. Melanjutkan pendidikan strata 1 (S.1) di IAIN SU jurusan Pendidikan Agama Islam yang diselesaikan pada tahun 2008. Meraih gelar Magister Pendidikan dari Universitas Negeri Medan Program Studi Administrasi Pendidikan pada tahun 2012. Sekarang lagi S3 di Universitas Negeri Medan pada Program Studi Manajemen Pendidikan.

Menikah dengan Putri Khairani Lubis, yang berprofesi sebagai Guru di Mts Swasta Al-Musulimin. Saat ini dikarunia Allah SWT 2 (dua) orang anak, yaitu: Azayla Zafirah Amanda Hasibuan dan Kanzia Amira Putri Hasibuan.

Adapun karier pernah penulis jabat sebagai Ketua LPMKE UNU-SU 2016-2017. sebagai tenaga pengajar di di SMP Negeri 4 Percut Sei Tuan tahun 2008-2012. Dosen Luar Biasa di UIN-SU Medan Tahun 2012-sekarang. Dosen UNU-SU 2016-Sekarang.

Adapun organisasi/karier yang penulis ikut, sebagai anggota PUSDIKRA, LPPPI dan Pengelola Jurnal **PUSDIKRA** 2013-sekarang, Pengelola Jurnal **JURDIKTI** di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, sebagai anggota **HISPAI** tahun 2014-sekarang. Aktivitas lainnya yang digeluti adalah sebagai trainer TOT Pelatihan MBS oleh USAID UIN_SU tahun 2014-2017.

Karya berupa buku yang sudah diterbitkan adalah Organisasi Manajemen (2016) terbitan Rajagrafindo Persada Jakarta.

Motto: “Mulailah Dengan Kemauan Yang Tinggi”

RIWAYAT EDITOR



Muhammad Rifa'i, M.Pd lahir di Medan 04 Mei 1970 dari pasangan yang bernama Jamaluddin Hawi dan Ibu Aminah. Anak ketiga dari sepuluh bersaudara. Menempuh pendidikan SD tamat tahun 1983, melanjutkan ke MTs Al-Ittihadiyah A Masruriyah Medan tamat tahun 1986, Tahun 1989 menyelesaikan PGAN Medan.

Pendidikan S-1 diselesaikan pada tahun 1995 pada Jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Sumatera Utara Medan. Meraih gelar Magister Pendidikan dari Universitas Negeri Medan dengan program studi Administrasi Pendidikan pada tahun 2006 dan saat ini sedang proses penyelesaian S3 di UNIMED program studi Manajemen Pendidikan. Saat ini bertugas sebagai Dosen tetap pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Sumatera Utara mengampuh mata kuliah Manajemen Pendidikan.

Menikah dengan Susmaini, M.Pd pada tahun 1996 dan dikarunia Allah SWT tiga orang anak, Annisa Rizqia Ramadhani lahir 1997, Bambang Gunawan lahir 1998 dan Rifqy Ikhsanul Akmal lahir 1999.

Karya ilmiah berupa buku yang pernah dipublikasi antara lain Teori Manajemen menuju efektifitas pengelolaan organisasi (Citapustaka Media Bandung, 2007); Manajemen Organisasi (Cita Pustaka Media Perintis Bandung, 2013), Organisasi Manajemen (editor) Raja Grafindo Persada 2016, Pengantar Kewirausahaan Rekayasa Akademik Melahirkan Enteprenership (editor) citapustaka Bandung 2016.

Kegiatan organisasi profesi dan sosial yang diikuti Tahun 2014-2018 Pengurus Daerah Ikatan Sarjana Pendidikan (ISMaPI) Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2015-2019 Pengurus Pusat Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI), Tahun 2014-2019 Pengurus Daerah Himpunan Sarjana Pendidikan Agama Islam (HSPA) Tahun 2015-2019 Pengurus Daerah Al-Ittihadiyah Provinsi Sumatera Utara, dan Tahun 2015-2019 Wakil Ketua Palang Merah Indonesia Medan.

GLOSSARIUM

Dapat diamati (*observability*)

Mudah tidaknya diamati suatu hasil inovasi.

Difusi

Proses komunikasi inovasi antara anggota sistem sosial dengan menggunakan saluran tertentu dan dalam waktu tertentu.

Diskover (*discovery*)

Penemuan sesuatu yang sebenarnya benda atau hal yang ditemukan itu sudah ada tetapi belum diketahui orang lain. Mislannya penemuan benua Amerika. Sebenarnya benua Amerika itu sudah lama ada tetapi baru ditemukan oleh Columbus pada abad 15, maka dikatakan Columbus menemukan benua Amerika, artinya Columbus adalah orang yang pertama menemukan benua Amerika.

Diseminasi

Proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan dan dikelola pelaksanaannya.

Disonansi

Sesuatu yang tidak sesuai atau tidak selaras.

Inovasi (*innovation*)

Ide, benda, peristiwa, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) baik berupa hasil invensi maupun diskoveri dengan tujuan mencapai tujuan tertentu atau memecahkan masalah.

Invensi (*Invention*)

Penemuan sesuatu yang benar-benar baru artinya hasil kreasi manusia. Dalam hal ini dapat berupa benda ataupun non benda yang ditemukan benar-benar sebelumnya belum ada, kemudian diadakan dengan hasil kreasi baru.

Keuntungan relatif

Sejauhmana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya.

Kompatibel (*compatibility*)

Tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai (value), pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima.

Kompleksitas (*complexity*)

Tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima.

Proses Keputusan Inovasi.

Proses yang dilakukan atau dialami oleh individu atau unit pengambil keputusan yang lain.

Tahap Difusi Inovasi

Suatu proses pengkomunikasian produk inovasi baru kepada calon pengadopsi atau calon pengguna.

Triabilitas (*triability*)

Dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima.

Strategi bujukan (*persuasive strategies*)

Melakukan perubahan sosial dengan cara membujuk agar sasaran perubahan (klien) mau mengikuti perubahan sosial yang direncanakan.

Strategi fasilitatif (*facilitative strategies*)

Melakukan perubahan sosial dengan cara menyediakan fasilitas dengan maksud agar program perubahan sosial akan berjalan dengan mudah dan lancar untuk mencapai tujuan perubahan sosial.

Strategi jalur organisasi

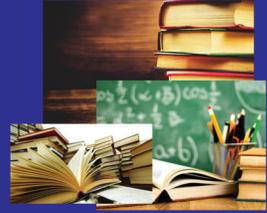
Proses difusi inovasi terhadap anggota organisasi melalui pengaruh pengambil keputusan.

Strategi paksaan (*power strategies*)

Melakukan perubahan sosial dengan cara memaksa klien (sasaran perubahan) untuk mencapai tujuan perubahan

Inovasi Pendidikan

MELEJITKAN POTENSI TEKNOLOGI
DAN INOVASI PENDIDIKAN



Inovasi pendidikan adalah suatu perubahan yang baru dan kualitatif berbeda dari hal yang ada sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan.

Kehadiran buku: INOVASI PENDIDIKAN: Melejitkan Potensi Teknologi dan Inovasi Pendidikan ini sangat penting artinya bagi membantu mahasiswa dan calon guru pendidikan islam, mahasiswa kependidikan islam, atau bagi para peminat kajain ilmu inovasi pendidikan. Tujuan penulisan buku ini untuk dapat mempermudah penyediaan sumber belajar bagi kalangan mahasiswa pada berbagai jurusan Pendidikan Islam, baik pada STAIN, IAIN, UIN maupun STAIS sehingga mempermudah penguasaan materi pokok kajian ilmu inovasi pendidikan.



Penerbit : Cv Widya Puspita
Email : cv.widyapuspita@gmail.com



Strategi pendidikan (*re-educative strategies*)

Melakukan perubahan sosial dengan cara menyampaikan fakta dengan maksud orang akan menggunakan fakta atau informasi itu untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan.

Strategi jalur terbuka

Proses difusi inovasi terhadap individu yang mempunyai kebebasan dalam mengambil keputusan untuk menerima atau menolak inovasi yang produk inovasi baru.